

KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Bupati Kutai Kartanegara
2025





BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara ini disampaikan garis besar pelaksanaan, realisasi dan capaian tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan mengusung Tema ***“Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi Dan Transformasi Pembangunan”***.

Substansi materi laporan ini menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat tentang arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada tahun 2025 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan kepentingan yang merupakan hasil implementasi kolaborasi dengan semangat ***“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”*** oleh Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disadari sepenuhnya akan segala keterbatasan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan tugas berkesinambungan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, koreksi, serta rekomendasi oleh DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun-tahun selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL.....	II
DAFTAR GRAFIK.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1. Dasar Hukum.....	I-1
I.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-1
I.3. Data Umum	I-2
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD	I-1
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	I-10
III.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	I-10
III.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja I-10	
III.1.2. Capaian Kinerja Urusan masing-masing Kegiatan pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai Target dalam Dokumen Anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.....	I-11
III.1.3. Analisis Kesesuaian antar Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	I-1
III.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	I-1
III.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya	I-10
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	I-1
BAB V PENUTUP	I-2

DAFTAR TABEL

Table 1. Visi Misi Bupati “Kukar Idaman” dan “Kukar Idaman Terbaik”.....	I.2
Tabel 2.Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.....	I.2
Tabel 3. Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030.....	I.2
Tabel 4. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN.....	I.4
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Kkutai Kartanegara Tahun 2025.....	I.4
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	I.5
Tabel 7. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.....	I.7
Tabel 8. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	I.8
Tabel 9. Jumlah PPPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	I.13
Table 10. Jumlah PPPK Paruh Waktu Tahun 2025.....	I.14
Tabel 11. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	I.15
Tabel 12. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025.....	I.17
Tabel 13. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025.....	I.18
Tabel 14. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	II.5
Tabel 15. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....	II.8
Tabel 16. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	II.9
Tabel 17. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	III.10
Tabel 18. Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Sasaran Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	III.13
Tabel 19. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	III.13
Tabel 20. Hasil Pengukuran Kinerja.....	III.15
Tabel 21. Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	III.16
Tabel 22. Rekapitulasi Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	III.17
Tabel 23. Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2025.....	III.18
Tabel 24. Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	III.19
Tabel 25. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota.....	III.20
Tabel 26. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD.....	III.20
Tabel 27. Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2025.....	III.20
Tabel 28. Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2025.....	III.24
Tabel 29. Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten/ Kota.....	III.29
Tabel 30. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD.....	III.30
Tabel 31. Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2025.....	III.30

Tabel 32. Capaian Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	III.32
Tabel 33. Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2025.....	III.36
Tabel 34. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.....	III.38
Tabel 35. Perbandingan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan 2024.....	III.39
Tabel 36. Hasil IKM Per Unsur Pelayanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	III.40
Tabel 37. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD.....	III.40
Tabel 38. Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2025.....	III.41
Tabel 39. Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2025.....	III.44
Tabel 40. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD.....	III.62
Tabel 41. Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2025.....	III.62
Tabel 42. Realisasi Program Beasiswa Tahun 2022-2025.....	III.65
Tabel 43. Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2025.....	III.66
Tabel 44. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD.....	III.68
Tabel 45. Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2025.....	III.68
Tabel 46. Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2024.....	III.70
Tabel 47. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD.....	III.72
Tabel 48. Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2025.....	III.73
Tabel 49. Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2025.....	III.74
Tabel 50. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	III.79
Tabel 51. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD.....	III.82
Tabel 52. Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2025.....	III.82
Tabel 53. Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2025.....	III.85
Tabel 54. Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2025.....	III.86
Tabel 55. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD.....	III.91
Tabel 56. Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2025.....	III.91
Tabel 57. Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2025.....	III.93
Tabel 58. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD.....	III.95
Tabel 59. Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2025.....	III.96
Tabel 60. Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2024.....	III.99
Tabel 61. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD.....	III.103
Tabel 62. Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2025.....	III.103
Tabel 63. Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2024.....	III.104
Tabel 64. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD.....	III.107
Tabel 65. Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2025.....	III.107
Tabel 66. Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2025.....	III.108

Tabel 67. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD.....	III.111
Tabel 68. Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2025.....	III.111
Tabel 69. Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2025.....	III.114
Tabel 70. Jumlah Pelanggan Terpasang Perumda Air Minum Kabupaten Kutai Kartanegara per bulan September 2025.....	III.115
Tabel 71. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Non RBPK Tahun 2025.....	III.125
Tabel 72. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD.....	III.125
Tabel 73. Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2025.....	III.125
Tabel 74. Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2025.....	III.127
Tabel 75. Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat.....	III.128
Tabel 76. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD.....	III.133
Tabel 77. Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2025.....	III.133
Tabel 78. Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2025.....	III.135
Tabel 79. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD.....	III.140
Tabel 80. Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2025.....	III.140
Tabel 81. Sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas Baku Mutu.....	III.143
Tabel 82. Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2025.....	III.145
Tabel 83. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD.....	III.146
Tabel 84. Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2025.....	III.147
Tabel 85. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024.....	III.148
Tabel 86. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025.....	III.153
Tabel 87. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	III.155
Tabel 88. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025 Dibanding dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026.....	III.158
Tabel 89. Capaian Tujuan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025 RPJMD 2021-2026.....	III.162
Tabel 90. Pemetaan Indikator RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD 2025.....	III.164
Tabel 91. Gambaran Awal Capaian Indikator RPJMD 2025-2029.....	III.166
Tabel 92. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Tabel 93. Pelaksanaan Urusan Pendukung Pemerintah	
Tabel 94. Pelaksanaan Urusan Pengawasan Pemerintah	
Tabel 95. Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintah	
Tabel 96. Pelaksanaan Urusan Kewilayahan	
Tabel 97. Pelaksanaan Pemerintahan Umum	
Tabel 98. Kebijakan Tahun 2025	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Persentase Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025	I.7
Grafik 2. Predikat SAKIP	I.19
Grafik 3. IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025	I.26
Grafik 4. Detil Hasil SPI Per Komponen Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2025	I.28
Grafik 5. Skor Per Dimensi Komponen Internal SPI Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2025	I.28
Grafik 6. Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023	I.32
Grafik 7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2025	I.45
Grafik 8. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2025	I.46
Grafik 9. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2025	I.47
Grafik. 10. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kab Kutai Kartanegara, 2010-2025	I.50
Grafik. 11. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2025	I.51
Grafik 12. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2025	I.52
Grafik. 13. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2025	I.53
Grafik. 14. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki) di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025	I.54
Grafik. 15. Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	I.60
Grafik. 16. IPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2025	I.61
Grafik 17. Indeks Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara 2010-2025	I.67
Grafik 18. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kab. Kutai Kartanegara 2010-2025	I.68
Grafik 19. Indeks Pembangunan Gender Kab. Kutai Kartanegara 2010-2024	I.74
Grafik 20. Indeks Gini Kab. Kutai Kartanegara	I.76
Grafik 21. Indeks Gini Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	I.76
Grafik 22. Indeks Desa Membangun Kab. Kutai Kartanegara tahun 2021-2025	I.80
Grafik 23. Perkembangan TPT Kab. Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025	I.88
Grafik 24. Perkembangan TPT Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur	I.88
Grafik 25. PDRB Per Kapita Kab. Kutai Kartanegara 2017-2025	I.90
Garfik 26. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2025	I.95
Grafik 27. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kab. Kutai Kartanegara 2018-2024	I.100
Grafik 28. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di	I.101

Kab. Kutai Kartanegara 2018-2024	
Grafik 29. Jumlah Perjalanan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kab. Kutai Kartanegara 2018-2024	I.102
Grafik 30. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kab. Kutai Kartanegara 2018-2024	I.106
Grafik 31. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kab. Kutai Kartanegara	I.109
Grafik 32. Rehabilitasi RTLH Tahun 2022-2024	I.124
Grafik 33. Perbandingan Kondisi Jalan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025	I.132
Grafik 34. Persentase Kondisi Jalan Kab. Kutai Kartanegara	I.132
Grafik 35. Panjang dan Persentase Kemantapan Jalan Kab. Kutai Kartanegara tahun 2022-2025	I.132
Grafik 36. Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara, Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022-2025	1.146
Grafik 37. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2025	I.146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Kutai Kartanegara	I.2
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk Wilayah IKN	I.3
Gambar 3. Perangkat Daerah, Jumlah Layanan dan Total Responden SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	I.25
Gambar 4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024	I.25
Gambar 5. Tabulasi Hasil SPAK &SPKP Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025	I.25
Gambar 6. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025	I.37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa setingkat kabupaten berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 03 Tahun 1953 dan penetapan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan membuat Daerah Istimewa Kutai di hapus dan menjadi Kabupaten Kutai.

Dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi serta penyelenggaraan pemerintah yang lebih optimal maka, dilakukan pemekaran wilayah di Kabupaten Kutai berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Pasca pemekaran Kabupaten Kutai, untuk membedakan penyebutan Kabupaten-kabupaten hasil pemekaran tersebut, Kabupaten Kutai berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Pada pelaporan tahun ini, Kabupaten Kutai Kartanegara memasuki periode Pemerintahan baru, transisi kepemimpinan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam dua periodisasi visi dan misi yang saling berkesinambungan.

Fokus utama pembangunan saat ini adalah transisi dari fase **“Kukar Idaman”** (2021-2026) menuju penguatan fondasi berkelanjutan serta peningkatan pada konsep **“Kukar Idaman Terbaik”** (2025-2029).

Visi “**Kukar Idaman**” adalah untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan berbahagia melalui optimalisasi potensi lokal. Memasuki fase “**Kukar Idaman Terbaik**”, visi tersebut ditingkatkan menjadi lebih spesifik dan strategis yakni menjadikan Kutai Kartanegara sebagai pusat pangan, pariwisata dan industri hijau yang merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyambut keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta upaya melakukan transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif (tambang) ke sektor terbarukan.

Misi “**Kukar Idaman**” yang dijalankan merupakan bentuk dedikasi untuk memperkuat birokrasi yang bersih, meningkatkan kualitas SDM unggul, dan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas. Pada “**Kukar Idaman Terbaik**” misi difokuskan pada hilirisasi pertanian dan kemandirian ekonomi desa guna memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat terbawah.

Table 1. Visi Misi Bupati “Kukar Idaman” dan “Kukar Idaman Terbaik”

Visi & Misi	Kukar Idaman (2021-2026)	Kukar Idaman Terbaik (2025-2029)
Visi Strategis	“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”	“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”
Misi 1	Peningkatan SDM berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya.	Terbaik dalam pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar (Kesehatan, Pendidikan & Sosial)
Misi 2	Memperkuat ekonomi rakyat berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Terbaik dalam hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Misi 3	Memantapkan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan melayani.	Terbaik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif (<i>Digital Governance</i>).
Misi 4	Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah..	Terbaik dalam pemerataan infrastruktur konektivitas wilayah yang ramah lingkungan.
Misi 5	Pengelolaan SDA berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	Terbaik dalam kemandirian ekonomi desa dan penguatan ketahanan pangan lokal.

Hingga pertengahan tahun berjalan, pelaksanaan pemerintahan tetap berpedoman pada rencana strategis sebelumnya. Namun, seiring dengan

ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2025 – 2029, maka pada paruh kedua tahun anggaran, arah kebijakan mulai diselaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 yang hendak dicapai adalah:

KUKAR IDAMAN TERBAIK

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Dalam visi ini terkandung tiga rumusan pokok yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara yang masyarakatnya maju, sejahtera dan berkelanjutan. Penjabaran makna yang terkandung dalam visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai berikut:

1. **Maju**, dengan mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan investasi serta memperkuat pemberdayaan masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat secara merata, sehingga akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong terciptanya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.
2. **Sejahtera**, diwujudkan dengan pengembangan SDM melalui penguatan pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan social serta penyediaan hunian yang layak, sehingga tercipta kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sehat, berdaya saing, dan memiliki karakter budaya yang kuat.
3. **Berkelanjutan**, pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup sebagai dasar bagi pembangunan jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen menerapkan praktik ramah lingkungan melalui

pengembangan industri hijau, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Program rehabilitasi lahan kritis, pelestarian hutan, dan mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas penting dalam menjaga ekosistem.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029, misi pembangunan sebagai berikut:

MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial.

Misi ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan tidak hanya pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga pada pemerataan akses di seluruh wilayah.

MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sector pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif.

Misi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan.

MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.

Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah.

MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

Pendidikan karakter merupakan modal penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan Pendidikan karakter masyarakat yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi kelestarian lingkungan untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat dengan lingkungan.

MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Misi ini menggambarkan komitmen Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun wilayah secara menyeluruh dan merata dengan mengedepankan prinsip keadilan spasial dan pemerataan akses terhadap sumber daya pembangunan.

Tabel 2

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2024	TARGET PEMBANGUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan Pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan	Tujuan 1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,62	5,70	6,05	6,37	6,74	7,13	7,71
			PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	259,19	271,53-271,71	287,89-288,27	308,51-309,12	333,93-334,81	364,91-334,81	402,83-404,53
		Sasaran 1.1 Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	7,88	8,14	9,15	10,13	11,03	12,14	13,45
		Sasaran 1.2 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	-29,18	0,00	0,80	1,00	1,10	1,15	1,20
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,24	78,66	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00
	Tujuan 2. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,51	73,34	75,17	77,01	78,84	80,67	82,50
			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52	3,58	3,64	3,70	3,76	3,82	3,88
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	4,39	4,42	4,45	4,48	4,51	4,54
			Nilai SAKIP	Nilai	65,93	68,28	70,62	72,97	75,32	77,66	80,01
		Sasaran 2.2 Meningktnya stabilitas kondusivitas daerah	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	106	100	95	90	85	80	75
	Tujuan 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	7,28	6,68-6,95	6,14-6,56	5,62-6,19	5,30-5,72	5,00-5,47	4,20-5,24

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2024	TARGET PEMBANGUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
berbasis kearifan lokal MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,57	76,86	77,37	77,85	78,34	78,90	79,41
		Sasaran 3.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya Ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,11	3,85-4,00	3,67-3,83	3,50-3,66	3,33-3,49	3,16-3,33	3,00-3,18
			Rasio Gini	Indeks	0,307	0,285-0,307	0,281-0,299	0,277-0,295	0,272-0,290	0,268-0,287	0,265-0,282
	Tujuan 4. Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan Hidup Daerah		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	30,82	17,59	34,91	41,52	47,7	47,03	53,45
		Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,59	78,82	79,00	79,17	79,34	79,51	79,68
		Sasaran 4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	118,80	115,80	112,80	109,80	106,80	103,80	100,80

Sumber : Perda No. 10 Tahun 2025 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arah tujuan pembangunan dan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun ke depan.

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta indikator sasaran Pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penetapan target kinerja kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

Indikator	Kondisi Awal	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,62	5,70	6,05	6,37	6,74	7,13	7,71
PDRB Per Kapita	259,19	271,53 – 271,71	287,89 – 288,27	308,51 – 309,12	333,93 – 334,81	364,91 – 366,11	402,83 – 404,53
Tingkat Kemiskinan	7,28	6,68 – 6,95	6,15 – 6,59	5,80 – 6,24	5,46 – 5,90	5,13 – 5,97	4,20 – 5,24
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,11	3,85 – 4,00	3,67 – 3,83	3,50 – 3,66	3,33 – 3,49	3,16 – 3,33	3,00 – 3,18
Rasio Gini	0,307	0,285 – 0,307	0,281 – 0,299	0,277 – 0,295	0,272 – 0,290	0,268 – 0,287	0,265 – 0,282
Indeks Pembangunan Manusia	76,57	76,86	77,37	77,85	78,34	78,9	79,41

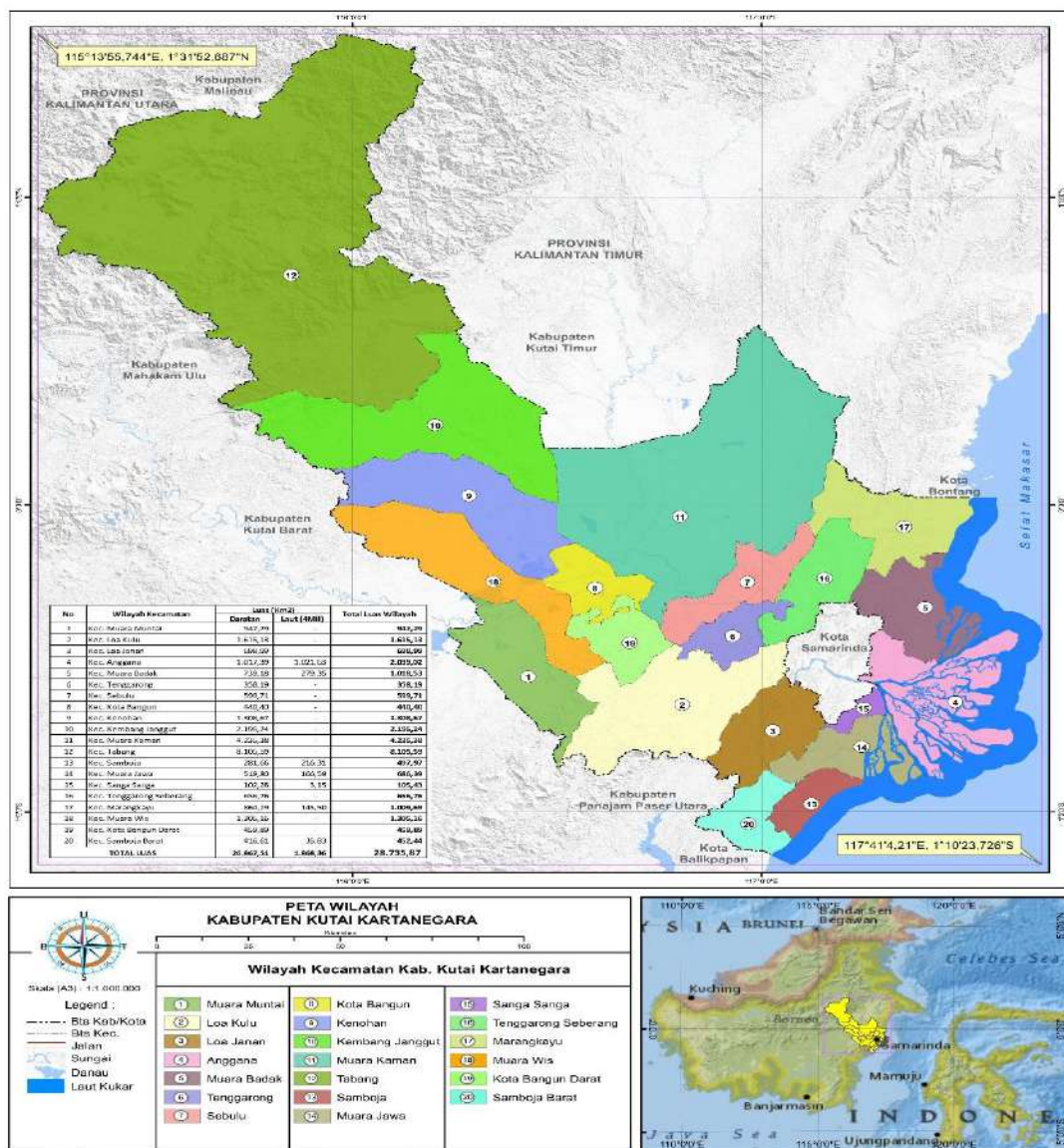
Sumber: RPJMD Kab. Kutai Kartanegara 2025-2029

1.3. Data Umum

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115° 13'55" Bujur Timur sampai dengan 117° 41'4" Bujur Timur dan 1°31'52" Lintang Utara sampai dengan 1° 10'23" Lintang Selatan. Berdasarkan validasi perhitungan dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 September 2021, luas wilayah daratan Kabupaten Kutai Kartanegara ± 26.867,51 km² dan luas wilayah laut ± 1.868,356 km² dengan total luas wilayah ± 28.735,87 km²

Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara

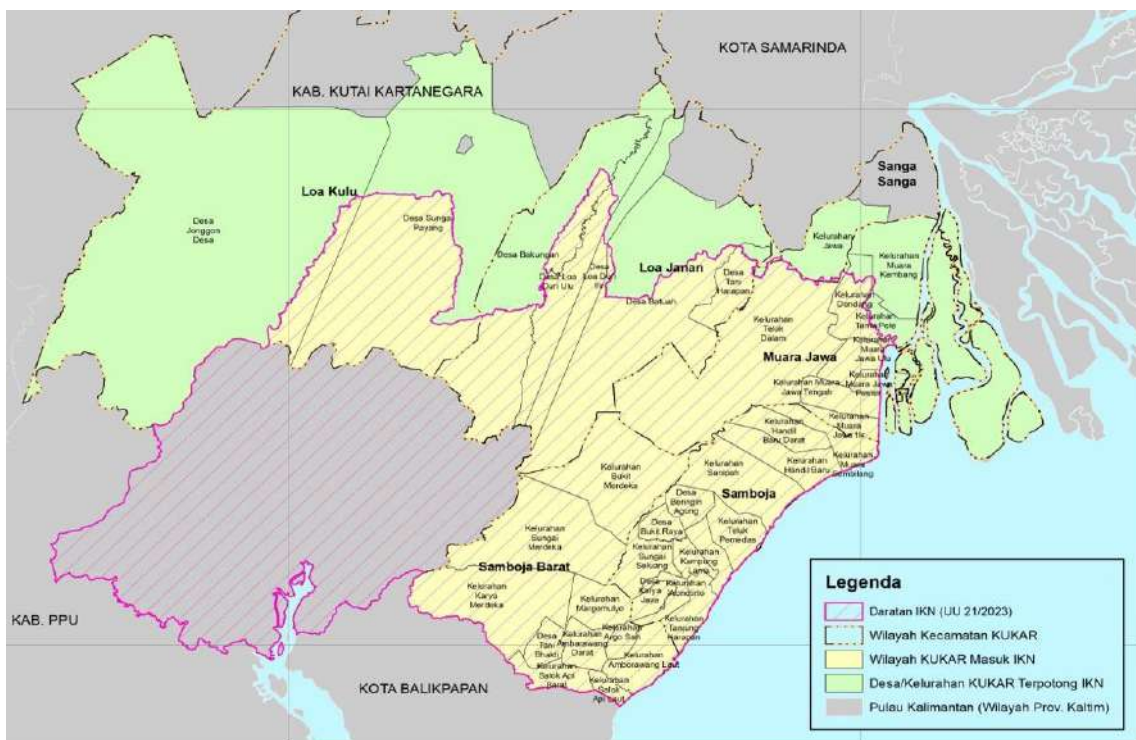


Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kutai Kartanegara 2025



imantan Timur sesuai
3 Tahun 2022 tentang
ang-Undang Republik
n atas Undang-Undang
Kota Negara Nusantara
wilayah lautan ± 69.769

Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk Wilayah IKN



Terdapat 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, secara rinci luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara sebagai berikut:

Tabel 4. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN

No	Kecamatan	Kawasan	Luas ($\pm$ km ²)	
			Wilayah diluar UU	Wilayah Masuk UU IKN
1	Tabang	Daratan	8.107	-
2	Kembang Janggut	Daratan	2.195	-
3	Kenohan	Daratan	1.309	-
4	Muara Muntai	Daratan	947	-
5	Muara Wis	Daratan	1.305,16	-
6	Kota Bangun	Daratan	440	-
7	Kota Bangun Darat	Daratan	460	-
8	Muara Kaman	Daratan	4.235	-
9	Sebulu	Daratan	600	-
10	Tenggarong Seberang	Daratan	657	-
11	Tenggarong	Daratan	358	-
12	Marang Kayu	Daratan	864	-
13	Muara Badak	Daratan	739	-
14	Anggana	Daratan	1.017,39	-
15	Loa Kulu	Daratan	1.365	250
16	Loa Janan	Daratan	321	378
17	Sanga-Sanga	Daratan	101,28	1
18	Muara Jawa	Daratan	222,80	297
19	Samboja	Daratan	-	281,66
20	Samboja Darat	Daratan	-	416,61
			25.290	1.625

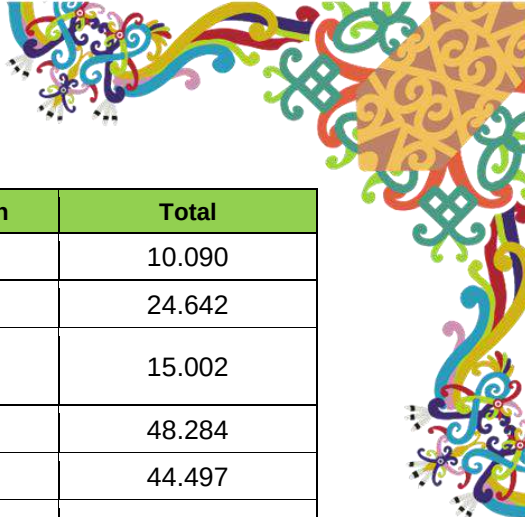
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kutai Kartanegara 2025

B. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Semester II Tahun 2025 sebesar 817.340 jiwa di 20 (dua puluh) wilayah kecamatan. Komposisi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Kkutai Kartanegara Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Tabang	7.676	6.565	14.241
2	Kembang Janggut	15.366	13.723	29.089
3	Kenohan	6.782	5.966	12.748
4	Muara Muntai	11.303	10.389	21.692



No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
5	Muara Wis	5.386	4.704	10.090
6	Kota Bangun	12.606	12.036	24.642
7	Kota Bangun Darat	7.791	7.211	15.002
8	Muara Kaman	25.652	22.632	48.284
9	Sebulu	23.442	21.055	44.497
10	Tenggarong Seberang	38.806	36.113	74.919
11	Tenggarong	60.389	57.612	118.001
12	Marang Kayu	15.757	14.645	30.402
13	Muara Badak	27.495	25.398	52.893
14	Anggana	21.092	19.295	40.387
15	Loa Kulu	30.261	27.950	58.211
16	Loa Janan	41.473	37.376	78.849
17	Sanga-Sanga	11.096	10.469	21.565
18	Muara Jawa	23.698	21.926	45.624
19	Samboja	22.450	20.755	43.205
20	Samboja Darat	17.407	15.592	32.999
Jumlah Penduduk		425.928	391.412	817.340

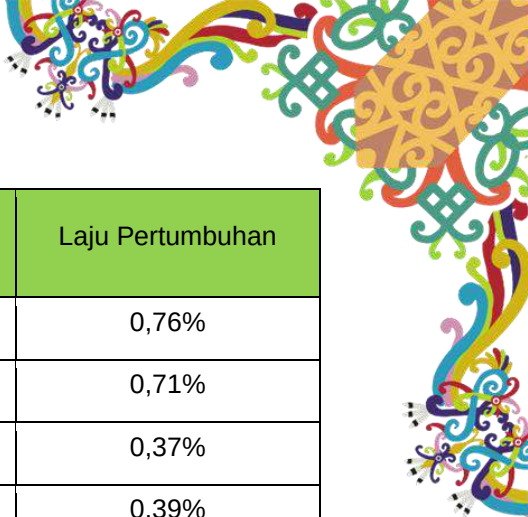
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DKB SMT II 2025

C. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah, Penghitungan pertumbuhan penduduk bertujuan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode waktu berdasarkan variable jumlah penduduk , jumlah kematian dan jumlah kelahiran.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Kecamatan	Jml Penduduk SMT I 2025	Jml Penduduk SMT II 2025	Laju Pertumbuhan
1	Tabang	14.155	14.241	0,61%
2	Kembang Janggut	28.584	29.089	1,74%
3	Kenohan	12.700	12.748	0,38%
4	Muara Muntai	21.643	21.692	0,23%
5	Muara Wis	10.069	10.090	0,21%

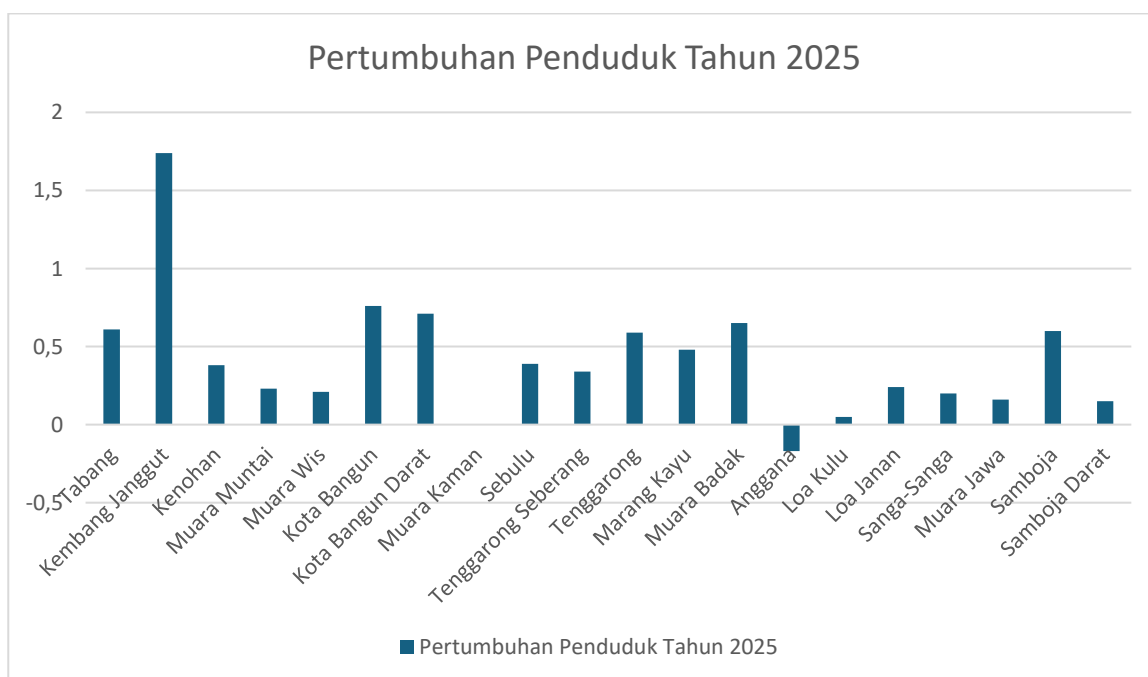


No	Kecamatan	Jml Penduduk SMT I 2025	Jml Penduduk SMT II 2025	Laju Pertumbuhan
6	Kota Bangun	24.455	24.642	0,76%
7	Kota Bangun Darat	14.894	15.002	0,71%
8	Muara Kaman	48.107	48.284	0,37%
9	Sebulu	44.326	44.497	0,39%
10	Tenggarong Seberang	74.667	74.919	0,34%
11	Tenggarong	117.308	118.001	0,59%
12	Marang Kayu	30.256	30.402	0,48%
13	Muara Badak	52.551	52.893	0,65%
14	Anggana	40.404	40.387	-0,17%
15	Loa Kulu	58.181	58.211	0,05%
16	Loa Janan	78.657	78.849	0,24%
17	Sanga-Sanga	21.522	21.565	0,20%
18	Muara Jawa	45.553	45.624	0,16%
19	Samboja	42.946	43.205	0,60%
20	Samboja Darat	32.948	32.999	0,15%
Jumlah Penduduk		813.926	817.340	0,42%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,DKB SMT II 2025

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 adalah 0,42%, terdapat kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk diatas rata-rata Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Kembang Janggut 1,74%, dan pertumbuhan penduduk yang dibawah rata-rata Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Anggana -0,17% adapun persentase pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlihat sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik1. Persentase Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025



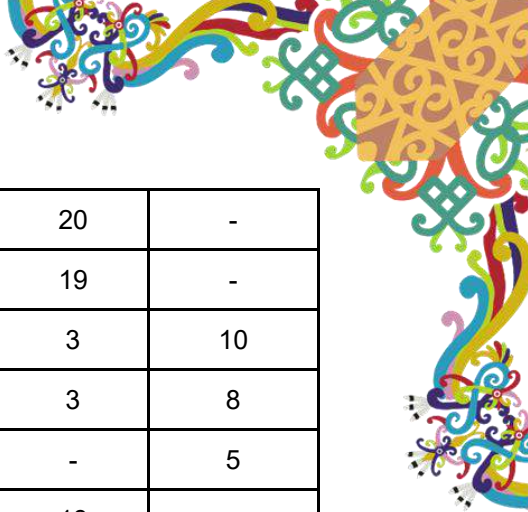
Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DKBSMT II 2025

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 Kecamatan dan 193 Desa dan 44 Kelurahan, berikut ini ditampilkan tabel pembagian luas wilayah per kecamatan dan jumlah desa/kelurahan.

Tabel 7. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (km ²)	Luas Wilayah Laut (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Muara Muntai	947,29	-	13	-
2	Loa Kulu	1.615,13	-	15	-
3	Loa Janan	698,99	-	8	-
4	Anggana	1.017,39	1.021,63	8	-
5	Muara Badak	739,18	279,35	13	-
6	Tenggarong	358,19	-	2	12
7	Sebulu	599,71	-	14	-
8	Kota Bangun	440,40	-	11	-
9	Kenohan	1.308,67	-	9	-
10	Kembang Janggut	2.195,24	-	11	-



11	Muara Kaman	4.235,38	-	20	-
12	Tabang	8.105,59	-	19	-
13	Samboja	281,66	216,31	3	10
14	Muara Jawa	519,80	166,59	3	8
15	Sanga-Sanga	102,28	3,15	-	5
16	Tenggarong Seberang	656,76	-	18	-
17	Marangkayu	864,19	145,50	11	-
18	Muara Wis	1.305,16	-	7	-
19	Kota Bangun Darat	459,89	-	10	-
20	Samboja Barat	416,61	-	1	9
	Jumlah	26.968,51	1.868,36	193	44

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Kutai Kartanegara 2025

E. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berjumlah 56 OPD dan 3 Rumah Sakit Daerah sebagai Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan.

Jumlah Pegawai di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 terdiri dari PNS sebanyak 10.403 orang, PPPK sebanyak 8.281 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 480 orang dengan rincian sebagai berikut:

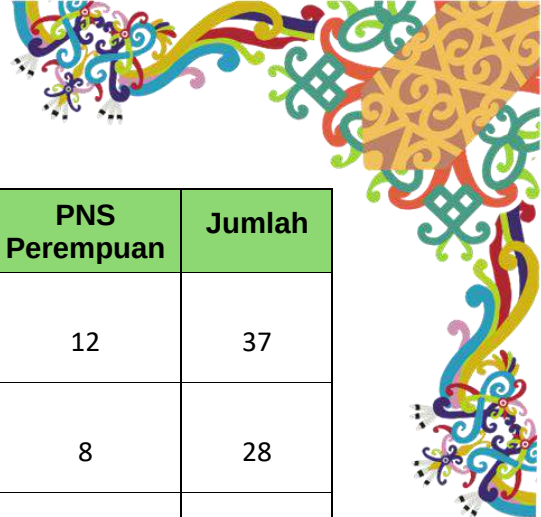
Tabel 8. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	305	189	494
2.	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan	89	67	156
3.	Inspektorat	Penunjang	56	37	93
4.	Badan Kepegawaian	Penunjang	52	22	74

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintahan Umum	31	27	58
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum Sub Urusan Bencana	38	13	51
7.	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang	147	104	251
8.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penunjang	93	57	150
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang	59	49	108
10.	Badan Riset Inovasi Daerah	Penunjang	49	22	71
11.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	40	40	80
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	60	33	93
13.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga	44	28	72
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	29	61
15.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	221	537	758
16.	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	21	27	48
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	40	22	62
18.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	25	32	57

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
	Menengah				
19.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79	30	109
20.	Dinas Pariwisata	Pariwisata	84	43	127
21.	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	210	107	317
22.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Trantibum Sub Urusan Kebakaran	59	11	70
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49	45	94
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	24	35
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29	38	67
26.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	1627	2709	4336
27.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22	22	44
28.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	83	31	114
29.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	57	40	97
30.	Dinas Perkebunan	Perkebunan	62	45	107
31.	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	34	26	60
32.	Dinas Pertanian dan	Pertanian dan	162	96	258

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
	Peternakan	Peternakan			
33.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Pemukiman	71	80	151
34.	Dinas Sosial	Sosial	46	17	63
35.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	31	23	54
36.	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibum Sub Urusan Trantibumlinmas	119	9	128
37.	Kantor Kecamatan Anggana	Urusan Kewilayahan	18	15	33
38.	Kantor Kecamatan Kembang Janggut	Urusan Kewilayahan	22	6	28
39.	Kantor Kecamatan Kenohan	Urusan Kewilayahan	15	1	16
40.	Kantor Kecamatan Kota Bangun	Urusan Kewilayahan	18	4	22
41.	Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat	Urusan Kewilayahan	16	-	16
42.	Kantor Kecamatan Loa Janan	Urusan Kewilayahan	14	12	26
43.	Kantor Kecamatan Loa Kulu	Urusan Kewilayahan	34	17	51
44.	Kantor Kecamatan Marang Kayu	Urusan Kewilayahan	8	10	18
45.	Kantor Kecamatan Muara Badak	Urusan Kewilayahan	13	11	24
46.	Kantor Kecamatan Muara Jawa	Urusan Kewilayahan	31	39	70
47.	Kantor Kecamatan Muara Kaman	Urusan Kewilayahan	49	11	60



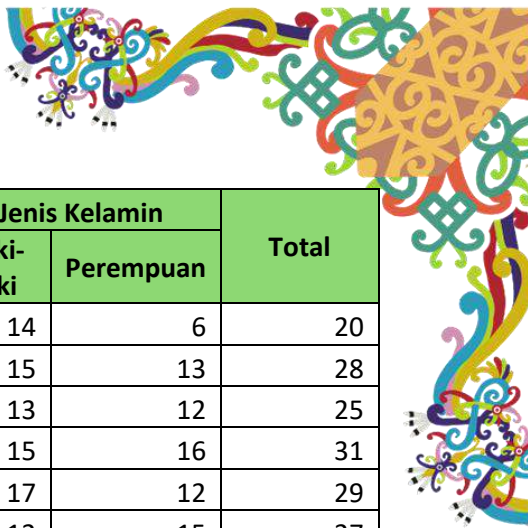
No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
48.	Kantor Kecamatan Muara Muntai	Urusan Kewilayahan	25	12	37
49.	Kantor Kecamatan Muara Wis	Urusan Kewilayahan	20	8	28
50.	Kantor Kecamatan Samboja	Urusan Kewilayahan	42	31	73
51.	Kantor Kecamatan Samboja Barat	Urusan Kewilayahan	43	21	64
52.	Kantor Kecamatan Sanga-Sanga	Urusan Kewilayahan	27	17	44
53.	Kantor Kecamatan Sebulu	Urusan Kewilayahan	24	8	32
54.	Kantor Kecamatan Tabang	Urusan Kewilayahan	29	8	37
55.	Kantor Kecamatan Tenggarong	Urusan Kewilayahan	170	152	322
56.	Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang	Urusan Kewilayahan	35	13	48
57.	RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	116	163	279
58.	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	32	53	85
59.	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	10	12	22

Sumber: BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, 2025

Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga didukung oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah PPPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

NO	INSTANSI	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat Daerah	100	86	186
2	Sekretariat DPRD	46	48	94
3	Inspektorat	15	16	31
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	12	28
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	10	22
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39	15	54
7	Badan Pendapatan Daerah	33	18	51
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	3	15
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16	13	29
10	Badan Riset Inovasi Daerah	13	19	32
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	19	20	39
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	32	21	53
13	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	43	14	57
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	18	35
15	Dinas Kesehatan	227	839	1066
16	Dinas Ketahanan Pangan	6	11	17
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	8	21
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	16	12	28
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18	27	45
20	Dinas Pariwisata	33	26	59
21	Dinas Pekerjaan Umum	45	33	78
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	151	40	191
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	26	51
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	5	20
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23	15	38
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1072	2123	3195
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16	5	21
28	Dinas Perhubungan	119	78	197
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	17	26
30	Dinas Perkebunan	37	29	66
31	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	24	17	41
32	Dinas Pertanian dan Peternakan	106	91	197
33	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22	18	40
34	Dinas Sosial	20	26	46
35	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	16	11	27
36	Satuan Polisi Pamong Praja	172	43	215
37	Kantor Kecamatan Anggana	10	13	23
38	Kantor Kecamatan Kembang Janggut	10	5	15

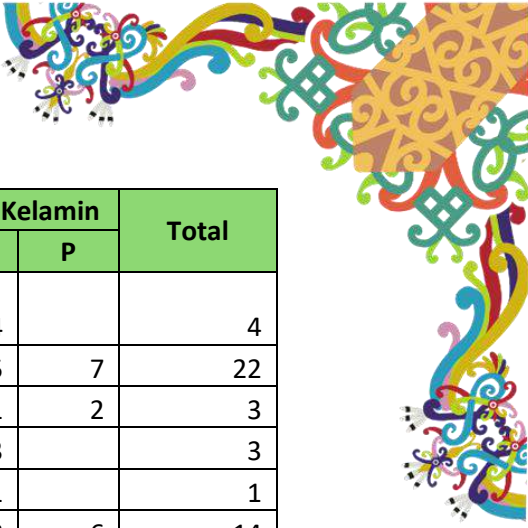


NO	INSTANSI	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
39	Kantor Kecamatan Kenohan	14	6	20
40	Kantor Kecamatan Kota Bangun	15	13	28
41	Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat	13	12	25
42	Kantor Kecamatan Loa Janan	15	16	31
43	Kantor Kecamatan Loa Kulu	17	12	29
44	Kantor Kecamatan Marang Kayu	12	15	27
45	Kantor Kecamatan Muara Badak	6	8	14
46	Kantor Kecamatan Muara Jawa	30	55	85
47	Kantor Kecamatan Muara Kaman	20	9	29
48	Kantor Kecamatan Muara Muntai	13	6	19
49	Kantor Kecamatan Muara Wis	14	8	22
50	Kantor Kecamatan Samboja	65	74	139
51	Kantor Kecamatan Samboja Barat	28	19	47
52	Kantor Kecamatan Sanga-Sanga	20	28	48
53	Kantor Kecamatan Sebulu	7	6	13
54	Kantor Kecamatan Tabang	4	10	14
55	Kantor Kecamatan Tenggarong	64	54	118
56	Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang	2	9	11
57	RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong	209	339	548
58	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	80	140	220
59	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	148	197	345
Jumlah		3414	4867	8281

Sumber: BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, 2025

Table 10. Jumlah PPPK Paruh Waktu Tahun 2025

NP	INSTANSI	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Sekretariat Daerah	2	2	4
2	Sekretariat DPRD	1		1
3	Badan Pendapatan Daerah	2		2
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1	1
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3		3
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	1	4
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2		2
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1	1
9	Dinas Kesehatan	25	76	101
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	3		3
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		1	1
12	Dinas Pariwisata	1	1	2
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6	2	8
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	66	68	134



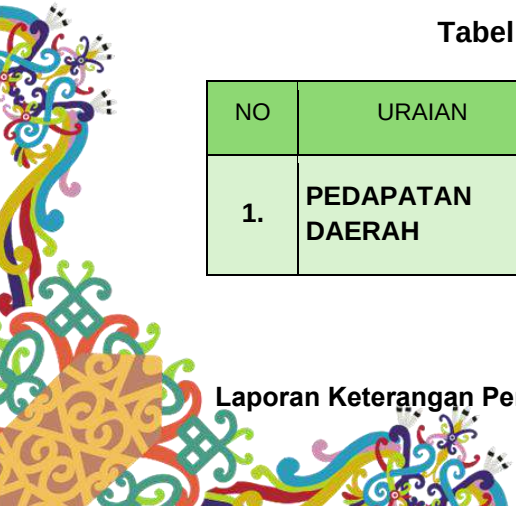
NP	INSTANSI	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4		4
16	Dinas Perhubungan	15	7	22
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	2	3
18	Dinas Perkebunan	3		3
19	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1		1
20	Dinas Pertanian dan Peternakan	8	6	14
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	2
22	Dinas Sosial	3		3
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2	2	4
24	Satuan Polisi Pamong Praja	20	2	22
25	Kecamatan Kenohan	1		1
26	Kecamatan Loa Kulu	4	1	5
27	Kecamatan Muara Jawa		1	1
28	Kecamatan Muara Kaman	1	1	2
29	Kecamatan Samboja		1	1
30	Kecamatan Sebulu		1	1
31	Kecamatan Tenggarong	12	1	13
32	Kecamatan Tabang	1		1
33	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	27	7	34
34	RSUD Aji Muhammad Parikesit	18	40	58
35	RSUD Dayaku Raja	5	13	18
Jumlah		221	259	480

Sumber: BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, 2025

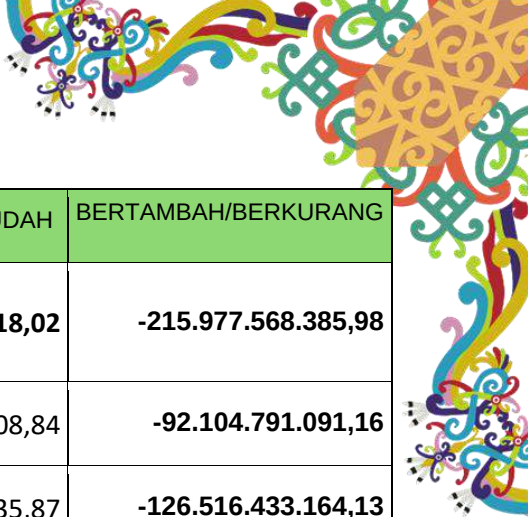
E. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebesar Rp. 9.561.294.132.110,02 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 11.185.094.966.627,50 secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 disajikan pada table berikut:

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025



NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG
1.	PEDAPATAN DAERAH	11.185.094.966.627,50	9.561.294.132.110,02	-1.623.800.834.517,43



NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG
	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	953.088.447.204,00	737.110.878.818,02	-215.977.568.385,98
	Pajak Daerah	364.451.980.000,00	272.347.188.908,84	-92.104.791.091,16
	Retribusi Daerah	487.820.481.700,00	361.304.048.535,87	-126.516.433.164,13
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	44.145.888.234,00	51.210.843.864,81	7.064.955.630,81
	Lain-lain PAD yang Sah	56.670.097.270,00	52.248.797.508,50	-4.421.299.761,50
2.	Pendapatan Transfer	10.003.888.862.351,20	8.803.420.966.382,00	-1.200.467.895.969,20
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.304.729.982.882,20	8.177.519.812.130,00	-1.127.210.170.752,20
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	699.158.879.469,00	625.901.154.252,00	-73.257.725.217,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	228.117.657.072,33	20.762.286.910,00	-207.355.370.162,33
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	228.117.657.072,33	20.762.286.910,00	-207.355.370.162,33

Sumber: SIPD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

F. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebesar Rp. 9.391.632.140.720,31 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.11.351.031.387.452,00 Secara rinci target dan realisasi belanja daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN SESUDAHNYA	BERTAMBAH/ BERKURANG
	BELANJA DAERAH	11.351.031.387.452,00	9.391.632.140.720,31	-1.959.399.246.731,69
1	BELANJA OPERASI	6.662.060.800.660,68	5.548.087.406.363,76	-1.113.973.394.296,92
	Belanja Pegawai	2.517.314.397.869,16	2.211.134.276.861,80	-306.180.121.007,36
	Belanja Barang dan Jasa	3.941.322.792.266,52	3.172.800.301.899,96	768.522.490.366,56
	Belanja Subsidi	110.704.000,00	97.812.000,00	-12.892.000,00
	Belanja Hibah	200.121.806.525,00	160.975.315.602,00	-39.146.490.923,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.191.100.000,00	3.079.700.000,00	-111.400.000,00
2	BELANJA MODAL	3.490.815.747.988,32	2.737.643.501.778,55	-753.172.246.209,77
	Belanja Modal Tanah	75.029.397.381,54	43.990.583.745,55	-31.038.813.635,99
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	604.277.998.940,56	522.663.266.328,00	-81.614.732.612,56
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.189.696.598.446,44	940.303.876.464,25	-249.392.721.982,19
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.596.705.248.215,78	1.229.832.571.263,75	-366.872.676.952,03
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.241.035.250,00	739.858.977,00	-22.501.176.273,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.865.469.754,00	113.345.000,00	-1.752.124.754,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.860.000.000,00	0,00	-8.860.000.000,00
	Belanja tidak Terduga	8.860.000.000,00	0,00	-8.860.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	1.189.294.838.803,00	1.105.901.232.578,00	-83.393.606.225,00
	Belanja Bagi Hasil	36.928.963.600,00	36.928.963.600,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan	1.152.365.875.203,00	1.105.901.232.578,00	-46.464.642.625,00

Sumber: SIPD Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2025

G. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Netto Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebesar Rp. 165.939.420.824,47 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 165.939.420.824,47 Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal. Secara rinci target dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2025 disajikan pada table berikut:

Tabel 13. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG
	SURFLUS / DEFESIT	165.936.420.824,47	165.936.420.824,47	-
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	165.936.420.824,47	165.936.420.824,47	-
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	165.936.420.824,47	165.936.420.824,47	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	165.936.420.824,47	165.936.420.824,47	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-

Sumber: SIPD Kab. Kutai Kartanegara 2025

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu komponen utama untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan informasi dan teknologi pemerintah harus dapat dioptimalkan dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan agar mempermudah akses data informasi yang dibutuhkan oleh setiap unsur *stakeholder*. Pengelolaan keuangan daerah melingkupi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan wujud pelaksanaan amanat sekaligus bukti capaian pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Pasca disahkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 telah banyak hal terjadi, diantaranya sebagai berikut :

- Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Perihal Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA.2025 hingga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 Perihal Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA.2025 berpengaruh pada pendapatan daerah secara umum dan rendahnya serapan belanja karena adanya efisiensi terhadap beberapa belanja sehingga menyebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- Selanjutnya adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan alokasi terhadap iuran jaminan kesehatan kepada pekerja bukan penerima upah (PBPU), pekerjaan yang telah selesai di tahun sebelumnya namun belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran



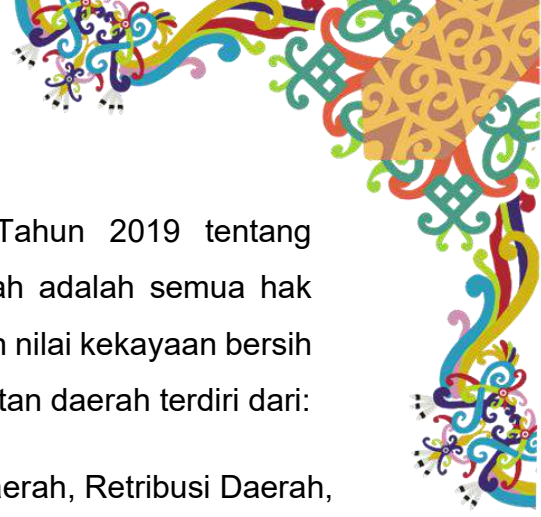
menyebabkan timbulnya kewajiban kepada pihak ketiga, melakukan pemungutan suara ulang (PSU), pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Telah menyebabkan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja,

- Berdasarkan audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara terkoreksilah nilai SiLPA yang merupakan salah satu komponen penerimaan pembiayaan.

Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 161, menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja,
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan,
4. Keadaan darurat, dan/atau,
5. Keadaan luar biasa.

Dalam siklus APBD, Perubahan APBD merupakan salah satu tahapannya. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD yang disertai prognosis menjadi dasar Perubahan APBD. Perubahan APBD bersifat kejadian/peristiwa dan dinamis, dalam artian perubahan APBD dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan. Perubahan APBD ini juga merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan.



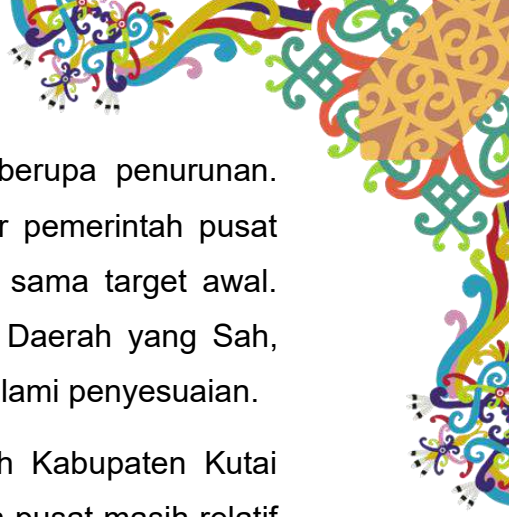
II.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasca terbitnya Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, terbit aturan yang merevisi alokasi transfer ke daerah seperti Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, terbit PMK Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rincian Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar yang diiringi dengan KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH juga berpengaruh pada pendapatan daerah. Hal tersebut juga pasti diikuti dengan penyesuaian pembagian dana bagi hasil (DBH) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PAD diprediksi masih sama dengan target awal, baik untuk pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.



Pendapatan transfer dilakukan penyesuaian target berupa penurunan. Penurunan tersebut berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat sedangkan pendapatan transfer antar daerah masih sama target awal. Sedangkan pendapatan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, juga masih sama dengan target awal atau tidak mengalami penyesuaian.

Sampai saat ini, ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat masih relatif cukup tinggi. Hal ini juga yang menjadi permasalahan utama pendapatan daerah.

Sedangkan kontribusi PAD masih rendah, hal ini dikarenakan adanya kendala Daerah Kabupaten juga memiliki kendala, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan validitas data pajak daerah.
2. Potensi belum terukur dan lemahnya tata kelola dan rendahnya pengawasan untuk retribusi daerah.

Begitu Lain-lain pendapatan daerah yang sah, adanya penyelesaian pajak pusat oleh perusahaan pada tahun 2024 dan rekapitalisasi perusahaan yang menyebabkan keuntungan bersih perusahaan tidak begitu besar.

Memperhatikan kondisi umum, permasalahan utama pendapatan hingga realisasi sampai dengan semester pertama, estimasi perubahan pendapatan daerah diprediksi menjadi sebesar Rp11.185.094.966.627,53 terurai atas :

1. Pendapatan asli daerah masih sebesar Rp953.088.447.204,00 yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah menjadi sebesar Rp364.451.980.000,00
 - b. Retribusi daerah menjadi sebesar Rp487.820.481.700,00
 - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menjadi sebesar Rp44.145.888.234,00
 - d. Lain-lain PAD yang Sah menjadi sebesar Rp56.670.097.270,00
2. Pendapatan Transfer menjadi sebesar Rp10.003.888.862.351,20 terdiri:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp9.304.729.982.882,20
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak bertambah sehingga menjadi sebesar Rp699.158.879.469,00
3. Sedangkan pendapatan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, masih sebesar Rp228.117.657.027,33

Dari uraian perubahan pendapatan sebagaimana dimaksud, secara ringkas tergambar pada tabel berikut :

Tabel 14. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Sebelum Perubahan	Perubahan APBD	Bertambah/Berkurang
Pendapatan Daerah	11.500.000.000.000,00	11.185.094.966.627,00	-314.905.033.372,07
Pendapatan Asli Daerah	953.088.447.204,00	953.088.447.204,00	-
Pajak Daerah	953.088.447.204,00	364.451.980,00	-
Retribusi Daerah	487.820.481.700,00	487.820.481.700,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	44.145.888.234,00	44.145.888.234,00	-
Lain-lain PAD yang sah	56.670.097.270,00	56.670.097.270,00	-
Pendapatan Transfer	10.296.911.552.796,00	10.003.888.862.351,20	-293.022.690.444,80
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.597.752.673.327,00	9.304.729.982.882,00	-293.022.690.44,80
Pendapatan Transfer Antar Daerah	699.158.879.469,00	699.158.879.469,00	-
Lain-lain Pendapatan yang Sah	250.000.000.000,00	228.117.657.072,33	-21.882.342.927,67
Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000.000,00	228.117.657.072,33	-21.882.342.927,67

II.2. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan umum perubahan pendapatan daerah masih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui memaksimalkan pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Secara umum kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah yaitu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta memperhatikan potensi



dan kondisi perekonomian daerah. Sedangkan untuk pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Adanya efisiensi sebagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion, perjalanan dinas, membatasi belanja honorarium, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur hingga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, pemerintah daerah diinstruksikan untuk menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah mempengaruhi perubahan belanja.

Belanja daerah pada rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA.2025 diprediksi menjadi sebesar Rp 11.351.031.387.452,00 atau berkurang dari sebelum perubahan. Belanja secara jenis, terurai atas :

1. Belanja operasi,
2. Belanja modal,
3. Belanja tidak terduga,
4. Belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Belanja operasi menjadi sebesar Rp 6.662.060.800.660,68 atau berkurang dari sebelum perubahan. Pada belanja pegawai, penyesuaian berupa peningkatan dilakukan guna memperhitungkan ketersediaan alokasi yang cukup sampai dengan akhir tahun. Belanja barang dan jasa adanya efisiensi menyebabkan berkurangnya belanja ini, begitu juga belanja bansos serta belanja subsidi. Sedangkan, belanja hibah mengalami kenaikan dan dimaksudkan guna menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, salah satunya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

Belanja modal dialokasikan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya berupa Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja



Modal Jalan, Belanja Modal Jaringan dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja modal menjadi sebesar Rp 3.490.815.747.988,32 atau berkurang dari sebelum perubahan dan dalam perolehannya tetap memperhatikan waktu efektif pelaksanaan. Belanja tidak terduga (BTT) berkurang sehingga menjadi Rp8.860.000.000,00. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran belanja yang diantaranya dipergunakan untuk pemungutan suara ulang (PSU) dan tetap dialokasikan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Alokasi ini menyesuaikan pendapatan yang diterima oleh Kabupaten. Namun Belanja Transfer pada perubahan tidak mengalami perubahan masih sebesar Rp. 1.189.294.838.803 yang terurai dalam bentuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Adapun gambaran umum perubahan belanja daerah sebagai berikut:

Tabel 15. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Sebelum Perubahan	Perubahan APBD	Bertambah/Berkurang
Belanja Daerah	12.000.000.000.000,00	11.351.031.387.452,00	-648.968.612.5547,99
Belanja Operasi	7.011.186.845.486,38	6.662.060.800.660,68	-349.126.044.825,70
Belanja Pegawai	2.470.351.101.822,00	2.517.314.397.869,16	46.963.296.047,16
Belanja Barang dan Jasa	4.431.801.620.084,38	3.941.322.792.266,53	-490.478.827.817,85
Belanja Subsidi	140.704.000,00	110.704.000,00	-30.000.000,00
Belanja Hibah	105.602.869.580,00	200.121.806.525,00	94.518.936.945,00
Belanja Bantuan Sosial	3.290.550.000,00	3.191.100.000,00	-99.450.000,00
Belanja Modal	3.749.518.315.710,62	3.490.815.747.988,32	258.702.567.722,30
Belanja Modal Tanah	79.314.222.061,54	75.029.397.381,54	-4.284.824.680,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	665.128.413.534,14	604.277.998.940,56	-60.850.414.593,58
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.155.012.549.944,72	1.189.696.598.446,44	34.684.048.501,72
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.736.639.784.173,22	1.596.705.248.215,78	-139.934.535.957,44
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.320.170.250,00	23.241.035.250,00	79.135.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	89.192.312.490,00	1.699.869.754,00	-87.492.442.736,00
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	8.860.000.000,00	-41.140.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	8.860.000.000,00	-41.140.000.000,00
Belanja Transfer	1.189.294.838.803,00	1.189.294.838.803,00	-
Belanja Bagi Hasil	36.928.963.600,00	36.928.963.600,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	1.152.365.875.203,00	1.152.365.875.203,00	-

Sumber data SIPD Kab. Kutai Kartanegara

II.3. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara garis besar pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan pada dasarnya merupakan transaksi keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Berdasarkan audit BPK terhadap LKPD, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang merupakan salah satu komponen dari penerimaan pembiayaan menjadi terkoreksi. Begitu juga pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal mengalami penyesuaian sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 16. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Sebelum Perubahan	Perubahan APBD	Bertambah/Berkurang
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	500.000.000.000,00	165.936.420.824,47	-334.063.579.175,53
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.000.000.000	165.936.420.824	-334.063.579.176
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pernyertaan Modal Daerah	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	500.000.000.000,00	165.936.420.824,47	-334.063.579.175,53
Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	-	-

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

III.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

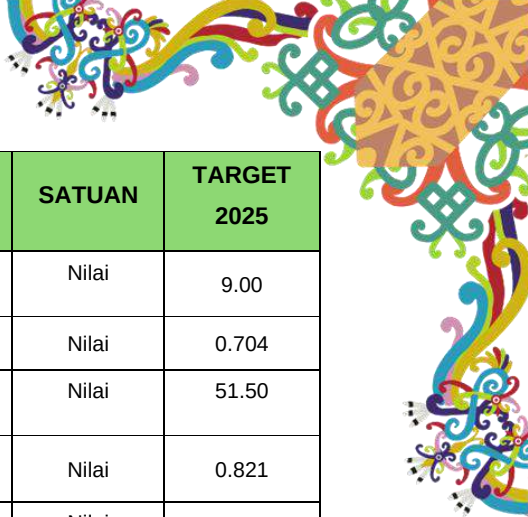
3.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas daya dukung keberhasilan atau ketidak berhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, serta dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penyesuaian serta Efisiensi Anggaran Tahun 2025, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang ditandatangani Bupati Kutai Kartanegara. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disajikan pada table berikut:

Tabel 17. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	77.00
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6.80



NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9.00
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0.704
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51.50
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0.821
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79.15
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0.270
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0.765
8	Menurunnya pengangguran di Masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4.25
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	202.16
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	7.05
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	4.00
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7.48
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1.77
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	93.58
		17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	91.16
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	87.18
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74.15
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	102.14

Sumber : Perjanjian Kinerja Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding



dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta diuraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

a) Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \left(1 + \left(\frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right) \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam format Pengukuran Kinerja (PK), selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala**

ordinal. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Sasaran Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

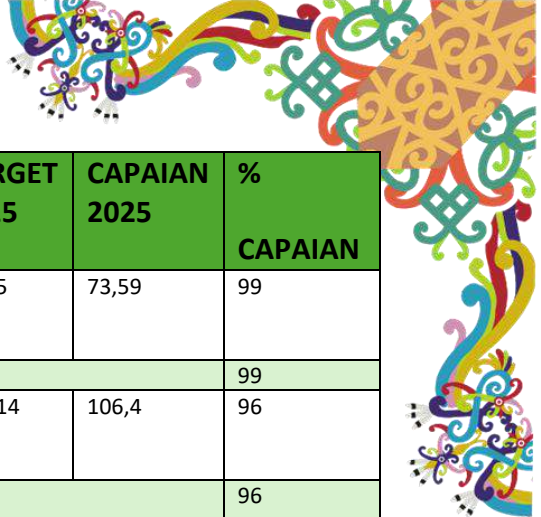
Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	77,00	66,71	86,63
Rata-rata Capaian							86,63
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,80	8,92	131
Rata-rata Capaian							131
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9,00	9.69	108
Rata-rata Capaian							108

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	% CAPAIAN
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,703	0,81	114
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,50	57,91	112
Rata-rata Capaian							113
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,821	0,84	102
Rata-rata Capaian							102
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,15	81,20	103
Rata-rata Capaian							103
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,270	*0,307	88
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,765	0,781	102
Rata-rata Capaian							95
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,60	4,40	105
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	202,16	249,11	123
Rata-rata Capaian							114
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	7,05	10,47	149
Rata-rata Capaian							149
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	4,00	*7,85	196
Rata-rata Capaian							196
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,48	*7,70	103
Rata-rata Capaian							103
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,77	-21,93	-1.238,9
Rata-rata Capaian							-1.238,9
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	93,58	75,89	81
		17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	91,16	98,69	108
Rata-rata Capaian							95
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	87,18	77,31	89
Rata-rata Capaian							89



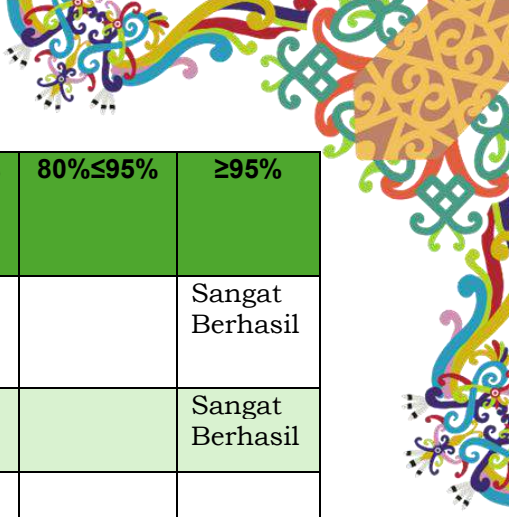
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	% CAPAIAN
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,15	73,59	99
Rata-rata Capaian							99
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	102,14	106,4	96
Rata-rata Capaian							96

*Capaian Tahun 2024, dikarenakan capaian tahun 2025 belum tersedia

Adapun pengkategorian hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 20. Hasil Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	86,63			Berhasil	
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1	131				Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	108				Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	2	113				Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1	102				Sangat Berhasil
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1	103				Sangat Berhasil
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	2	95				Sangat Berhasil
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	2	114				Sangat Berhasil
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	1	149				Sangat Berhasil



NO	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	1	196				Sangat Berhasil
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	103				Sangat Berhasil
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1	-1238,9	Kurang Berhasil			
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	2	95			Berhasil	
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1	89			Berhasil	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	99				Sangat Berhasil
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	1	96				Sangat Berhasil

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja ≥ 95 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 12 sasaran, atau 75%;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 18,75%;
- Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan
- Capaian kinerja 0 s/d< 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

Pencapaian kinerja 16 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 21. Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1	Sangat Berhasil	12	75,00
2	Berhasil	3	18,75
3	Cukup Berhasil	0	0,00
4	Kurang Berhasil	1	6,25
Jumlah		16	100

Selanjutnya hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rekapitulasi Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET RPJMD 2025	CAPAIAN 2025	% CAPAIAN
1	Nilai SAKIP	Nilai	77,00	66,71	86,63
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,80	8,92	131,18
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9,00	9,69	108
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,704	81	114,45
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,50	57,91	112,45
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,821	0,84	102,44
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,15	*81,20	103
8	Indeks Gini	Nilai	0,270	*0,307	88
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,765	0,781	102,44
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,60	4,40	105
11	PDRB Per Kapita	Nilai	202,16	249,11	123
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	7,05	10,47	149
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Nilai	4,00	*7,85	196
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Nilai	7,48	*7,70	103
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Nilai	1,77	-21,93	-1239%
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Nilai	93,58	75,89	81%
17	Persentase Rumah Layak Huni	Nilai	91,16	98,69	108%
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	87,18	77,310	88,68%
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,15	73,59	99,24%
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	102,14	106,40	96%

*Capaian Tahun 2024, dikarenakan capaian tahun 2025 belum tersedia

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Sasaran 1: “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP mencapai 86,64 dan termasuk predikat “Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 23. Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2025

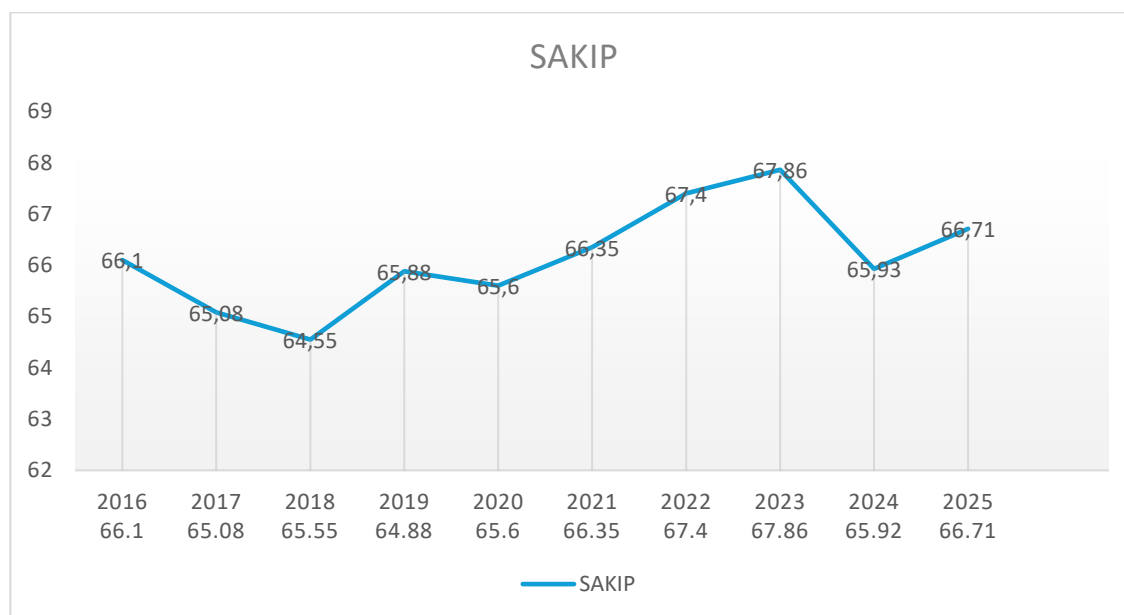
NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	Nilai	77,00	66,71	86,64

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan metode *desk* evaluasi, dengan hasil capaian sebesar 66,71 Predikat B. Capaian ini naik 0,79 dari capaian Tahun 2024, namun capaian ini lebih rendah 10,29 dari target kinerja RPJMD 2025 yaitu sebesar 77,00 Adapun Capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja dalam 10 tahun terakhir ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 2. Predikat SAKIP



Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2016-2025

Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 24. Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,30	21,35
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,46	20,55
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,34	10,69
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,83	14,12
Nilai Hasil Evaluasi		100	65,92	66,71
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2025

Jika melihat hasil penilaian diatas Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara berada pada peringkat ke tiga dari 10 (sepuluh) kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Berikut Tabel Hasil evaluasi SAKIP kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025:

Tabel 25. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota

No	Pemerintah Daerah	Nilai	Predikat
1	Provinsi Kalimantan Timur	77,82	BB
2	Kota Bontang	71,42	BB
3	Kota Balikpapan	70,63	BB
4	Kab. Kutai Kartanegara	66,71	B
5	Kota Samarinda	64,57	B
6	Kab. Kutai Barat	63,60	B
7	Kab. Berau	63,58	B
8	Kab. Paser	61,96	B
9	Kab. Penajam Paser Utara	61,14	B
10	Kab. Kutai Timur	60,45	B
11	Kab. Mahakam Hulu	54	C

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 26. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1	Nilai SAKIP	Nilai	66,35	67,4	67,86	65,92	66,71	80,01

Sumber data: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 27. Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2025

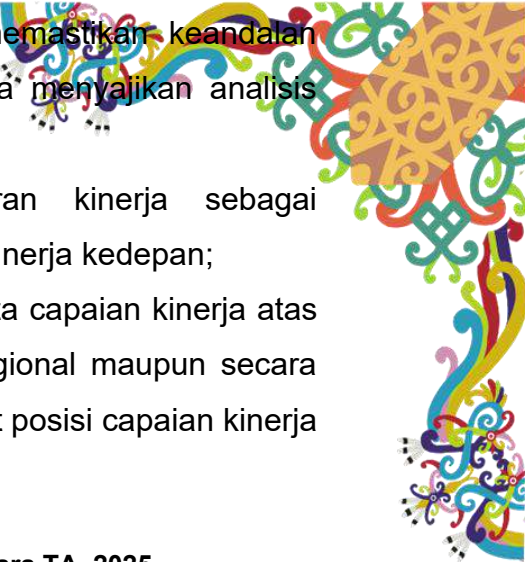
No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.856.439.507.284,00	4.195.280.444.739,75	3.110.206.830.820,02	74,14%
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.075.000.000,00	509.376.070,00	459.237.809,00	90,16%
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	695.000.000,00	442.513.700,00	350.441.600,00	79,19%
4	PROGRAM				84,26%

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	75.000.000,00	34.110.800,00	28.741.102,00	
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8.413.350.385,00	4.021.800.444,00	3.330.801.624,00	82,82%
6	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	74.129.898.000,00	59.684.274.909,00	54.426.573.829,00	91,19%
7	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.380.000.000,00	4.398.376.564,00	2.734.552.316,00	62,17%
8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.425.000.000,00	5.604.120.870,00	4.664.010.475,00	83,22%
9	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.290.000.000,00	5.905.643.556,00	3.501.243.488,00	59,29%
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.820.000.000,00	4.767.316.920,00	3.390.841.334,00	71,13%
11	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.055.000.000,00	5.215.569.972,00	4.609.626.160,00	88,38%
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	596.073.174.800,00	587.054.061.886,45	489.613.879.206,00	83,40%
13	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.570.000.000,00	2.281.221.415,00	1.389.547.670,00	60,91%
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.162.701.502,00	7.098.112.830,00	5.574.976.194,00	78,54%
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	781.000.000,00	357.749.700,00	203.358.250,00	56,84%
Total		4.588.384.631.971,00	4.882.654.694.376,20	3.684.484.661.877,02	75,46%



Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.3.684.484.661.877,02** dari total anggaran sebesar **Rp. 488.654.694.376,20** atau sebesar **75,46%**. Sementara itu, capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan mencapai **86,64%**. Meskipun penggunaan dana lebih rendah dari capaian kinerja, terdapat indikasi ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya, karena target sasaran belum sepenuhnya tercapai (100%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran lebih rendah dari anggaran yang tersedia, efektivitas dalam pencapaian sasaran masih perlu ditingkatkan.

Adapun rekomendasi dari evaluasi SAKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk periode perencanaan selanjutnya sehingga berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasi dan diukur dengan indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound);
 2. Melakukan reviu dan perbaikan dalam menetapkan target kinerja baik di tingkat Pemda maupun PD dengan memanfaatkan data capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai landasan dalam penetapan target kinerja periode berikutnya;
 3. Agar memperhatikan kepatuhan terkait pembaruan dan penyampaian dokumen perencanaan pada portal esr.menpan.go.id sebagai bentuk komitmen instansi dalam implementasi SAKIP yang lebih baik.
 4. Memastikan IKU pada pemerintah daerah dan perangkat daerah yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator, sumber data dan penanggungjawab;
 5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam atas ketercapaian kinerja;
 6. Memanfaatkan informasi capaian pada laporan kinerja sebagai pertimbangan untuk penentuan strategi dan target kinerja kedepan;
 7. Menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai sudah berada di kondisi mana.
- 

8. Melakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh perangkat daerah dan melaporkannya pada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal selesai ditindaklanjuti oleh seluruh PD melalui mekanisme monitoring yang tepat secara berkala.

Beberapa rekomendasi dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, sudah mulai ditindak lanjuti, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan reviu dan perbaikan dalam penetapan target kinerja pada tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah dengan memanfaatkan data capaian kinerja tahun sebelumnya (*Baseline*) sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja periode berikutnya, sehingga target yang ditetapkan lebih realistis dan terukur.
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tengah meningkatkan kepatuhan perangkat daerah dalam melakukan pembaruan serta penyampaian dokumen perencanaan melalui portal esr.menpan.go.id secara tepat waktu sebagai bentuk komitmen dalam mendukung implementasi SAKIP yang lebih baik.
3. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah telah dilengkapi dengan komponen yang memadai, meliputi deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator, sumber data, serta penanggung jawab indikator.

2. Analisis Kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai **131,18%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 28. Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,8	8,92	131,18

Sumber data: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

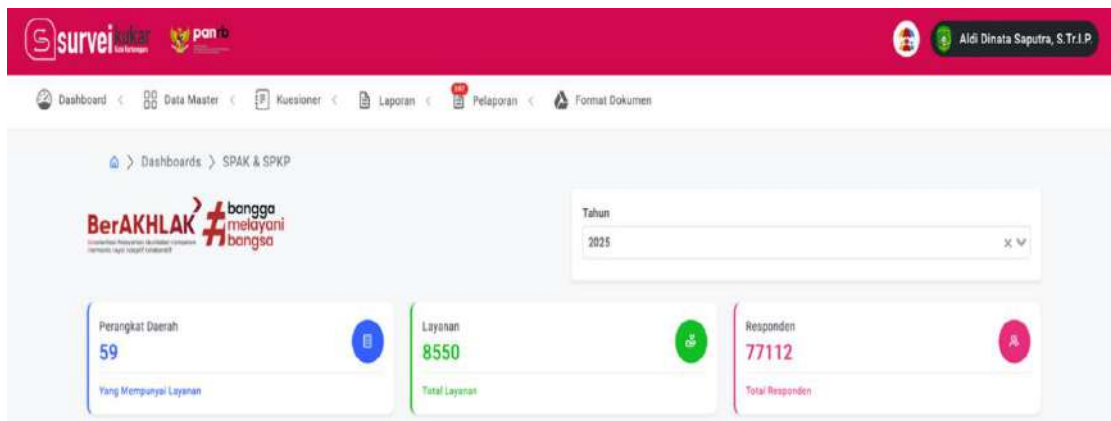
Penilaian terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi berdasarkan IPAK yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun dalam LHE RB Tahun 2023 tidak mencantumkan nilai IPAK lagi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, dimana ruang lingkup surat edaran tersebut salah satunya terkait menyelenggarakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang hasilnya dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, maka Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 melaksanakan SPAK melalui Aplikasi Survei Kukar dengan link akses <https://survei.kukarkab.go.id>, pelaksanaan survey di 59 (lima puluh enam) perangkat daerah dan 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah, terhadap 8550 layanan, dengan jumlah responden 77.112 orang.

Adapun hasil penarikan data IPAK melalui Aplikasi Survei Kukar adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Perangkat Daerah, Jumlah Layanan dan Total Responden SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

Gambar 4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

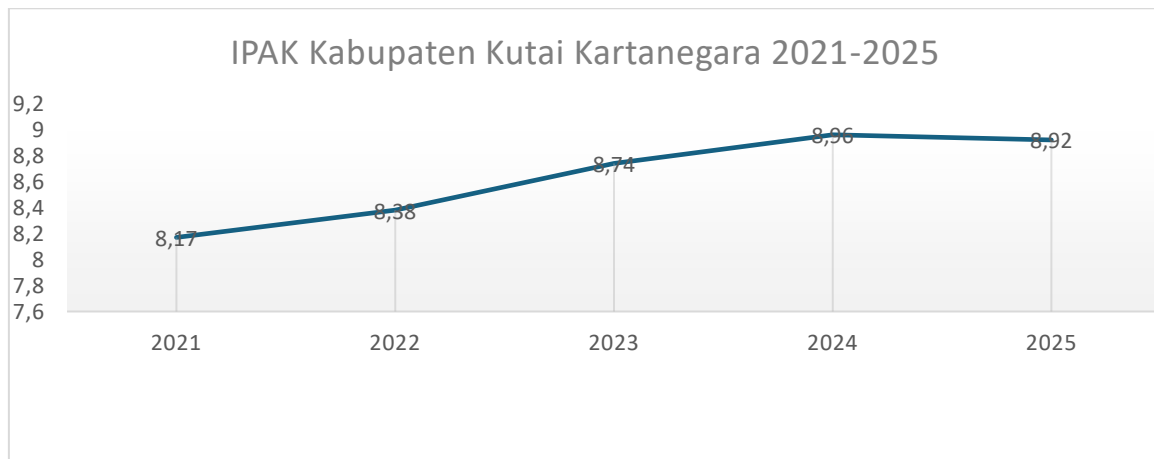
Gambar 5. Tabulasi Hasil SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

Untuk Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yang dilakukan melalui survey mandiri, mengalami penurunan sebesar 0,04 dibandingkan dengan capai IPAK Tahun 2024 yang memperoleh nilai 8,96, setelah sebelumnya meningkat 0,22 di Tahun 2024 dibandingkan dengan IPAK Tahun 2023 yang memperoleh nilai sebesar 8,74. Perkembangan IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 3 IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025



Sumber: LHE RB Tahun 2021-2022 dan Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023-2025

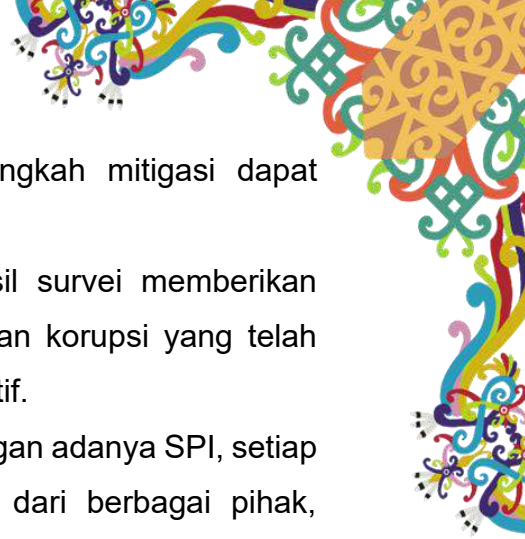
Karena SPAK dilaksanakan secara mandiri, sehingga tidak tersedia data IPAK Kabupaten/ Kota lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. maka dalam laporan ini hanya menyajikan perbandingan IPAK sejak Tahun 2021.

Sejak Tahun 2021 Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) melaksanakan Survei Penilaian Integrita (SPI), hasil survei ini juga menjadi salah satu komponen penilaian dalam LHE Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas dalam suatu lembaga atau instansi, khususnya di sektor publik. SPI menjadi gambaran sejauh mana upaya pencegahan korupsi telah diterapkan serta bagaimana persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan terhadap potensi risiko korupsi dalam suatu institusi.

SPI memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. **Mengidentifikasi Risiko Korupsi.** SPI membantu menemukan titik rawan yang berpotensi menjadi celah terjadinya korupsi dalam suatu instansi.



Dengan memahami area yang berisiko, langkah-langkah mitigasi dapat segera diterapkan.

2. **Mengukur Efektivitas Kebijakan Antikorupsi.** Hasil survei memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan pencegahan korupsi yang telah diterapkan oleh instansi berjalan dengan baik dan efektif.
3. **Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.** Dengan adanya SPI, setiap instansi dapat lebih terbuka terhadap umpan balik dari berbagai pihak, termasuk pegawai, pengguna layanan, serta pemangku kepentingan lainnya.
4. **Mendorong Budaya Integritas.** SPI tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pendorong perubahan budaya kerja yang lebih transparan, jujur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

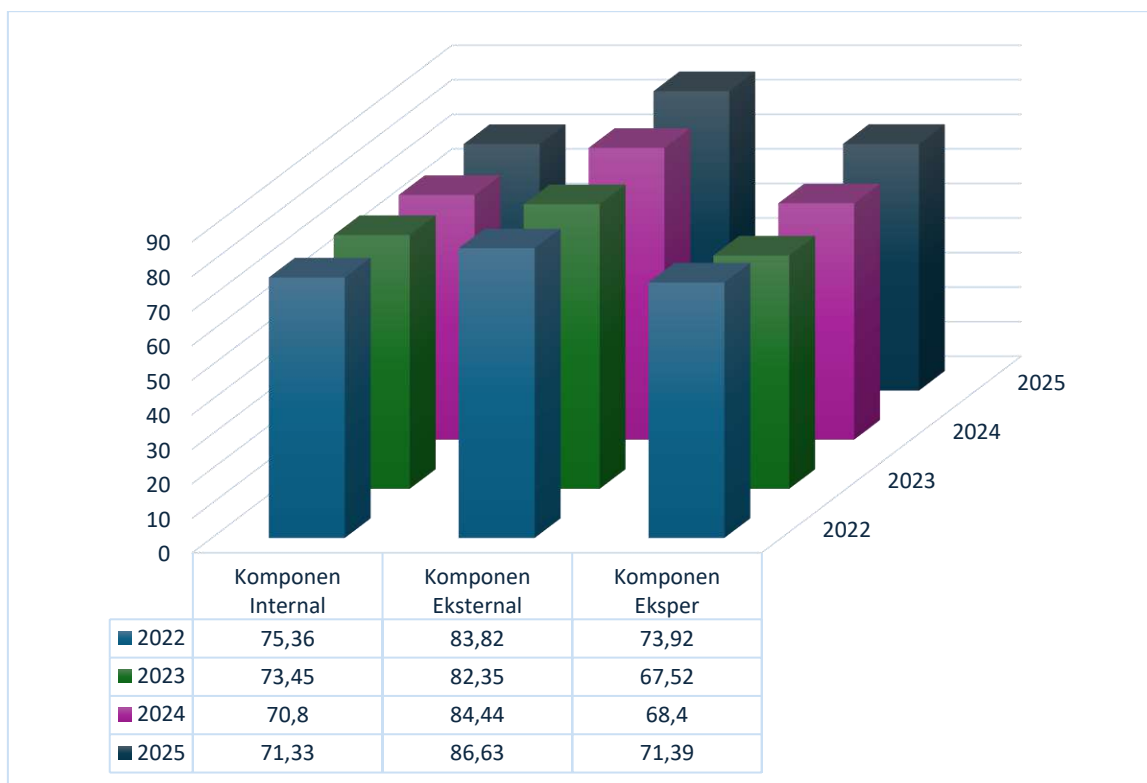
SPI dilakukan dengan metode survei yang melibatkan berbagai kelompok responden untuk mendapatkan data yang objektif dan komprehensif. Responden yang biasanya dilibatkan antara lain:

- **Pegawai internal** di instansi yang bersangkutan.
- **Pengguna layanan atau mitra kerja** yang berinteraksi dengan instansi tersebut.
- **Eksper atau akademisi** yang memiliki wawasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator, seperti transparansi dalam pelayanan publik, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil SPI yang dapat di akses pada laman <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=40829689>, Nilai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 67,14, Skor turun sebanyak 0.55 poin dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini berada dalam kategori Rentan. Berikut Detail Hasil Survei Penilaian Integritas Per Komponen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2025:

Grafik 4. Detil Hasil SPI Per Komponen Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2024



Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Grafik 5. Skor Per Dimensi Komponen Internal SPI Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2025



Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tabel 29. Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Rata-Rata SPI	2021	2022	2023	2024	2025	Kategori	Perbandingan Capaian SPI Tahun 2025 dengan 2024	Keterangan
Bontang	62,56	74,02	74,99	77,69	73,92	Waspada	-3,77	Menurun
Balikpapan	70,12	73,51	73,83	75,08	77,43	Waspada	2,35	Meningkat
Samarinda	62,8	70,03	72,32	71,55	75,90	Waspada	4,35	Meningkat
Paser	67,55	70,17	71,51	74,00	76,01	Waspada	2,01	Meningkat
Kutai Timur	59,94	65	70,99	59,16	66,36	Rentan	7,2	Meningkat
Berau	68,99	71,63	69,68	72,52	69,17	Rentan	-3,35	Menurun
Mahakam Hulu	71,25	66,98	69,14	71,08	70,08	Rentan	-1	Menurun
Kutai Kartanegara	72,06	67,22	67,69	67,14	71,59	Rentan	4,45	Meningkat
Kutai Barat	71,73	73,03	64,65	67,23	69,63	Rentan	2,4	Meningkat
Penajam Paser Utara	66,18	68,85	64,11	61,28	71,80	Rentan	10,52	Meningkat
Provinsi Kalimantan Timur	66,35	73,04	72,71	69,95	69,78	Rentan	-0,17	Menurun
Nasional	72,4	71,94	70,97	71,52	72,32	Rentan	0,8	Meningkat

Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI), pada laman resmi <https://jaga.id/> , ada penurunan hasil SPI Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 4,84 poin di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021, dan ditahun 2023 hasil SPI Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat 0,47 point jika dibandingkan dengan hasil SPI Tahun 2022, Kemudian menurun kembali 0,55 poin di Tahun 2024 dibandingkan SPI Tahun 2023, dan Terjadi Peningkatan di Tahun 2025 sebesar 4,45 point dibandingkan SPI Tahun 2024.

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 30. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,17	8,38	8,74	8,96	8,92	7

Sumber: LHE RB Tahun 2021-2022 dan Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023-2025)

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 31. Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.250.243.462.584,00	6.139.194.759,00	3.996.248.487,00	65,09%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.426.680.000,00	4.945.806.181,00	3.033.035.180,00	61,33%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	21.647.327.956,00	20.833.570.706,00	19.071.882.101,00	91,54%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.145.888.000,00	6.951.793.000,00	3.549.761.386,00	51,06%
5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.150.000.000,00	2.962.337.000,00	1.298.276.998,00	43,83%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.30,949,204,152.00** dari anggaran sebesar **Rp. 41,832,701,646.00** atau **73,98%**. Realisasi keuangan sebesar 73,98% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **131,18%**, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dengan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.



Berdasarkan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, catatan berisi Detil Hasil SPI Per Komponen Internal: 71,33; Eksternal: 86,63; Eksper: 71,39, dari data tersebut skor terendah terletak pada komponen internal, yang dimensinya meliputi Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Perdagangan Pengaruh (Trading in influence), Sosialisasi Antikorupsi, Transparansi, sehingga ada rekomendasi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas, setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2025. Dalam SPI 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat skor SPI sebesar 71.59. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.

Langkah langkah dan Upaya yang Dilakukan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi:

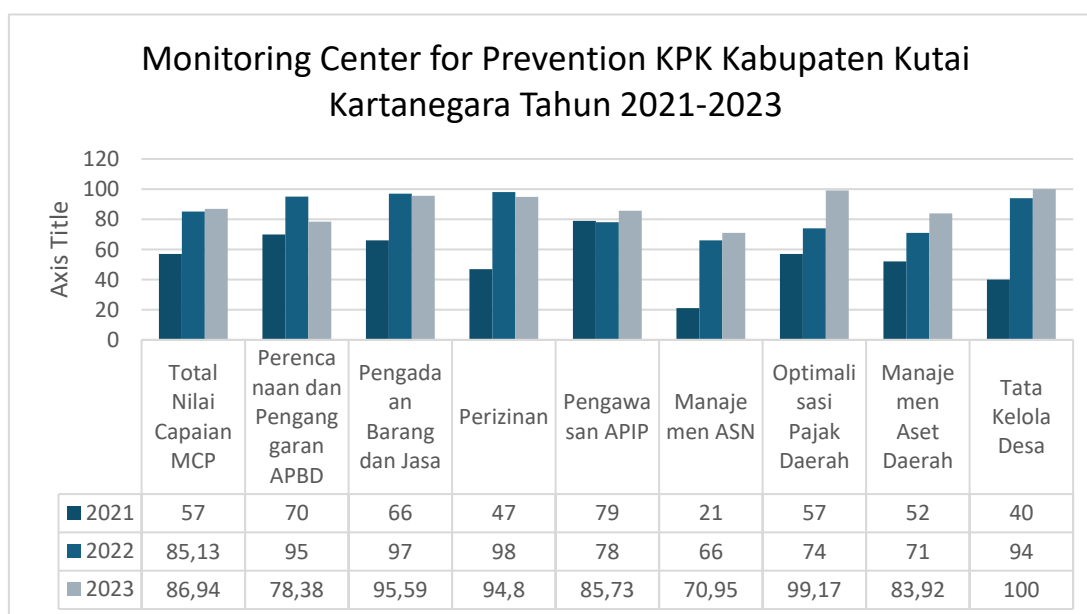
Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya.

Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, melalui 8 area intervensi yaitu (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Perizinan; (4) APIP; (5) Manajemen ASN; (6) Optimalisasi Pajak Daerah; (7) Manajemen Aset Daerah; (8) Tata Kelola Dana Desa.

Grafik 6. Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023



Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023

**Terdapat perubahan komponen penilaian sejak 2024 sehingga Gambaran data perbandingan hanya sampai 2023*

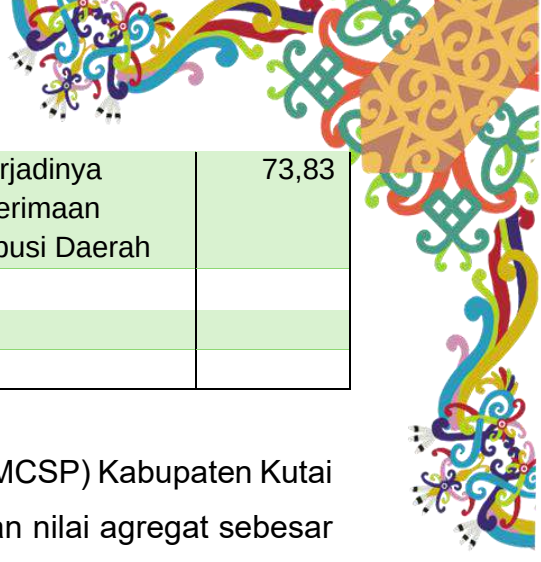
Hasil monitoring progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 8 area intervensi, secara keseluruhan Hasil MCP KPK Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat dari Tahun 2022 sebesar 1,94%, namun dari 8 area intervensi, ada 3 area yang mengalami penurunan nilai, yaitu area Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan

Barang dan Jasa, dan Perijinan. Peningkatan signifikan pada area Tata Kelola Desa dari 94% di tahun 2022 menjadi 100% di Tahun 2023.

Untuk MCP KPK Tahun 2025 ada beberapa perubahan komponen penilaian, dan capaian MCP KPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengalami kenaikan nilai 13,52 %, dari 69,85% di tahun 2024 turun menjadi 83,37% di tahun 2025, berikut disajikan data capaian sesuai komponen penilaian MCP KPK Kutai Kartanegara Tahun 2025:

Tabel 32. Capaian Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

CAPAIAN 83,37			
Perencanaan	72,58	Anggaran	82,91
Perencanaan Pembangunan Daerah	60	Pencegahan Terjadinya Penggelembungan (Mark Up) Anggaran	89
Pokok Pikiran	100	Benturan kepentingan pada Pengesahan APBD	77
Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan	58		
Pengadaan Barang dan Jasa	95,96	Pelayanan Publik	93,68
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	91	Sektor Perizinan	87
Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	99	Sektor Pendidikan	92
Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)	98	Sektor Kesehatan	96
		Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil	100
Pengawasan APIP	80,92	Manajemen ASN	85,29
Penguatan APIP	80,92	Tata Kelola Manajemen ASN	85,29
Pengelolaan BMD	68,36	Optimalisasi Pajak Daerah	73,83



Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah	68,36	Pencegahan Terjadinya Kebocoran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	73,83

Sumber data: JAGA - Platform Pencegahan Korupsi Tahun 2025

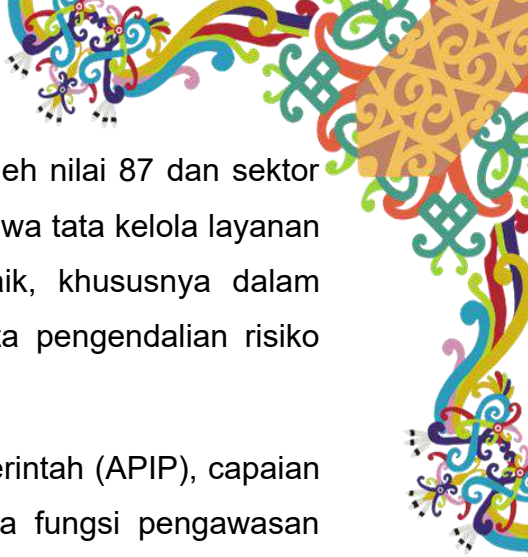
Secara umum, capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan nilai agregat sebesar 83,37. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar area pencegahan korupsi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa sektor yang memerlukan penguatan lebih lanjut.

Pada area perencanaan pembangunan daerah, capaian yang diperoleh adalah 60. Nilai ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas perencanaan penting untuk mencegah potensi penyimpangan sejak tahap awal penyusunan program dan anggaran.

Dalam aspek penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, capaian berada pada angka 58, yang merupakan salah satu nilai terendah dalam tabel. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola penyaluran bantuan masih memerlukan pembenahan, terutama dalam hal transparansi, mekanisme verifikasi penerima, serta pengawasan terhadap penyaluran dana agar tepat sasaran dan bebas dari potensi penyalahgunaan.

Sebaliknya, pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, capaian menunjukkan nilai yang cukup tinggi yaitu 91. Hal ini menandakan bahwa proses pengadaan telah berjalan relatif baik, dengan penerapan sistem dan prosedur yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah.

Lebih lanjut, pengadaan barang dan jasa non-konstruksi melalui e-purchasing pada OPD tertentu (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU) bahkan memperoleh nilai 98, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap sistem pengadaan elektronik. Hal ini merupakan indikator positif bahwa digitalisasi pengadaan telah dimanfaatkan secara optimal untuk meminimalkan potensi penyimpangan.



Pada sektor pelayanan publik, sektor perizinan memperoleh nilai 87 dan sektor kesehatan memperoleh nilai 96. Nilai ini menunjukkan bahwa tata kelola layanan pada kedua sektor tersebut telah berjalan dengan baik, khususnya dalam penerapan standar pelayanan, transparansi proses, serta pengendalian risiko korupsi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam aspek penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), capaian berada pada angka 80,92. Nilai ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, baik dalam hal kapasitas SDM, kualitas audit, maupun tindak lanjut hasil pengawasan.

Sementara itu, tata kelola manajemen ASN memperoleh nilai 85,29, yang mencerminkan bahwa sistem pengelolaan aparatur telah berjalan dengan relatif baik, termasuk dalam aspek transparansi, merit system, serta pengendalian terhadap potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan kepegawaian.

Pada aspek pengelolaan aset daerah, pencegahan penyalahgunaan barang milik daerah memperoleh nilai 68,36. Nilai ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset masih memerlukan perbaikan, terutama terkait penatausahaan aset, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan barang milik daerah.

Terakhir, pada pencegahan kebocoran penerimaan pajak dan retribusi daerah, capaian berada pada angka 73,83. Nilai ini menunjukkan bahwa upaya pengamanan pendapatan daerah sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu penguatan dalam sistem pengawasan, digitalisasi penerimaan, serta integrasi data untuk meminimalkan potensi kebocoran.

3. Analisis Kinerja Sasaran 3: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**” dengan indikator **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik** mencapai **108%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 33. Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9,00	9,69	108

Sumber data: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

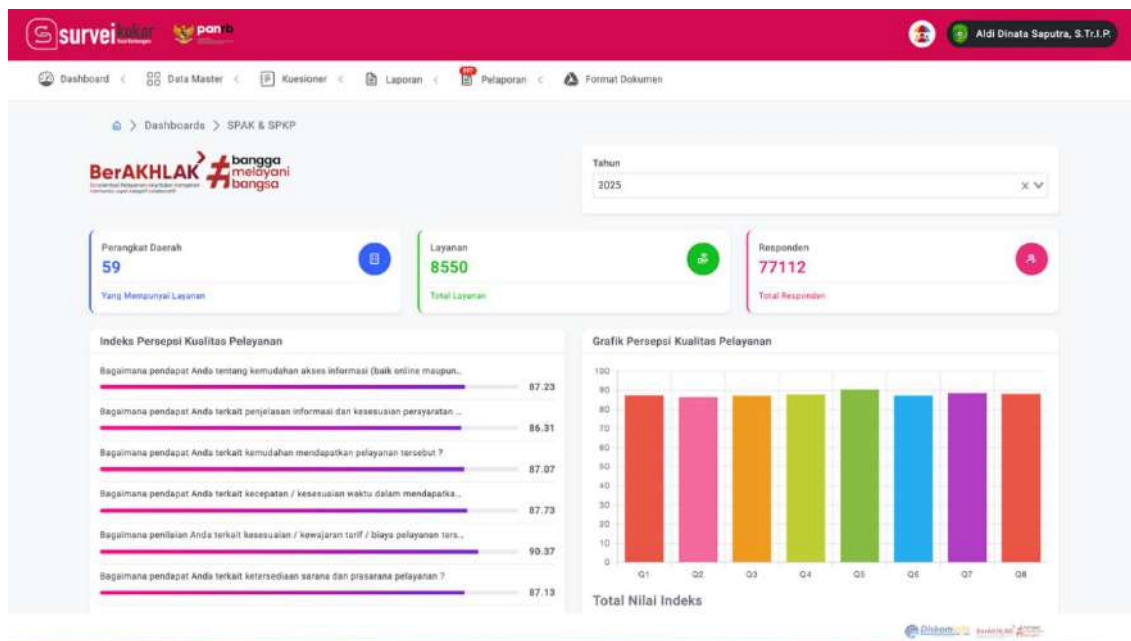
Rumus perhitungan atau Penilaian terhadap Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) berdasarkan IPKP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, dimana ruang lingkup surat edaran tersebut salah satunya terkait menyelenggarakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) yang hasilnya dalam bentuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP).

Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, maka Kabupaten Kutai Kartanegara mulai Tahun 2023 sampai dengan saat ini, melaksanakan SPKP melalui Aplikasi Survei Kukar dengan link akses <https://survei.kukarkab.go.id>, pelaksanaan survey di Tahun 2025 56 (lima puluh enam) perangkat daerah dan 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah, terhadap 8550 layanan, dengan jumlah responden 77.112 orang.

Adapun hasil penarikan data IPKP melalui Aplikasi Survei Kukar adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

Capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2025 sebesar 9,69 atau dikonversi dalam skala 1-10, maka capaian kinerja sebesar 9,69 capaian ini mengalami peningkatan dari Tahun 2024 sebesar 0,95 dimana sebelumnya di Tahun 2024 IPKP sebesar 8,74.

Dalam dokumen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi mulai Tahun 2023 sampai saat ini, juga tersedia Capaian Indeks Pelayanan Publik dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Di Tahun 2025 Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, yang hasilnya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, terdapat sedikit perbedaan penetapan Unit Lokus Evaluasi (ULE) sebelumnya di Tahun 2024 dilakukan terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Anggana, Dinas Sosial dan RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti. Namun di Tahun 2025 yang menjadi ULE adalah Dinas Pendidikan dan Dinas

Sosial. Kendati demikian, Unit Lokus Evaluasi yang secara spesifik dipilih terhadap 2 Perangkat Daerah tersebut tidak diberi nilai capaian per masing-masing Perangkat Daerah, Namun Nilai Indeks Pemerintah Daerah. Berikut hasil penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2025 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 34. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No.	Instansi	Indeks	Kategori
1	Provinsi Kalimantan Timur	4,35	A-
2	Bontang	4,53	A
3	Samarinda	4,67	A
4	Balikpapan	4,70	A
5	Kutai Timur	4,44	A-
6	Kutai Kartanegara	3,89	B
7	Kutai Barat	3,56	B
8	Paser	4,37	A-
9	Penajam Paser Utara	4,23	A-
10	Berau	4,30	A-
11	Mahakam Ulu	2,92	C

Sumber data: Kementerian PANRB

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang bersumber dari Kementerian PANRB, Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai indeks pelayanan publik sebesar 3,89 dengan kategori B.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berada pada kategori baik, namun masih memerlukan peningkatan untuk dapat mencapai kategori A- atau A sebagaimana yang telah dicapai oleh beberapa daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, sebagian daerah telah memperoleh nilai dengan kategori A dan A-, seperti Kota Balikpapan (4,70), Kota Samarinda (4,67), Kota Bontang (4,53), serta beberapa kabupaten lainnya seperti Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, dan Berau. Sementara itu, capaian Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada pada kategori yang sama dengan Kabupaten Kutai Barat (3,56) dan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mahakam Ulu yang memperoleh nilai 2,92 dengan kategori C.

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berada pada tingkat yang baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam penguatan standar pelayanan, peningkatan

kualitas sarana dan prasarana pelayanan, serta optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

Tabel 35. Perbandingan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan 2024

No	Kab/Kota	Rata- Rata 2024	Kategori 2024	Rata- Rata 2025	Kategori 2025	Perbandingan Capaian 2025 dengan 2024	Keterangan
1.	Kutai Kartanegara	4,35	A-	3,89	B	-0,46	Menurun
2.	Samarinda	4,26	A-	4,67	A	0,41	Meningkat
3.	Balikpapan	4,19	A	4,70	A	0,51	Meningkat
4.	Bontang	4,28	A-	4,53	A	0,25	Meningkat
5.	Kutai Barat	4,11	A-	3,56	B	-0,55	Menurun
6.	Berau	3,71	B	4,30	A-	0,59	Meningkat
7.	Penajam Paser Utara	3,75	B	4,23	A-	0,48	Meningkat
8.	Kabupaten Kutai Timur	2,90	C	4,44	A-	1,54	Meningkat
9.	Kabupaten Paser	4,03	A-	4,37	A-	0,34	Meningkat
10.	Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	2,92	C	-	-

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2024 dan 2025

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, mulai Tahun 2023, melalui Aplikasi Survei Kukar, dan beberapa perangkat daerah masih melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri maupun menggunakan jasa pihak ke tiga. Berdasarkan Laporan Kompilasi Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, pengolahan data SKM dari 56 (lima puluh enam) perangkat daerah, dan 3 RSUD, dengan total jumlah responden sebanyak **78.144** orang, hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah **91,14 (Sangat Baik)**, caiapain ini lebih tinggi dari capaian IKM Tahun 2024 sebesar

88,85 (Sangat Baik) atau meningkat 2,29 point. Adapun nilai IKM perunsur terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 36. Hasil IKM Per Unsur Pelayanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Rata-Rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,60
U2	Prosedur Pelayanan	3,58
U3	Kecepatan Pelayanan	3,54
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,84
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,58
U6	Kompetensi Petugas	3,60
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,63
U8	Penanganan Pengaduan	3,84
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,59

Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

Dari hasil survey diatas, diketahui 3 (tiga) unsur pelayanan terendah yang harus menjadi perhatian dan untuk segera dibenahi, yang pertama unsur kecepatan pelayanan dengan nilai rata-rata 3,54, dapat diartikan pelayanan yang diberikan petugas masih dinilai lambat oleh masyarakat, unsur terendah ke dua adalah unsur kesesuaian pelayanan dengan nilai 3,58 dan unsur terendah ke tiga adalah unsur Prosedur Pelayanan dengan nilai rata-rata 3,58. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, hendaknya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Menyusun Langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 37. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD

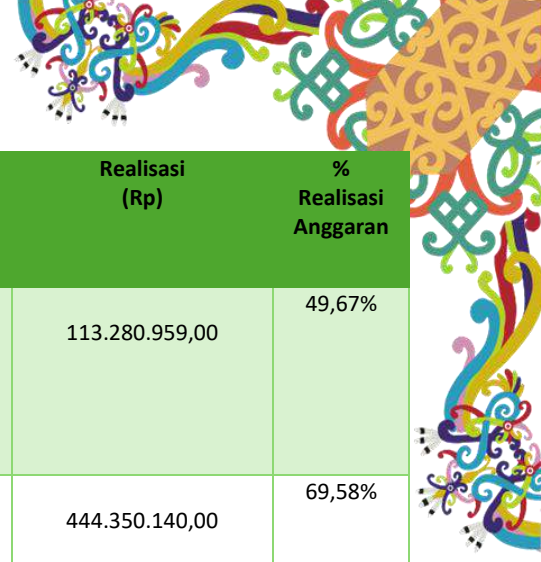
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	8,41	8,74	9,69	9,05

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2021-2022 dan Survei Kukar 2023-2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 38. Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.498.240.000,00	5.219.143.075,00	4.591.123.556,00	87,97%
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.225.000.000,00	364.964.400,00	222.925.172,00	61,08%
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.410.893.206,00	344.020.700,00	257.318.610,00	74,80%
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	475.000.000,00	117.125.400,00	86.711.388,00	74,03%
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	160.000.000,00	31.515.000,00	25.470.000,00	80,82%
6	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	90.770.020.000,00	86.133.178.400,00	59.196.182.437,00	68,73%
7	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	173.630.787.670,00	84.935.867.135,00	75.854.328.179,00	89,31%
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.250.000.000,00	2.628.642.980,00	1.731.203.324,00	65,86%
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.050.000.000,00	1.154.067.484,00	1.115.070.660,00	96,62%
10	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.481.992.000,00	67.095.173.206,00	62.088.337.526,00	92,54%



NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	700.000.000,00	228.070.000,00	113.280.959,00	49,67%
12	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.502.429.000,00	638.629.000,00	444.350.140,00	69,58%
13	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.200.000.000,00	729.922.000,00	429.295.744,00	58,81%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp. 249.620.318.780,00** dari anggaran sebesar **Rp. 206.155.597.695,00** atau **82,59%**. Realisasi keuangan sebesar 82,59% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **108%**, maka terjadi efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil mencapai 100% dengan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan publik. Proses birokrasi yang panjang serta prosedur administrasi yang belum sepenuhnya sederhana menyebabkan masyarakat harus melalui berbagai tahapan pelayanan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan inkonsistensi dalam proses pelayanan. Selain itu, sebagian aparatur masih memiliki keterbatasan kompetensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi pelayanan, serta pemahaman terhadap standar pelayanan.

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), masih terdapat beberapa unit pelayanan yang memiliki keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, sistem antrian, perangkat komputer, serta jaringan internet yang belum sepenuhnya memadai. Pemanfaatan



teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan juga belum optimal sehingga sebagian pelayanan masih dilakukan secara manual. Di samping itu, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik belum dilaksanakan secara maksimal, yang berpotensi menyebabkan proses pelayanan tidak berjalan secara konsisten.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penyusunan dan penetapan kebijakan pelayanan pada setiap unit pelayanan, seperti Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memastikan implementasinya berjalan secara optimal.

Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek pelayanan prima, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemahaman terhadap standar pelayanan. Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan yang memadai pada seluruh unit pelayanan juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga perlu terus didorong melalui penggunaan berbagai aplikasi pelayanan publik yang telah tersedia, seperti Aplikasi DISAPA IDAMAN sebagai bentuk digitalisasi pelayanan administrasi di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, serta Aplikasi Idaman Terbaik sebagai portal pelayanan publik yang menyediakan informasi terkait layanan pada seluruh unit pelayanan. Selain itu, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara konsisten dapat menjadi instrumen penting dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik.

4. Analisis Kinerja Sasaran 4 : “Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan”** dengan indikator **Indeks Pendidikan & Indeks Pembangunan Kebudayaan** mencapai **113,45%** dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 39. Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,81	114,45
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00	57,91	112,45
Rata-rata Capaian					113,45

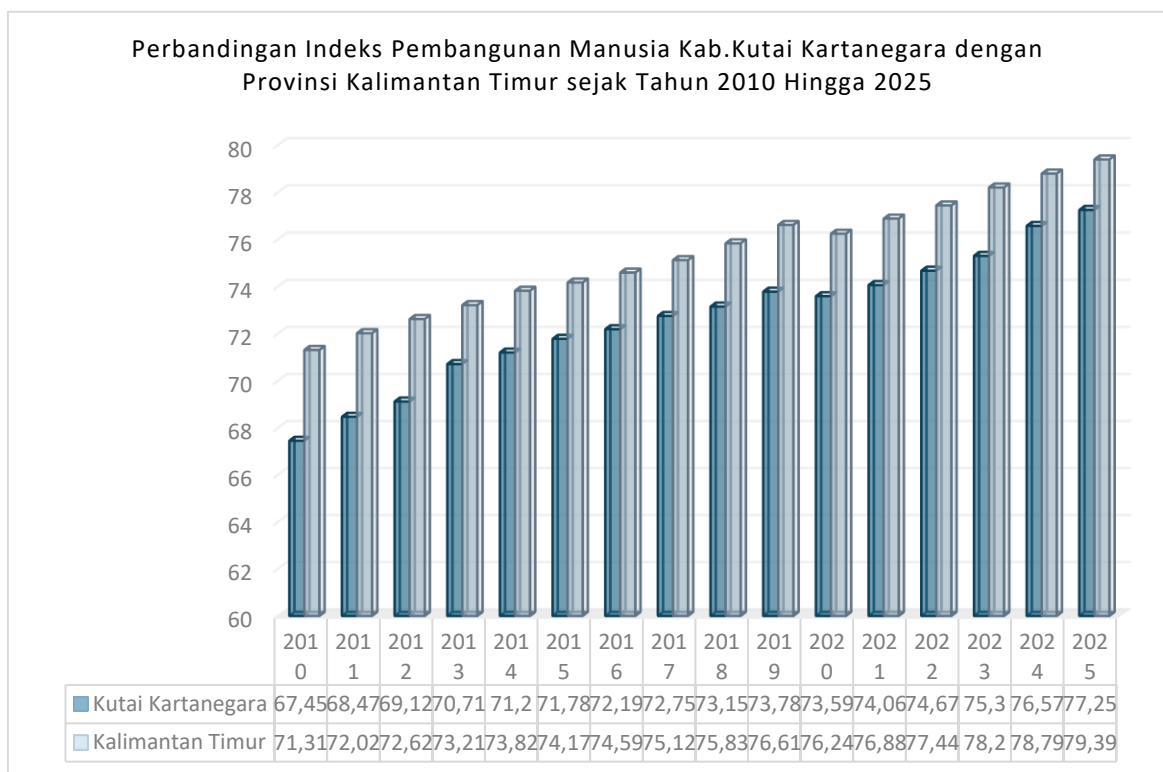
Salah satu indeks komposit yang digunakan sebagai indikator kinerja pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat di suatu wilayah. Menurut UNDP, pembangunan manusia hanya dapat direalisasikan bila penduduk dalam suatu wilayah tertentu setidaknya memiliki peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif sehingga memiliki daya beli. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indeks tersendiri. Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (*expectancy of life at birth*) yang menghasilkan indeks kesehatan. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan indikator harapan lama sekolah dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang menghasilkan indeks pengetahuan. Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan yang menghasilkan indeks pendapatan.

Perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2010-2025 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat di Grafik 2.3.7. Dengan menggunakan metode baru, pada tahun 2010 IPM Kutai Kartanegara hanya mencapai 67,45, sementara IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai angka yang lebih tinggi 71,31. Pada tahun 2025 IPM Kutai Kartanegara meningkat 0,68 poin

menjadi 77,25. Selama periode 2010-2025 IPM Kutai Kartanegara selalu lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Timur. Kendati demikian, jika dilihat dari pertumbuhannya, IPM Kutai Kartanegara tumbuh sedikit lebih cepat dibandingkan IPM Kaltim. Selama periode 2010-2025, IPM Kutai Kartanegara tumbuh 9,8 persen sementara IPM Kaltim hanya tumbuh di kisaran 8,08 persen.

Grafik 7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2025



Sumber: BPS

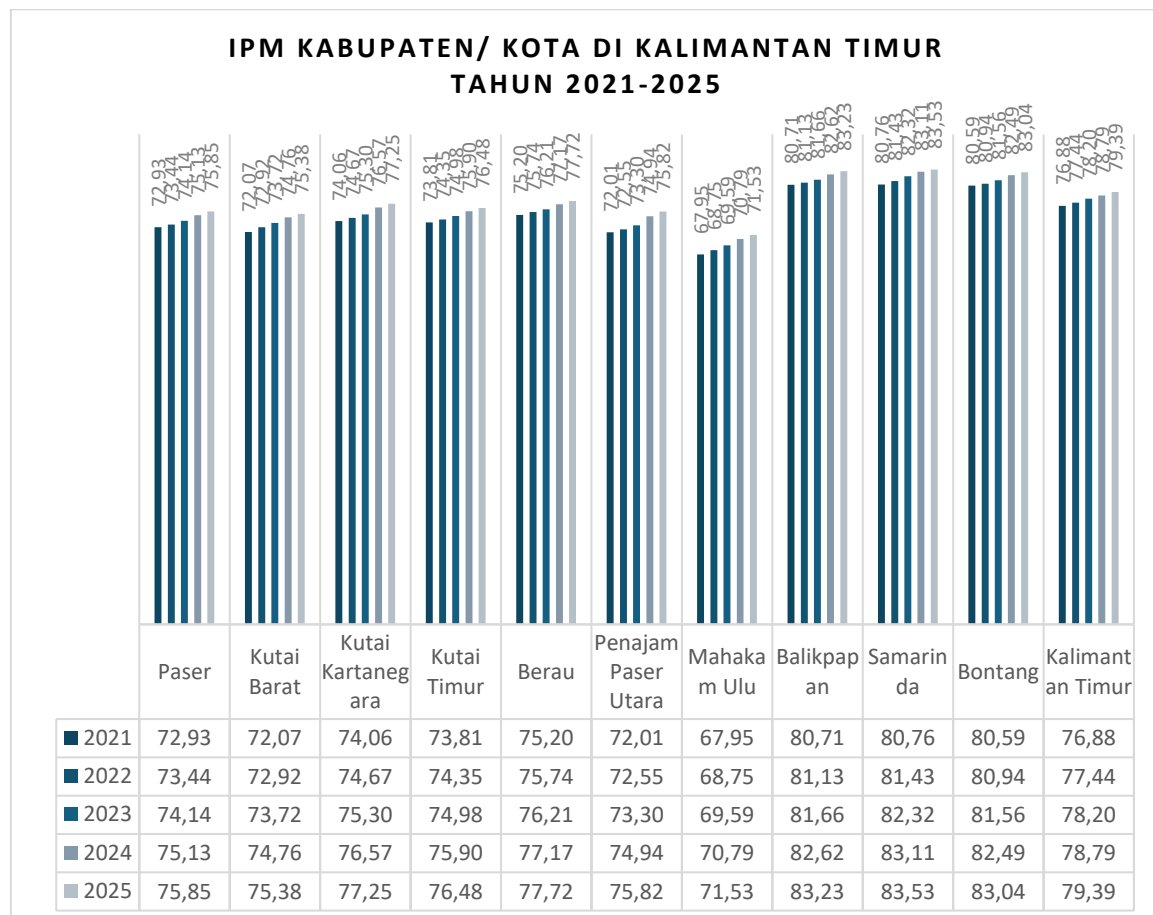
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga 2025, yang mengalami peningkatan signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2010, HLS tercatat sebesar 11,59 tahun, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara diproyeksikan akan mengenyam pendidikan hingga jenjang kelas 6 SMP. Angka ini terus meningkat, dengan lonjakan signifikan terjadi antara 2012 hingga 2014, di mana HLS naik dari 12,11 tahun menjadi 13,24 tahun, menandakan peningkatan akses terhadap pendidikan menengah.

Sejak tahun 2015, pertumbuhan HLS mulai melambat, tetapi tetap menunjukkan tren positif, mencapai 13,56 tahun pada 2017 dan bertahan di angka tersebut hingga 2019. Setelah tahun 2020, angka HLS sedikit meningkat lagi menjadi 13,64 tahun pada 2023, 13,65 tahun pada 2024, dan mencapai 13,85 tahun pada 2025

yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara kini diperkirakan akan bersekolah hingga jenjang kelas 1 perguruan tinggi atau diploma satu (D1).

Secara keseluruhan, peningkatan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kesadaran pendidikan di Kutai Kartanegara, didukung oleh peningkatan fasilitas pendidikan, program beasiswa, serta kebijakan wajib belajar yang semakin efektif. Meskipun demikian, stagnasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mengurangi angka putus sekolah, agar HLS dapat terus meningkat secara signifikan di masa mendatang.

Grafik 8. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2025

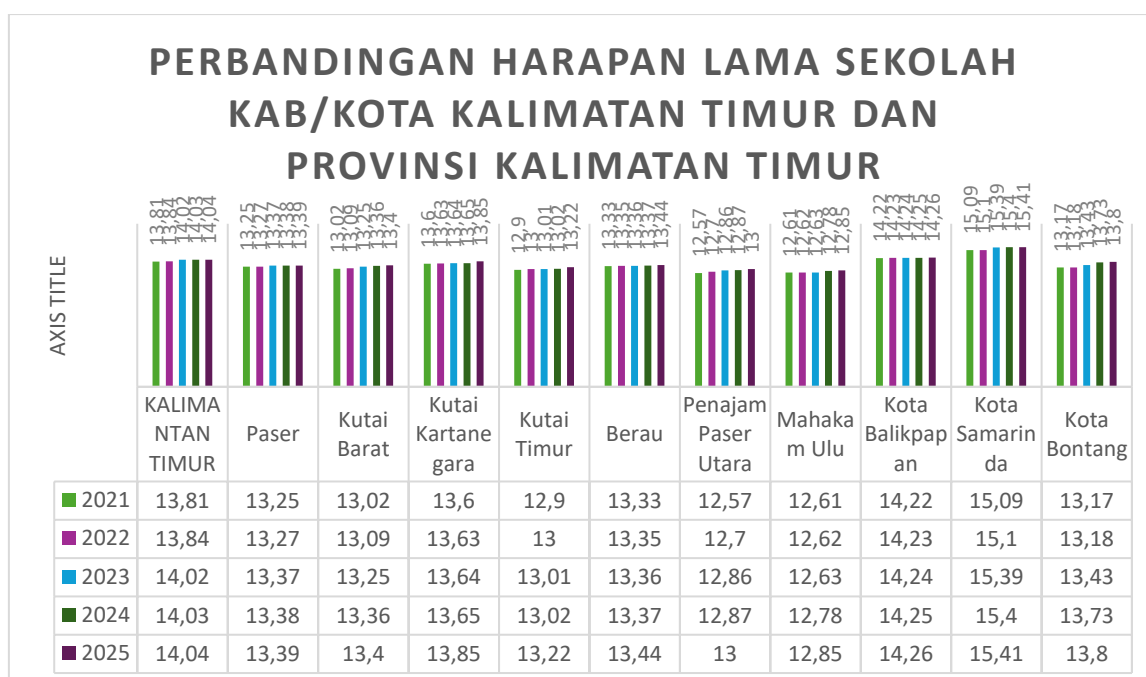


Sumber: BPS, 2025

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2021 hingga 2025. Secara keseluruhan, HLS mengalami peningkatan di semua daerah, menunjukkan adanya perbaikan akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, HLS meningkat dari 13,60 tahun pada 2021 menjadi 13,85 tahun pada 2025, yang berarti anak-anak di daerah ini diproyeksikan akan bersekolah hingga jenjang diploma satu (D1). Secara provinsi, Kalimantan Timur juga menunjukkan tren positif, dengan HLS meningkat dari 13,81 tahun pada 2021 menjadi 14,04 tahun pada 2025.

Grafik 9. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2025

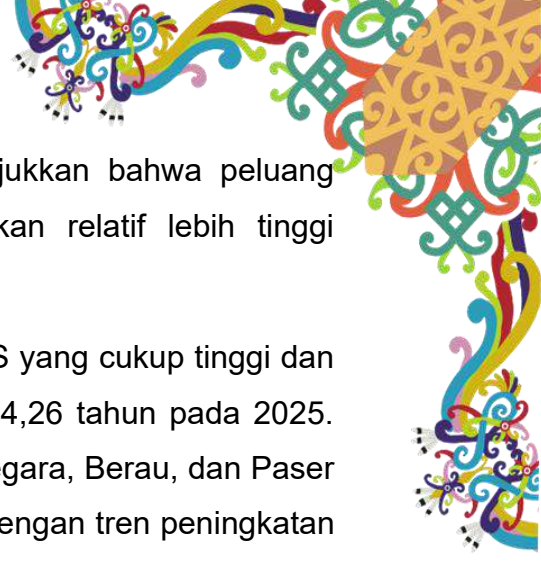


Sumber: BPS, 2025

Grafik Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa secara umum HLS mengalami peningkatan secara bertahap di hampir seluruh wilayah selama periode tersebut. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan akses dan peluang masyarakat untuk menempuh pendidikan lebih lama.

Secara provinsi, Kalimantan Timur mengalami peningkatan HLS dari 13,81 tahun pada 2021 menjadi 14,04 tahun pada 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa rata-rata anak usia sekolah di Kalimantan Timur memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga sekitar 14 tahun atau setara dengan pendidikan menengah atas.

Jika dilihat pada tingkat kabupaten/kota, Kota Samarinda memiliki nilai HLS tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Nilainya meningkat dari 15,09 tahun pada



2021 menjadi 15,41 tahun pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat di Samarinda untuk mengenyam pendidikan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut.

Selanjutnya, Kota Balikpapan juga menunjukkan nilai HLS yang cukup tinggi dan stabil, meningkat dari 14,22 tahun pada 2021 menjadi 14,26 tahun pada 2025. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Kutai Kartanegara, Berau, dan Paser memiliki nilai HLS yang berada di kisaran 13–14 tahun, dengan tren peningkatan yang relatif kecil namun tetap konsisten.

Di sisi lain, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu merupakan daerah dengan nilai HLS relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain. Pada tahun 2025, HLS di Penajam Paser Utara mencapai 13,0 tahun, sedangkan Mahakam Ulu sebesar 12,85 tahun. Meskipun demikian, kedua daerah tersebut tetap menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa ketimpangan HLS antar daerah masih terlihat, terutama antara wilayah perkotaan dan beberapa kabupaten yang lebih terpencil. Namun demikian, tren peningkatan yang terjadi di seluruh wilayah mengindikasikan adanya kemajuan dalam pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Timur.

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan, yang dihitung berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perubahan terjadi dalam pengukuran indeks pengetahuan, di mana indikator angka melek huruf tidak lagi digunakan karena mayoritas wilayah telah mencapai tingkat yang tinggi dan tidak lagi sensitif untuk mengukur kualitas pendidikan. Pada tahun 2010, dalam komponen pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pengetahuan mencatat angka terendah yaitu 57,79. Pada tahun 2022, indeks ini mengalami peningkatan sebesar 10,87 poin menjadi 68,66. Pada tahun 2024, Indeks Pengetahuan nasional meningkat lagi menjadi sekitar 65-66, seiring dengan kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi 13,21 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,85 tahun, menunjukkan bahwa pendidikan formal rata-rata di Indonesia telah mencapai tingkat SMP kelas 2. Meskipun Indeks Pengetahuan tetap menjadi mencapai tingkat SMP kelas 2. Meskipun Indeks Pengetahuan tetap

menjadi komponen IPM dengan angka terendah, pertumbuhannya tetap yang tercepat dibandingkan indeks lain.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Indeks Pendidikan juga mengalami peningkatan yang signifikan, sejalan dengan tren nasional. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kalimantan Timur telah mencapai lebih dari 13 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat mendekati 9 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menempuh pendidikan setidaknya hingga tingkat SMP. Secara spesifik, di Kabupaten Kutai Kartanegara, peningkatan indeks ini didukung oleh program pendidikan daerah, seperti beasiswa untuk siswa kurang mampu, peningkatan fasilitas sekolah, serta dukungan bagi tenaga pendidik. Kebijakan pemerintah daerah yang terus memperluas akses pendidikan, baik melalui infrastruktur sekolah maupun program bantuan pendidikan, turut mempercepat kenaikan Indeks Pendidikan.

Namun, tantangan masih ada, terutama terkait ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman, ketersediaan tenaga pengajar berkualitas di desa-desa terpencil, serta minimnya akses terhadap teknologi dan internet di beberapa daerah. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap perbedaan pencapaian pendidikan antarwilayah dalam Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur secara umum. Dengan berbagai upaya peningkatan pendidikan yang terus dilakukan, diharapkan Indeks Pendidikan di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur dapat terus meningkat, mengejar rata-rata nasional, serta mendukung target peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini.

Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

$I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

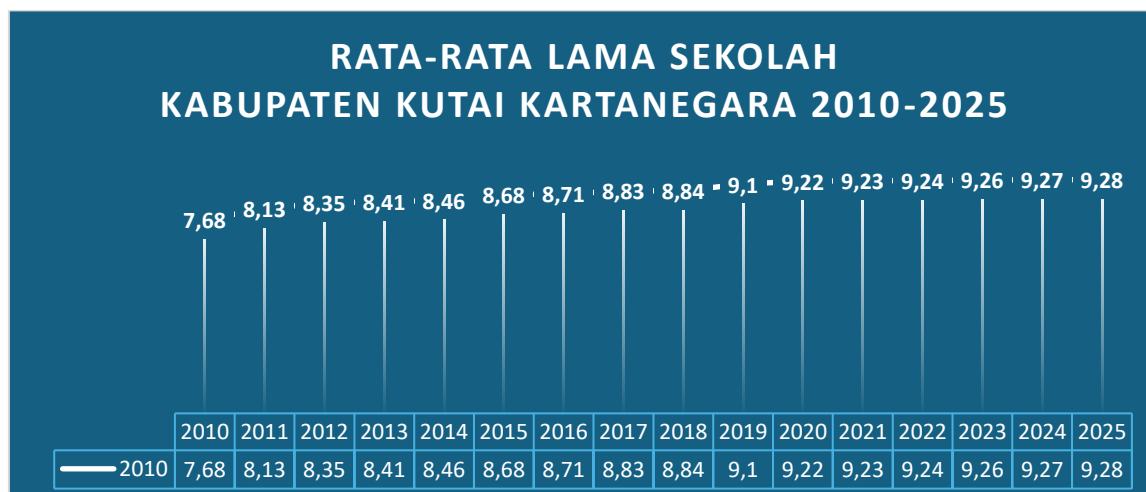
$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

I_{RLS} = Indeks Rata – rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Komponen dimensi pengetahuan dalam pembangunan manusia dihitung dengan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah tiap jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Cakupan penghitungan angka HLS adalah penduduk umur 7 tahun ke atas. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

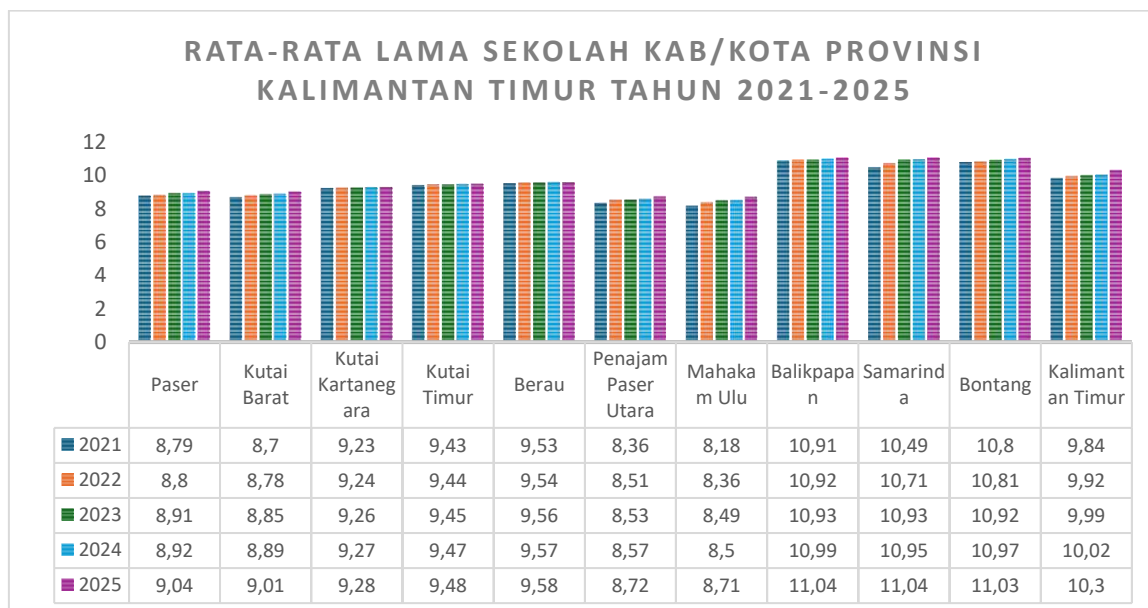
Grafik. 10. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2025



Sumber: BPS 2025

Grafik menunjukkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2021 hingga 2025, yang mengalami peningkatan dari 9,23 tahun pada 2021 menjadi 9,28 tahun pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan akses terhadap pendidikan formal, di mana rata-rata penduduk Kutai Kartanegara telah menempuh pendidikan hingga hampir menyelesaikan SMP kelas 3. Meskipun mengalami pertumbuhan, angka ini masih berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur, yang pada tahun 2025 mencapai 10,30 tahun.

Grafik. 11. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2025



Sumber: BPS 2025

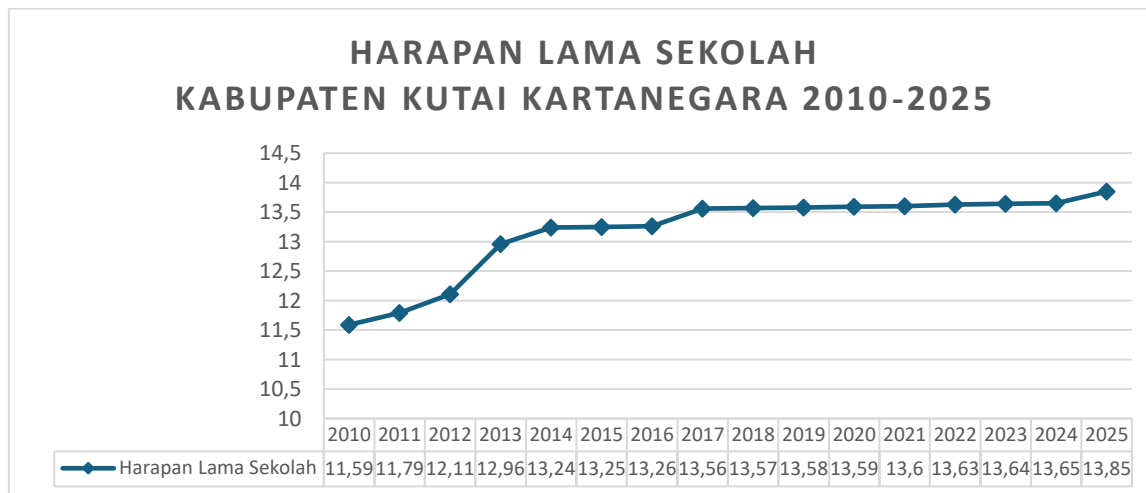
Sebagai perbandingan, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang memiliki RLS yang lebih tinggi, masing-masing 11,04 tahun, 11,04 tahun, dan 11,03 tahun pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perkotaan lebih banyak yang telah menamatkan jenjang SMA atau setidaknya mencapai kelas 1 SMA dibandingkan dengan Kutai Kartanegara. Faktor seperti akses sekolah yang lebih mudah, ketersediaan tenaga pendidik yang lebih baik, serta infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap di daerah perkotaan dapat menjadi penyebab utama tingginya angka RLS di kota-kota tersebut.

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara memiliki angka RLS yang lebih tinggi dibandingkan Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara, yang pada tahun 2024 masing-masing hanya mencapai 8,71 tahun dan 8,72 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah dengan tantangan geografis dan akses pendidikan yang masih terbatas, rata-rata pendidikan penduduknya masih lebih rendah, dengan banyak yang belum menyelesaikan jenjang SMP.

Meskipun RLS di Kutai Kartanegara mengalami peningkatan, kesenjangan dengan kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda masih cukup terasa. Faktor yang dapat mendorong peningkatan RLS lebih signifikan di Kutai Kartanegara antara lain perluasan akses pendidikan di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, serta program beasiswa dan bantuan pendidikan yang

lebih merata. Dengan program-program ini, diharapkan rata-rata lama sekolah di Kutai Kartanegara dapat terus meningkat, mengejar angka provinsi, dan mendekati capaian daerah perkotaan di Kalimantan Timur.

Grafik 12. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2025



Sumber: BPS 2025

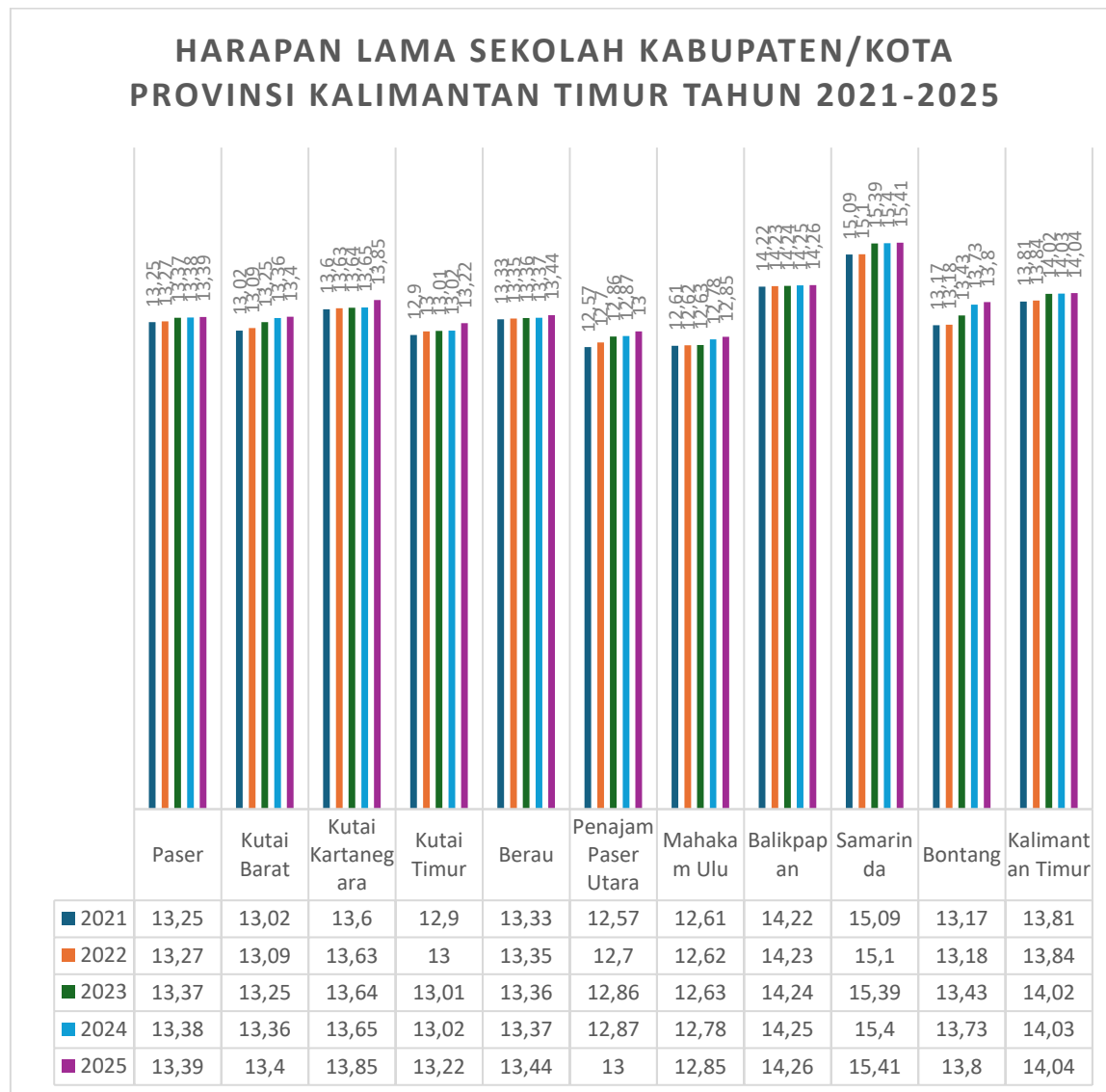
Grafik menunjukkan perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga 2025, yang mengalami peningkatan signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2010, HLS tercatat sebesar 11,59 tahun, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara diproyeksikan akan mengenyam pendidikan hingga jenjang kelas 6 SMP. Angka ini terus meningkat, dengan lonjakan signifikan terjadi antara 2012 hingga 2014, di mana HLS naik dari 12,11 tahun menjadi 13,24 tahun, menandakan peningkatan akses terhadap pendidikan menengah.

Sejak tahun 2015, pertumbuhan HLS mulai melambat, tetapi tetap menunjukkan tren positif, mencapai 13,56 tahun pada 2017 dan bertahan di angka tersebut hingga 2019. Setelah tahun 2020, angka HLS sedikit meningkat lagi menjadi 13,64 tahun pada 2023, 13,65 tahun pada 2024, dan mencapai 13,85 pada tahun 2025 yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara kini diperkirakan akan bersekolah hingga jenjang kelas 1 perguruan tinggi atau diploma satu (D1).

Secara keseluruhan, peningkatan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kesadaran pendidikan di Kutai Kartanegara, didukung oleh peningkatan fasilitas pendidikan, program beasiswa, serta kebijakan wajib belajar yang semakin efektif. Meskipun demikian, stagnasi dalam beberapa tahun terakhir

menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mengurangi angka putus sekolah, agar HLS dapat terus meningkat secara signifikan di masa mendatang.

Grafik. 13. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2025



Sumber: BPS 2025

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2021 hingga 2025. Secara keseluruhan, HLS mengalami peningkatan di semua daerah, menunjukkan adanya perbaikan akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

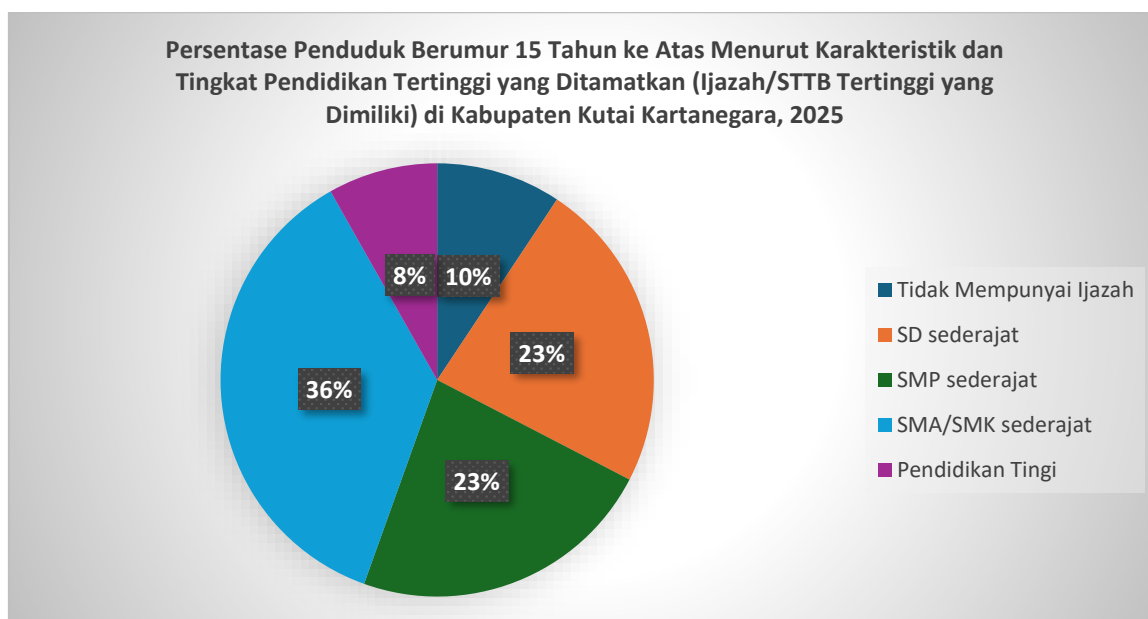
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, HLS meningkat dari 13,60 tahun pada 2021 menjadi 13,85 tahun pada 2025, yang berarti anak-anak di daerah ini diproyeksikan akan bersekolah hingga jenjang diploma satu (D1). Secara provinsi,

Kalimantan Timur juga menunjukkan tren positif, dengan HLS meningkat dari 13,81 tahun pada 2021 menjadi 14,04 tahun pada 2025.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, Samarinda dan Balikpapan mencatatkan HLS tertinggi di Kalimantan Timur, masing-masing 15,41 tahun dan 14,26 tahun pada 2025, yang menunjukkan akses pendidikan lebih luas di kota-kota besar. Sementara itu, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara mencatat angka HLS lebih rendah, masing-masing 12,85 tahun dan 13,00 tahun pada 2025, menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah tersebut.

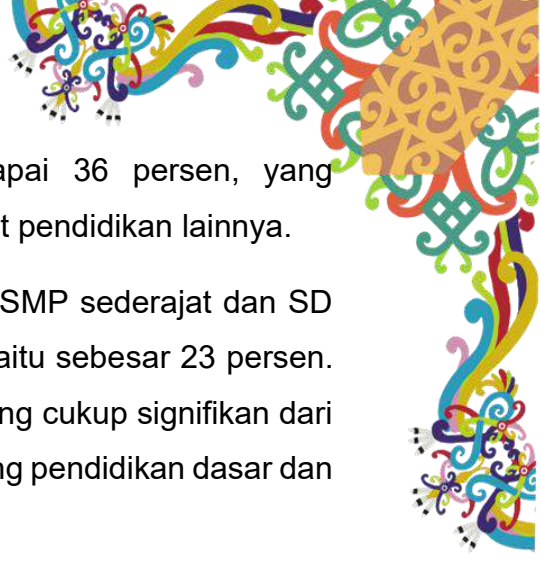
Secara keseluruhan, peningkatan HLS di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Kartanegara, menandakan kemajuan dalam sektor pendidikan, namun perbedaan antarwilayah menunjukkan masih perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan, dukungan tenaga pengajar, serta program bantuan pendidikan agar kesempatan belajar semakin merata di seluruh daerah.

Grafik. 14. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki) di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025



Sumber: BPS 2025, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) November

Struktur tingkat pendidikan penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan menengah. Hal ini tercermin dari persentase penduduk



dengan pendidikan SMA/SMK sederajat yang mencapai 36 persen, yang merupakan proporsi terbesar dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya.

Selanjutnya, penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP sederajat dan SD sederajat masing-masing memiliki proporsi yang sama, yaitu sebesar 23 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat bagian yang cukup signifikan dari penduduk yang tingkat pendidikannya berhenti pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

Sementara itu, penduduk yang tidak mempunyai ijazah tercatat sebesar 10 persen. Persentase ini menggambarkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menamatkan pendidikan formal, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan.

Di sisi lain, proporsi penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi tercatat sebesar 8 persen, yang merupakan bagian paling kecil dalam komposisi tingkat pendidikan penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara masih relatif rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya.

Secara keseluruhan, komposisi tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah mencapai pendidikan menengah, namun peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta pengurangan jumlah penduduk yang belum memiliki ijazah pendidikan formal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Indeks Pendidikan/ Indeks Pengetahuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, diperoleh dengan perhitungan:

$$I_{pendidikan} = 0,71$$

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat

digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mencapai **57,91**, mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar **57,42**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, baik dari sisi pelestarian warisan budaya, peningkatan ekonomi budaya, hingga aspek kesetaraan gender. Setiap dimensi yang membentuk IPK memiliki peran yang signifikan dalam mencerminkan keberhasilan pembangunan kebudayaan di daerah ini.

Adapun capaian Dimensi penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

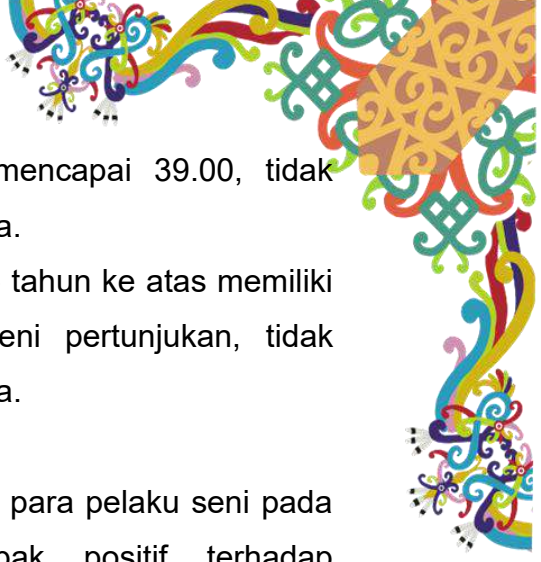
a) Dimensi

Ekonomi

Budaya



23 September 2025: Koordinasi dengan Pusdatin dan Bagian Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyampaikan permintaan data jumlah pengunjung event serta jumlah pengrajin dan UMKM yang menjual produk tradisional (Dimensi Warisan Budaya dan Ekonomi Budaya)



Dimensi Ekonomi Budaya pada Tahun 2025 mencapai 39.00, tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya.

- **Capaian indikator utama:** 39% penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki sumber penghasilan dari keterlibatan dalam seni pertunjukan, tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya.
- **Faktor pendukung:**
 - Adanya program stimulan dari pemerintah kepada para pelaku seni pada tahun sebelumnya yang memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan aktivitas berkarya dan kesempatan tampil pada berbagai kegiatan di tahun berikutnya.
 - Tingginya semangat dan konsistensi para pelaku seni, serta dukungan komunitas budaya yang tetap aktif memanfaatkan ruang publik dan berbagai event budaya sebagai sarana ekspresi dan pelestarian seni.
- **Tantangan:**
 - Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada berkurangnya jumlah event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
 - Keterbatasan dukungan anggaran yang menyebabkan kesempatan tampil bagi pelaku seni menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

b) Dimensi Pendidikan

Dimensi Pendidikan mengalami peningkatan dari **73,66** pada tahun 2024 menjadi **73,77** pada tahun 2025. Pendidikan yang lebih inklusif terlihat dari semakin tingginya angka partisipasi sekolah bagi kelompok ekonomi 40% terbawah yang mencapai **91,79%**. Rata-rata lama sekolah penduduk juga sedikit meningkat menjadi **9,28 tahun**, sementara harapan lama sekolah mencapai **13,65 tahun**. Pemerintah daerah terus memperkuat program pendidikan inklusif dan implementasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah, termasuk pengajaran bahasa daerah dan seni budaya. Namun, tantangan masih ada, terutama rendahnya angka partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas yang hanya **48,35%**, serta kurangnya tenaga pendidik di bidang seni dan budaya.

c) Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya mengalami penurunan dari **82,29** pada tahun 2024 menjadi **80,62** pada tahun 2025. Terdapat perubahan tingkat toleransi sosial dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 mencapai **94,33%**, Menurun dibandingkan Tahun 2024 sebanyak **97,79%** rumah tangga menyatakan setuju jika salah satu anggota keluarga mereka bersahabat dengan orang dari suku yang berbeda. Meskipun mengalami penurunan, angka masih berada pada posisi tinggi dalam hal toleransi antar-masyarakat. Sebagian besar masyarakat juga menerima keberadaan kelompok dari suku lain dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Program penguatan toleransi sosial dan kebijakan yang mendukung keberagaman budaya berperan dalam mempertahankan harmoni sosial ini. Namun, meningkatnya pola hidup individualis serta pengaruh media digital menjadi tantangan dalam mempertahankan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.

d) Dimensi Warisan Budaya

Dimensi Warisan Budaya mengalami penurunan dari **69,74** pada tahun 2024 menjadi **66,51** pada tahun 2025, Lebih rendah dibanding tahun 2023 yaitu **67,43**. Sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk pelestarian budaya, termasuk penetapan **12 dari 100 Objek**



Diduga Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Kabupaten serta pengakuan **25 dari 60 Warisan Budaya Takbenda** sebagai bagian dari budaya nasional. Program konservasi dan dokumentasi warisan budaya terus diperkuat melalui kegiatan berbasis budaya seperti festival seni dan budaya lokal. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan penggunaan bahasa daerah yang masih rendah, dengan hanya **38,26%** penduduk yang menggunakannya secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perhatian terhadap cagar budaya yang belum terdaftar juga masih perlu ditingkatkan.

e) Dimensi Ekspresi Budaya

Dimensi Ekspresi Budaya mengalami pertumbuhan signifikan dari **45,08** pada tahun 2024 menjadi **45,88** pada tahun 2025. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan budaya dan seni menunjukkan adanya ruang berekspresi yang lebih terbuka.



Pemerintah daerah telah menyediakan berbagai event budaya yang lebih inklusif, memungkinkan setiap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi. Dukungan berupa ruang-ruang kreatif bagi seniman juga semakin berkembang. Namun, masih diperlukan penguatan fasilitas bagi komunitas seni agar mereka dapat mengekspresikan budaya secara lebih optimal.

f) Dimensi Budaya Literasi

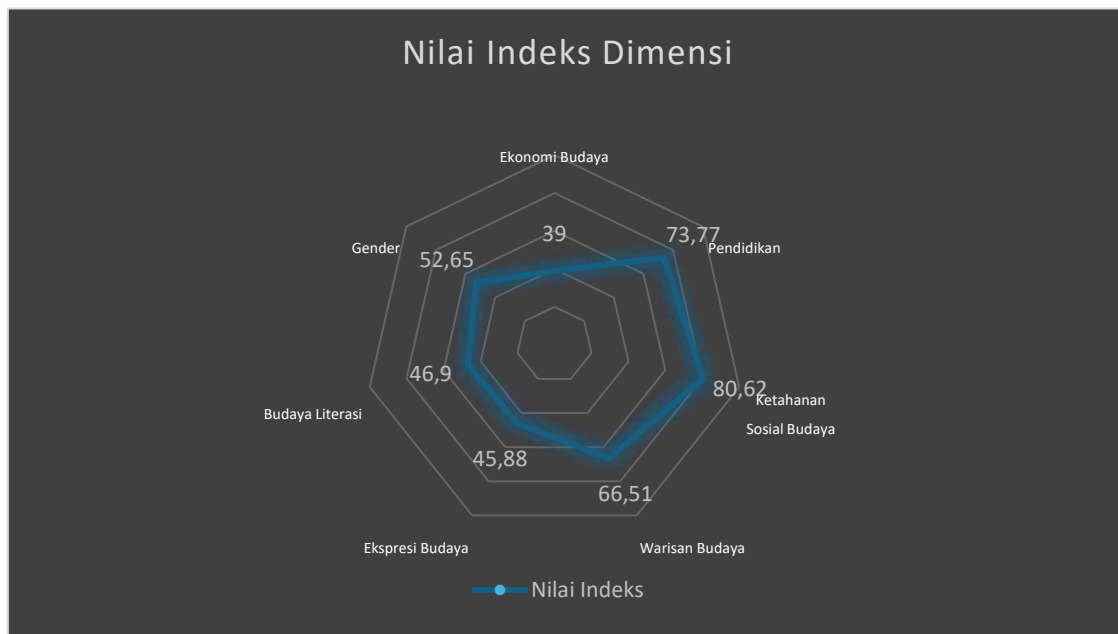
Dimensi Budaya Literasi mengalami Peningkatan yang signifikan dari **38,8** pada tahun 2024 menjadi **46,9** pada tahun 2025. Peningkatan nilai dialami oleh ketiga indikator yang menyusun dimensi ini. Hal ini dipengaruhi karena adanya fasilitas perpustakaan keliling, perpustakaan desa yang turut menyumbang capaian hasil, serta struktur administrasi yang tercatat dari setiap pengunjung yang datang.

g) Dimensi Gender

Dimensi Kesetaraan Gender mengalami penurunan dari 53,38 pada tahun 2024 menjadi 52,65 pada tahun 2025. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan menurun dibanding tahun sebelumnya. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, dari 100 orang laki-laki yang bekerja pada tahun 2025 ada sebanyak 54 orang perempuan yang juga bekerja. Angka ini menunjukkan tidak adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan agar meningkatkan rasio kesetaraan gender untuk pekerja wanita dengan laki-laki yang bekerja bisa mendapatkan jumlah yang sebanding.

Berdasarkan ulasan per-indikator, terdapat 6 (enam) dimensi yang memiliki nilai indeks lebih tinggi dibanding tahun 2024, yaitu Pendidikan, Ekspresi budaya, dan Budaya Literasi. Sedangkan dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Gender berada di bawah angka tahun 2024. Sedangkan Nilai Indeks Ekonomi budaya sama dengan tahun sebelumnya. Nilai indeks Budaya Literasi mengalami peningkatan signifikan ketimbang tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik. 15. Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



Sumber: Laporan IPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

Apabila menilik nilai dimensi pada gambar di atas, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara dimensi yang satu dengan lainnya. Dimensi dengan hasil tertinggi adalah Ketahanan Sosial Budaya (80,62) dan Pendidikan (73,77). Tingginya nilai Ketahanan Sosial Budaya menggambarkan kemajemukan masyarakat di Kutai Kartanegara dapat dikelola dengan baik, sehingga kohesi sosial antar masyarakat yang berbeda agama, suku, dan ras cukup kuat. Sedangkan, tingginya nilai indeks dimensi pendidikan menunjukkan cukup mapannya sarana prasarana dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai aspek yang menunjang pembangunan dan transformasi kebudayaan. Dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dan dimensi gender yang biasanya menjadi penyumbang nilai terbesar tahun ini harus

mengalami penurunan, sedangkan dimensi ekonomi budaya masih stagnan di angka 39. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perlu adanya strategi baru yang mengadaptasi perubahan-perubahan kondisi daerah dan negara yang membawa dampak pada fluktuasi capaian IPK. Kerjasama seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk bersinergi dalam Upaya melestarikan kebudayaan.

Grafik. 16. IPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2025



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara

Grafik Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2025 menunjukkan bahwa sebagian besar dimensi mengalami peningkatan meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada beberapa indikator.

Dimensi ketahanan sosial budaya memiliki capaian tertinggi, meningkat dari 73,28 pada tahun 2022 menjadi 82,29 pada tahun 2024, kemudian sedikit menurun menjadi 80,62 pada tahun 2025. Dimensi pendidikan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat hingga mencapai 73,77 pada tahun 2025.

Dimensi warisan budaya dan ekspresi budaya menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2022, meskipun warisan budaya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025. Dimensi budaya literasi juga mengalami peningkatan cukup signifikan hingga mencapai 46,9 pada tahun 2025. Sementara itu, dimensi gender meningkat dari 46,84 pada tahun 2022 menjadi 52,65 pada tahun 2025.

Di sisi lain, dimensi ekonomi budaya mengalami peningkatan dari 21 pada tahun 2022 menjadi 39 pada tahun 2024 dan tetap pada angka yang sama di tahun 2025, namun masih menjadi dimensi dengan capaian terendah dibandingkan dimensi lainnya.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 40. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	0,679	0,71	0,805	0,706
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	N/A	47,42	53,23	57,42	57,91	53

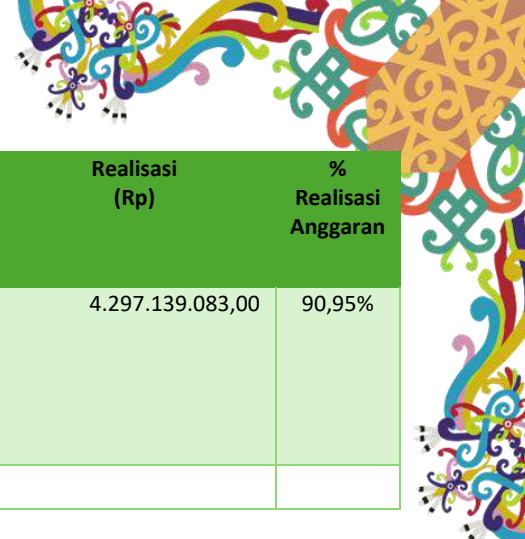
Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 41. Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	891.692.847.000,00	831.676.444.590,00	557.057.089.669,00	66,98%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	4.420.000.000,00	2.271.233.140,00	2.064.387.750,00	90,89%
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.640.000.000,00	3.772.852.400,00	3.710.677.000,00	98,35%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.950.000.000,00	965.422.460,00	734.337.800,00	76,06%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	4.860.000.000,00	1.825.907.344,00	1.022.773.978,00	56,01%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	6.170.000.000,00	5.149.768.480,00	5.073.216.655,00	98,51%

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
7	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	50.000.000,00	24.809.200,00	15.930.000,00	64,21%
8	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.508.500.000,00	4.441.865.290,00	3.676.728.280,00	82,77%
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.033.800.000,00	5.085.831.650,00	4.376.732.176,00	86,06%
10	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.900.000.000,00	1.774.204.000,00	1.601.242.182,00	90,25%
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	6.426.495.000,00	2.668.025.380,00	2.092.865.693,00	78,44%
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.450.000.000,00	1.607.427.320,00	1.268.199.388,00	78,90%
13	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	16.325.000.000,00	14.926.362.200,00	10.974.700.718,00	73,53%
14	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.200.000.000,00	3.167.018.100,00	893.994.191,00	28,23%
15	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	500.000.000,00	318.832.640,00	280.401.251,00	87,95%
16	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.850.000.000,00	1.016.593.900,00	452.657.191,00	44,53%
17	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.600.000.000,00	1.359.650.320,00	195.141.579,00	14,35%
18	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	9.526.000.000,00	6.053.496.800,00	3.373.277.463,00	55,72%
19	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	535.511.117,00	287.191.059,00	203.316.960,00	70,80%
20	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	70.213.286.703,00	85.433.261.995,00	74.637.286.191,00	87,36%



NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
21	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	6.050.000.000,00	4.724.874.000,00	4.297.139.083,00	90,95%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.678.002.095.198,00** dari anggaran sebesar **Rp.978.551.072.268,00** atau **62,29%**. Realisasi keuangan sebesar 62,29% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **113,45%**, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Sudah tersedianya lembaga pendidikan jenjang pada setiap desa
2. Adanya pembebasan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah dan adanya beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia
3. Kondisi geografis sebagian wilayah Kutai Kartanegara yang sulit dijangkau, juga mempengaruhi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
4. Masih rendahnya kesadaran penduduk di wilayah tertentu terutama pada wilayah perkebunan dan kampung nelayan untuk bersekolah/ kuliah, masyarakat lebih mementingkan bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
5. Terkait pembangunan kebudayaan adanya prioritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional.
6. Situasi kerukunan umat beragama, suku, ras, dan golongan di wilayah ini juga sangat baik, bahkan belum pernah terjadi konflik yang eskalatif.
7. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mendorong lahirnya pelaku seni yang menjadikan kesenian sebagai sumber penghasilan utama dengan memberi pelatihan, sponsorship, publikasi, hingga promosi.

8. Peningkatan minat baca dengan menyediakan beragam buku bacaan, pustakawan, dan sarana prasarana penunjang di tiap perpustakaan kecamatan, kelurahan, dan desa.

Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan Indeks Pendidikan salah satunya menjadikan Program Beasiswa Idaman dan Program 1000 guru sarjana, menjadi program dedikasi/ prioritas. Beasiswa 1000 Guru Sarjana dibagi dalam 3 kategori yaitu beasiswa guru non PNS/ Tenaga Pendidik, Beasiswa Calon Guru dan Beasiswa Pasca Sarjana (S2 dan S3), sedangkan Beasiswa Kukar Idaman dibagi dalam 7 kategori yaitu Beasiswa Berkebutuhan Khusus, Beasiswa Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan/ Madrasah, Beasiswa Santri Pondok Pasantren, Beasiswa Stimulan (S1), Beasiswa Khusus (Yatim Piatu terdampak covid-19) Beasiswa Santri Lanjut Perguruan Tinggi dan Beasiswa Tematik.

Di Tahun 2025 melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara telah merealisasikan beasiswa dengan rincian:

Tabel 42. Realisasi Program Beasiswa Tahun 2022-2025

NO.	KATEGORI BEASISWA	CAPAIAN				KETERANGAN
		2022	2023	2024	2025	
1	Beasiswa santri lanjut perguruan tinggi	7	22	48	144	
2	Beasiswa stimulan Mahasiswa	644	1094	3926	3447	
3	Beasiswa Non ASN skema tematik	21	75	139	61	
4	Beasiswa santri pondok pesantren	159	329	238	181	
5	Beasiswa tingkat SD/SMP/SMA SLB	15	0	0	0	
6	Beasiswa tingkat SMA/SMK/MA	95	347	855	149	
7	Beasiswa khusus (yatim piatu) korban covid 19	21	57	0	0	
TOTAL		962	1924	5206	3.982	

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

5. Analisis Kinerja Sasaran 5: “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat**” dengan indikator **Indeks Kesehatan** mencapai **99,14%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 43. Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,82	0,841	102,44

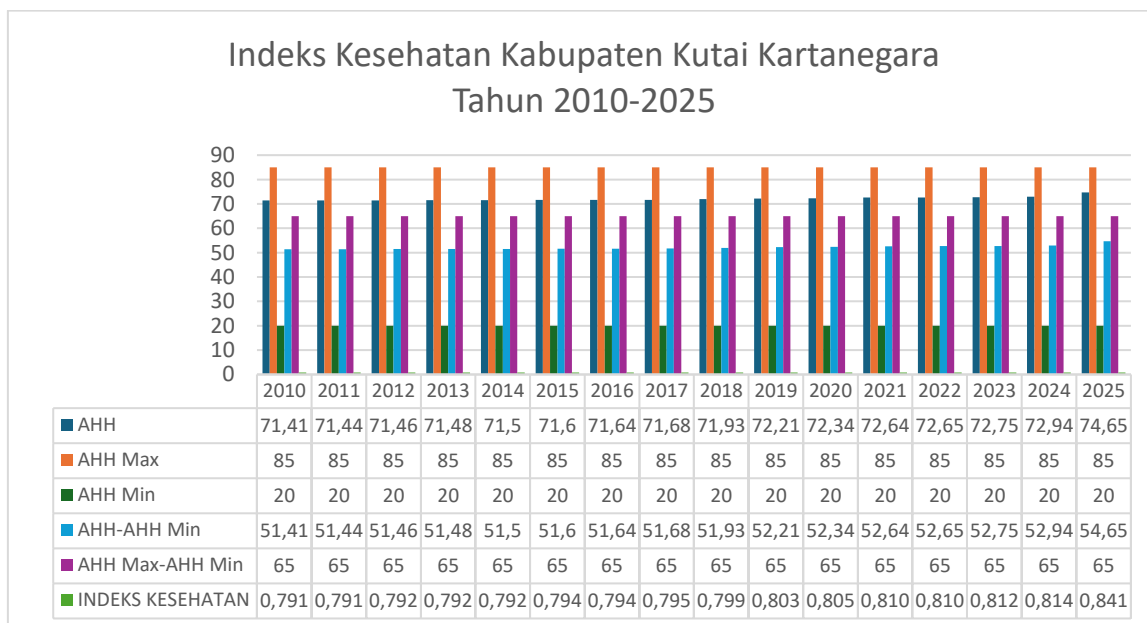
Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (expectancy of life at birth) yang menghasilkan indeks kesehatan, merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan indikator Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Pada Tahun 2025 Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 0,841, capaian ini meningkat 0,027 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 angka indeks Kesehatan berada pada 0,814. Setiap tahunnya indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat. Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2025, ditampilkan pada grafik dibawah ini:

Grafik 17. Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai kartanegara 2010-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara

Angka Harapan Hidup

Komponen umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (expectation of life at birth). Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator angka harapan hidup (AHH) maka semakin tinggi



Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Puskesmas Loa Iduh



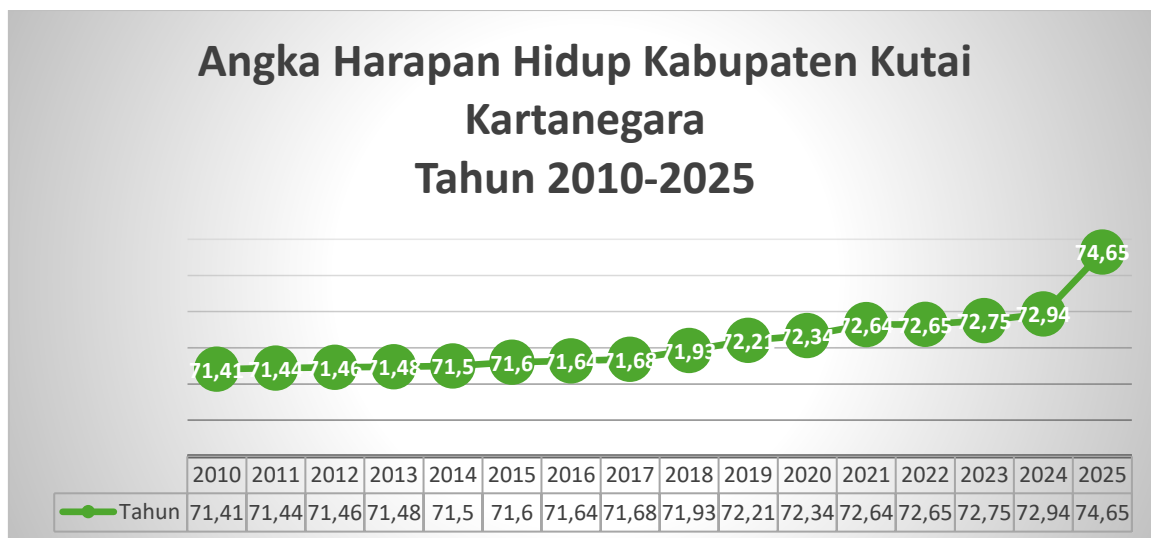
Posbindu Desa Loa Duri Ulu

kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.

Pada tahun 2010 perkiraan rata-rata umur yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 71,41 tahun. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 72,94 tahun pada tahun 2023, dan

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 mencapai 74,65.

**Grafik 18. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara
2010-2025**



Sumber: BPS, 2025

Tabel 44. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD

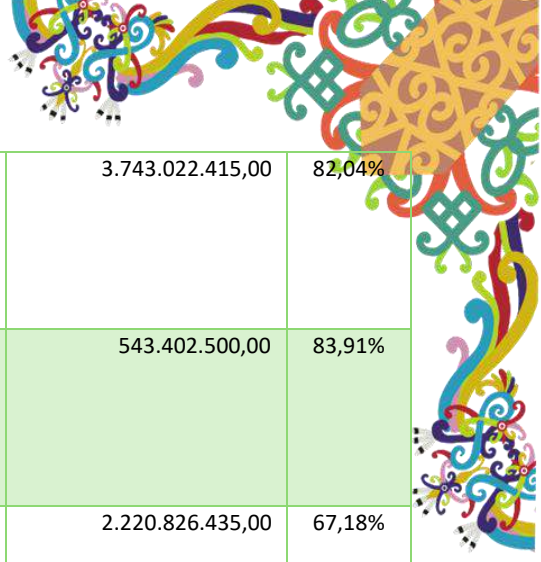
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,81	0,812	0,814	0,841	0,824

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 45. Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	911.801.898.909,00	793.194.009.927,00	639.602.491.842,00	80,64%



2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.500.896.000,00	4.562.285.190,00	3.743.022.415,00	82,04%
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	893.500.000,00	647.615.600,00	543.402.500,00	83,91%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.126.522.000,00	3.305.859.000,00	2.220.826.435,00	67,18%
5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.152.260.000,00	5.254.307.189,00	4.934.905.341,00	93,92%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	45.046.840.000,00	49.113.429.856,00	37.849.928.883,00	77,07%
Total		975.521.916.909,00	856.077.506.762,00	688.894.577.416,00	80,47%

sebesar **80,47%**. Sementara itu, realisasi keuangan sebesar **80,47%** dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai **102,44%** menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya relatif efisien dan sasaran telah mencapai **100%**, efektivitas pencapaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan anggaran mencerminkan bahwa sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai hasil yang hampir sesuai dengan target.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat susah untuk diakses secara merata di seluruh wilayah.
2. Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit-unit layanan Kesehatan masyarakat.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memecahkan permasalahan ini antara lain:

1. Penyediaan fasilitas sarana prasarana Kesehatan sesuai standar yang dilakukan secara bertahap, dengan membangun dan memperbaiki kondisi Bangunan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui beasiswa daerah.
3. Terus meningkatkan penyediaan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada masyarakat.
4. Terhadap kesenjangan SDM Kesehatan, maka dijadwalkan secara rutin kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas-puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Analisis Kinerja Sasaran 6: “Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan**” dengan indikator **Indeks Pembangunan Gender** mencapai **100,63%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 46. Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2024

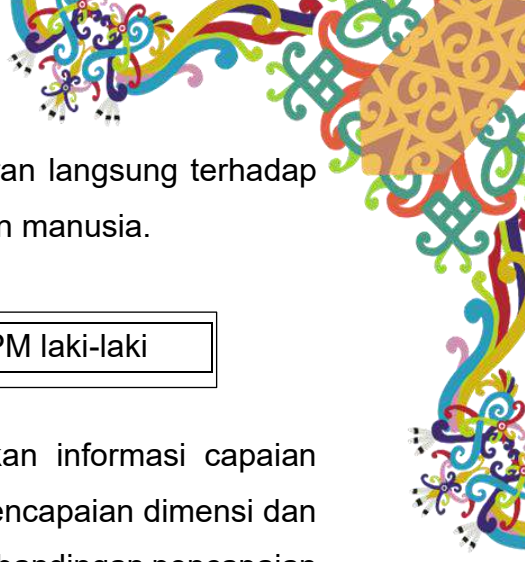
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10	79,60	100,63

)* Data Capaian Tahun 2024

Sumber data: Badan Pusat Statistik

*“Hasil analisis berikut masih menggunakan capaian tahun 2024, karena hingga saat penyusunan laporan ini Badan Pusat Statistik (BPS) belum menerbitkan data **Indeks Pembangunan Gender Kutai Kartanegara tahun 2025**”.*

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode



sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

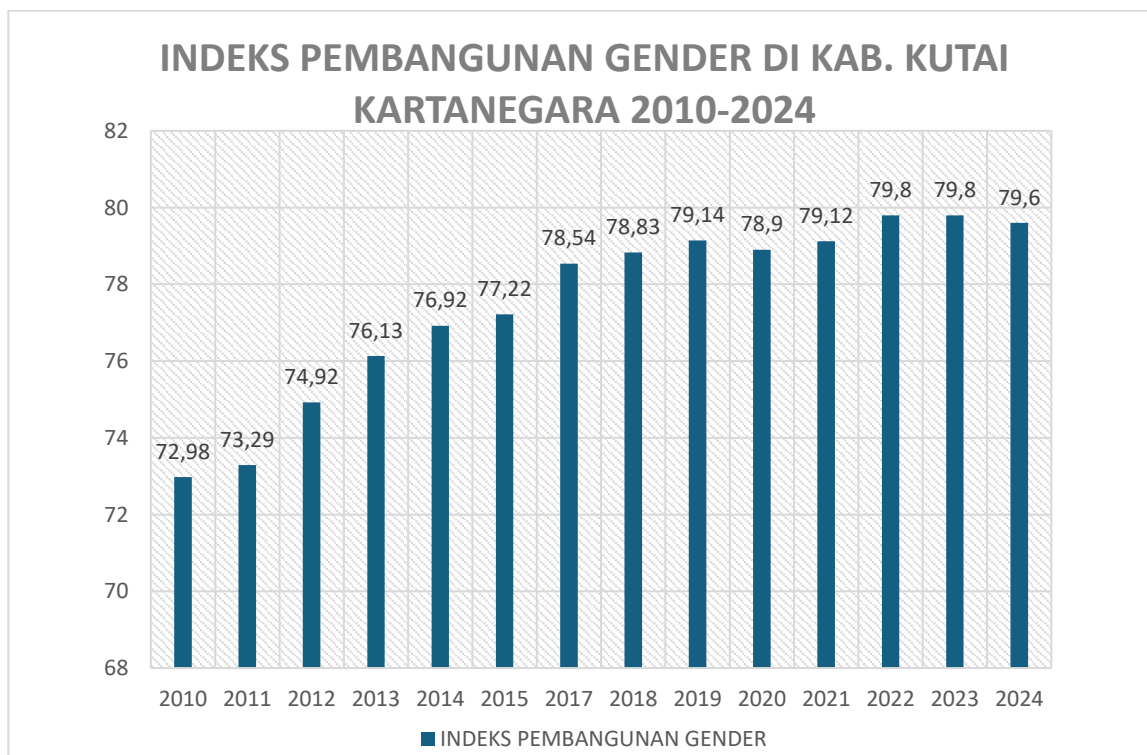
Rumusan: $IPG = IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$

Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Grafik 19. Indeks Pembangunan Gender Kab Kutai Kartaengara Tahun 2010-2024



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 47. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,80	79,80	79,60	*79,60	79,2

Sumber data: Badan Pusat Statistik

*Capaian Tahun 2024, Capaian Tahun 2025 belum diterbitkan oleh BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 48. Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.100.000.000,00	874.299.660,00	818.445.871,00	93,61%
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.100.000.000,00	734.344.020,00	646.217.720,00	88,00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	250.000.000,00	120.731.500,00	120.071.400,00	99,45%
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.541.000.000,00	1.821.120.820,00	1.466.815.925,00	80,54%
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	3.250.000.000,00	1.690.266.179,00	1.488.333.265,00	88,05%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.4.539.884.181,00** dari anggaran sebesar **Rp. 5.240.762.179,00** atau **86,63%**. Perbandingan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dihitung secara akurat. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran yang digunakan merupakan realisasi tahun 2025, sedangkan capaian kinerja yang tersedia masih menggunakan data tahun 2024. Kondisi tersebut terjadi karena data capaian kinerja tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga perhitungan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dilakukan secara tepat.

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai.

Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki landasan hukum yang lebih terbaru dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender telah mengalami perubahan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021, yang mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab Bupati, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Selain itu, guna mendukung implementasi yang lebih konkret, diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang lebih responsif gender. Dengan adanya regulasi yang lebih mutakhir ini, diharapkan kesetaraan dan keadilan gender dapat semakin terwujud dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Analisis Kinerja Sasaran 7: “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat” dengan indikator Indeks Gini dan Indeks Desa Membangun mencapai **98,67%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 49. Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
8	Indeks Gini	Nilai	0,27	0,307*	90,36
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,765	0,781	102,09
Rata-rata Capaian					95

Sumber data: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kemendes Tahun 2025

*Capaian tahun 2024, karena tahun 2025 belum terbit

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:



Indeks Gini

“Hasil analisis berikut masih menggunakan capaian tahun 2024, karena hingga saat penyusunan laporan ini Badan Pusat Statistik (BPS) belum menerbitkan data Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025”.

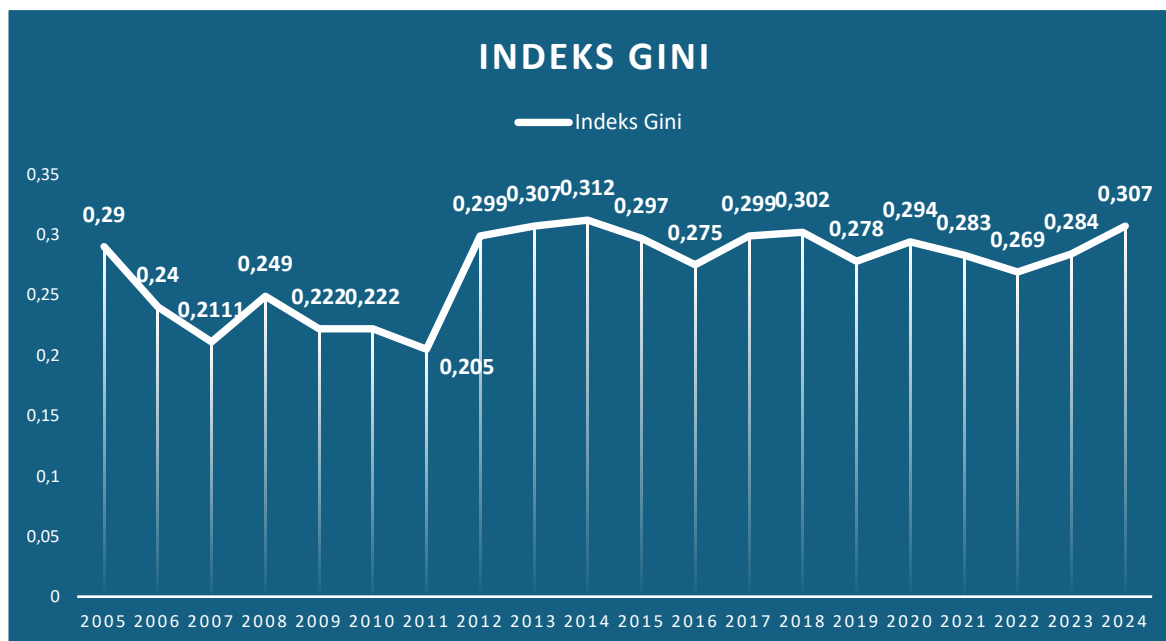
Angka realisasi 2024 Indeks Gini atau Gini Ratio terealisasi sebesar 0,307, angka ini menurun sebesar 0,023 poin dari Tahun 2023 sebesar 0,284. Target tahun 2024 sebesar 0,28 sehingga capaiannya adalah sebesar 90,36 %. Angka tersebut lebih kecil apabila dibandingkan angka Indeks Gini nasional sebesar 0,379 (pada Maret 2024), dan juga lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,310 (data BPS Kalimantan Timur per Maret 2024).

Indeks Gini merupakan tolak ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah; $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Nilai Indeks Gini berkisar 0 hingga 1. Jika mendekati 1 maka ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar. Jika mendekati 0, maka distribusi pendapatan makin merata. Realisasi Indeks Gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kriteria ketimpangan rendah.

Perkembangan gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kondisi yang berfluktuatif. Pada awal periode tahun 2005 gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,290. Menurut Oshima (1976), angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Gini ratio terus menurun meskipun berfluktuatif hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2011 sebesar 0,205. Pada tahun 2012 gini ratio meningkat tajam menjadi 0,299 dan terus meningkat hingga mencapai 0,312 pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara penduduk semakin melebar dibanding kondisi periode 2005-2011. Pada periode berikutnya, 2015 hingga 2016, angka gini ratio sempat turun hingga mencapai 0,275 namun kembali meningkat di tahun 2017 dan 2018. Meskipun sempat turun di tahun 2019 namun karena pandemi Covid-19 angka gini ratio kembali meningkat di tahun 2020. Pada periode 2012 hingga 2021 dapat dikatakan gini ratio cenderung turun melambat meskipun berfluktuatif. Gini ratio tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai angka 0,269 yang menunjukkan kondisi pemerataan yang lebih baik dibanding awal periode tahun

2021, karena mengalami penurunan 0,014, namun meningkat Kembali di Tahun 2023 dengan angka 0,284 hingga pada Tahun 2024.

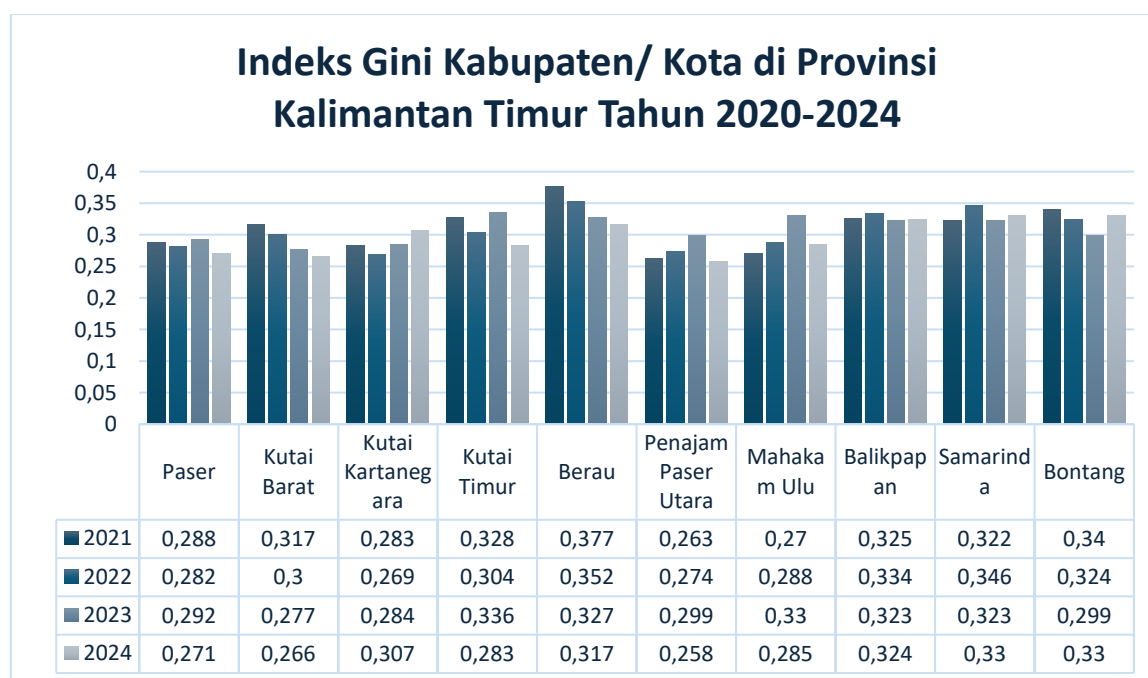
Grafik 20. Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2024



Sumber data: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024, jika dibandingkan dengan Indeks Gini kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 21. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024



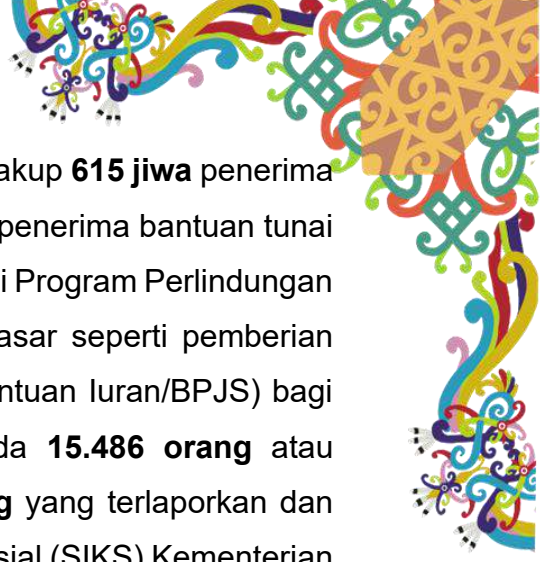
Sumber data: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya rasio gini, pertama yakni kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Hal itu telah menciptakan kemiskinan yang menurun. Kedua, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, bahkan dibawah standar sedangkan pekerja formal memiliki gaji yang terlalu melampaui standar seharusnya. Ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata.

Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menekan tingkat kesenjangan, salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui inovasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK: <https://rbpk.kukarkab.go.id/>) Kutai Kartanegara, agar meningkatkan *Colaboratif Working* antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah desa dan keterlibatan non pemerintah. Beberapa program antara lain Program Sanitasi Aman, Program Yok Baiki Rumah, Program Air Bersih, Program Pondok Pangan Etam. Program Nyaman Be'jukut, Program Pendidikan Keaksaraan Dasar, Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Program Pendidikan Kesetaraan Paket A s/d C, Program Bantuan Alat Bantu Aksesibilitas, Program Bantuan Pangan. Melalui program-program ini nantinya diharapkan bisa mencapai Kemiskinan 0% pada tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dibutuhkan kolaborasi semua stakeholder serta meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam pengentasan kemiskinan.

Selain itu, program jaring pengaman sosial juga akan sangat mempengaruhi penurunan gini ratio. Melalui Program Rehabilitasi Sosial, Pemda Kutai Kartanegara telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi di luar panti, sebanyak **1.388 orang** atau tercapai **100%**





dari yang ditargetkan pada Tahun 2024. Bantuan ini mencakup **615 jiwa** penerima bantuan permakanan kemiskinan ekstrem serta **773 jiwa** penerima bantuan tunai bagi lansia, disabilitas, dan anak telantar. Selain itu, melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberian pangan, sandang, dan layanan kesehatan (Penerima Bantuan Iuran/BPJS) bagi masyarakat miskin non-potensial telah diberikan kepada **15.486 orang** atau **98,18%** dari target 2024 sebesar **96%** dari **15.786 orang** yang dilaporkan dan terdata dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai dengan bulan Desember 2024. Di samping itu, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kutai Kartanegara mencapai **10.920 keluarga penerima manfaat (KPM)**, serta bantuan pangan dari Program Sembako yang menjangkau **15.486 KPM**.

Program ini tidak hanya memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi juga mendukung target **Universal Health Coverage (UHC)** di Kutai Kartanegara, yang kini telah mencapai **98,18%** dari total penduduk, memastikan hampir seluruh warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, Pemkab Kutai Kartanegara juga terus memperbaiki akurasi data penerima manfaat dengan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala agar bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, upaya pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui bantuan usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) dan program *graduasi* KPM PKH, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat agar tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Dengan kombinasi bantuan sosial dan program pemberdayaan, diharapkan angka kemiskinan di Kutai Kartanegara terus mengalami penurunan secara signifikan.

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu:

- a) **Indeks Ketahanan Sosial**, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman
- b) **Indeks Ketahanan Ekonomi**, meliputi Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah

c) **Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan**, meliputi Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Adapun Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

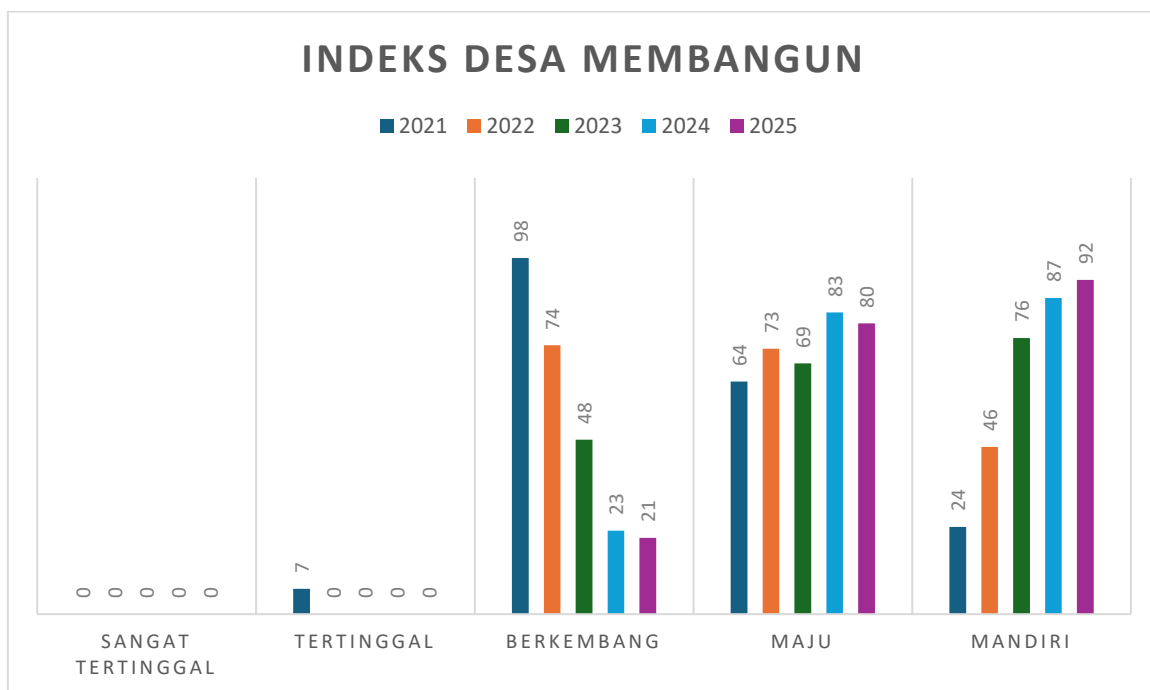
Tabel 50. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

NO	KECAMATAN	TOTAL	JUMLAH DESA					
			MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TIDAK TERIDENTIFIKASI
1	ANGGANA	8	3	4	1	0	0	0
2	KEMBANG JANGGUT	11	6	4	1	0	0	0
3	KENOHAN	9	1	5	3	0	0	0
4	KOTA BANGUN	11	3	6	2	0	0	0
5	KOTA BANGUN DARAT	10	1	7	2	0	0	0
6	LOA JANAN	8	7	1	0	0	0	0
7	LOA KULU	15	11	4	0	0	0	0
8	MARANG KAYU	11	3	6	2	0	0	0
9	MUARA BADAK	13	8	4	1	0	0	0

NO	KECAMATAN	TOTAL	JUMLAH DESA					
			MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TIDAK TERIDENTIFIKASI
10	MUARA KAMAN	20	9	9	2	0	0	0
11	MUARA MUNTAI	13	12	1	0	0	0	0
12	MUARA WIS	7	3	4	0	0	0	0
13	SAMBOJA	3	0	3	0	0	0	0
14	SAMBOJA BARAT	1	0	1	0	0	0	0
15	SEBULU	14	8	3	3	0	0	0
16	TABANG	19	1	14	4	0	0	0
17	TENGGARONG	2	0	2	0	0	0	0
18	TENGGARONG SEBERANG	18	16	2	0	0	0	0
TOTAL		193	92	80	21	0	0	0

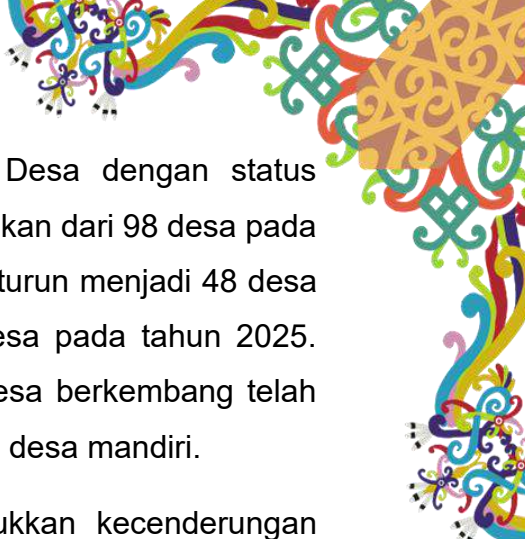
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2025

Grafik 22. Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2025

Grafik Indeks Desa Membangun menunjukkan perkembangan status desa di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021 hingga 2025 yang secara umum mengalami peningkatan kualitas pembangunan desa. Pada periode tersebut tidak terdapat desa dengan status sangat tertinggal. Sementara itu, desa dengan status tertinggal yang pada tahun 2021 masih berjumlah 7 desa, sejak tahun 2022 hingga 2025 sudah tidak ada lagi. Kondisi ini menunjukkan adanya



perbaiki status desa ke kategori yang lebih tinggi. Desa dengan status berkembang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 98 desa pada tahun 2021 menjadi 74 desa pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 48 desa pada tahun 2023, 23 desa pada tahun 2024, dan 21 desa pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar desa berkembang telah mengalami peningkatan status menjadi desa maju maupun desa mandiri.

Di sisi lain, jumlah desa dengan status maju menunjukkan kecenderungan meningkat dari 64 desa pada tahun 2021 menjadi 73 desa pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 69 desa pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi 83 desa pada tahun 2024, dan berada pada angka 80 desa pada tahun 2025. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada desa dengan status mandiri yang terus bertambah setiap tahunnya, yaitu dari 24 desa pada tahun 2021 menjadi 46 desa pada tahun 2022, meningkat menjadi 76 desa pada tahun 2023, kemudian 87 desa pada tahun 2024, dan mencapai 92 desa pada tahun 2025. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kemajuan yang cukup baik, ditandai dengan berkurangnya desa pada kategori status rendah serta meningkatnya jumlah desa dengan status maju dan mandiri.

Capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Status Indeks Desa menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, memiliki total 193 desa dengan skor nilai Indeks Desa sebesar 0,781 atau 78,10 persen yang menempatkan Kabupaten Kutai Kartanegara pada status Indeks Desa “Maju”. Adapun rincian status desa pada tahun 2025 terdiri dari 92 desa berstatus mandiri, 80 desa berstatus maju, 21 desa berstatus berkembang, serta tidak terdapat desa dengan status tertinggal maupun sangat tertinggal.

Penetapan status desa pada Tahun 2025 juga mengalami perubahan sistem penilaian. Jika sebelumnya penilaian menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan tiga dimensi utama yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), maka pada Tahun 2025 penilaian status desa menggunakan Indeks Desa (ID) yang mencakup enam dimensi penilaian, yaitu Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Perubahan ini

bertujuan untuk memberikan pengukuran yang lebih komprehensif terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 51. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	0,284	0,307	0,307*	0,27
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,747	0,776	0,7969	0,781	0,785

Sumber data: BPS dan Kemendes 2025

*Data tahun 2024, capaian 2025 belum terbit

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 52. Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.300.000.000,00	353.909.340,00	295.344.095,00	83,45%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	46.100.000.000,00	34.334.168.300,00	24.112.309.280,00	70,23%
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	12.043.060.000,00	11.870.272.000,00	10.021.446.138,00	84,42%
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.750.000.000,00	2.287.948.100,00	1.922.050.208,00	84,01%

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.150.000.000,00	843.615.000,00	634.656.863,00	75,23%
6	PROGRAM PENATAAN DESA	84.204.248.994,00	67.794.025.068,00	67.243.243.600,00	99,19%
7	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	500.000.000,00	247.808.800,00	130.291.400,00	52,58%
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	23.926.693.870,00	19.521.740.892,00	18.575.651.032,00	95,15%
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	19.096.924.500,00	4.604.672.998,00	3.605.402.103,00	78,30%
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.201.850.000,00	4.888.299.900,00	4.349.637.895,00	88,98%
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.150.000.000,00	3.184.681.946,00	1.983.526.435,00	62,28%
12	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.180.000.000,00	3.381.990.877,00	3.142.575.299,00	92,92%
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	148.885.722.996,00	141.139.425.213,00	126.767.118.950,00	89,82%



Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran peningkatan status desa di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 adalah **Rp.262.783.253.298,00** dari total anggaran sebesar **Rp. 294.452.558.434,00**, atau sekitar **89,24%**. Perbandingan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dihitung secara akurat. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran yang digunakan merupakan realisasi tahun 2025, sedangkan capaian kinerja yang tersedia masih menggunakan data tahun 2024. Kondisi tersebut terjadi karena data capaian kinerja tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga perhitungan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dilakukan secara tepat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. **Tersedianya pendamping desa** baik dari Kementerian Desa maupun Kabupaten yang membantu dalam pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi aset lokal desa. Keberadaan pendamping ini berperan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah desa serta mendorong sinergi program pembangunan antar sektor.
2. **Kesadaran pemerintah desa terkait peningkatan status desa** semakin meningkat, didorong oleh adanya reward dari pemerintah pusat bagi desa yang berhasil mencapai status **Desa Mandiri**. Selain itu, ketersediaan anggaran pembangunan yang memadai juga menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian target pembangunan desa.
3. **Program jaring pengaman sosial yang efektif**, seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat, turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan status desa, serta mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Kutai Kartanegara.
4. **Masih terdapat tantangan di tingkat desa**, seperti kekhawatiran sebagian kepala desa terhadap pengurangan alokasi anggaran jika status desa meningkat. Hal ini menyebabkan beberapa desa enggan meningkatkan statusnya meskipun sebenarnya telah memenuhi kriteria untuk naik ke kategori **Maju atau Mandiri**.

5. **Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas** tetap menjadi tantangan, terutama dalam pemerataan pembangunan. Beberapa desa masih mengalami keterbatasan akses terhadap internet, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang dapat menghambat percepatan pembangunan desa secara merata.
6. **Kurangnya pemahaman sebagian kepala desa dalam pengisian kuisioner penilaian Indeks Desa Membangun (IDM)**, terutama dalam aspek pencatatan kondisi sarana dan prasarana desa, sehingga beberapa desa yang seharusnya dapat naik status tidak dapat memperoleh skor maksimal dalam penilaian.

5. Analisis Kinerja Sasaran 8: “Menurunnya Pengangguran di Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Menurunnya Pengangguran di Masyarakat**” dengan indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB per Kapita** mencapai **113,88%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 53. Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,60	4,40	105
11	PDRB Per Kapita	Nilai	202,16	249,11	123
Rata-rata Capaian					113,88

Sumber: BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator penting yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPT mengukur persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Semakin tinggi angka TPT, semakin besar tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai.

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah di bidang ketenagakerjaan adalah meningkatnya pengangguran. Pengangguran terjadi ketika jumlah

angkatan kerja yang ada, belum atau tidak terserap sepenuhnya oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Seseorang dikatakan bekerja apabila melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Sementara pengangguran mencakup empat kriteria, yaitu mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat besarnya tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT diperoleh dengan membagi antara jumlah pengangguran (penduduk yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan) dengan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran). Ukuran ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap di dalam pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara pengangguran terhadap angkatan kerja, sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Kedua hal tersebut akan selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang, dan sebaliknya jika kesempatan kerja besar berarti TPT akan semakin kecil.

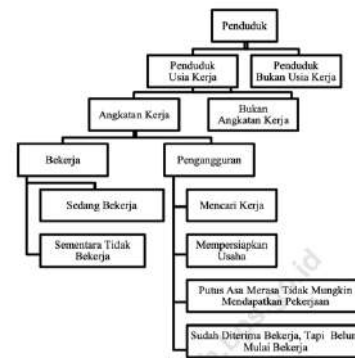
Tabel 54. Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2025

Tahun	Pengangguran	
	Jumlah (orang)	Perubahan (orang)
2010	33980	
2011	23530	-10450
2012	23977	447
2013	22215	-1762
2014	24381	2166
2015	31397	7016
2017	19473	-11924
2018	21361	1888
2019	22607	1246
2020	20497	-2110

2021	21544	1047
2022	15412	-6132
2023	14731	-681
2024	16125	1394
2025	17592	1467

Sumber: BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2025

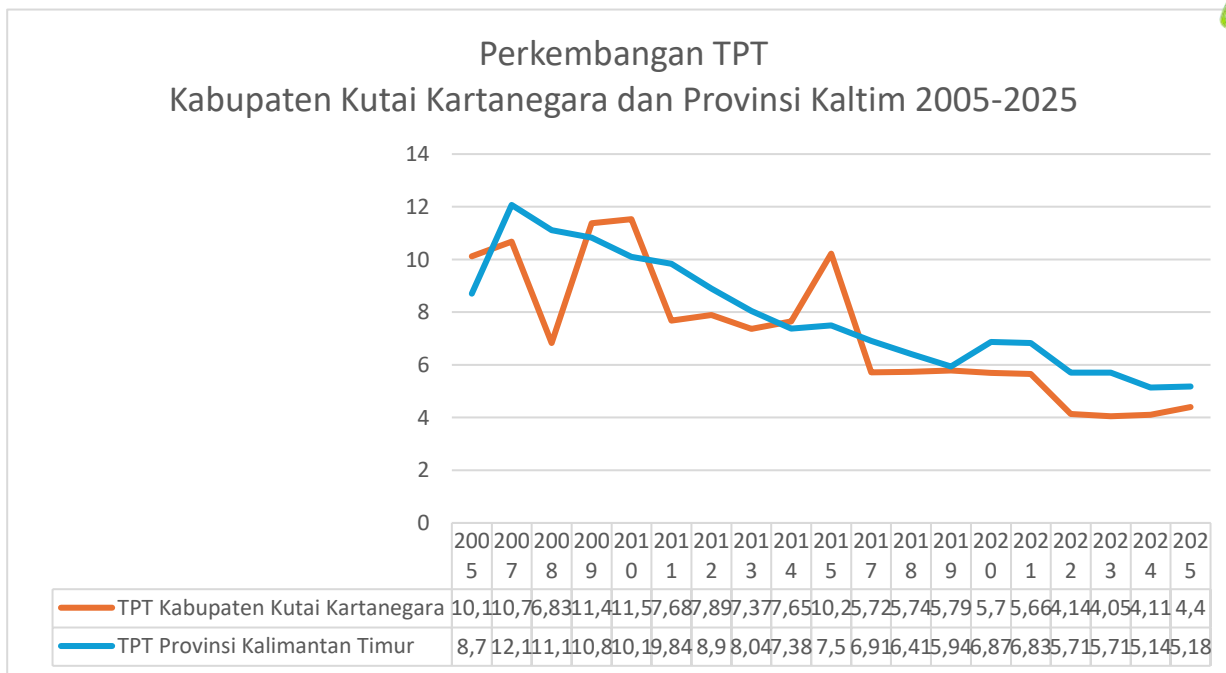
Selama 1 dekade terakhir, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berfluktuasi dengan kecenderungan menurun (lihat tabel 2.3.39). Jumlah pengangguran tercatat berkisar antara 20-35 ribu, dimana jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2010 yang mencapai 33.980 orang, dan di Tahun 2024 merupakan capaian terendah tercatat pada sebanyak 16.125 orang.



Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan

Namun jumlah pengangguran di Tahun 2025 kembali meningkat sebanyak 1.467 orang dibandingkan Tahun 2024, menjadi 17.592 orang. Penduduk yang terkategori sebagai pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers), serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (future starters). Jumlah pengangguran yang juga tercatat cukup tinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 31.397 orang. Perubahan jumlah pengangguran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 2.3.39. Pada tahun 2011, jumlah pengangguran tercatat berkurang sebanyak 10.450 orang dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Kemudian pada tahun 2013 berkurang sebanyak 1.762 orang, tahun 2017 berkurang sebanyak 11.924 orang, dan tahun 2020 juga berkurang sebanyak 2.110 orang. Namun demikian, pada beberapa tahun juga terjadi penambahan jumlah pengangguran meskipun secara angka tidak terlalu besar. Penambahan jumlah pengangguran ini terjadi pada tahun 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 dan 2025. Penambahan pengangguran ini banyak terjadi pada tahun dimana ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi yang kurang baik. Dengan melihat data diatas, maka secara rata-rata, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berkurang sebanyak 1.170 orang setiap tahunnya.

Grafik 23. Perkembangan TPT Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kaltim, 2005-2025



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur data per Agustus 2025



Pelaksanaan Job Fair/ Bursa Kerja Tahun 2025

Sejalan dengan jumlah pengangguran, perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara juga berfluktuasi dengan kecenderungan angka yang relatif rendah, terutama pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2005, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 10,12 persen, lebih

tinggi daripada TPT Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar 8,70 persen. Satu tahun kemudian, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 10,68 persen, lebih rendah dari TPT Provinsi Kalimantan Timur yang melonjak menjadi 12,07 persen. Pada tahun 2008, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara kembali turun cukup drastis mencapai angka 6,83 persen, jauh lebih rendah dari TPT Kalimantan Timur yang sebesar 11,11 persen. Namun pada tahun 2009-2010 dan kemudian tahun 2015, TPT Kutai Kartanegara meningkat cukup tajam, melebihi TPT Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya angka TPT ini tidak terlepas dari fakta bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai magnet bagi para pekerja

pendatang dari luar wilayah. Akibatnya jumlah pencari kerja di Kutai Kartanegara bertambah banyak dan tingkat pengangguran juga meningkat. Beruntungnya, pada periode 2017-2025, rata-rata TPT Kutai Kartanegara tercatat sebesar 4,472 persen.

Grafik 24. Perkembangan TPT Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim, 2021-2025



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

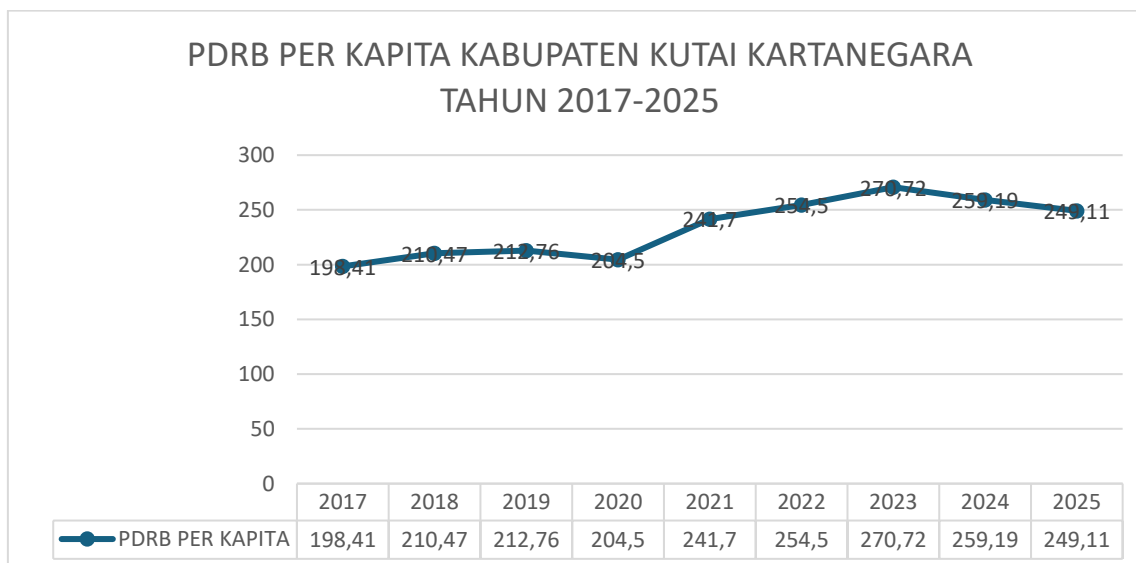
Jika melihat grafik diatas TPT Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan ke 3 (tiga) terendah di antara kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu, dan TPT tertinggi berada di Kota Bontang sebesar 6,36, kemudian Kabupaten Kutai Timur di angka 6,2 dan Kota Balikpapan di 5,84.

PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin besar pula rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap individu di wilayah tersebut.

Berikut ini disajikan data capaian kinerja PDRB Per Kapita:

Grafik 25. PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2025



Sumber: BPS

PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan penurunan pada Tahun 2025 jika dibandingkan Tahun 2024 dari 259,19 juta rupiah di tahun 2024 menjadi 249,11 juta di tahun 2025 atau menurun 10,08 dari Tahun 2024, setelah sebelumnya di Tahun 2024 menurun 11,53 dari Tahun 2023. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama 20 tahun terakhir telah meningkatkan PDRB perkapita penduduk, dari Rp. 113,64 juta rupiah pada Tahun 2005 menjadi Rp. 241,70 juta rupiah pada Tahun 2021 dan meningkat menjadi 270,72 juta rupiah di Tahun 2023. Kendati demikian, masih terdapat gap yang cukup besar antara PDRB perkapita dengan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Hal ini disebabkan salah satunya karena peranan komponen konsumsi rumah tangga di PDRB yang tercatat relatif kecil dengan kontribusi rata-rata kurang dari 10 persen dalam 10 tahun terakhir.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 55. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	5,66	4,14	4,05	4,11	4,4	4,1
11	PDRB Per Kapita	Nilai	241,7	254,5	270,72	259,19	249,11	204,69

Sumber data: BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 56. Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	450.000.000,00	148.167.500,00	123.932.630,00	83,64%
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.003.540.000,00	3.143.833.400,00	2.910.553.348,00	92,58%
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	9.060.000.000,00	6.594.047.540,00	4.566.360.044,00	69,25%
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	11.386.704.000,00	8.848.883.950,00	6.666.718.143,00	75,34%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	26.165.000.000,00	13.851.830.218,00	12.820.224.808,00	92,55%



Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.27.087.788.973,00** dari anggaran sebesar **Rp. 32.586.762.608,00** atau **83,13%**. Realisasi keuangan sebesar 83,13% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **113,88%**, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor pendukung tercapainya Target Tingkat Pengangguran Terbuka :

1. Peningkatan tingkat pendidikan dan pelatihan bersertifikat kompetensi meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja di pasar tenaga kerja.
2. Mendorong wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
3. Kebijakan yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja, melindungi hak pekerja, dan mendorong penciptaan lapangan kerja dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Faktor Penghambat tercapainya Target :

1. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dapat menjadi penghambat. Peningkatan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan industri dapat meninggalkan beberapa pekerja dengan keterampilan yang tidak sesuai.
2. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan di pasar tenaga kerja.
3. Pertumbuhan Jumlah Lulusan Baru (Fresh Graduates). Setiap tahun, Kukar mengalami peningkatan jumlah lulusan dari SMA dan perguruan tinggi yang memasuki angkatan kerja. Banyak dari lulusan baru ini belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja, sehingga menambah angka pengangguran. Fenomena ini terjadi karena proses pencarian pekerjaan oleh lulusan baru belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang sesuai.
4. Pertumbuhan Angkatan Kerja yang Lebih Cepat dari Penyerapan Tenaga Kerja. Meskipun jumlah penduduk yang bekerja meningkat, pertumbuhan angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Kukar meningkat lebih cepat. Hal ini menyebabkan lonjakan TPT karena pasar kerja belum mampu menampung seluruh angkatan kerja baru yang masuk setiap tahunnya.

Selain faktor-faktor tersebut, penelitian di wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa variabel seperti rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan jumlah industri besar sedang memiliki pengaruh signifikan terhadap TPT. Meskipun penelitian ini mencakup wilayah Kalimantan secara umum, faktor-faktor tersebut kemungkinan juga mempengaruhi TPT di Kukar.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kutai Kartanegara.

9. Analisis Kinerja Sasaran 9: “Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah” dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai **149%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 57. Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	7,05	10,47	149%

Sumber data: BPS: Data Diolah Tahun 2025

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian secara luas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mendorong pertumbuhan sektor pertanian dengan target RPJMD 2025 sebesar 7,05%. Dengan Realisasi pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2025 mencapai 10,47%, atau 149% dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, laju pertumbuhan sektor ini mencapai 10,47%, mengalami peningkatan sebesar 256,12% dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 2,94%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pertumbuhan sektor ini hanya

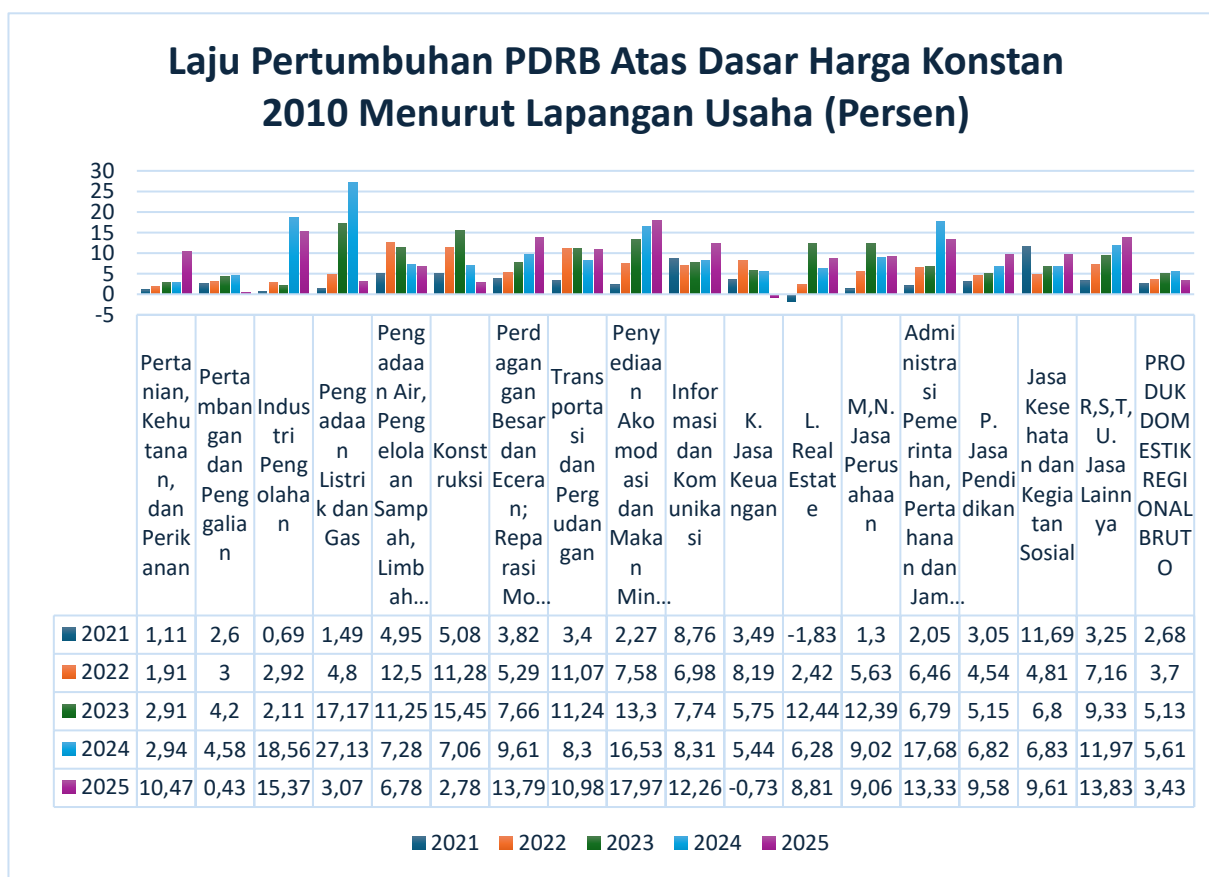


meningkat 256,12% dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan melampaui target yang ditetapkan.

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah, dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, pada tahun-tahun sebelumnya cenderung belum mencapai target yang ditetapkan sehingga memperoleh predikat “Kurang Berhasil”. Meskipun demikian, pada tahun 2025 terjadi lonjakan pertumbuhan yang signifikan, di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keberhasilan ini menjadi indikasi bahwa potensi sektor pertanian di Kutai Kartanegara mulai dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Walaupun struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor migas dan batubara sebagai sektor unggulan, namun pada tahun 2025, sektor pertanian mengungguli sektor migas dan batubara, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peluang yang semakin besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian daerah kedepannya.

Grafik 26. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2025



Sumber data: BPS 2025

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 58. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,02	1,91	2,91	2,94	10,47	7,5

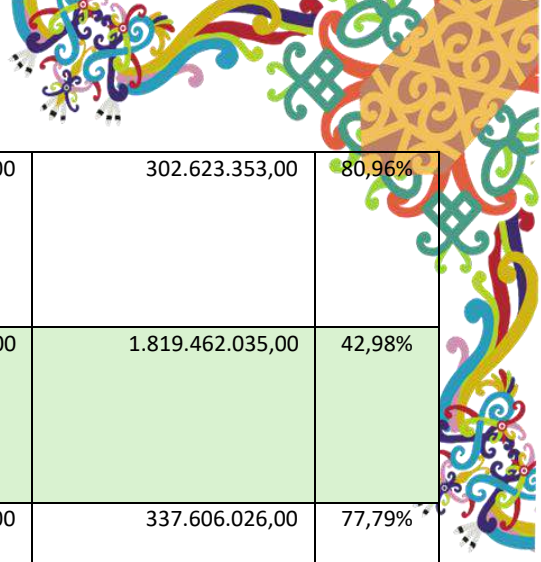
Sumber data: BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 59. Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	690.000.000,00	605.974.921,00	507.501.164,00	83,75%
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1.125.000.000,00	684.875.600,00	574.408.790,00	83,87%
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	300.000.000,00	76.577.169,00	29.573.900,00	38,62%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.300.000.000,00	720.122.937,00	482.908.054,00	67,06%
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	126.083.260.000,00	99.066.555.727,00	79.627.172.998,00	80,38%
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	341.104.750.000,00	312.248.408.597,00	296.736.954.047,00	95,03%
7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.925.000.000,00	8.799.487.110,00	3.974.514.812,00	45,17%
8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	15.526.000.000,00	10.148.873.360,00	8.150.832.512,00	80,31%
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	111.624.685.000,00	89.836.922.830,00	64.844.378.736,00	72,18%

10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	83.087.103.950,00	68.349.106.007,00	53.579.839.493,00	78,39%
11	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.075.000.000,00	755.793.620,00	726.659.040,00	96,15%
12	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.450.000.000,00	1.974.869.300,00	623.604.987,00	31,58%
13	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.600.000.000,00	748.707.200,00	332.176.872,00	44,37%
14	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	17.319.400.000,00	12.523.192.483,00	9.635.964.125,00	76,94%
15	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	205.000.000,00	139.592.000,00	99.103.760,00	71,00%
16	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	21.155.000.000,00	13.390.289.600,00	11.159.949.686,59	83,34%
17	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.595.000.000,00	1.831.236.800,00	1.395.491.127,00	76,20%
18	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.420.000.000,00	940.498.200,00	913.006.861,00	97,08%
19	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	985.000.000,00	551.900.600,00	323.396.800,00	58,60%



20	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	685.000.000,00	373.792.600,00	302.623.353,00	80,96%
21	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	26.865.000.000,00	4.232.906.991,00	1.819.462.035,00	42,98%
22	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	790.000.000,00	433.998.800,00	337.606.026,00	77,79%
23	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	650.000.000,00	131.386.100,00	68.939.625,00	52,47%
24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	750.000.000,00	350.151.560,00	209.811.950,00	59,92%
Total		803.310.198.950,00	628.915.220.112,00	536.455.880.753,59	85,30%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut mencapai **Rp.536.455.880.753,59** dari total anggaran sebesar **Rp.628.915.220.112,00** atau sekitar **85,30%**. Namun, capaian kinerja sasaran hanya mencapai **149%**, yang menunjukkan penggunaan sumber daya yang Efisien. Hal ini disebabkan oleh tercapainya target sasaran secara penuh, sementara alokasi dana yang digunakan relatif rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

10. Analisis Kinerja Sasaran 10: “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah**” dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata mencapai **229,53%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 60. Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42	7,85	229,5322

)* menggunakan data capaian Tahun sebelumnya (2024)

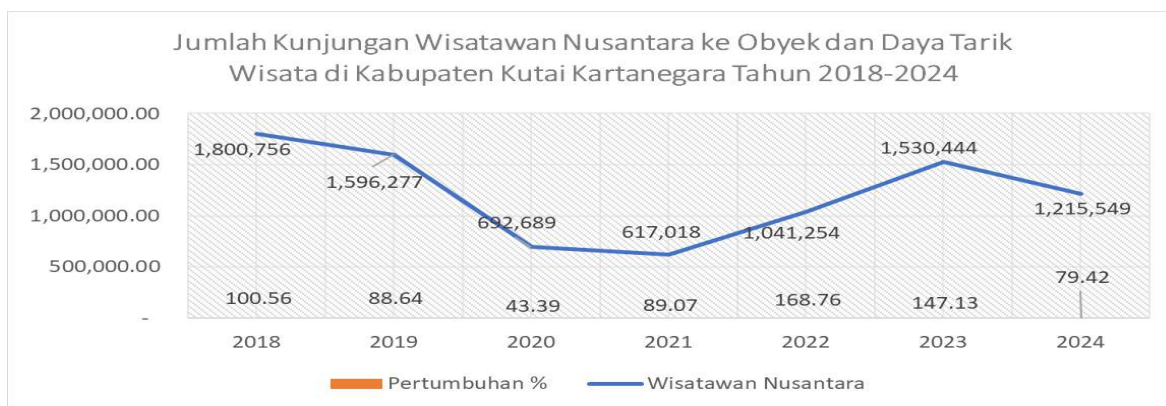
“Data kajian yang digunakan pada analisis ini merupakan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024. Sementara itu, untuk tahun 2025 data kajian belum tersedia. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2025 kegiatan kajian yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga Badan Riset dan Inovasi Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan kajian sebagaimana direncanakan”

Berdasarkan data terbaru, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, tercatat 1.041.886 kunjungan, yang kemudian meningkat menjadi 1.500.126 kunjungan pada tahun 2023, menunjukkan kenaikan sebesar 458.240 wisatawan.

Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 1.215 kunjungan.

Peningkatan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendorong sektor pariwisata sebagai pemicu transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, diharapkan percepatan perekonomian daerah dapat tercapai.

Grafik 27. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



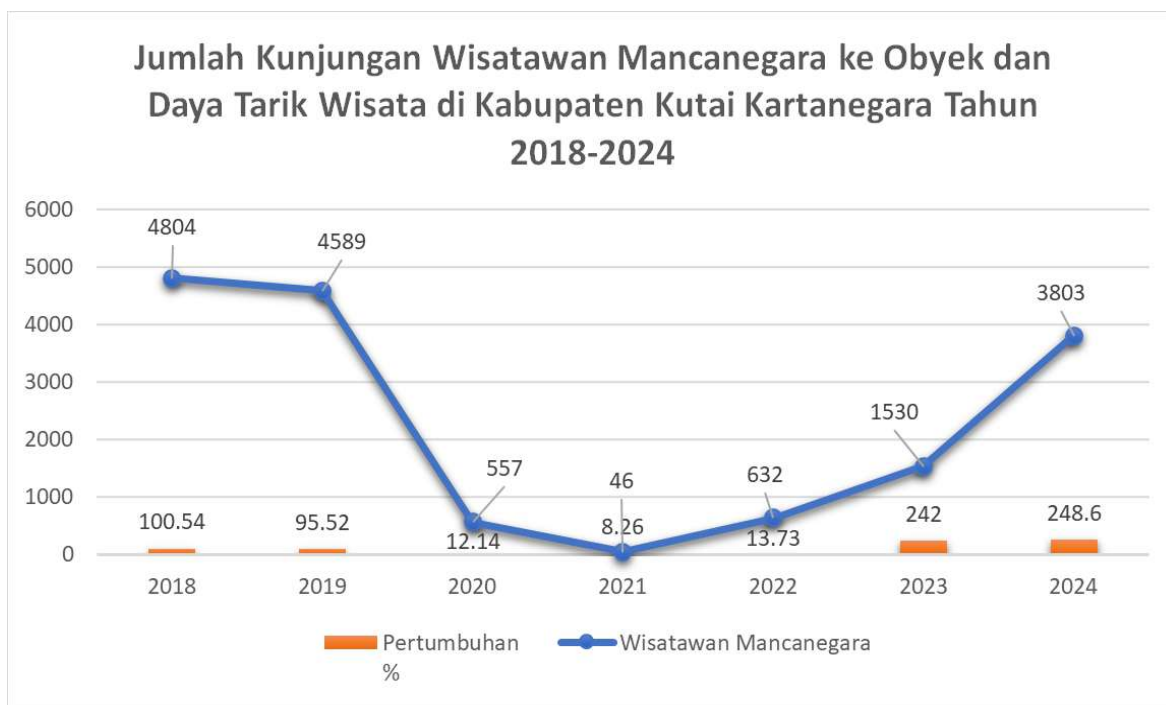
Sumber data: BPS Kutai Kartanegara 2018-2024

Grafik tersebut menampilkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan nusantara mencapai 1.800.756 orang, namun mengalami penurunan menjadi 1.596.277 orang pada tahun 2019. Penurunan semakin tajam terjadi pada tahun 2020, di mana jumlah wisatawan anjlok hingga 692.689 orang, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan masih rendah di angka 617.018 orang.

Namun, sektor pariwisata mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2022 dengan jumlah wisatawan meningkat menjadi 1.041.254 orang, lalu melonjak lebih tinggi lagi menjadi 1.530.444 orang pada tahun 2023. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 1.215.549 orang. Persentase pertumbuhan wisatawan juga mencerminkan tren ini, dengan angka tinggi pada 2018 (100,56%) dan 2019 (88,64%) yang turun drastis pada 2020 (43,39%). Namun, pemulihan signifikan terjadi pada 2022 (168,76%) dan 2023 (147,13%), sebelum kembali turun pada 2024 (79,42%).

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pariwisata domestik di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan signifikan selama pandemi, tetapi mampu bangkit dengan peningkatan kunjungan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih mengalami fluktuasi pada 2024.

Grafik 28. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



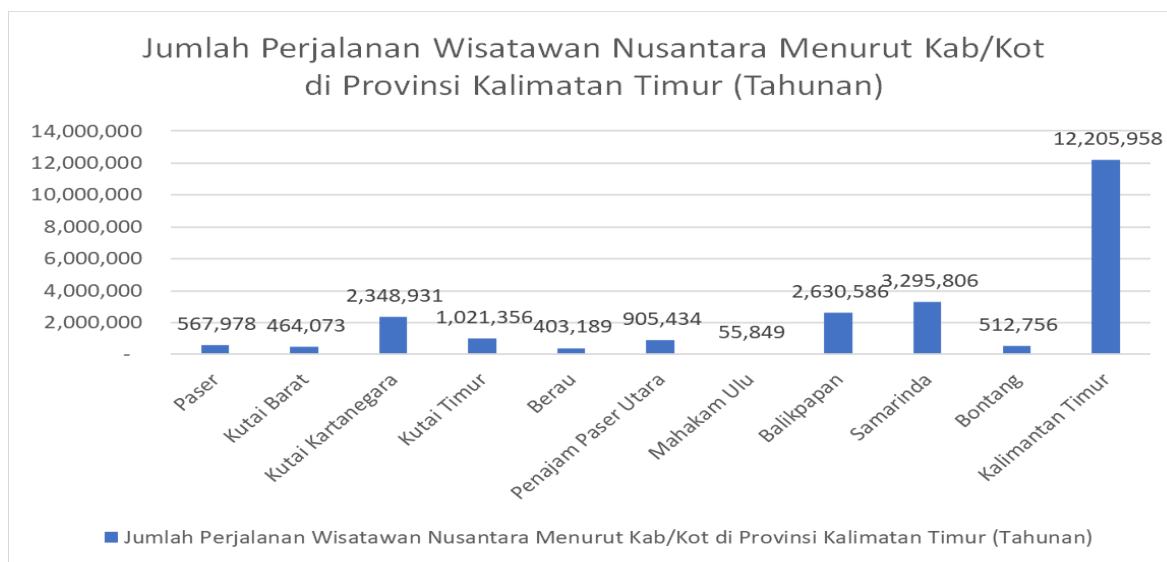
Sumber: Dinas Pariwisata Tahun 2024

Grafik tersebut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan mencapai 4.804 orang, kemudian sedikit menurun menjadi 4.589 orang pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 dengan hanya 557 wisatawan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Penurunan semakin tajam pada tahun 2021, di mana jumlah wisatawan hanya mencapai 46 orang.

Setelah itu, jumlah wisatawan mulai menunjukkan tanda pemulihan, naik menjadi 632 orang pada tahun 2022 dan meningkat lebih lanjut menjadi 1.530 orang pada tahun 2023. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah wisatawan mencapai 3.803 orang. Tren pertumbuhan tahunan juga mencerminkan fluktuasi ini, di mana angka pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2018 dan 2019 (100,54% dan 95,52%) mengalami penurunan drastis selama pandemi (12,14% pada 2020 dan 8,26% pada 2021). Namun, pertumbuhan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2023 (242%) dan 2024 (248,6%), mencerminkan pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami dampak besar akibat pandemi, tetapi mulai pulih dengan peningkatan jumlah wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun sebagai Faktor Pembanding Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota Tujuan sebagai Berikut:

Grafik 29. Jumlah Perjalanan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber: BPS Kalimantan Timur 2024

Berdasarkan data jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan daya tarik wisata yang cukup kuat dengan mencatatkan 2.348.931 perjalanan wisatawan dalam setahun. Angka ini menjadikan Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah dengan jumlah wisatawan terbesar di provinsi tersebut, bersaing ketat dengan Kota Balikpapan yang mencatatkan 2.630.538 perjalanan dan Kota Samarinda dengan 3.295.806 perjalanan. Jumlah wisatawan di Kutai Kartanegara juga jauh melampaui beberapa daerah lainnya seperti Kutai Timur (1.021.356), Berau (403.189), dan Bontang (512.756). Data ini menunjukkan bahwa Kutai Kartanegara memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan mampu bersaing dengan kota-kota besar di Kalimantan Timur. Jika dikelola dengan baik, daerah ini berpotensi untuk terus meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi wisata utama di provinsi ini.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 61. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	6,6	7,85	7,85	4,23

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 62. Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2025

N O	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	17.776.894.000,00	12.246.293.472,00	9.414.996.423,00	76,88%
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	24.265.000.000,00	21.102.949.975,00	18.887.767.996,00	89,50%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.200.000.000,00	891.365.853,00	831.444.976,00	93,28%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar **Rp. 29.134.209.395,00** dari total anggaran **Rp. 34.240.609.300,00** atau setara dengan **85,09%**. Perbandingan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dihitung secara akurat. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran yang digunakan merupakan realisasi tahun 2025, sedangkan capaian kinerja yang tersedia masih menggunakan data tahun 2024. Kondisi tersebut terjadi karena data capaian kinerja tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga perhitungan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dilakukan secara tepat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata, yang berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata. Selain itu, pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terus meningkat menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Kartanegara semakin siap dalam mengelola sektor pariwisata serta menerima kunjungan wisatawan.

11. Analisis Kinerja Sasaran 11: “Berkembangnya Ekosistem Kreatif”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Berkembangnya Ekosistem Kreatif**” dengan indikator **Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif** mencapai **117,55%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

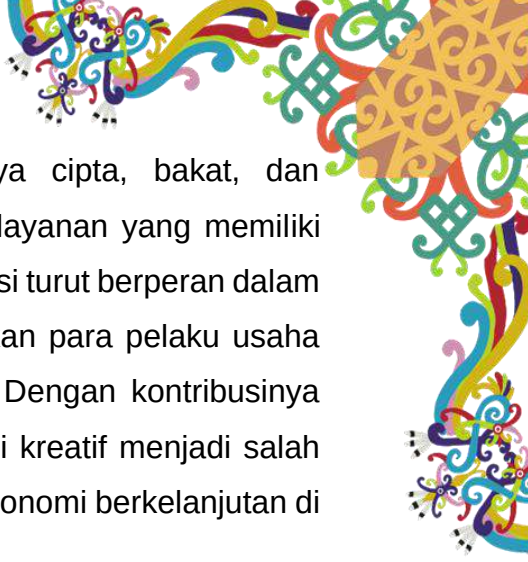
Tabel 63. Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,55	7,70	117,5573

“Data kajian yang digunakan pada analisis ini merupakan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024. Sementara itu, untuk tahun 2025 data kajian belum tersedia. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2025 kegiatan kajian yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga Badan Riset dan Inovasi Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan kajian sebagaimana direncanakan”.

Dengan demikian, analisis yang disajikan dalam laporan ini masih menggunakan data hasil kajian tahun 2024. Diharapkan pada tahun berikutnya kegiatan kajian dapat kembali dilaksanakan sehingga data yang lebih mutakhir dapat tersedia untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang berbasis pada kreativitas, ide, dan inovasi sebagai faktor utama dalam menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi ini mencakup berbagai sektor, seperti seni pertunjukan, desain, musik, film, kuliner, fesyen, hingga pengembangan perangkat lunak dan digital. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dimanfaatkan bukan hanya

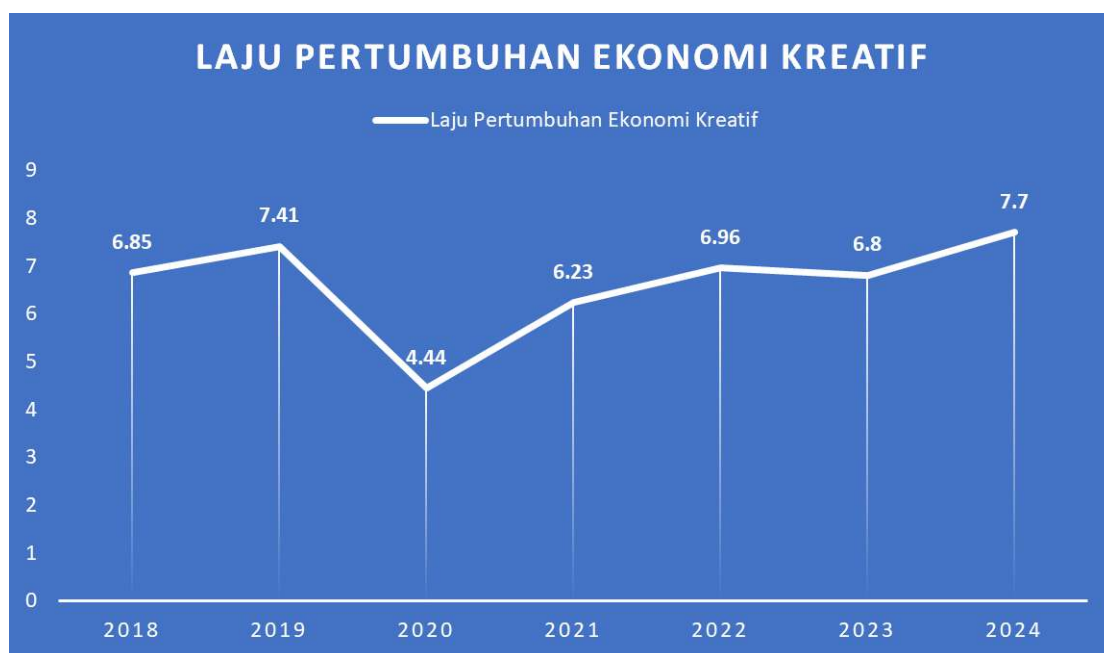


bahan mentah atau modal finansial, tetapi juga daya cipta, bakat, dan keterampilan manusia dalam menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Perkembangan teknologi dan digitalisasi turut berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif, memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara global. Dengan kontribusinya terhadap inovasi dan penciptaan lapangan kerja, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Laju pertumbuhan ekonomi kreatif adalah tingkat perubahan atau peningkatan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat sektor ekonomi kreatif berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian suatu daerah atau negara. Pertumbuhan ini dapat dihitung berdasarkan peningkatan nilai tambah bruto (NTB) dari industri kreatif, jumlah tenaga kerja yang terlibat, serta perkembangan subsektor ekonomi kreatif seperti seni pertunjukan, desain, musik, film, kuliner, dan teknologi digital.

Laju pertumbuhan ekonomi kreatif dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inovasi, teknologi, kebijakan pemerintah, permintaan pasar, serta keterampilan sumber daya manusia. Jika angka pertumbuhannya meningkat, berarti sektor ekonomi kreatif semakin berkembang dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya saing produk kreatif, serta kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah atau nasional. Sebaliknya, jika laju pertumbuhan mengalami penurunan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menghambat perkembangan sektor kreatif agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Grafik 30 . Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018-2024, terlihat adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2018, sektor ekonomi kreatif tumbuh sebesar **6,85%**, menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan ini semakin meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai **7,41%**, yang didorong oleh peningkatan investasi, penguatan program ekonomi kreatif, serta berbagai kegiatan promosi dan festival daerah yang mendukung para pelaku usaha kreatif. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan hingga **4,44%**, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pembatasan sosial, penutupan tempat usaha, serta berkurangnya mobilitas masyarakat menjadi faktor utama yang memperlambat aktivitas ekonomi kreatif selama periode tersebut. Berbagai subsektor seperti seni pertunjukan, event organizer, dan industri pariwisata kreatif sangat terdampak akibat pembatasan kegiatan fisik.

Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali dengan laju pertumbuhan sebesar **6,23%**. Hal ini didorong oleh adaptasi para pelaku usaha kreatif terhadap digitalisasi, seperti penjualan produk secara daring, pemanfaatan media sosial, serta berbagai program dukungan yang diberikan untuk mendorong pemulihan usaha kreatif. Tren pemulihan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan mencapai **6,96%**, menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah berhasil bangkit dari dampak pandemi.

Pada tahun 2023, pertumbuhan sedikit mengalami penurunan menjadi **6,8%**, yang masih menunjukkan stabilitas dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor yang memengaruhi sedikit penurunan ini adalah adanya tantangan baru seperti persaingan yang semakin ketat, inflasi, serta perubahan tren konsumsi masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk kreatif. Meskipun demikian, secara keseluruhan, sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan daya tahan yang cukup kuat dan terus mengalami perkembangan positif seiring dengan berbagai program dan inovasi yang terus dilakukan. Namun di Tahun 2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat menjadi 7,7.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 64. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	6,8	7,7	7,48	7,56

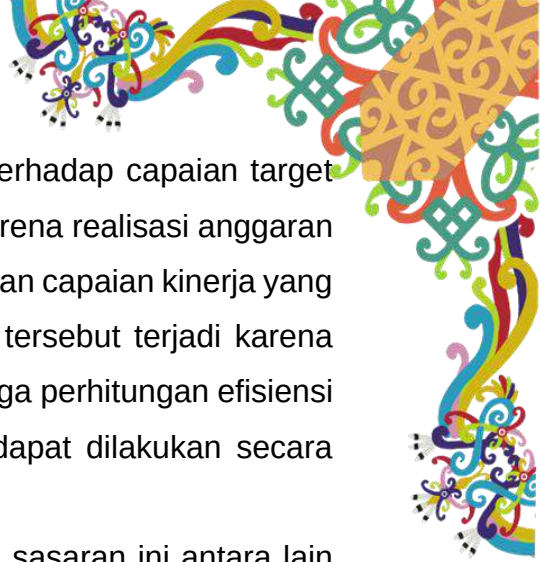
Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 65. Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	17.100.000.000,00	11.150.570.820,00	8.410.796.568,00	75,43%
Total		17.100.000.000,00	11.150.570.820,00	8.410.796.568,00	75,43%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp.8.410.796.568,00** dari total anggaran **Rp. 11.150.570.820,00** atau sebesar



75,43%. Perbandingan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dihitung secara akurat. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran yang digunakan merupakan realisasi tahun 2025, sedangkan capaian kinerja yang tersedia masih menggunakan data tahun 2024. Kondisi tersebut terjadi karena data capaian kinerja tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga perhitungan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dilakukan secara tepat.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran ini antara lain peran aktif generasi muda, ketersediaan tenaga kerja yang mendukung, serta terbukanya peluang bagi mereka untuk berkreasi. Kemajuan teknologi, kemudahan akses komunikasi, serta perkembangan media sosial juga menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan Ekosistem Kreatif. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sebagai indikator utama perkembangan sektor tersebut.

12. Analisis Kinerja Sasaran 12: “Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah**” dengan indikator **Tingkat Pertumbuhan Investasi** mencapai **-1239%** dan termasuk predikat “**Kurang Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 66. Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,77	-21,93	-1239%

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Di Tahun 2025 target Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi RPJMD sebesar 1,77%, Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2025 mencapai Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar -21,93%, capaian sangat jauh dari target dan jauh lebih kecil dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 10,85%.

Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi adalah :

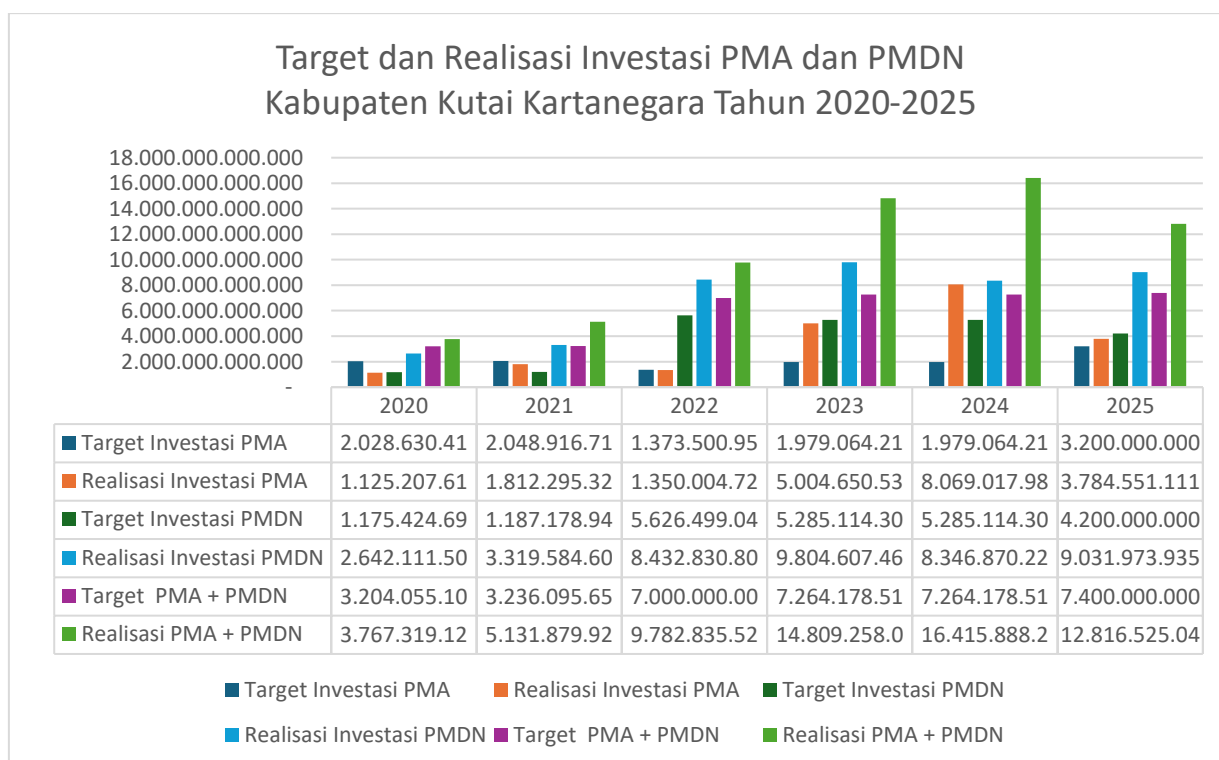
$$\text{Tingkat Pertumbuhan Investasi} = \frac{(\text{Jumlah Investasi Tahun } n - \text{Jumlah Investasi } n-1) \text{ di Kabupaten/ Kota}}{\text{Jumlah Investasi } n-1 \text{ di Kabupaten/ Kota}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Investasi} = \frac{12.816.525.047.627 - 16.415.888.215.433}{16.415.888.215.433} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Investasi} = -21,93\%$$

Berikut disajikan Perhitungan Target, Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2025 :

Grafik 31. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025



Nilai Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 sebesar Rp.12.816.525.047.627, lebih rendah Rp. 3.599.363.167.806, dibandingkan realisasi investasi Tahun 2023 yang mencapai nilai Rp. Rp. 16.415.888.215.433.

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan investasi Tahun 2025, tingkat pertumbuhan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar -21,93%. Capaian ini menunjukkan adanya penurunan realisasi investasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan melemahnya minat investasi, melainkan lebih dipengaruhi oleh struktur investasi yang bersifat siklis. Pada tahun sebelumnya terdapat realisasi investasi dalam skala besar, khususnya dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersifat proyek strategis dan tidak berulang setiap tahun. Dengan selesainya proyek-proyek tersebut, pada tahun berjalan tidak terdapat investasi baru dengan nilai yang setara sehingga berdampak pada kontraksi pertumbuhan investasi.

Secara fundamental, iklim investasi Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki daya tarik yang kuat, didukung oleh keberadaan kebijakan insentif penanaman modal, layanan investasi melalui Mal Pelayanan Publik, komitmen pemerintah daerah dalam percepatan investasi, serta posisi strategis wilayah yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, potensi sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur dasar, serta meningkatnya kebutuhan kawasan mitra IKN tetap menjadi faktor yang menarik bagi investor.

Namun demikian, penurunan pertumbuhan investasi turut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penurunan realisasi PMA akibat selesainya proyek-proyek besar pada periode sebelumnya
2. Siklus investasi sektor ekstraktif yang bersifat fluktuatif
3. Perubahan kondisi global seperti nilai tukar dan biaya logistic
4. Aktivitas promosi investasi yang belum optimal
5. Ketergantungan pada sektor investasi tradisional
6. Pipeline investasi baru yang belum terbentuk secara kuat

Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan investasi mengalami kontraksi pada tahun pelaporan, kondisi iklim investasi daerah tetap kondusif. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat diversifikasi sektor

investasi, optimalisasi promosi, serta peningkatan kemudahan pelayanan perizinan guna mendorong pertumbuhan investasi yang lebih stabil.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 67. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD

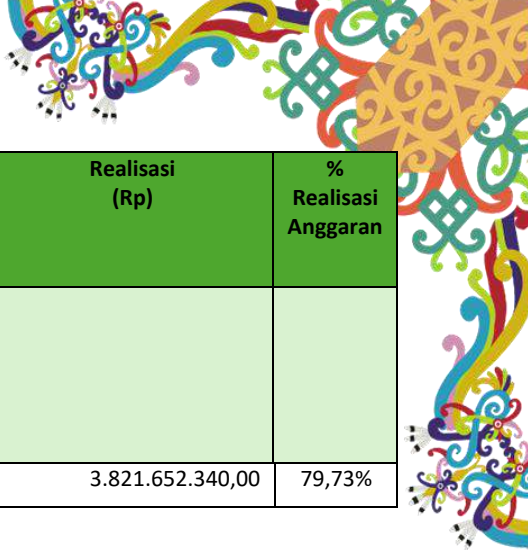
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	51,38	10,85	-21,93	1,79

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 68. Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.600.000.000,00	1.717.281.800,00	1.679.913.709,00	97,82%
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.550.000.000,00	1.098.959.200,00	940.463.107,00	85,58%
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.650.000.000,00	846.643.775,00	455.605.632,00	53,81%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.200.000.000,00	619.102.773,00	592.187.535,00	95,65%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	1.929.882.900,00	511.315.200,00	153.482.357,00	30,02%



NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	PENANAMAN MODAL				
Total		8.929.882.900,00	4.793.302.748,00	3.821.652.340,00	79,73%

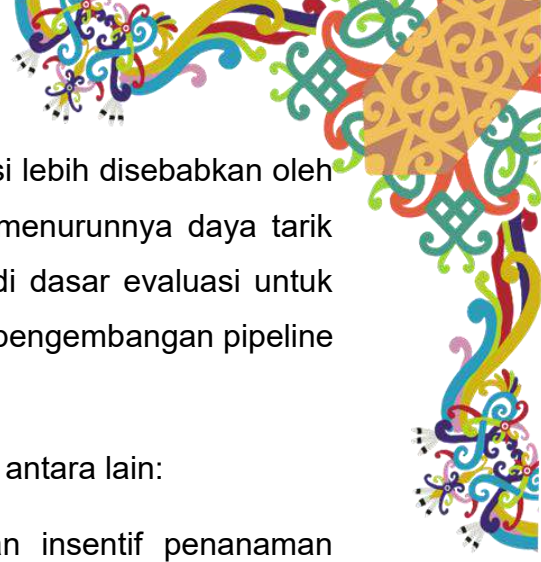
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.3.821.652.340,00** dari anggaran sebesar **Rp.4.793.302.748,00** atau **79,73%**. Realisasi keuangan sebesar 79,73% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **-21,93%**, maka penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut dinilai tidak efisien, karena target sasaran gagal mencapai 100%, namun penggunaan sumber daya cukup tinggi dari capaian kinerja.

Pada tahun pelaporan, indikator kinerja Tingkat Pertumbuhan Investasi menunjukkan realisasi sebesar -21,93%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian tersebut belum memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh struktur realisasi investasi yang bergantung pada masuknya proyek investasi berskala besar. Pada periode sebelumnya, **realisasi investasi didominasi oleh proyek PMA dengan nilai signifikan**. Dengan selesainya proyek-proyek tersebut, pada tahun berjalan tidak terdapat realisasi investasi baru dengan nilai yang sebanding sehingga memengaruhi capaian terhadap target.

Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika ekonomi global, perubahan keputusan investasi perusahaan, serta karakteristik sektor investasi daerah yang masih didominasi sektor ekstraktif turut memengaruhi capaian indikator ini.

Meskipun demikian, secara umum iklim investasi daerah tetap menunjukkan potensi positif yang didukung oleh kebijakan insentif investasi, layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik, komitmen pemerintah daerah dalam percepatan investasi, serta posisi strategis Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.



Dengan demikian, kesenjangan antara target dan realisasi lebih disebabkan oleh siklus investasi dan dinamika eksternal, bukan karena menurunnya daya tarik investasi daerah secara fundamental. Kondisi ini menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat promosi investasi, diversifikasi sektor, serta pengembangan pipeline proyek investasi pada periode mendatang.

Beberapa kondisi yang mendukung iklim investasi daerah antara lain:

1. Kebijakan daerah terkait pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal.
2. Pemusatan layanan perizinan dan investasi yang meningkatkan kemudahan dan efisiensi pelayanan.
3. Dukungan kelembagaan melalui forum koordinasi, percepatan investasi, dan pembinaan pelaku usaha.
4. Potensi sumber daya alam yang besar, khususnya pada sektor energi dan ekstraktif.
5. Kedekatan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
6. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi.
7. Stabilitas ekonomi nasional yang mendorong keyakinan pelaku usaha untuk berinvestasi.

Beberapa faktor yang memengaruhi belum optimalnya pertumbuhan investasi antara lain:

1. Penurunan investasi asing akibat selesainya proyek-proyek besar pada tahun sebelumnya.
2. Ketergantungan pada sektor pertambangan dan energi yang menyebabkan investasi bersifat fluktuatif.
3. Perubahan nilai tukar, biaya logistik, serta penundaan ekspansi investor.
4. Keterbatasan kegiatan promosi dan forum investasi yang berdampak pada rendahnya pipeline investasi baru.
5. Dominasi sektor berbasis sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan harga komoditas global.
6. Beberapa aspek pelayanan investasi yang masih memerlukan penguatan, seperti konsultasi penanaman modal dan pengelolaan data investasi.

13. Analisis Kinerja Sasaran 13: “Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih**” dengan indikator **Cakupan Layanan Air Bersih dan Presentase Rumah Layak Huni** mencapai **95%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 69. Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	93,58	75,89	81,10
17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	91,16	91,16	108
Rata-rata Capaian					95

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

1. Cakupan Layanan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari sungai Mahakam yang didalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air leding, pompa mata air terlindung dan sumur terlindung.

Indikator Kinerja Utama **Cakupan Layanan Air Bersih** adalah Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih / Jumlah rumah tangga dikali 100. Sumber data berasal dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025, Jumlah rumah tangga (sasaran) merupakan hasil konversi dari jumlah penduduk (jiwa) dengan asumsi satu rumah tangga = 4 jiwa, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih diperoleh dari perhitungan jumlah Layanan Perpipaian dan Bukan Jaringan Perpipaian (tandon).

Berikut disajikan tabel data Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum/ SPAM berdasarkan kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025:

Tabel 70. Jumlah Pelanggan Terpasang Perumda Air Minum Kabupaten Kutai Kartanegara per bulan September 2025

Jiwa	Jumlah Rumah Kabupaten	Layanan PDAM (RT)	Perpipaan Perdesaan (RT)	Non Perpipaan (RT)	PDAM	Perdesaan	PDAM (%)	Perkotaan/Perdesaan (%)
806.964	175.181	112.346	12.270	8337	112.346	20.607	55,69	10,21

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Cakupan Layanan Air Bersih

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{132.953}{175.181} \times 100\% = \underline{\underline{75,89\%}}$$



Pembangunan Boster Loa Ipuh Darat dan Jembatan Pipa JDU menuju Boster Kecamatan Tenggarong

Indikator Cakupan Layanan Air Bersih menunjukkan adanya penurunan capaian pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, realisasi cakupan layanan air bersih mencapai 80,20% dari target sebesar 92,16%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 87,02%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memperoleh akses terhadap layanan air bersih, meskipun masih terdapat selisih sekitar 12% dari target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian kinerja. Realisasi cakupan layanan air bersih tercatat sebesar 75,89% dari target 93,58%, dengan capaian kinerja sebesar 81,10%. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan capaian sebesar 4,31% dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi dan perluasan layanan air bersih kepada masyarakat.

Penurunan capaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan dalam pengembangan jaringan layanan, keterbatasan sumber daya, serta faktor eksternal seperti kondisi geografis dan kendala teknis yang mempengaruhi distribusi air bersih. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih dalam perencanaan dan pelaksanaan program, khususnya melalui optimalisasi peran PDAM, penguatan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) non-perpipaan, serta peningkatan pemeliharaan sarana SPAM perdesaan.



Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap strategi pencapaian target Renstra 2021–2026. Upaya korektif dan inovatif perlu segera dilakukan agar capaian cakupan layanan air bersih dapat kembali berada



pada jalur yang diharapkan. Hal ini juga penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada aspek akses terhadap air minum layak, serta sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan dasar.

Adapun beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program peningkatan cakupan layanan air bersih antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Jaringan

- Jaringan perpipaan PDAM belum menjangkau seluruh wilayah, terutama pada desa-desa terpencil serta daerah dengan kondisi geografis yang sulit, seperti wilayah perbukitan, rawa, maupun kawasan yang jauh dari sumber air baku.
- Kapasitas instalasi pengolahan air bersih yang tersedia masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat atau calon pelanggan.

2. Kendala Pembiayaan

- Ketersediaan anggaran untuk pembangunan maupun pemeliharaan sarana air bersih belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan di lapangan.
- Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menyebabkan keberlanjutan program dan layanan air bersih menjadi kurang stabil.

3. Kualitas dan Keberlanjutan Sarana

- Sebagian sarana air bersih berbasis masyarakat, khususnya SPAM non-perpipaan, mengalami penurunan fungsi akibat keterbatasan pemeliharaan.
- Pada beberapa lokasi, kualitas air yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi standar kesehatan, sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan air bersih.

4. Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat

- Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana air bersih masih relatif rendah, yang berdampak pada kerusakan fasilitas dalam waktu yang lebih cepat.

- Kapasitas teknis kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi (KPSPAMS) di tingkat desa masih terbatas dalam mengoperasikan serta memelihara sistem yang ada.
5. Koordinasi Lintas Dinas dan Pemangku Kepentingan
- Pelaksanaan program air bersih melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, pemerintah desa, serta masyarakat. Koordinasi yang belum optimal seringkali menimbulkan tumpang tindih program maupun keterlambatan pelaksanaan.
 - Integrasi data cakupan layanan air bersih antarinstansi juga belum sepenuhnya berjalan optimal.
6. Faktor Eksternal
- Pertumbuhan penduduk serta proses urbanisasi meningkatkan kebutuhan air bersih lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas layanan yang tersedia.
 - Perubahan iklim, termasuk potensi musim kemarau yang lebih panjang, turut mempengaruhi ketersediaan sumber air baku.

Penurunan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 4,31% dibandingkan tahun 2024 mencerminkan adanya kombinasi hambatan yang bersifat struktural, teknis, maupun sosial. Keterbatasan jaringan PDAM, belum optimalnya pemeliharaan sarana berbasis masyarakat, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang masih perlu diperkuat menjadi faktor utama yang mempengaruhi pencapaian target Renstra. Selain itu, dinamika eksternal seperti pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim turut memberikan tekanan tambahan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi pelayanan air bersih kepada masyarakat.





WTP 50 Ltr/Dtk SPM Sei Merdeka beserta prasarananya

2. Persentase Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja Utama **Persentase Rumah Layak Huni** adalah Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah di wilayah pemda x 100%

Cakupan Rumah Layak Huni

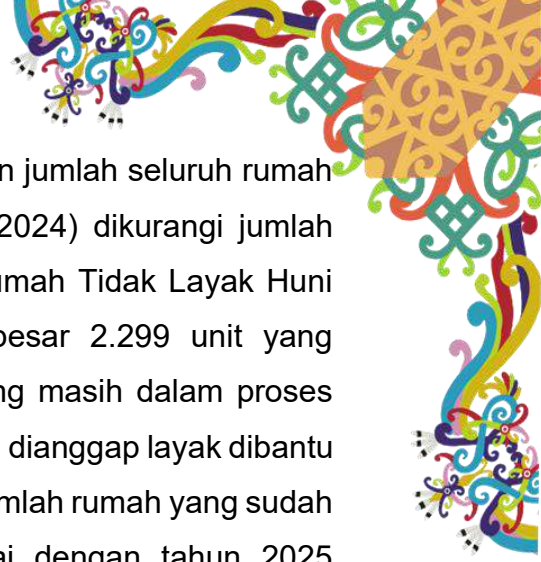
$$= \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda}} \times 100\%$$

Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda

$$= \frac{172.882}{175.181} \times 100\% = \underline{\underline{98,69 \%}}$$

Keterangan:

1. Jumlah seluruh rumah kabupaten diperoleh dari Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2024.

- 
2. Jumlah rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh rumah di Kabupaten (berdasarkan data RP3KP Tahun 2024) dikurangi jumlah rumah tidak layak huni. Di tahun 2025, jumlah Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan data RBPK Kutai Kartanegara sebesar 2.299 unit yang diperoleh dari perhitungan jumlah data rumah yang masih dalam proses verifikasi dan validasi sebanyak 1.576 unit dan yang dianggap layak dibantu sebanyak 1.259 unit kemudian di kurangi dengan jumlah rumah yang sudah di rehab dan ditangani dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebanyak 536 unit.
 3. Sasaran Yok Baiki Rumah pada data RBPK sebanyak 5.371 unit. Setelah di verifikasi tidak semua masuk dalam kriteria RTLH. Yang masuk (layak dibantu) hanya sebesar 1.259 dan yang belum di verifikasi sementara oleh bidang terkait dimasukkan ke dalam kriteria RTLH, maka diperoleh sejumlah 2.299 unit tersebut.

$$\begin{aligned} 175.181 - 2.299 &= 172.882 \text{ Unit Rumah Layak Huni.} \\ &172.882 \\ &----- \times 100 \\ &= 175.181 \\ &= 98,69 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan data tersebut, capaian Indikator Cakupan Rumah Layak Huni menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, realisasi indikator mencapai 98,64% dari target sebesar 90,89%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 108,53%. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pada tahun 2025 realisasi kinerja tercatat sebesar 98,69% dari target sebesar 91,16%, dengan capaian kinerja sebesar 108,26%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terlihat adanya peningkatan realisasi indikator sebesar 0,05%. Namun demikian, secara persentase capaian kinerja terjadi sedikit



penurunan sebesar 0,27%, yang dipengaruhi oleh peningkatan target pada tahun 2025.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) merupakan program yang mengadopsi skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui pendekatan swadaya, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses peningkatan kualitas rumah mereka.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

Data calon penerima bantuan yang belum sepenuhnya tervalidasi sehingga memerlukan waktu tambahan untuk proses verifikasi dan pendataan ulang.

Ketersediaan material bangunan yang terkadang mengalami kelangkaan di lapangan sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan rehabilitasi rumah.

Keberhasilan pelaksanaan program juga didukung oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya jumlah hunian yang layak melalui skema Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH), semakin berkembangnya sistem pelaksanaan program rumah swadaya, serta adanya dukungan teknis dalam pengembangan program rumah swadaya di daerah.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) merupakan bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bertujuan untuk mendorong serta meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan program tersebut berdasarkan Renstra periode 2021–2026, sekaligus dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, yaitu meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah. Program ini juga sejalan dengan program dedikasi KUKAR IDAMAN, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas permukiman masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menetapkan tiga zona prioritas penanganan, yaitu Zona Tengah, Zona Hulu, dan Zona Pesisir, sebagai wilayah



sasaran untuk memperoleh bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH).

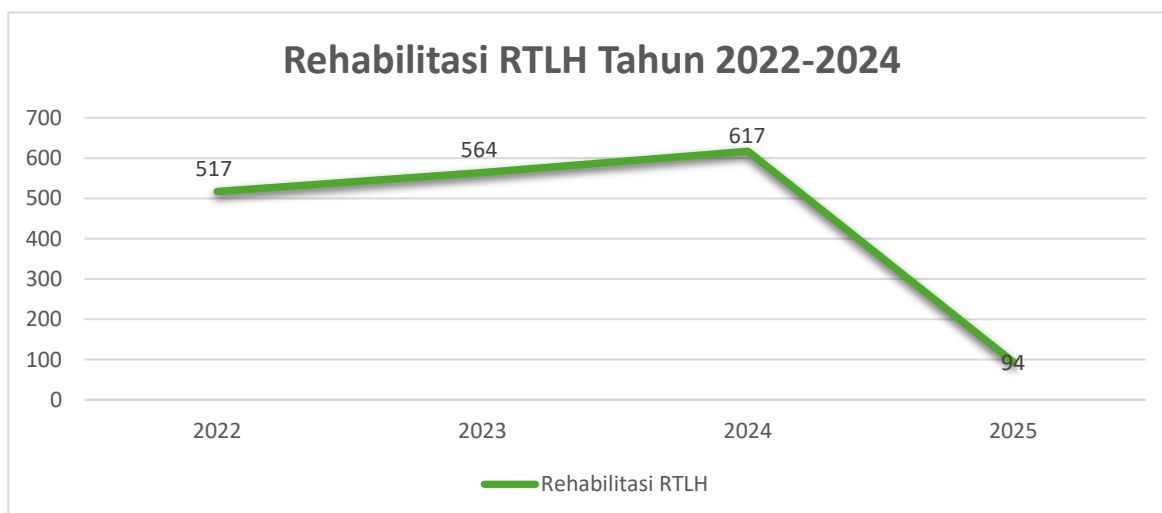
Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare, yang meliputi subkegiatan penyusunan, review, dan legalisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP), serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan rumah tidak layak huni dan pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh.

Selain itu, pelaksanaan indikator juga didukung oleh Program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan perbaikan rumah tidak layak huni sebagai upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan Program adopsi dari BSPS. Pengadaan rumah secara swadaya ini telah banyak merumahkan masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, permasalahan yang muncul dari pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas adalah minimnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai rumah layak huni (RLH). Hal ini menyebabkan kondisi rumah yang dibangun dalam jangka panjang menjadi tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH. Karena itulah, pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Bertambahnya jumlah penghunian rumah yang layak huni melalui skema R RTLH, meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program Rumah Swadaya.

Grafik 32. Rehabilitasi RTLH Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R RTLH) Adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Di tahun 2024 ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas permukiman masyarakat, di Tahun 2024 sebanyak 617 unit rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, yang tersebar di 18 Kecamatan. Jumlah yang mendapat bantuan rehabilitasi di Tahun 2024 lebih banyak dibandingkan Tahun 2023 dengan total sebanyak 562 Unit rumah yang direhabilitasi, atau meningkat 55 unit rumah.



Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di
Desa Loa Rava Kec. Tenggarong



Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di
Desa Wonotirto Kecamatan Samboia

Tabel 71. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Non RBPK Tahun 2025

No	Zona	Jumlah Unit Rumah Per Zona	Kecamatan	Jumlah Unit Rumah Per Kecamatan	Keterangan
1.	Tengah	7	Tenggarong	4	4 Kelurahan
			Loa Janan	3	2 Desa
2.	Pesisir	26	SangaSanga	4	3 Desa
			Muara Jawa	22	4 Kelurahan
3.	Hulu	33	Sebulu	33	4 Desa
Total		66			

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 72. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD

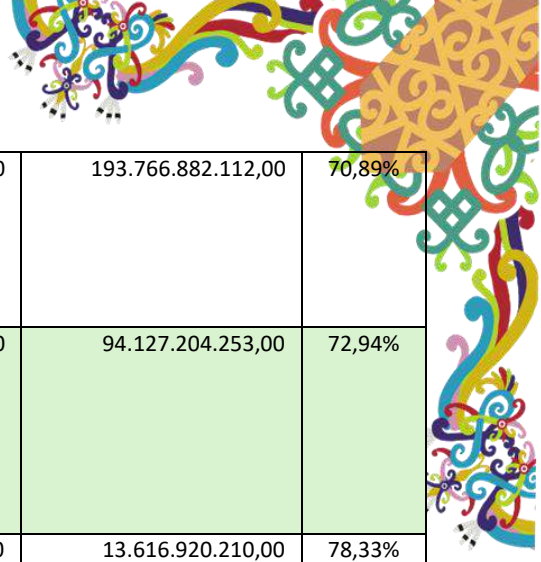
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	76,67	82,54	80,20	75,89	95
17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	93,49	98,64	91,16	91,44

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kutai kartanegara Tahun 2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 73. Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	177.284.866.034,00	166.011.250.453,00	115.547.530.613,00	69,60%



2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	274.565.943.750,00	273.345.845.731,00	193.766.882.112,00	70,89%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	148.028.165.354,00	129.048.086.605,00	94.127.204.253,00	72,94%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.939.999.993,00	17.384.981.047,00	13.616.920.210,00	78,33%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	22.300.000.000,00	17.932.691.948,00	5.503.089.860,00	30,69%
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.363.615.440,00	2.699.477.998,00	2.523.139.000,00	93,47%
7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	10.490.000.000,00	5.431.231.500,00	4.902.620.519,00	90,27%
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	237.245.461.196,00	237.751.944.316,00	199.940.887.753,00	84,10%
Total		896.218.051.767,00	849.605.509.598,00	629.928.274.320,00	74,14%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.629.928.274.320,00** dari anggaran sebesar **Rp.849.605.509.598,00** atau **74,14%**. Realisasi keuangan sebesar 74,14% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **95%**, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walau penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

14. Analisis Kinerja Sasaran 14: “Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah” dengan indikator **Indeks Aksesibilitas Wilayah** mencapai **88,68%** dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 74. Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	87,18	77,310	88,68

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Indeks Aksesibilitas Wilayah diukur dengan rumus:

$$\text{Indeks Aksesibilitas Wilayah} = \frac{\text{Jalan Mantap} + \text{Aksesibilitas}}{2}$$

$$\text{Indeks Aksesibilitas Wilayah} = \frac{65,73 + 88,89}{2} = 77,310$$

Keterangan:

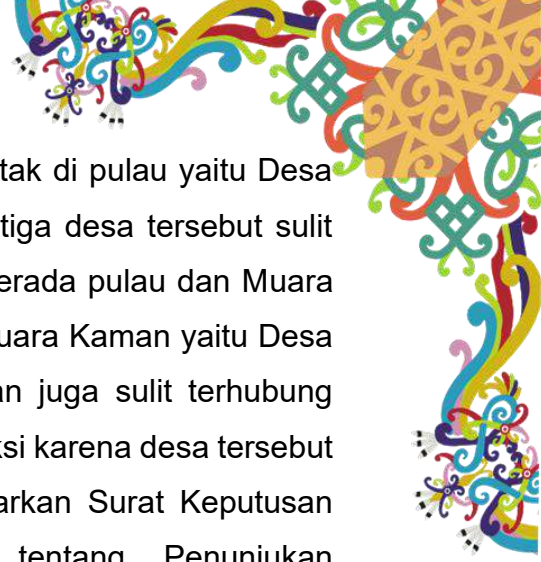
$$\text{Aksesibilitas} = \frac{\text{jumlah Kecamatan terhubung}}{\text{total Kecamatan}} \times 100 \%$$

Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas dari 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ada 2 kecamatan yang belum terhubung jalur darat dengan ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Muara Wis, dan ada beberapa desanya terletak di pulau dan kawasan lindung daerah gambut sehingga tidak dapat terkoneksi melalui jalur darat. Dari 237 jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, ada 11 desa yang belum terhubung jalur darat, dari 11 desa tersebut ada 7 desa yang tidak bisa terhubung jalur darat karena kondisi wilayah. Data sebaran desa tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 75. Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Desa yang Belum Terhubung Jalur Darat	Desa yang Tidak Bisa Terhubung Jalur Darat
1	Muara Muntai	13	1 Desa (Desa Jantur)	1 Desa (Desa Jantur)
2	Loa Kulu	15		
3	Loa Janan	8		
4	Anggana	8	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)
5	Muara Badak	13		
6	Tenggarong	14		
7	Sebulu	14		
8	Kota Bangun	11		
9	Kenohan	9		
10	Kembang Janggut	11		
11	Muara Kaman	20	5 Desa (Desa Kupang Baru, Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering, Desa Tunjungan)	3 Desa (Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering)
12	Tabang	19		
13	Samboja	13		
14	Muara Jawa	8		
15	Sanga-Sanga	5		
16	Tenggarong Seberang	18		
17	Marangkayu	11		
18	Muara Wis	7	2 Desa (Desa Enggelam, Desa Muara Enggelam)	
19	Kota Bangun Darat	10		
20	Samboja Barat	10		
TOTAL		237	11 Desa	7 Desa

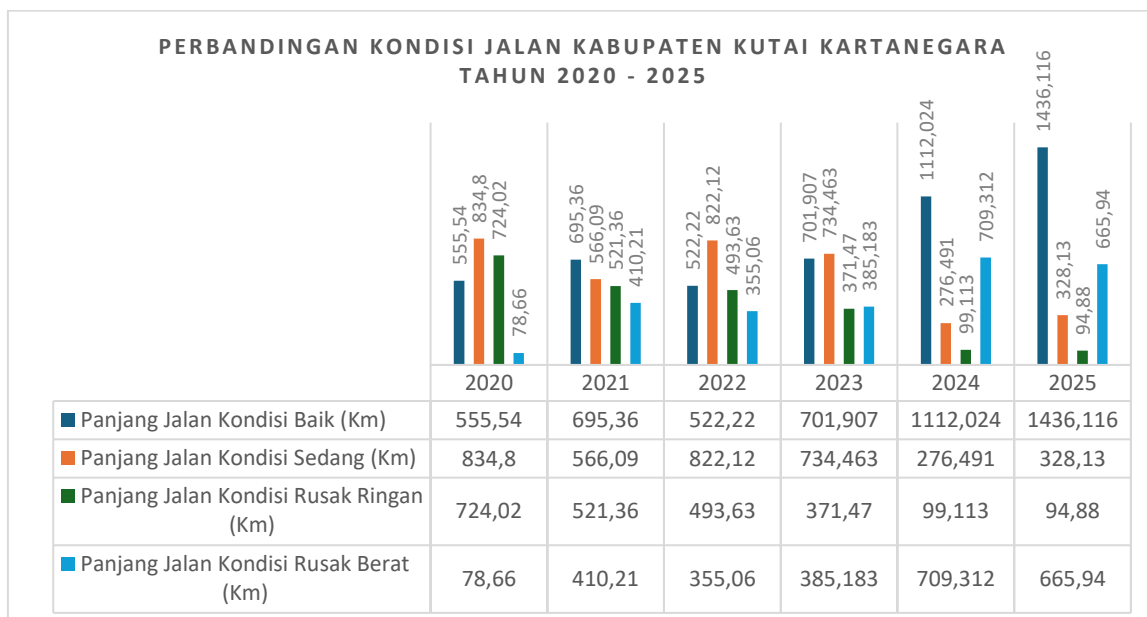
Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021



Di Kecamatan Anggana terdapat 3 (tiga) desa yang terletak di pulau yaitu Desa Muara Pantuan, Desa Sepatin, dan Desa Tani Baru. Ketiga desa tersebut sulit dihubungkan melalui jalur darat karena lokasinya yang berada pulau dan Muara Selat Makassar. Selain itu, 3 (tiga) desa di Kecamatan Muara Kaman yaitu Desa Liang Buaya, Desa Bukit Jering, dan Desa Muara Siran juga sulit terhubung melalui jalur darat. Desa Liang Buaya tidak dapat terkoneksi karena desa tersebut masuk dalam kawasan lindung daerah gambur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 590/526/001/A.Ptn/2013 tentang Penunjukan Konservasi Sebaran lahan Gambut Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Desa Bukit Jering dan Desa Muara Siran berada di lokasi yang terpisah dari Kecamatan Muara Kaman oleh Sungai Mahakam dan Sungai Kedang Kepala dan di Kecamatan Muara Muntai ada Desa Jantur.

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah dengan indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah Tahun 2025 sebesar 77,31%, capaian ini lebih tinggi 1,27% dari capaian kinerja di Tahun 2024 yaitu sebesar 76,045%, peningkatan capaian kinerja ini disebabkan adanya perubahan panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 321 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan, panjang ruas jalan 2.193,02 KM, namun berdasarkan Surat Keputusan terbaru Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ruas Jalan, panjang ruas jalan menjadi 2.196,94 KM, atau bertambah 3,92 KM. Berikut disajikan grafik perbandingan kondisi jalan dan perbandingan kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025:

Grafik 33. Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025

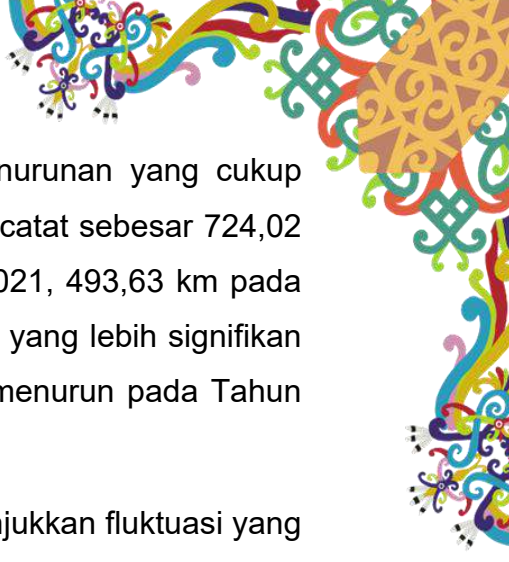


Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Grafik menunjukkan perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode Tahun 2020–2025 yang terdiri dari kategori kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat.

Secara umum terlihat adanya peningkatan signifikan pada panjang jalan dengan kondisi baik dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2020 panjang jalan kondisi baik tercatat sebesar 555,54 km, kemudian meningkat menjadi 695,36 km pada Tahun 2021, meskipun sempat menurun pada Tahun 2022 menjadi 522,22 km. Selanjutnya terjadi peningkatan kembali pada Tahun 2023 menjadi 701,91 km, meningkat signifikan pada Tahun 2024 sebesar 1.112,02 km, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 1.436,12 km. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, panjang jalan dengan kondisi sedang cenderung berfluktuasi selama periode pengamatan. Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 834,8 km, kemudian menurun pada Tahun 2021 menjadi 566,09 km, meningkat kembali pada Tahun 2022 menjadi 822,12 km, dan kembali menurun pada Tahun 2023 sebesar 734,46 km. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2024 menjadi 276,49 km, kemudian sedikit meningkat pada Tahun 2025 menjadi 328,13 km.



Untuk jalan dengan kondisi rusak ringan, terjadi tren penurunan yang cukup konsisten. Pada Tahun 2020 panjang jalan rusak ringan tercatat sebesar 724,02 km, kemudian menurun menjadi 521,36 km pada Tahun 2021, 493,63 km pada Tahun 2022, dan 371,47 km pada Tahun 2023. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada Tahun 2024 menjadi 99,11 km, dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 94,88 km.

Di sisi lain, panjang jalan dengan kondisi rusak berat menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 78,66 km, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2021 menjadi 410,21 km. Pada Tahun 2022 dan 2023 relatif stabil di kisaran 355–385 km, namun kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 709,31 km, sebelum sedikit menurun pada Tahun 2025 menjadi 665,94 km.

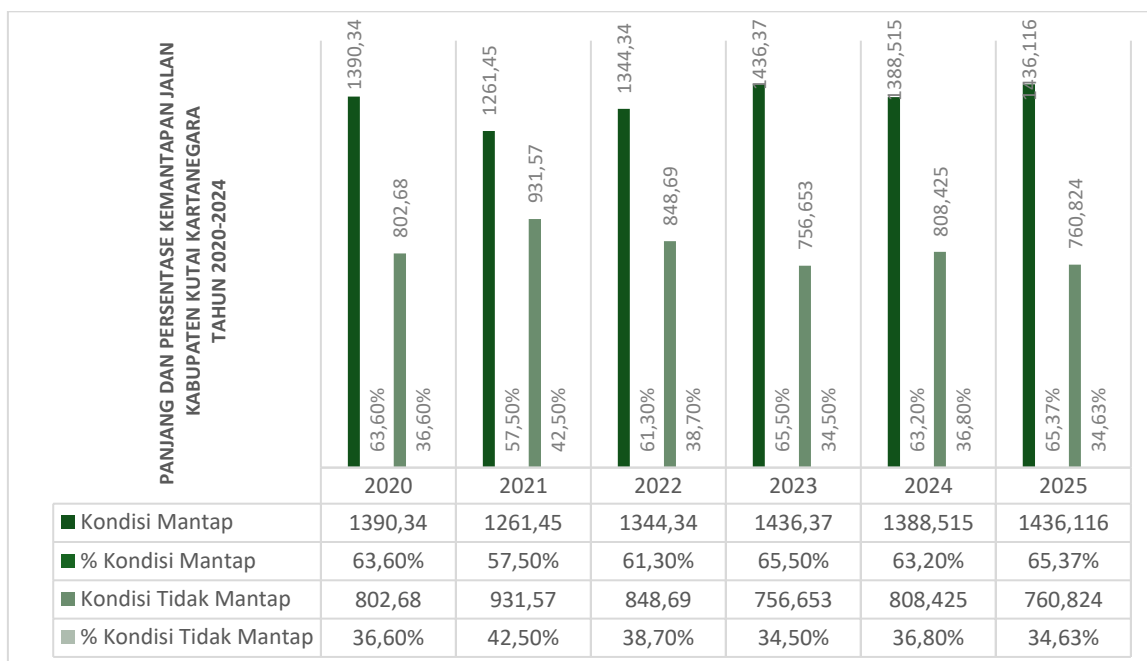
Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan panjang jalan dengan kondisi baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam penanganan jalan rusak berat yang jumlahnya masih relatif tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam peningkatan kualitas infrastruktur jalan melalui program pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan guna meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Grafik 34. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Grafik 35. Panjang dan Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 76. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD

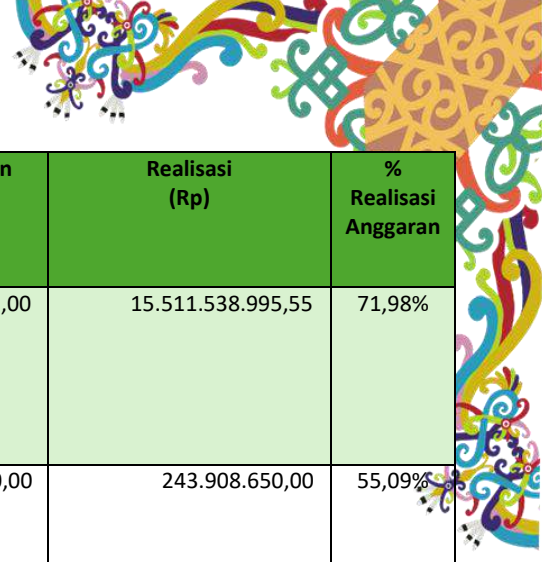
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	n.a	75,65	77,19	76,045	77,31	88,18

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 77. Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	64.700.000.000,00	64.700.000.000,00	53.116.442.717,00	82,10%
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.949.893.337,00	11.195.459.137,00	4.680.365.003,00	41,81%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.213.778.205.278,00	948.647.787.668,00	743.166.387.387,00	78,34%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	6.800.000.000,00	3.699.681.084,00	560.981.747,00	15,16%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.500.000.000,00	3.015.700.060,00	2.510.502.613,00	83,25%
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	700.000.000,00	601.530.500,00	568.521.100,00	94,51%



NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	23.800.000.000,00	21.549.494.120,00	15.511.538.995,55	71,98%
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	900.000.000,00	442.738.020,00	243.908.650,00	55,09%
9	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	300.000.000,00	135.082.950,00	15.146.200,00	11,21%
10	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	834.799.664,00	411.662.306,00	254.330.087,00	61,78%
11	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	850.000.000,00	685.310.206,00	656.265.225,00	95,76%
12	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	600.000.000,00	290.689.400,00	275.383.350,00	94,73%
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	187.974.960.000,00	158.584.157.966,00	134.303.277.966,00	84,69%
14	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	7.800.000.000,00	3.224.137.231,00	2.078.330.233,00	64,46%
Total		1.523.487.858.279,00	1.217.183.430.648,00	957.941.381.273,55	78,70%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.957.941.381.273,55** dari anggaran sebesar **Rp. 1.217.183.430.648,00** atau **78,70%**. Realisasi keuangan sebesar **78,70%**, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **88,68%**, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan

sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
2. Kondisi geografis juga mempengaruhi perubahan topografi.
3. Beban kendaraan yang melintasi jalan tersebut (ODOL = *over dimension over loading*) seperti kendaraan truck yang bermuatan lebih dari kapasitas.
4. Umur konstruksi yang merupakan jangka waktu di mana jalan dapat berfungsi secara optimal sebelum mengalami penurunan kualitas yang signifikan atau memerlukan rehabilitasi besar. Umur ini biasanya dihitung sejak jalan dibangun hingga kondisinya tidak lagi memenuhi standar layanan yang ditetapkan.

15. Analisis Kinerja Sasaran 15: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**” dengan indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** mencapai **99,70%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 78. Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81	73,59	99,70

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kondisi dan keberlanjutan lingkungan suatu wilayah. IKLH mencerminkan tingkat kualitas lingkungan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Semakin tinggi nilai IKLH, semakin baik kondisi lingkungan, yang menunjukkan bahwa ekosistem di



wilayah tersebut berada dalam keadaan sehat dan mampu mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. **Komponen Utama IKLH:**

1. Kualitas Udara

Pelaksanaan pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan pada sejumlah titik pantau yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemantauan kualitas air dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter utama yaitu pH, Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrat (NO₃-N), Fecal Coliform, dan Total Phospat yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA).

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air pada tahun terbaru, diperoleh nilai Indeks Kualitas Air sebesar **52,05**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada pada kategori Sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air masih dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di sekitar badan sungai, khususnya aktivitas domestik yang menghasilkan limbah rumah tangga sehingga beberapa parameter seperti Fecal Coliform masih berada di atas baku mutu yang ditetapkan.

Upaya peningkatan kualitas air terus dilakukan melalui pengendalian pencemaran air, peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari badan air, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik terutama di wilayah bantaran sungai..

2. Kualitas Air

Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan menggunakan metode Manual Passive Sampler, dengan memasang alat pemantauan pada beberapa titik lokasi yang mewakili kondisi wilayah tertentu. Pemantauan dilakukan untuk memperoleh data konsentrasi beberapa parameter pencemar udara yang selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Udara (IKU).



Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara terbaru, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **92,73**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Kutai Kartanegara berada dalam kategori Baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas udara masih berada pada kondisi yang cukup baik dan belum mengalami tekanan pencemaran udara yang signifikan.

Meskipun demikian, upaya pengendalian pencemaran udara tetap perlu dilakukan melalui pengawasan terhadap sumber emisi, pengendalian aktivitas industri dan transportasi, serta peningkatan ruang terbuka hijau guna menjaga kualitas udara agar tetap berada pada kondisi yang baik.

3. Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi kualitas tutupan lahan yang dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non-hutan. Beberapa kategori tutupan lahan yang menjadi komponen perhitungan IKTL antara lain tutupan hutan, belukar atau belukar rawa, ruang terbuka hijau, serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil perhitungan terbaru, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **75,17**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan berada dalam kategori Baik serta menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan nilai IKTL ini dipengaruhi oleh upaya pengelolaan kawasan hutan, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengembangan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tutupan lahan serta menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil pengukuran 3 komponen utama IKLH diatas maka diperoleh Indeks Kualitas lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

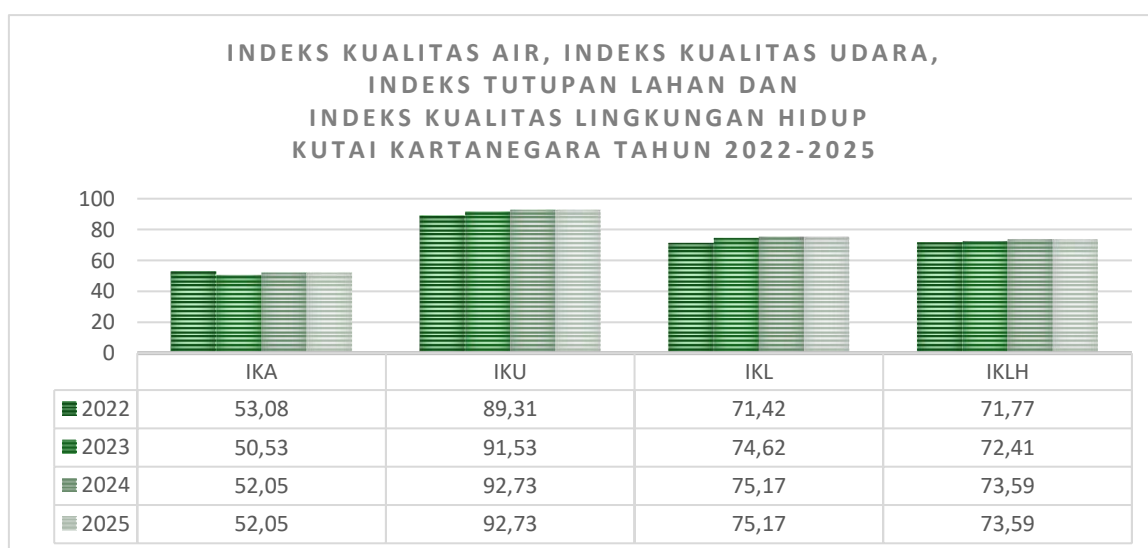
$$IKLH \frac{Kab}{Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

$$IKLH \frac{Kab}{Kota} = (0,376 \times 52,05) + (0,405 \times 92,73) + (0,219 \times 75,17)$$

IKLH Kab. Kutai Kartanegara = 73,59 = Kategori IKLH "BAIK"

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 4 tahun terakhir, menunjukkan peningkatan dari IKLH, berikut grafik IKA, IKU, IKL dan IKLH Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2025:

Grafik 36. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 – 2025



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep *Environmental Quality Index* (EQI) dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH digunakan oleh



Sungai Separi (Kec. Tenggarong Seberang)

pemerintah sebagai dasar dalam merancang kebijakan lingkungan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami tren dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis seperti:

- Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.
- Pengelolaan limbah dan pencemaran air yang lebih efektif.
- Penghijauan kembali lahan yang mengalami degradasi.
- Penguatan regulasi lingkungan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.



Sungai Anggana (Kec. Anggana)

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 79. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	72,41	73,59	73,59	74,51

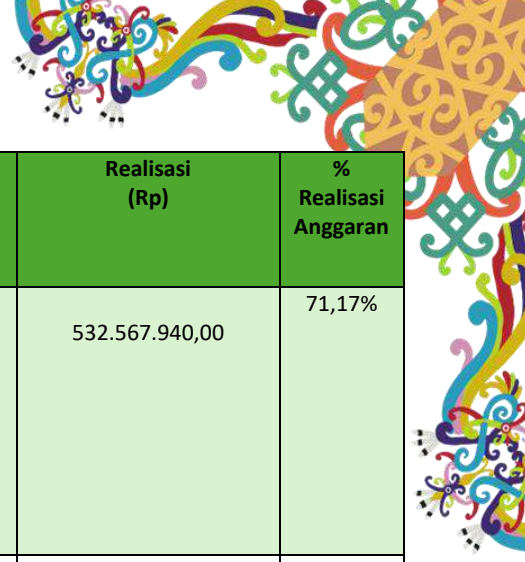
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 80. Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	500.000.000,00	253.797.520,00	239.709.200,00	94,45%
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.808.000.000,00	2.399.969.399,00	1.549.635.152,00	64,57%
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.336.590.000,00	3.236.304.662,00	2.512.090.900,00	77,62%
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	400.000.000,00	191.243.320,00	166.908.480,00	87,28%

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	600.000.000,00	288.383.800,00	232.067.733,00	80,47%
6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	75.000.000,00	43.548.900,00	42.245.300,00	97,01%
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	480.000.000,00	232.345.260,00	113.584.000,00	48,89%
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.451.125.000,00	560.324.000,00	176.723.116,00	31,54%
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000,00	113.631.600,00	104.464.400,00	91,93%
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	59.750.905.990,00	50.667.595.838,00	40.346.410.724,00	79,63%



NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
11	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.250.000.000,00	748.252.400,00	532.567.940,00	71,17%
Total		73.901.620.990,00	58.735.396.699,00	46.016.406.945,00	78,35%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.46.016.406.945,00** dari anggaran sebesar **Rp. 58.735.396.699,00** atau **78,35%**. Realisasi keuangan sebesar 78,35% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **99,24%**, maka efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut tercapai, karena target sasaran hampir mendekati 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Jika dilihat dari realisasi IKLH tahun 2025 sebesar 73,59, capaian ini sama dengan capaian IKLH di Tahun 2024. Nilai capaian hanya sekitar 99,24 % dari target IKLH 74,15 Namun tetap masuk dalam Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup “**BAIK**”. Adapun beberapa hal yang menyebabkan realisasi IKLH tidak dapat tercapai sesuai dengan yang ditarget dikarenakan beberapa hal:

- a) Tidak terpenuhinya target pada Indeks Kualitas Air, IKA : Target = 57,42 Realisasi = 52,05. Pelaksanaan Pemantauan air permukaan pada 78 titik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kutai Kartanegara sebanyak 36 titik, Pusat sebanyak 24 titik, dan Provinsi sebanyak 18 titik (penentuan titik pantau berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-0207/DLHK/Bid 3.1/663.1/02/2024 Tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024.
- b) Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dengan jumlah 8 parameter uji

(pH,TSS,DO,BOD,COD,NO₃-N,Fecal Coli,Total Phospat) tetapi pada tahun 2022 menggunakan Metode perhitungan PerMen LHK nomor 27 Tahun 2021 dengan Aplikasi IKLH.

- c) Dari 78 titik pantau perhitungan indeks pencemaran air, sebanyak 58 tercemar ringan dan 6 titik tercemar sedang.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi status mutu air di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

- 1) Pola Hidup Masyarakat di bantaran sungai yang menyebabkan *Parameter Fecal Coliform* masih diatas baku mutu hal ini disebabkan karena kondisi sungai kita yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik.
- 2) Belum maksimalnya pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik baik individu maupun Terpadu di Wilayah Perkotaan dan perdesaan;
- 3) Belum adanya pengolahan air limbah dari usaha kecil;
- 4) Belum maksimalnya pelaksanaan restorasi sungai.

Berikut beberapa sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas baku mutu:

Tabel 81. Sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas Baku Mutu

Sungai	Baku Mutu Sungai Kelas 2	Hasil Sample (fecal coliform mg/l)
Sungai Loa Haur Loa Duri	1000	3735,75
Sungai Perian	1000	6518
Sungai Jembayan Desa Jonggon	1000	12237
Desa Muara Aloh	1000	1498
Sungai Anggana Pelabuhan Kutai Lama	1000	360
Sungai Saka Kanan Tenggarong	1000	3548,8
Kedang Rantau Pelabuhan Situs Kerajaan Mulawarman	1000	147
Sungai Sentekan Desa Long Beleh Haloq	1000	4120,5

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

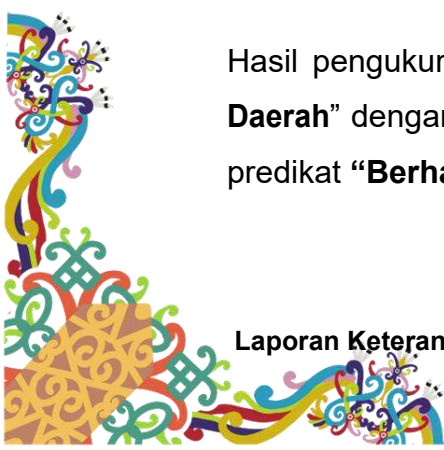
Faktor Pendukung:

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
2. Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan dan dampak perubahan iklim
3. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari luar APBD
4. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, proklamasi dan Keanekaragaman Hayati
5. Adanya kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Faktor Penghambat:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam masih belum berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan Sumber Daya Alam menipis
2. Pencemaran air, udara dan tanah belum tertangani secara tepat, karena pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan
3. Perubahan penggunaan lahan yang cepat diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yg pesat dan diikuti oleh peningkatan aktivitas yg dapat menurunkan daya dukung lahan dan mengganggu keseimbangan ekosistem
4. Adanya Eksploitasi Sumber Daya Alam secara besar-besaran dapat mengakibatkan penurunan dan kerusakan lingkungan

16. Analisis Kinerja Sasaran 16: “Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah”



Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah**” dengan indikator **Indeks Risiko Bencana** mencapai **96%** dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 82. Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	102,14	106,40	96

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasar-kan rumus berikut:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \text{Vulnerability Capacity}$$

Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan para-meter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

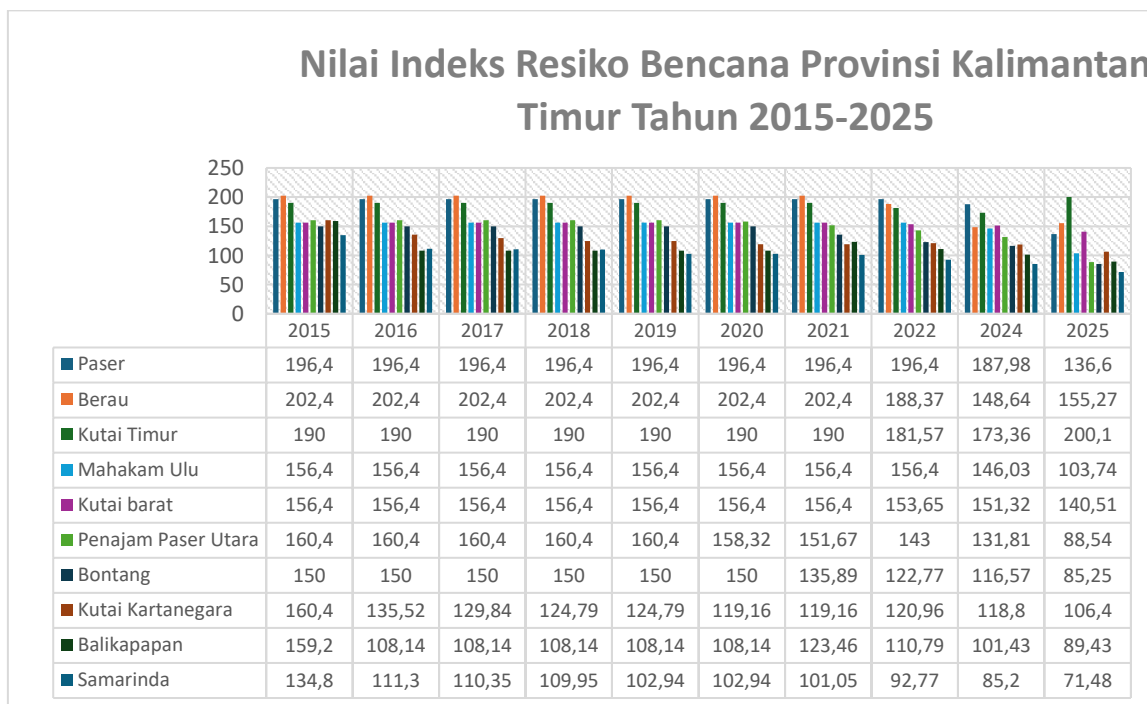


Sampai saat ini nilai Indeks Risiko Bencana hasil perhitungan dari IRBI oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB.

Nilai Capaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara dengan skor 106.40 (sedang) adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB

melalui surat nomor B-27.23/BNPB/D- I/SS.01.03/1/2026,tanggal 28 Januari 2026,hal penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Kalimantan Timur

Grafik 37. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2025



Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 83. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,16	120,96	114,3	118,80	106,40	100

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 84. Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2025

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.475.000.000,00	3.019.394.600,00	2.094.891.133,00	69,38%
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.290.039.638,00	2.640.914.980,80	1.516.875.435,00	57,44%
3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.475.000.000,00	1.575.822.090,00	757.846.110,00	48,09%
Total		12.240.039.638,00	7.236.131.670,80	4.369.612.678,00	60,39%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.4.369.612.678,00** dari anggaran sebesar **Rp. 7.236.131.670,80** atau 60,39%. Realisasi keuangan sebesar 60,39% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **96%**, maka pencapaian kinerja dinilai efisien, karena target sasaran berhasil 100% tercapai dengan penggunaan sumber daya jauh lebih rendah dari capaian kinerja.

Capaian indikator Indeks Risiko Bencana memperoleh nilai sebesar 106,40 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 102,14. Meskipun capaian menunjukkan nilai di atas target, masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi penanggulangan bencana di daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain target yang ditetapkan relatif tinggi sehingga cukup sulit untuk dicapai secara maksimal. Selain itu, sistem peringatan dini di beberapa wilayah masih belum optimal sehingga informasi mengenai potensi bencana belum sepenuhnya dapat diterima masyarakat secara tepat waktu. Infrastruktur mitigasi bencana seperti shelter dan jalur evakuasi di beberapa daerah juga masih terbatas dan belum memadai untuk menampung jumlah penduduk yang terdampak bencana.

Di samping itu, belum tersedianya regulasi daerah yang mengatur pemulihan pasca bencana secara lintas perangkat daerah turut mempengaruhi efektivitas upaya penanggulangan bencana. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala, khususnya masih kurangnya tenaga terlatih di bidang penanggulangan bencana seperti relawan, terutama di tingkat desa dan kelurahan, sehingga menyulitkan implementasi program mitigasi bencana. Kurangnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam program mitigasi juga menyebabkan sinergi dalam upaya penanggulangan bencana belum berjalan secara optimal.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator Indeks Risiko Bencana yaitu Program Penanggulangan Bencana, melalui beberapa kegiatan antara lain Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, serta Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. Program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat sistem mitigasi bencana, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi dan menanggulangi risiko bencana secara lebih efektif.

Berikut Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 85. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2024	2025	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	65,92	66,71	Meningkat 0,79
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,96	8,92	Menurun - 0,04
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,74	9,69	Meningkat 0,95

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2024	2025	
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,71	0,81	Meningkat 0,1
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	57,42	57,91	Meningkat 0,49
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,84	Meningkat 0,03
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,600	81,200	Meningkat 1,6
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,307	0,307	Sama
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7969	0,781	Menurun - 0,02
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,11	4,40	Menurun - 0,29
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	240,87	249,11	Meningkat 8,24
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	2,94	10,47	Meningkat 7,53
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	7,85	7,85	Sama
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,70	7,70	Sama
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	10,85	-21,93	Menurun - 32,78
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	80,20	75,89	Menurun - 4,31
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	98,64	98,69	Meningkat 0,05



NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2024	2025	
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	76,045	77,310	Meningkat 1,27
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,59	73,59	Sama
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	118,80	106,40	Meningkat 12,4

Dari data pada tabel diatas secara garis besar capaian kinerja 2025 menunjukkan angka penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat 5 (lima) sasaran yang menunjukkan angka penurunan, dan ada 11 (sebelas) yang capaian kinerjanya meningkat, dan 4 diantaranya masih menggunakan capaian tahun 2024 dikarenakan sumber data belum dirilis.

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata – rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

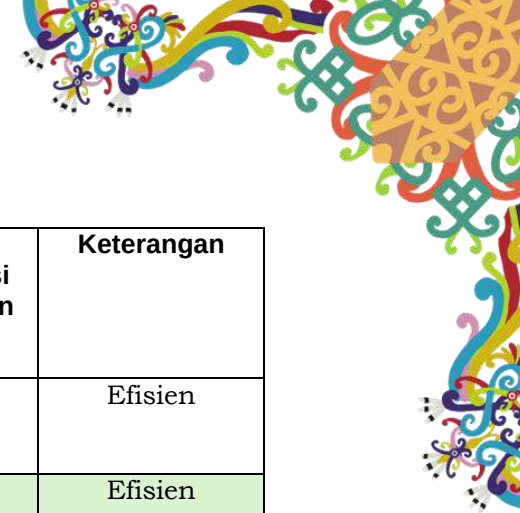
- a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.



Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 86. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	91%	4.882.654.694.376,20	3.684.484.661.877,02	75,46%	Efisien
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1	132%	41.832.701.646,00	30.949.204.152,00	73,98%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	108%	249.620.318.780,00	206.155.597.695,00	82,59%	Efisien
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	2	114%	978.551.072.268,00	678.002.095.198,00	69,29%	Efisien
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1	103%	856.077.506.762,00	688.894.577.416,00	80,47%	Efisien
6	Meningkatnya peran serta I-1 dalam pembangunan	1	103%	5.240.762.179,00	4.539.884.181,00	86,63%	Efisien
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	2	98%	294.452.558.434,00	262.783.253.298,00	89,24%	Efisien



NO	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	2	113%	32.586.762.608,00	27.087.788.973,00	83,13%	Efisien
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	1	159%	628.915.220.112,00	536.455.880.753,59	85,30%	Efisien
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	1	230%	34.240.609.300,00	29.134.209.395,00	85,09%	Efisien
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	109%	11.150.570.820,00	8.410.796.568,00	75,43%	Efisien
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1	-1253%	4.793.302.748,00	3.821.652.340,00	79,73%	Tidak Efisien
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	2	108%	849.605.509.598,00	629.928.274.320,00	74,14%	Efisien
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1	88%	1.217.183.430.648,00	957.941.381.273,55	78,70%	Efisien
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	100%	58.735.396.699,00	46.016.406.945,00	78,35%	Efisien
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	1	98%	7.236.131.670,80	4.369.612.678,00	60,39%	Efisien



Analisis efisiensi penggunaan anggaran pada Sasaran Nomor 6, 7, 10, dan 11 belum dapat dipastikan I-1 adalah ketepatannya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tahun data yang digunakan dalam perhitungan, I-1 adalah data capaian kinerja yang tersedia masih menggunakan data tahun 2024, sementara data realisasi anggaran yang digunakan merupakan realisasi tahun 2025. Kondisi tersebut menyebabkan kedua komponen yang dibandingkan tidak berada pada periode yang sama, sehingga hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara akurat.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 16 sasaran menunjukkan 15 (lima belas) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, terdapat 1 (satu) sasaran tidak efisien, karena kinerja tidak mencapai 100%. Dari 1 (satu) sasaran yang tidak efisien, ada sebanyak 4 (lima belas) sasaran yang tidak mencapai target namun penyerapan anggaran lebih rendah dari capaian kinerja, dan terdapat 4 (empat) sasaran yang penyerapan anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

Dari keseluruhan penjabaran diatas dapat disimpulkan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang terdiri dari 16 sasaran, I-1 adalah sebagai berikut:

Tabel 87. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	77,00	66,71	87%
Rata-rata Capaian							87%
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,80	8,92	131%
Rata-rata Capaian							131%

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9,00	9,69	108%
Rata-rata Capaian							108%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,81	114%
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,50	57,91	112%
Rata-rata Capaian							113%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,821	0,84	102%
Rata-rata Capaian							102%
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,15	81,200	103%
Rata-rata Capaian							103%
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,27	*0,307	88%
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,765	0,781	102%
Rata-rata Capaian							95%
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,60	4,40	105%
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	202,16	249,11	123%
Rata-rata Capaian							114%
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	7,05	10,47	149%
Rata-rata Capaian							149%
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	4,00	*7,85	196%
Rata-rata Capaian							196%
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,48	*7,70	103%
Rata-rata Capaian							103%

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	PERSENTASE CAPAIAN
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,77	-21,93	-1239%
Rata-rata Capaian							-1239%
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	93,58	75,89	81%
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	91,16	98,69	108%
Rata-rata Capaian							95%
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	87,18	77,310	89%
Rata-rata Capaian							89%
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,15	73,59	99%
Rata-rata Capaian							99%
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	102,14	106,40	96%
Rata-rata Capaian							96%

*Data Capaian Tahun 2024, dikarenakan Data 2025 belum rilis

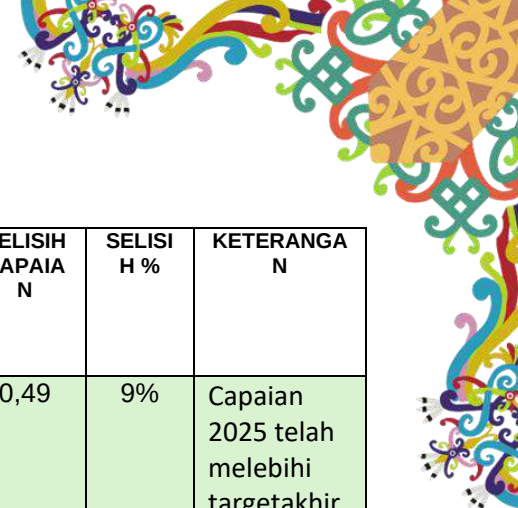
Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 12 sasaran, atau 75%;
- Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori “berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 18,75%;
- Capaian kinerja 50 s/d <80 kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%.
- Capaian kinerja 0 s/d $<50\%$ kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

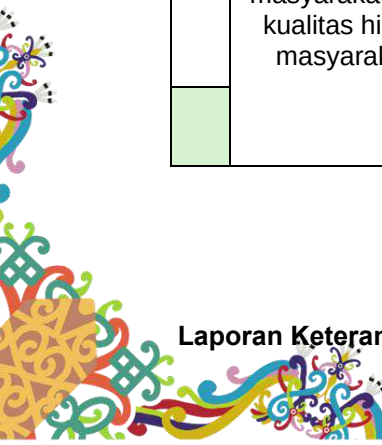
Jika membandingkan antara capaian Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 2.3.78, dan Tahun 2025 adalah tahun ke-5 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, sehingga dapat dilakukan pengukuran terhadap capaian Tujuan Pemerintah Daerah, adapun hasil capaian tujuan dapat dilihat pada tabel 2.3.79 dibawah ini:

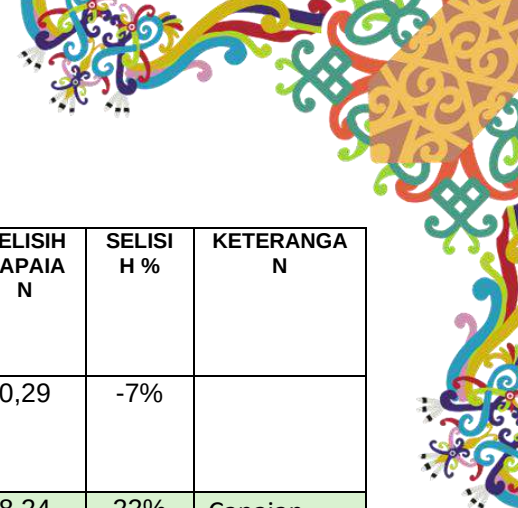
Tabel 88. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dibanding dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

N O	SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUA N	CAPAIA N 2021	CAPAIA N 2022	CAPAIA N 2023	CAPAIA N 2024	CAPAIA N 2025	TARGE T 2026	% CAPAIAN 2025 DIBANDIN G TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIA N	SELISI H %	KETERANGA N
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	66,35	67,4	67,86	65,92	66,71	80,01	83%	0,79	-17%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,166	8,38	8,66	8,96	8,92	7	127%	-0,04	27%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	8,41	8,74	9,69	9,05	107%	0,95	7%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	0,679	0,71	0,81	0,71	113%	0,10	13%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD



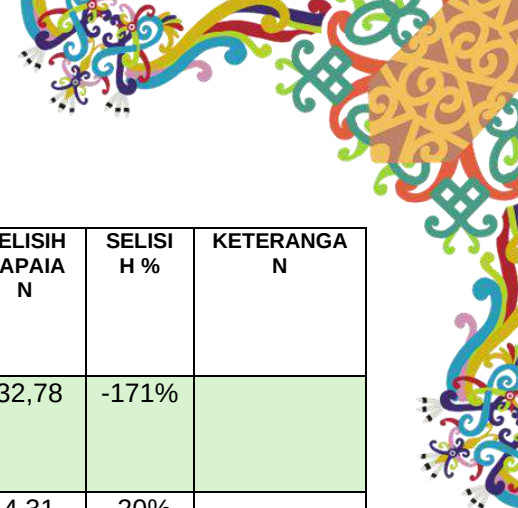
N O	SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIA N 2021	CAPAIA N 2022	CAPAIA N 2023	CAPAIA N 2024	CAPAIA N 2025	TARGE T 2026	% CAPAIAN 2025 DIBANDIN G TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIA N	SELISI H %	KETERANGA N
	Pelestarian Kebudayaan	5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n.a	47,42	53,23	57,42	57,91	53	109%	0,49	9%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,81	0,812	0,81	0,84	0,82	103%	0,03	3%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,8	79,8	79,600	81,200	79,2	103%	1,60	3%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	0,284	0,307	0,307	0,27	88%	0,00	-12%	
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,747	0,776	0,7969	0,781	0,79	99%	-0,02	-1%	





N O	SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIA N 2021	CAPAIA N 2022	CAPAIA N 2023	CAPAIA N 2024	CAPAIA N 2025	TARGE T 2026	% CAPAIAN 2025 DIBANDIN G TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIA N	SELISI H %	KETERANGA N
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Penganggura n Terbuka	Nilai	5,66	4,14	4,05	<u>4,11</u>	<u>4,40</u>	4,1	93%	0,29	-7%	
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	241,7	254,5	270,72	240,87	249,11	204,69	122%	8,24	22%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	1,02	1,91	2,91	2,94	10,47	7,5	140%	7,53	40%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	3,74	7,85	7,85	4,23	186%	0,00	86%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	6,96	7,70	7,70	7,56	102%	0,00	2%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD



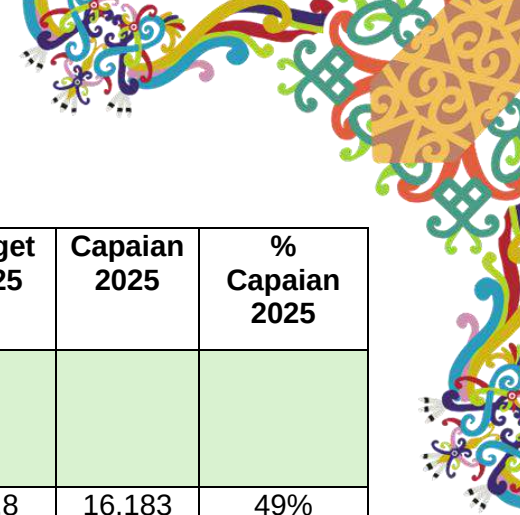


N O	SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIA N 2021	CAPAIA N 2022	CAPAIA N 2023	CAPAIA N 2024	CAPAIA N 2025	TARGE T 2026	% CAPAIAN 2025 DIBANDIN G TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIA N	SELISI H %	KETERANGA N
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	51,38	10,85	-21,93	30,9	-71%	-32,78	-171%	
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	76,67	82,18	80,20	75,89	95	80%	-4,31	-20%	
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	93,49	98,64	98,69	91,44	108%	0,05	8%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	n.a	75,65	77,19	76,045	77,310	88,18	88%	1,27	-12%	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	72,41	73,59	73,59	74,51	99%	0,00	-1%	
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,16	120,96	114,3	118,80	106,40	100	94%	-12,40	-6%	



Tabel 89. Capaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 RPJMD 2021-2026

NO	MISI / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		Satuan	Capaian				Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025
					2021	2022	2023	2024			
	Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani										
1	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,95	62,74	60,12	71,33	65	79,82	123%
	Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya										
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	2	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,06	74,67	75,3	76,57	76,20	77,25	101%
3	Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	3	Tingkat Kebahagiaan	Nilai	NA	78,83	73,02	79,60	74,00		0%
		4	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,35	7,96	7,61	7,28	6,40	4,40	69%
	Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif										
4	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	5	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	Persen	2,94	5,35	7,69	7,88	5,72	9,75	170%



NO	MISI / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		Satuan	Capaian				Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025
					2021	2022	2023	2024			
	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah										
5	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	6	Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	37,8	35,8	16,183	16,183	32,8	16,183	49%
		7	Persentase penurunan kawasan kumuh / Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	48.00 (50.44 ha)	51,73 (86,97 ha)	45,87 (7,11 Ha) Data Revisi : 0,0046	0,0046	0,0055	92,26 (14,3 Ha)	1677455%
	Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan										
6	Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	8	Persentase penurunan Emisi GRK	Persen	5,79	9,16	6,01	6,16	5,00	17,59	352%



C. Keterkaitan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Indikator RPJMD 2025–2029

1. Pemetaan Indikator RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD 2025-2029

Tabel 90. Pemetaan Indikator RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD 2025-2029

No	Indikator RPJMD 2021-2026	TARGET 2025 (RPJMD 2021-2026)	Indikator RPJMD 2025-2029	TARGET 2025 (RPJMD 2025-2029)	Ket
1	PDRB per Kapita	202,16	PDRB per Kapita	271,53 - 271,71	Beririsan/ Masih berlaku
2	Nilai SAKIP	77,00	Nilai SAKIP	68,28	Beririsan/ Masih berlaku
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,60	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85-4,00	Beririsan/ Masih berlaku
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,82	Beririsan/ Masih berlaku
5	Indeks Resiko Bencana	102,14	Indeks Resiko Bencana	115,80	Beririsan/ Masih berlaku
6	Indeks Gini/Rasio Gini	0,27	Indeks Gini/Rasio Gini	0,285 - 0,307	Beririsan/ Masih berlaku
7	Indeks Persepsi Anti Korupsi	6,8	Tidak Dilanjutkan		
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9	Tidak Dilanjutkan		
9	Indeks Pendidikan	0,704	Tidak Dilanjutkan		
10	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,5	Indeks Pembangunan Manusia	76,86	Perubahan Definisi
11	Indeks Kesehatan	0,821	Tidak Dilanjutkan		
12	Indeks Pembangunan Gender	79,15	Tidak Dilanjutkan		
13	Indeks Gini	0,27	Tidak Dilanjutkan		
14	Indeks Desa Membangun	0,765	Tidak Dilanjutkan		

No	Indikator RPJMD 2021-2026	TARGET 2025 (RPJMD 2021-2026)	Indikator RPJMD 2025-2029	TARGET 2025 (RPJMD 2025-2029)	Ket
15	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,05	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	8,14	Perubahan Definisi
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,7	Perubahan Definisi
17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	7,48			
18	Tingkat Pertumbuhan Investasi	1,77	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	0	Perubahan Definisi
19	Cakupan Layanan Air Bersih	93,58	Tidak Dilanjutkan		
20	Presentase Rumah Layak Huni	91,16	Tidak Dilanjutkan		
21	Indeks Aksesibilitas Wilayah	87,18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78,66	Perubahan Definisi
22	-		Indeks Reformasi Birokrasi	73,34	Baru Ditambahkan
23	-		Indeks Daya Saing Daerah	3,58	Baru Ditambahkan
24	-		Indeks Pelayanan Publik	4,39	Baru Ditambahkan
25	-		Angka Kriminalitas	100	Baru Ditambahkan
26	-		Tingkat kemiskinan	6,68-6,95	Baru Ditambahkan
27	-		Penurunan Intensitas Emisi GRK	17,59	Baru Ditambahkan

2. Gambaran Awal Capaian Indikator RPJMD 2025-2029

Tabel 91. Gambaran Awal Capaian Indikator RPJMD 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET RPJMD 2025-2029	CAPAIAN 2025	% CAPAIAN
1	Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70	3,43	60%
2			PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	271,53 - 271,71	249,11	92%
3		Meningkatnya Pembangunan Ekonomi sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	8,14	9,75	120%
4		Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	0,00	-21,93	#DIV/0!
5		Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pembangunan dan Penataan Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,66	76,24*	97%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,34	79,82	109%
7			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,58	100%
8		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,39	3,89	89%
9			Nilai SAKIP	Nilai	68,28	66,71	98%
10		Meningkatnya Stabilitas Kondusivitas daerah	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	100	106*	94%
11	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Tingkat kemiskinan	%	6,68–6,95	6,72	100%
12		Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,86	77,25	101%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET RPJMD 2025-2029	CAPAIAN 2025	% CAPAIAN
13		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya Ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85-4,00	4,40	110%
14			Rasio Gini	Indeks	0,285 - 0,307	0,307*	100%
15	Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	17,590	17,59	100%
16		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,82	73,59	93%
17		Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	Indeks	115,80	106,40	109%

*Menggunakan Angka Baseline 2024 pada RPJMD Kutai Kartanegara 2025-2029

3. Catatan Transisi Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan ketentuan perencanaan pembangunan daerah, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 masih mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021–2026 yang masih berlaku pada saat penyusunan target kinerja. Namun demikian, dalam proses evaluasi dan pelaporan kinerja, beberapa indikator kinerja telah mulai diselaraskan dengan arah kebijakan dan indikator yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk transisi perencanaan agar kesinambungan antara periode pembangunan sebelumnya dengan periode pembangunan yang baru tetap terjaga. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya menggambarkan pencapaian terhadap target RPJMD 2021–2026, tetapi juga dapat menjadi baseline atau referensi awal dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Oleh karena itu, capaian kinerja Tahun 2025 tetap dipaparkan sebagai capaian awal terhadap indikator dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai gambaran kondisi awal pembangunan daerah pada awal periode RPJMD baru. Adapun capaian dimaksud

diuraikan sebagai berikut.

I. Gambaran Umum Kinerja Sasaran 1. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi sektor Unggulan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	8,14	9,75	120

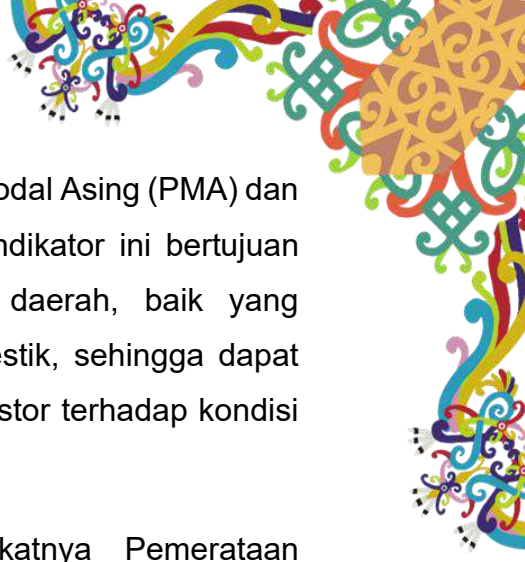
Sebelumnya, indikator yang digunakan berfokus pada laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, pada periode selanjutnya indikator tersebut diperluas menjadi PDRB sektor non-ekstraktif. Perubahan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan aktivitas ekonomi di luar sektor ekstraktif.

Hal ini penting mengingat selama ini sektor ekstraktif masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengamatan terhadap pertumbuhan sektor non-ekstraktif diperlukan guna melihat potensi pengembangan sektor ekonomi lainnya serta mendorong diversifikasi struktur perekonomian daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penguatan sektor-sektor ekonomi di luar sektor ekstraktif.

II. Gambaran Umum Kinerja Sasaran 2. Meningkatnya Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
2	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	0	-21,93	-1239

Indikator pertumbuhan investasi yang digunakan pada periode ini masih sama dengan yang digunakan pada RPJMD sebelumnya, yaitu menggunakan laju



pertumbuhan nilai investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penggunaan indikator ini bertujuan untuk mengukur dinamika perkembangan investasi di daerah, baik yang bersumber dari investor asing maupun dari investor domestik, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian daerah.

III. Gambaran Umum Kinerja Sasaran 3. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pembangunan dan Penataan Wilayah

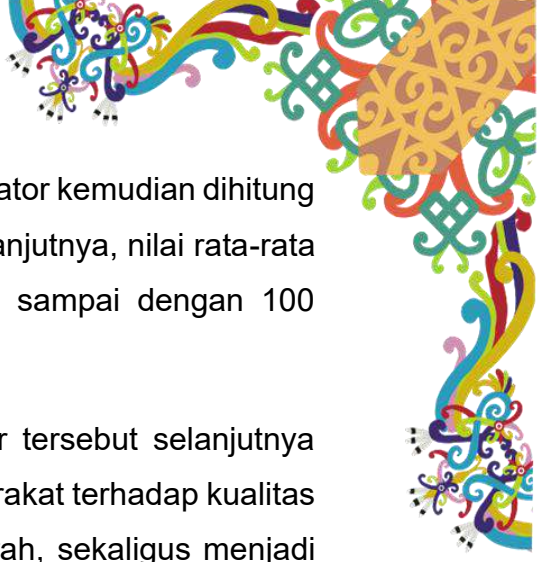
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,66	76,24*	97

*Capaian Tahun 2024

Perubahan metode dalam pengukuran dari sebelumnya yaitu aksesibilitas wilayah yang menghitung kondisi jalan serta keterhubungan antar-wilayah di kabupaten kutai kartanegara. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah. Metode pengukuran indeks ini menggunakan pendekatan survei kepada masyarakat sebagai pengguna langsung layanan infrastruktur, sehingga penilaian yang dihasilkan mencerminkan persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kondisi serta kualitas layanan yang diterima.

Dalam pelaksanaannya, responden yang dilibatkan merupakan masyarakat yang memanfaatkan layanan infrastruktur, seperti pengguna jalan, masyarakat penerima layanan air bersih, maupun masyarakat yang memanfaatkan fasilitas drainase dan sarana infrastruktur lainnya. Responden diminta memberikan penilaian terhadap beberapa aspek layanan infrastruktur, antara lain kondisi fisik infrastruktur, kemudahan akses terhadap layanan, keandalan layanan, kecepatan penanganan kerusakan, serta manfaat layanan bagi masyarakat.

Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai dengan 4, yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat dari kategori



sangat tidak puas hingga sangat puas. Nilai dari setiap indikator kemudian dihitung rata-ratanya berdasarkan jawaban seluruh responden. Selanjutnya, nilai rata-rata tersebut dikonversi menjadi nilai indeks dengan skala 0 sampai dengan 100 melalui proses pengalihan dengan faktor konversi tertentu.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tersebut selanjutnya digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan perencanaan pembangunan infrastruktur pada periode berikutnya.

IV. Analisis Kinerja Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
4	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Indeks	4,39	3,89
5	Nilai SAKIP	Indeks	Nilai	68,28	66,71

Indikator kinerja pada sasaran ini menggunakan Indeks Pelayanan Publik dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat ukur. Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah, yang mencakup berbagai aspek seperti kebijakan pelayanan, profesionalitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Indeks ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain itu, indikator juga menggunakan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu sistem yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan. Penilaian SAKIP mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah mampu merencanakan kinerja, mengukur pencapaian kinerja, serta melakukan evaluasi dan pelaporan secara efektif, sehingga mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.

V. Analisis Kinerja Sasaran 5. Meningkatnya Stabilitas Kondusivitas daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
6	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	100	106*	94%

*Capaian Tahun 2024

Indikator angka kriminalitas digunakan untuk menggambarkan tingkat kejadian tindak kejahatan yang terjadi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini umumnya dihitung berdasarkan jumlah kasus tindak pidana yang tercatat oleh aparat penegak hukum dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat.

Angka kriminalitas juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi sosial masyarakat, karena semakin rendah angka kriminalitas maka semakin baik tingkat keamanan dan stabilitas sosial di suatu daerah. Sebaliknya, peningkatan angka kriminalitas dapat menjadi sinyal perlunya penguatan upaya pencegahan kejahatan, peningkatan pengawasan, serta kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

VI. Analisis Kinerja Sasaran 6. Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,86	77,25	101%

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, dimensi pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

IPM memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga sering digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi salah satu tujuan penting dalam pembangunan daerah melalui peningkatan akses dan kualitas layanan di bidang kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

VII. Analisis Kinerja Sasaran 7. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya Ketimpangan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85-4,00	4,40	110%
9	Rasio Gini	Indeks	0,285 - 0,307	0,307*	100%

*Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk melihat kondisi pasar kerja serta kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Semakin rendah nilai Tingkat Pengangguran Terbuka, maka semakin baik kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah karena menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam kegiatan ekonomi.

Sementara itu, Rasio Gini (Gini Ratio) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Nilai Rasio Gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 0 menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang lebih baik, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indikator ini penting untuk melihat sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

VIII. Analisis Kinerja Sasaran 8. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,82	73,59	93%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup secara komprehensif di suatu wilayah. Indeks ini disusun berdasarkan beberapa komponen utama, antara lain kualitas air, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan. Melalui pengukuran terhadap komponen tersebut, IKLH dapat memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup serta tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di suatu daerah.

Nilai IKLH mencerminkan tingkat keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Semakin tinggi nilai IKLH, maka semakin baik pula kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut. Oleh karena itu, peningkatan nilai IKLH menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

IX. Analisis Kinerja Sasaran 9. Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap bencana daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
11	Indeks Resiko Bencana	Indeks	115,80	106,40	109%

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat potensi risiko bencana di suatu wilayah. Indeks ini disusun berdasarkan beberapa komponen utama, yaitu tingkat ancaman bencana (hazard), tingkat kerentanan masyarakat (vulnerability), serta kapasitas daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana (capacity). Melalui pengukuran terhadap komponen-komponen tersebut, Indeks Risiko Bencana dapat



memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang dihadapi suatu daerah terhadap berbagai jenis bencana.

Nilai Indeks Risiko Bencana digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana. Semakin rendah nilai indeks risiko bencana, maka semakin baik tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan daerah dalam mengelola serta mengurangi dampak bencana. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menurunkan tingkat risiko bencana di suatu wilayah.

III.2. Capaian Kinerja Urusan masing-masing Kegiatan pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai Target dalam Dokumen Anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

Program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri atas 18 (delapan belas) Bidang Urusan Pemerintahan yakni Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga



Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan terdiri atas 8 (delapan) Bidang Urusan Pemerintahan yakni Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Adapun Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdiri atas 8 (delapan) Bidang Urusan yakni Perencanaan, Keuangan, Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, Pengadaan, Hubungan dengan Perwakilan Daerah dan Pelayanan Publik. Secara rinci masing-masing capaian program dapat terlihat pada tabel capaian program pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

Tabel 92. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

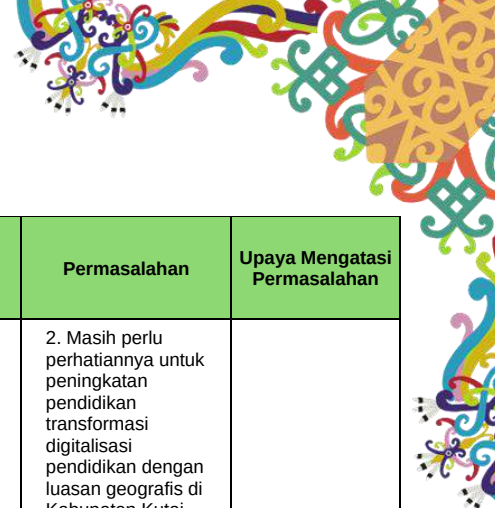
No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1. BIDANG PENDIDIKAN												
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas - APK PAUD - APK SD Sederajat - APM SD sederajat - Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun - Angka putus sekolah SD - APK SMP Sederajat - APM SMP sederajat - Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun - Angka Putus sekolah SMP - Angka Melek Huruf Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	66,71	1,391,777,152,433	980,335,699,507	1. Waktu ket:Dikarenakan pelaporan dijadwalkan pada Tanggal 28 Februari 2026 Penilaian SAKIP pada Bulan Juni/Juli 2026. Nilai diatas adalah capaian Tahun 2024	



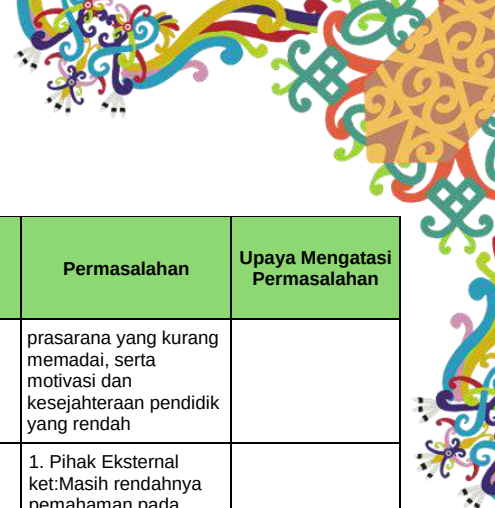
No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	8	2	1.485.611.400	421.388.554	1. Waktu ket:Penyusunan dokumen SAKIP ditetapkan 28 februari 2025	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	71894	71894	1.365.988.380.616	965.997.201.077		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	Dokumen	964	900	766.840.900	336.566.800		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	Orang	771	771	264.566.250	208.293.720		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	Orang/Bulan	23708	23708	2.435.310.600	2.031.162.391		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Unit	30	30	385.903.800	312.156.000		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	Buah	6335	6335	16.087.970.967	7.662.373.006		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	Unit	528	528	4.362.567.900	3.366.557.959		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas - APK PAUD - APK SD Sederajat - APM SD sederajat - Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun - Angka putus sekolah SD - APK SMP Sederajat - APM SMP sederajat - Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun - Angka Putus sekolah SMP - Angka Melek Huruf	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD	Persen	89.71	86.95	831,676,444,590	557,057,089,669	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP	Persen	88.71	83.42			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD	Persen	83.02	103.59			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan	

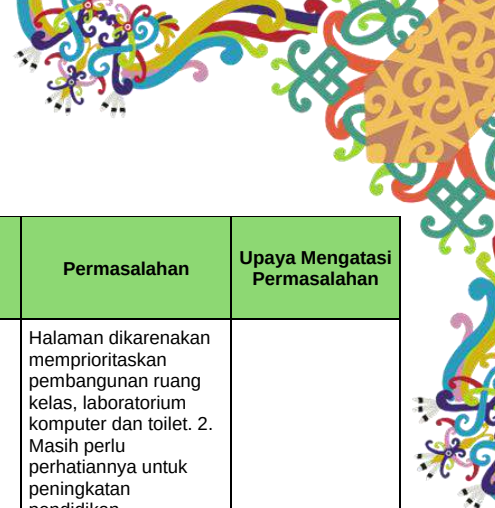
No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan	Persen	68.38	92.13			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih banyaknya data DTKS dan data capil yang tidak sinkron sehingga menyebabkan data anak tidak sekolah (ATS) menjadi tinggi	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	3000	201				
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	92.94	99	416.044.597.552	262.825.268.564	1. Anggaran ket:1. Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan. 2. Masih rendahnya program musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	88.65	90			1. Anggaran ket: Tingkat kopetensi murid yang harus di tingkatkan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	95.23	61			1. Anggaran ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	85.65	87			1. Anggaran ket: 1. Masih rendahnya anggaran untuk Pembanguann Ruang Tata Usaha, Pembangunan Ruang UKS dan Pembangunan Halaman SD dikarenakan memprioritaskan pembangunan ruang kelas, laboratorium komputer dan toilet.	



No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Masih perlu perhatiannya untuk peningkatan pendidikan transformasi digitalisasi pendidikan dengan luasan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi hambatan dalam jangkauan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	98.23	66			1. Anggaran ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	76.23	51			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 2. Regulasi/Peraturan ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 3. Anggaran ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana	

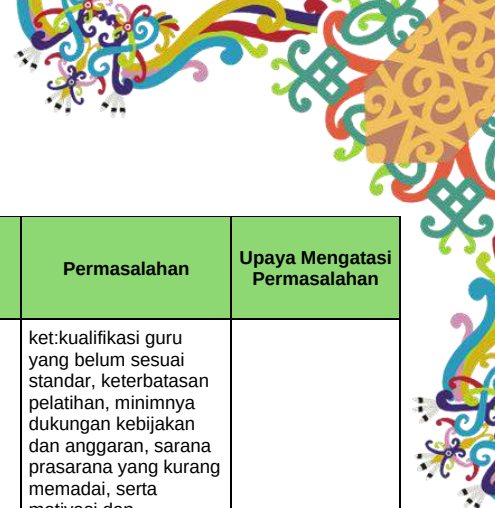


No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	89.08	98			1. Pihak Eksternal ket:Masih rendahnya pemahaman pada satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data dan menindak lanjuti hasil rapor pendidikan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar penilaian Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	86.08	54			1. Anggaran ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP	Persen	90.37	54	229.539.992.354	155.377.833.391	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan. 2. Masih rendahnya peningkatan program musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar isi Pendidikan SMP	Persen	85.94	92			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kopetensi murid yang harus di tingkatkan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar proses Pendidikan SMP	Persen	92.94	65			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP	Persen	80.8	80			1. Anggaran ket:1. Masih rendahnya anggaran untuk Pembanguann Ruang Tata Usaha, Pembangunan Ruang UKS dan Pembangunan	



No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Halaman dikarenakan memprioritaskan pembangunan ruang kelas, laboratorium komputer dan toilet. 2. Masih perlu perhatiannya untuk peningkatan pendidikan transformasi digitalisasi pendidikan dengan luasan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi hambatan dalam jangkauan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar pengelolaan Pendidikan SMP	Persen	93.51	93			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Persen	76.8	65			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih rendahnya "Proporsi PTK penggerak : Jumlah guru dan kepala sekolah yang masuk ke dalam program guru penggerak dibagi total guru dan kepala sekolah," serta "Proporsi guru yang menjadi guru penggerak : Jumlah guru yang lulus program guru penggerak dibagi total guru,"	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar pembiayaan Pendidikan SMP	Persen	87.37	90			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih rendahnya pemahaman pada satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data dan menindak lanjuti hasil rapor pendidikan.	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar penilaian Pendidikan SMP	Persen	81.51	72			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD)	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD	Persen	89.83	81	141.500.070.915	112.918.305.404	1. Waktu ket:Masih terdapat satuan PAUD yang belum terdampingi mengingat lokasi relatif jauh dari Puskesmas	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Isi Pendidikan PAUD	Persen	91.58	74			1. Dukungan Pemimpin ket:Perubahan Mindset yang relatif lambat sehingga untuk melakukan adaptasi dengan kurikulum baru agak terhambat	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Proses Pendidikan PAUD	Persen	98.49	84			1. Peralatan ket:Penguasaan TIK yang masih lemah	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Persen	43.84	23.35			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 2.Regulasi/Peraturan ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 3. Anggaran	



No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 4. Dukungan Pemimpin ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD	Persen	73.98	94			1. Anggaran ket:1. Adanya tambahan anggaran ada di APBD Perubahan sehingga kesulitan dalam merencanakan untuk peruntukan pemenuhan parasarana dalam bentuk bangunan. 2. Masih perlu perhatiannya untuk peningkatan pendidikan transformasi digitalisasi pendidikan dengan luasan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi hambatan dalam jangkauan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD	Persen	92.85	89			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Pelaksanaan supervisi yang	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											dilakukan masih belum maksimal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD	Persen	83.55	87			1. Peralatan ket: Di semester awal sebagian sekolah kesulitan membuat SPJ karena kondisi laptop sebagian bermasalah	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Penilaian Pendidikan PAUD	Persen	87.15	91			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Sebagian guru masih lemah dalam penggunaan komputer	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	Persen	68.72	58	44.591.783.769	25.935.682.310	1. Regulasi/Peraturan ket: Standar dan indikator yang digunakan dalam rapor pendidikan berbeda dengan yang digunakan untuk perhitungan sebelumnya. Sehingga harus melakukan penyesuaian Kedua : sebagian personal yang jadi sasaran survey ANBK sebagai dasar perhitungan rapor pendidikan banyak yang belum faham dan mengisi dengan tidak maksimal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Isi Pendidikan Kesetaraan	Persen	72.62	96			1. Regulasi/Peraturan ket: Sebagian indikator untuk pendidikan kesetaraan masih belum terisi atau tidak ditemukan skor dan nilainya pada rapor pendidikan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Proses Pendidikan Kesetaraan	Persen	72.58	63			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Rata-rata rekrutmen tutor baru dilakukan pada	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pertengahan tahun/tahun pelajaran dan baru di bimtek pada penghujung tahun	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesenjangan	Persen	65.53	38			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kesulitan guru/tutor untuk mengikuti program guru penggerak dan Pendidikan Profesi	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Sarana Prasarana Pendidikan Kesenjangan	Persen	67.29	81			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Bertambahnya satuan pendidikan baru SKB yang belum terpenuhi sarana dan prasarannya menyebabkan skor capaian menjadi menurun Tambahan anggaran berada di Perubahan sehingga kesulitan diperuntukan untuk Bangunan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pengelolaan Pendidikan Kesenjangan	Persen	67.58	94			1. Regulasi/Peraturan ket: Adanya perubahan indikator capaian dan sistem penskoran	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pembiayaan Pendidikan Kesenjangan	Persen	62.38	61			1. Pihak Eksternal ket: Perencanaan masih belum berpusat pada Data evaluasi diri	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Penilaian Pendidikan Kesenjangan	Persen	67.43	67			1. Alokasi dan Kapasitas SDM	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Angka Melek Huruf	Persen	99.98	100			1. Pihak Eksternal ket: Angka capaian menurun karena dengan adanya data baru yang bersumber dari DTK dan PTKE ternyata ditemukan tambahan data warga	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											belum tuntas aksara Faktor Kedua : yang bersangkutan setelah dilakukan verifikasi dan diajak untuk nebgikuti program pemberatantasn buta aksara rata-rata tidak mau dengan berbagai alasan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas - APM SD sederajat - APM SMP sederajat	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	Persen	100	100	2,271,233,140	2,064,387,750	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD	Dokumen	2	2	2.271.233.140	2.064.387.750	1. Anggaran ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal 2. Waktu ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	Dokumen	1	1			1. Anggaran ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal 2. Waktu ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD	Dokumen	1	1			1. Anggaran ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Lokal 2. Waktu ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	Dokumen	1	1			1. Anggaran ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal 2. Waktu ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas - APM SD sederajat - APM SMP sederajat	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase terpenuhinya jumlah guru	Persen	95	100	3,772,852,400	3,710,677,000		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD	Rasio	80	80	3.772.852.400	3.710.677.000		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Rasio Guru dengan Peserta didik SD	Rasio	80	80				
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	Rasio	80	80				
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	Persen	100	100	965,422,460	734,337,800		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			- Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun - Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun									
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah Pendidikan Dasar	Dokumen	61	13	-	-	1.Regulasi/Peraturan ket:Sarana dan prasarana tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan kementerian pendidikan Anggaran Ket : Kurangnya anggaran untuk melakukan survey Kelayakan Ijin Pendirian dan Ijin Perpanpajang Operasional Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah PAUD dan Non-Formal	Dokumen	100	477	965.422.460	734.337.800	1. Pihak Eksternal ket:Sarana dan prasarana tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan kementerian pendidikan. Kurangnya anggaran untuk melakukan survey Kelayakan Ijin Pendirian dan Ijin Perpanpajang Operasional Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat 2. Anggaran ket:Sarana dan prasarana tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan kementerian pendidikan. Kurangnya anggaran untuk melakukan survey Kelayakan Ijin	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Pendirian dan Ijin Perpanpajang Operasional Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	
2. KESEHATAN												
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	93,9	509.681.178.936	422.538.850.099	1. Anggaran ket:Efisiensi anggaran dan beberapa kali proses penerbitan DPA yang terlambat sehingga beberapa kegiatan ada yg tidak bisa terlaksana atau tertunda 2. Waktu ket:Efisiensi anggaran dan beberapa kali proses penerbitan DPA yang terlambat sehingga beberapa kegiatan ada yg tidak bisa terlaksana atau tertunda	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	638.505.800	380.964.298		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4	4	420.010.518.089	380.330.475.845		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	63.548.000	59.113.298		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	391.513.000	302.375.073		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	1.261.292.040	1.102.629.688		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	22	14	2.334.523.500	2.320.516.022		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	31.470.036.115	14.397.477.202		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	42	42	1.145.749.000	760.605.465	1. Peralatan ket:Ketersediaan sarana prasarana	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Nilai	32	32	52.365.493.392	22.884.693.208		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Menurunnya Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentasi Balita Stunting	Persen	14,1	102,84	385.412.378.051	301.856.085.716	Menurunnya Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Menurunnya Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Keluarga sehat	Persen	0,4	90				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0,76	110,53				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0,77	116,88				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	0,63	52,38				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0,52	157,69				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0,89	110,11				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0,43	200				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0,48	100				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Persen	78	78	142.911.034.025	130.966.842.103	1. Anggaran ket:Efisiensi anggaran pada beberapa paket pekerjaan yang sudah di anggarakan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terkena efisiensi anggaran 2. Waktu ket:Efisiensi anggaran pada beberapa paket pekerjaan yang sudah di anggarakan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terkena efisiensi anggaran	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan 12 SPM	Persen	100	89,08	232.730.567.130	161.541.427.405		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persen	30	30	2.495.860.596	2.397.840.895		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpantaunya Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persen	100	100	7.274.916.300	6.949.975.313		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	80	118,1	2.520.077.690	1.969.922.731		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	Izin	1500	1195	310.849.360	193.231.000		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	Dokumen	80	80	582.951.690	479.845.600		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Menurunnya Angka	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	100	100	647.615.600	543.402.500		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kematian Bayi - Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat									
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki izin	Persen	100	100	99.370.000	97.835.000		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Kegiatan	15	15	106.185.000	103.840.000		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	942	942	196.415.600	177.445.000		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	253	253	202.265.000	121.080.000		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Capaian RT-PHBS	Persen	36	144,44	1.134.177.000	765.821.313		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas	Persen	50	50	137.129.400	124.371.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Keterbatasan SDM dalam mengadvokasi lintas sektor terkait	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Memanfaatkan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	Persen	55	90	162.128.000	144.216.924		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Desa Siaga aktif dengan UKBM aktif	Persen	36	32,91	834.919.600	497.233.389	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kurangnya kemampuan SDM untuk mengadvokasi lintas sektor terkait	
3. BIDANG PEKERJA UMUM												
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten - Persentase Aksesibilitas Jalan Kabupaten Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik - Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir - Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,25	100	268.211.498.001	207.594.539.588	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Ada nya Efisiensi Pada Alokasi Anggaran	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	0,03	574.195.930	223.521.075	1. Anggaran ket: Belum Terpenuhi	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dokumen	1	0	248.738.699.402	196.076.476.371		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dinilai	Laporan	50	0	136.602.000	97.060.000		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	807.774.000	485.507.996		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PENATAAN RUANG											
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	Persen	100	0	4.538.407.488	2.426.257.292		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	0	12.177.692.481	7.367.003.277		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	50	0	1.238.126.700	918.713.577		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	meningkatkan kualitas layanan irigasi & penanganan banjir - Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0,72	100	166.011.250.453	115.547.530.613		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0,23	100				
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0,03	100				
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi	Hektar (Ha)	0,13	0,13	98.111.643.930	71.497.845.912		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik	Persen	76,51	76,51	67.899.606.523	44.049.684.701		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	meningkatkan kualitas layanan irigasi & penanganan banjir - Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Sistem Drainase	Persen	3,96	100	64.700.000.000	53.116.442.717		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Sistem Drainase	Ha	13	13	64.700.000.000	53.116.442.717		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik - Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	Persen	67,25	100	11.195.459.137	4.680.365.003	1. Anggaran ket:kurangnya anggaran	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Yang Dapat Digunakan	Unit	2	2	11.195.459.137	4.680.365.003	1. Anggaran ket:kurangnya anggaran	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik - Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persen	81,88	100	273.345.845.731	193.766.882.112	1. Anggaran ket:tidak tersedianya anggaran	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungan di kabupaten	Unit	15	15	273.345.845.731	193.766.882.112	1. Anggaran ket:tidak tersedianya anggaran	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten - Persentase Aksesibilitas Jalan Kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	64,95	98,88	948.647.787.668	743.166.387.387	1. Regulasi/Peraturan ket:ada beberapa ruas jalan kabupaten yang mengalami penurunan kondisi jalan dari sebelumnya mantap menjadi tidak mantap, pada tahun 2025 sebanyak 196 ruas jalan kabupaten yang mengalami penurunan kondisi hal ini disebabkan antara lain kendaraan ODOL (over dimension dan over loading) serta kondisi alam dimana akhir-akhir ini	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga beberapa ruas jalan mengalami kerusakan bahkan ada yang mengalami longsor	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Kilometer	1424,39	1408,61	948.647.787.668	743.166.387.387	1. Regulasi/Peraturan ket:ada beberapa ruas jalan kabupaten yang mengalami penurunan kondisi jalan dari sebelumnya mantap menjadi tidak mantap, pada tahun 2025 sebanyak 196 ruas jalan kabupaten yang mengalami penurunan kondisi hal ini disebabkan antara lain kendaraan ODOL (over dimension dan over loading) serta kondisi alam dimana akhir-akhir ini intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga beberapa ruas jalan mengalami kerusakan bahkan ada yang mengalami longsor	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten - Persentase Aksesibilitas Jalan Kabupaten Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik - Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir - Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengembangan Jasa Konstruksi (SOP, Data, Layanan, Instruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)	Persen	100	100	3.699.681.084	560.981.747		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Yang Akan Mengikuti Pelatihan	Orang	310	310	2.125.609.034	434.677.905		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat	Aplikasi	1	1	880.540.910	43.815.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) yang sudah diterbitkan	Buah	1	1	274.362.500	14.240.000		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Tertib Pengawasan, Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Perusahaan	25	25	419.168.640	68.248.842		
4. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	93,58	81,1	129.048.086.605	94.127.204.253	1. Pihak Eksternal ket:1. verifikasi BNBA yang belum valid	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan	Persen	1,26	85,71				
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	Paket	4	4	129.048.086.605	94.127.204.253	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggaran	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	88,3	107	17.384.981.047	13.616.920.210	1. Pihak Eksternal ket:Kerbatasan Kapasitas SDM serta Faktor eksternal seperti cuaca buruk dan kondisi sosial ekonomi	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat / Terpusat	Unit	51	295	17.384.981.047	13.616.920.210		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	97,39	89.449.804.667	79.718.971.967	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Perlunya dukungan anggaran untuk pelatihan, pembinaan dan pengembangan Kapasitas SDM	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	506.075.500	109.193.801		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4	4	66.052.930.096	64.775.840.091		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	106.138.000	81.968.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Keterbatasan Kapasitas SDM dapat Menghambat Pengelolaan BMD	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	231.608.000	76.215.600		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	4.477.750.707	2.716.107.772		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	10	10	984.087.000	208.189.889		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	8.806.382.614	5.845.053.279		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	118	118	8.284.832.750	5.906.403.535		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	17.932.691.948	5.503.089.860	1. Regulasi/Peraturan ket: Belum adanya Penetapan SK Bencana	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100			1. Pihak Eksternal ket: Data penerima manfaat selalu berubah-ubah	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	15	9	1.335.799.000	728.294.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Kabupaten/Kota								
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	Kegiatan	1	1	279.502.000	116.130.000		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/rehab	Unit	19	12	15.306.895.000	4.218.328.400		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dokumen	1	1	1.010.495.948	440.337.460		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	48,19	191,45	2.699.477.998	2.523.139.000	1. Pihak Eksternal ket: Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kualitas permukiman kumuh	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	140.028.000	66.071.000	1. Anggaran ket: Alokasi Anggaran yang terlambat	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area	Hektar (Ha)	2	2	2.559.449.998	2.457.068.000		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak - Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	6,4	20,47	5.431.231.500	4.902.620.519		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	Unit	517	18,18				

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang direnovasi	Unit	517	94	5.431.231.500	4.902.620.519	1. Anggaran ket: adanya pemotongan anggaran (Rasio)	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	4,29	27,97	237.751.944.316	199.940.887.753	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Menekankan pada proses sistematis keterukuran, keterlibatan pemangku kepentingan serta dasar pertimbangan seperti kondisi baseline dan kapasitas sumber daya agar tujuan dan target dpt dipantau dan dicapai secara efektif	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Persen	15,75	15,75	237.751.944.316	199.940.887.753		
5. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah - Jumlah pelanggaran produk hukum daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	82,86	30.750.839.370	26.933.577.539	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Keterbatasan SDM	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	26	26	543.979.475	270.477.240	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Keterbatasan Alokasi dan SDM	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	17	17	22.262.742.405	21.112.799.163		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	-	-		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	17	17	412.875.600	398.027.059		

No	Uraian Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	4	4	800.171.010	388.277.375		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	0	773.980.420	8.929.000	1. Anggaran ket:Anggaran Belum Tersedia	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	4.432.640.270	3.947.623.611		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	84	84	1.524.450.190	807.444.091		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah - Jumlah pelanggaran produk hukum daerah	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persen	86	100	5.219.143.075	4.591.123.556	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggaran	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	Persen	100	100				
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penurunan Angka Penanganan Gangguan Trantibum	Kasus	900	937	4.317.950.650	3.889.836.500		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah PERDA yang ditegakkan	PERDA	3	3	728.922.425	555.934.040	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggaran	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	Satuan Polisi Pamong Praja		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	Orang	3	3	172.270.000	145.353.016	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	88,29	15.961.643.197	13.737.568.641	1. Manajemen Resiko ket:Manajemen Resiko	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen	83	89,16			1. Manajemen Resiko ket:Manajemen Resiko	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	617.520.800	593.262.361		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	10.097.374.770	8.735.978.270		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Laporan	39	39	131.650.000	114.723.850		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	5	1	-	-	1. Anggaran ket:Kekosongan Kas Daerah	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	100	100	642.315.800	605.423.970		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	300	71	965.446.817	432.923.793	1. Anggaran ket:Terbatasnya Transfer Anggaran Daerah	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.507.335.010	1.320.904.079		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	87	87	2.000.000.000	1.934.352.318		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana - Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Jumlah Regulasi Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	18,11	78,13	3.019.394.600	2.094.891.133	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Kapasitas SDM Belum Memadai 2. Adanya Pengurangan/Rasionalisasi Anggaran 2. Anggaran ket:1. Kapasitas SDM Belum Memadai 2. Adanya Pengurangan/Rasionalisasi Anggaran	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	19,55	81,59			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Kapasitas SDM Belum Memadai 2. Adanya Pengurangan/Rasionalisasi Anggaran 2. Anggaran ket:1. Kapasitas SDM Belum Memadai 2. Adanya Pengurangan/Rasionalisasi Anggaran	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100			1. Peralatan ket:Peralatan	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	18,11	2,8	361.212.400	252.716.180	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, Koordinasi Dengan Stakeholder Lainnya Belum Optimal 2. Pihak Eksternal ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, Koordinasi Dengan Stakeholder Lainnya Belum Optimal 3. Anggaran ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, Koordinasi Dengan Stakeholder Lainnya Belum Optimal	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100	90	1.070.602.000	686.946.802	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, waktu pelaksanaan Belum Optimal 2. Pihak Eksternal ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, waktu pelaksanaan Belum Optimal 3. Anggaran ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, waktu pelaksanaan Belum Optimal	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	1.119.335.600	762.459.177	1. Peralatan ket:Peralatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	1,96	468.244.600	392.768.974		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	80,56	30.228.011.845	25.000.635.374		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen	72	80,56				
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30	29	237.924.544	165.193.340		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	28	28	16.563.872.583	14.002.052.288		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Laporan	9	6	35.702.500	28.670.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Pengamanan BMD SKPD memerlukan dukungan alokasi kapasitas SDM	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	56	2	32.043.311	7.520.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	130	62	1.659.085.419	1.117.402.249		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	3	11,11	487.240.000	487.240.000		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	25	30,55	10.212.373.488	8.482.910.297		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	83	80	999.770.000	709.647.200		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran - Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) - Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia - Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	2.640.914.981	1.516.875.435	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Trdapat Kesalahan dalam Penentuan Target Seharusnya Satuannya adalah menit bukan persen	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran) "	Kelompok	5	100			1. Anggaran ket:Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana,Personil dan Sumber Daya Manusia (Keahlian)	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana,Personil dan Sumber Daya Manusia (Keahlian) 2. Peralatan ket:Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana,Personil dan Sumber Daya Manusia (Keahlian) 3. Anggaran ket:Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana,Personil dan Sumber Daya Manusia (Keahlian)	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	2.202.876.210	1.239.386.535		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	103.461.274	87.601.500	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. kurangnya respon objek pendataan sarana prasarana kebakaran menyampaikan data sapras proteksi bangunan gedung 2. Dalam pelaksanaan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran belum tersedianya aparatur yang memiliki kopetensi sesuai regulasi 2. Pihak Eksternal ket:1. kurangnya respon objek pendataan sarana prasarana kebakaran menyampaikan data sapras proteksi bangunan gedung 2. Dalam pelaksanaan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran belum	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai regulasi	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen	Dokumen	1		-	-		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelompok	310	310	147.425.334	61.916.200	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Belum memadainya peralatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan relawan 2. Kurang tersedianya sdm yang tersertifikasi yang memiliki kapasitas sebagai narasumber 2. Peralatan ket:Belum memadainya peralatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan relawan 2. Kurang tersedianya sdm yang tersertifikasi yang memiliki kapasitas sebagai narasumber	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi dan Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusi	Persen	100	107,14	187.152.163	127.971.200		
6. BIDANG SOSIAL												
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial - Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82	89,72	14.900.500.981	12.949.197.453	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas 2. Regulasi/Peraturan ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	82	73,57	514.524.615	213.344.500	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas 2. Regulasi/Peraturan ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	82	73,57			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas 2. Regulasi/Peraturan ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	20	20	11.455.839.804	10.242.668.737	1. Anggaran ket:Keterbatasan kemampuan keuangan daerah	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	20	20			1. Anggaran ket:Keterbatasan kemampuan keuangan daerah	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	121.140.500	94.214.800	1. Anggaran ket:Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik walaupun terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial			Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	4			1. Anggaran ket: Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik walaupun terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	75	56,25	19.364.800	12.078.800	1. Anggaran ket: Proses Pelaksanaan Kegiatan masih berjalan dengan baik meskipun belum maksimal terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2			1. Pihak Eksternal ket: Pelaksanaan Kegiatan masih berjalan dengan baik meskipun belum maksimal terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	744.861.401	662.477.673	1. Pihak Eksternal ket: Pelaksanaan Kegiatan masih berjalan baik meskipun masih bertahap di karena kondisi keuangan daerah, harus mendahulukan belanja skala prioritas yang tinggi (urgen) 2. Anggaran ket: Pelaksanaan Kegiatan masih berjalan baik meskipun masih bertahap di karena kondisi keuangan daerah, harus mendahulukan belanja skala prioritas yang tinggi (urgen)	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	101.439.134	101.056.997	1. Anggaran ket: Pelaksanaan Kegiatan Tetap berjalan meskipun belum maksimal terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	Bulan	12	12	1.312.888.327	1.171.130.017		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					disediakan							
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	630.442.400	452.225.929	1. Anggaran ket: Pelaksanaan Kegiatan Tetap berjalan meskipun belum maksimal terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	92	99,01	5.149.768.480	5.073.216.655	1. Anggaran ket: Anggaran kegiatan peningkatan SDM terfokus pada pembayaran PSM, TSKS, PUSKESOS, sehingga mencapai 99 % pembayaran jasa pergeseran anggaran mengurangi nilai makna Pengembangan SDM PSKS 2. Waktu ket: Anggaran kegiatan peningkatan SDM terfokus pada pembayaran PSM, TSKS, PUSKESOS, sehingga mencapai 99 % pembayaran jasa pergeseran anggaran mengurangi nilai makna Pengembangan SDM PSKS	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	Orang	50	50	16.006.900	12.695.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: di harapkan di Buat Peraturan Daerah tentang mekanisme di sesuaikan dengan kearifan lokal di Kab. Kutai Kartanegara. 2. Regulasi/Peraturan ket: di harapkan di Buat Peraturan Daerah tentang mekanisme di sesuaikan dengan kearifan lokal di Kab. Kutai Kartanegara. 3. Anggaran ket: di harapkan di Buat Peraturan Daerah tentang mekanisme di sesuaikan dengan kearifan lokal di Kab. Kutai Kartanegara.	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	Orang	70	70	5.133.761.580	5.060.521.655	1. Anggaran ket: Anggaran terfokus pada pembayaran SDM PUSKESOS, PSM TSKS ,	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											SDM PSKS perlu peningkatan kapasitas pengelolaan manajemen publik speking dll kedepan perlu perhatian khusus	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Persen	100	100	24.809.200	15.930.000		
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Orang	5	5	24.809.200	15.930.000		
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	83,5	4.441.865.290	3.676.728.280	1. Anggaran ket:1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti tidak dapat dilaksanakan secara Maksimal dengan berkurangnya anggaran kegiatan. 2. Untuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti belum dapat dilaksanakan karena jumlah kuota yang terbatas di Dinas Sosial Provinsi.	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	Orang	1250	1217	4.004.515.580	3.412.331.680	1. Anggaran ket:1. Pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dengan kurangnya anggaran kegiatan. 2. Untuk pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti belum dapat dilaksanakan karena jumlah kuota yang terbatas di Dinas Sosial Provinsi.	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	Orang	320	202	437.349.710	264.396.600	1. Anggaran ket:1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Tidak dapat	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial						dilaksanakan secara maksimal dengan berkurangnya anggaran kegiatan. 2. Untuk Pelayanan Rehabilitas Sosial di dalam panti belum dapat dilaksanakan karena jumlah kuota terbatas di Dinas Sosial Provinsi.	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	97,83	100	5.085.831.650	4.376.732.176		
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial			Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	Persen	100	97,63				
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara	Orang	40	12	1.099.896.400	697.940.300	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya efisiensi Anggaran dan penagihan pembayaran belanja yang tidak lancar, serta kurangnya kapasitas penampungan.	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	Dokumen	2	1,99	3.985.935.250	3.678.791.876	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya efisiensi anggaran, target awal tidak sesuai karena mengacu pada DTSEN, hasil pemuktahiran data ditetapkan oleh BPS Pusat. 2. Pihak Eksternal ket:Adanya efisiensi anggaran, target awal tidak sesuai karena mengacu pada DTSEN, hasil pemuktahiran data ditetapkan oleh BPS Pusat. 3. Anggaran ket:Adanya efisiensi anggaran, target awal tidak sesuai karena mengacu pada DTSEN, hasil pemuktahiran data ditetapkan oleh BPS Pusat.	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	1.575.822.090	757.846.110	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Rasionalisasi anggaran, menunggu proses APBDP, kesiapan SDM yang masih rendah, Pihak eksternal dapat menghambat penanganan bencana melalui kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana 2. Pihak Eksternal ket:Rasionalisasi anggaran, menunggu proses APBDP, kesiapan SDM yang masih rendah, Pihak eksternal dapat menghambat penanganan bencana melalui kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana 3. Anggaran ket:Rasionalisasi anggaran, menunggu proses APBDP, kesiapan SDM yang masih rendah, Pihak eksternal dapat menghambat penanganan bencana melalui kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Perlindungan Sosial	KK	1500	2709	1.275.822.090	577.964.910	1. Anggaran ket:Ketiadaan Anggaran	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana	Desa/Kelurahan	12	0	300.000.000	179.881.200	1. Anggaran ket:Rasionalisasi anggaran	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang di kelola	Persen	100	100	1.774.204.000	1.601.242.182	1. Anggaran ket:Anggaran kurang dan pekerjaan rehab dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan masih perlu dilakukan	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	Lokasi	2	2	1.774.204.000	1.601.242.182		
7. BIDANG TENAGA KERJA												
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	73	98,3	12.605.992.012	10.530.350.513	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Dokumentasi pelaksanaan kegiatan	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	460.385.021	303.429.390		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	10.164.857.601	8.960.467.581		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Laporan	1	1	81.086.000	38.760.000		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	69	95	170.643.000	93.104.792		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	2	274.535.070	244.687.805		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	1	1	42.670.000	32.528.450		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	886.075.320	629.162.821		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	30	5	525.740.000	228.209.674		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	148.167.500	123.932.630	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Tertindakannya	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kerja	kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru - Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Ditempatkan								kegiatan	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	1	1	148.167.500	123.932.630	1. Anggaran ket:Anggaran sangat kurang untuk Pelaksanaan Penyusunan RTKD terkaid dana pendampingan dari Narasumber 2. Dukungan Pemimpin ket:Anggaran sangat kurang untuk Pelaksanaan Penyusunan RTKD terkaid dana pendampingan dari Narasumber	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing, - Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	24,34	19,68	3.143.833.400	2.910.553.348		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	Unit	3	100			1. Anggaran ket:Efisiensi	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	300	183	3.089.095.000	2.887.333.348	1. Anggaran ket:adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pembatalan beberapa program pelatihan yang telah direncanakan, sehingga pelatihan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk jenis pelatihan yang paling cepat memberikan peluang kerja bagi peserta	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	Lembaga	11	15	15.225.850	10.060.000	1. Manajemen Resiko ket:Hambatan dalam penerapan manajemen risiko antara lain disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran organisasi terhadap pentingnya identifikasi dan mitigasi risiko sejak awal perencanaan kegiatan. Selain itu, belum tersedianya pedoman atau sistem yang terintegrasi	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											dalam pengelolaan risiko, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen risiko, serta keterbatasan data dan informasi yang akurat turut menjadi kendala dalam penerapan manajemen risiko secara efektif.	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Perusahaan	25	25	15.350.150	9.990.000	1. Manajemen Risiko ket: Hambatan utama dalam pelaksanaan konsultasi ini adalah belum optimalnya penerapan manajemen risiko di tingkat perusahaan kecil. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya identifikasi risiko usaha, mitigasi, dan pengendalian risiko sebagai bagian dari strategi peningkatan efisiensi dan keberlanjutan usaha.	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Persen	25	0	24.162.400	3.170.000	1. Anggaran ket: Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengukuran produktivitas adalah terbatasnya anggaran akibat kebijakan efisiensi	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru - Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Ditempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	12,35	809,72	6.594.047.540	4.566.360.044		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan antar kerja	Layanan	2	2	6.384.574.840	4.369.410.104	1. Peralatan ket: 1. Ada beberapa item barang belum ada di SIPD karena harus diusulkan melalui Aplikasi Simaston. 2. Adanya beberapa kali Efisiensi Anggaran sehingga target berkurang 2. Regulasi/Peraturan ket: 1. Ada beberapa item barang belum ada di SIPD karena harus diusulkan melalui Aplikasi Simaston. 2. Adanya beberapa kali Efisiensi Anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											sehingga target berkurang	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	0	-	-	1. Anggaran ket: tidak bisa dilaksanakn	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	Event	1	1	209.472.700	196.949.940	1. Pihak Eksternal ket: Perusahaan yang belum melaporkan hasil rekrutmen kegiatan	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan Dinamis - Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	Persen	100	99,78	8.848.883.950	6.666.718.143	1. Anggaran ket: Karena Efisiensi	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	Perusahaan	28	43	248.792.900	158.339.310		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundang Undangan	Perusahaan	65	27	8.600.091.050	6.508.378.833		
8. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	76,5	92,5	7.980.179.999	7.185.372.670		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	484.593.100	435.033.635		



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	40	40	6.428.000.746	5.732.707.103		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	57.616.000	49.616.000		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	69.724.250	68.910.000		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	389.759.192	375.444.515		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	30	30	78.835.200	71.782.000		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	376.875.511	367.743.417		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	23	23	94.776.000	84.136.000		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	22,92	100	874.299.660	818.445.871		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang dilembagakan	OPD	56	52	191.585.026	177.257.566		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Orang	28	26	394.988.734	386.866.705		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga	28	26	287.725.900	254.321.600		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	734.344.020	646.217.720		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan pada perangkat daerah	OPD	11	11	197.565.500	143.593.248		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi	Kasus	50	50	327.896.920	307.271.472		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan Perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	10	10	208.881.600	195.353.000		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Persen	77,8	100	353.909.340	295.344.095		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Lembaga	3	3	104.620.400	79.691.915	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Efisiensi Anggaran sehingga harus penyesuaian di beberapa hal 2. Waktu ket:Efisiensi Anggaran sehingga harus penyesuaian di beberapa hal	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Kecamatan	2	2	249.288.940	215.652.180	1. Peralatan ket:penyesuaian efisiensi anggaran 2. Anggaran ket:penyesuaian efisiensi anggaran	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Persen	80,77	100,28	120.731.500	120.071.400		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Dokumen	2	2	120.731.500	120.071.400		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	790	88,35	1.821.120.820	1.466.815.925		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk	Lembaga	5	5	-	-		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan/kelurahan/desa menginisiasi layak Anak	Desa/Kelurahan	7	7	1.821.120.820	1.466.815.925	1. Anggaran ket:efisiensi anggaran sehingga harus dilakukan penyesuaian	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	1.690.266.179	1.488.333.265		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah	Lembaga	20	20	330.705.700	247.233.553		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	Orang	100	112	938.139.899	923.742.621		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	Desa	17	10	421.420.580	317.357.091		
9. BIDANG PANGAN												
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	85,65	14.658.764.757	12.222.401.143		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	16	16	572.354.600	523.816.364		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	8.913.511.589	7.614.147.417		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	67.262.000	53.816.500		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	9	198.374.000	190.299.850		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	12	12	901.745.737	808.314.854		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang	Unit	104	140	3.486.563.000	2.547.874.170		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	383.953.831	357.517.439		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	30	30	135.000.000	126.614.549		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah - Ketersediaan energi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Unit	10	1,640.00	34.334.168.300	24.112.309.280	1. Waktu ket: Pelaksanaan Kegiatan Tidak tepat waktu, sehingga baru selesai di Bulan desember	
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	164	34.334.168.300	24.112.309.280		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Score Pola Pangan harapan - Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	Kkal/Kapita/Hari	2200	92,5	11.870.272.000	10.021.446.138		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan			Kecukupan Konsumsi Protein	Gram/Kapita/Hari	57,2	110,96				
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	Persen	5	5	9.242.185.600	8.092.824.120		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pangan								
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan cadangan Pangan Pemerintah	Ton	150	3	646.113.000	166.070.200	1. Regulasi/Peraturan ket:karena belum adanya regulasi, jadi kegiatan tidak bisa secara keseluruhan dilaksanakan	
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kelompok	30	30	1.981.973.400	1.762.551.818		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah - Ketersediaan energi	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	Desa	5	360	2.287.948.100	1.922.050.208		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1	1	205.644.000	178.380.417		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani	Desa/Kelurahan	5	5	2.082.304.100	1.743.669.791		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Score Pola Pangan harapan - Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	Persen	92	103,26	843.615.000	634.656.863		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat	Persen	92	95	843.615.000	634.656.863		
10. BIDANG PERTANAHAN												
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahkan Pola Ruang - Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	80	100	3.015.700.060	2.510.502.613	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Penyesuaian Target/Output Terkait Pengurangan anggaran	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	Persen	4	4	1.667.322.880	1.519.517.400		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	Persen	27,29	14,6	406.187.000	210.308.607	1. Anggaran ket:ketersediaan kas daerah terbatas	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	Persen	5,03	5,03	318.695.300	210.501.985		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	Persen	3,77	3,77	623.494.880	570.174.621		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	100	18.427.686.274	16.244.122.495	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kurangnya Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sehingga menghambat kemampuan pegawai dalam pengelolaan SAKIP. 2. Perubahan kebijakan pada implementasi SAKIP 2. Regulasi/Peraturan ket: Kurangnya Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sehingga menghambat kemampuan pegawai dalam pengelolaan SAKIP. 2. Perubahan kebijakan pada implementasi SAKIP	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	570.816.400	386.130.412		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	10.551.148.578	9.480.884.103		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	92.581.970	38.703.700		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	1	664.014.280	430.462.866	1. Anggaran ket: Keterbatasan anggaran yang tersedia	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	749.403.938	682.265.451	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten 2. Penggunaan aplikasi e-purchasing atau e-catalog yang belum optimal (Versi 6) 3. Ketersediaan Anggaran Dana Kas Daerah yang tidak menentu	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Regulasi/Peraturan ket:1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten 2. Penggunaan aplikasi e-purchasing atau e-catalog yang belum optimal (Versi 6) 3. Ketersediaan Anggaran Dana Kas Daerah yang tidak menentu 3. Anggaran ket:1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten 2. Penggunaan aplikasi e-purchasing atau e-catalog yang belum optimal (Versi 6) 3. Ketersediaan Anggaran Dana Kas Daerah yang tidak menentu	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	18	78	2.416.407.000	2.252.020.748	1. Anggaran ket:Ketersediaan Dana/Anggaran Daerah yang tidak menentu pada APBD Perubahan 2025	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	2.236.475.108	2.018.304.660		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	12	12	1.146.839.000	955.350.555		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	95	100	601.530.500	568.521.100	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Sengketa tanah garapan melibatkan banyak pihak dan emosi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka jika tidak ditangani dengan pendekatan komunikasi dan pengelolaan risiko sosial yang baik. (2) Petugas mediasi di tingkat desa/kecamatan terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam teknik mediasi yang efektif dan netral. (3) Sistem pengelolaan kasus masih manual, belum tersedia Sistem Informasi	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Rekapitulasi Data Pengaduan Kasus Tanah yang mendukung pelacakan dan penanganan berbasis data. (4) Ketergantungan pada kehadiran dan komitmen pihak luar (masyarakat, badan hukum, atau instansi) yang terlibat dalam konflik seringkali menjadi hambatan saat proses mediasi tidak direspons dengan baik. 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Sengketa tanah garapan melibatkan banyak pihak dan emosi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka jika tidak ditangani dengan pendekatan komunikasi dan pengelolaan risiko sosial yang baik. (2) Petugas mediasi di tingkat desa/kecamatan terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam teknik mediasi yang efektif dan netral. (3) Sistem pengelolaan kasus masih manual, belum tersedia Sistem Informasi Rekapitulasi Data Pengaduan Kasus Tanah yang mendukung pelacakan dan penanganan berbasis data. (4) Ketergantungan pada kehadiran dan komitmen pihak luar (masyarakat, badan hukum, atau instansi) yang terlibat dalam konflik seringkali menjadi hambatan saat proses mediasi tidak direspons dengan baik. 3. Manajemen Resiko ket: Sengketa tanah garapan melibatkan banyak pihak dan emosi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka jika tidak ditangani dengan pendekatan komunikasi dan pengelolaan risiko sosial	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											yang baik. (2) Petugas mediasi di tingkat desa/kecamatan terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam teknik mediasi yang efektif dan netral. (3) Sistem pengelolaan kasus masih manual, belum tersedia Sistem Informasi Rekapitulasi Data Pengaduan Kasus Tanah yang mendukung pelacakan dan penanganan berbasis data. (4) Ketergantungan pada kehadiran dan komitmen pihak luar (masyarakat, badan hukum, atau instansi) yang terlibat dalam konflik seringkali menjadi hambatan saat proses mediasi tidak direspons dengan baik.	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	601.530.500	568.521.100	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cenderung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public 2. Peralatan ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cenderung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public 3. Pihak Eksternal ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cenderung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaan anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public 4. Anggaran ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cenderung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaan anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak	

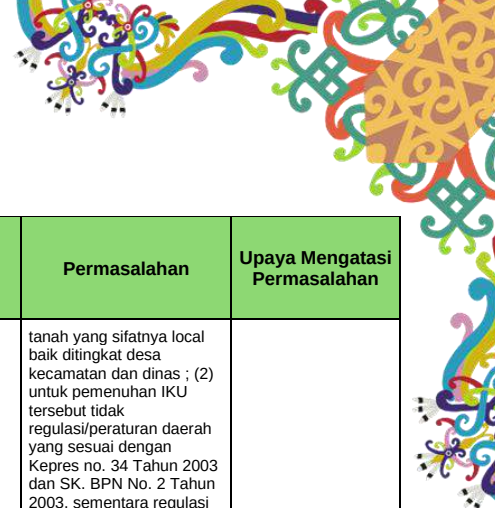
No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public 5. Waktu ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cenderung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	85	76,47	21.549.494.120	15.511.538.995	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Data dan lokasi yang disampaikan OPD yang memerlukan tanah kurang lengkap dan lokasi yang ditetapkan belum ada kepastian.	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	8	7	21.549.494.120	15.511.538.995	1. Pihak Eksternal ket:Sengketa Waris dan kurangnya respon OPD yang memerlukan tanah	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	Persen	95	100	442.738.020	243.908.650	1. Regulasi/Peraturan ket:- Diakhir tahun kepastian pembayaran 2. Anggaran ket:- Diakhir tahun kepastian pembayaran	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian	Dokumen	4	4	345.100.020	175.455.650		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tanah kebelbihan maksimum							
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	97.638.000	68.453.000		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	Persen	60	10,03	135.082.950	15.146.200	1. Regulasi/Peraturan ket:- belum ada kejelasan batas batas tanah adat yang dikuasai MHA, belum ada Kajian dari BRIDA dan pihak lain terkait adanya tanah ulayat di Kukar 2. Pihak Eksternal ket:- belum ada kejelasan batas batas tanah adat yang dikuasai MHA, belum ada Kajian dari BRIDA dan pihak lain terkait adanya tanah ulayat di Kukar 3. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:- belum ada kejelasan batas batas tanah adat yang dikuasai MHA, belum ada Kajian dari BRIDA dan pihak lain terkait adanya tanah ulayat di Kukar	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota	Dokumen	3	1	135.082.950	15.146.200	1. Regulasi/Peraturan ket:Belum ada kejelasan batas tanah adat yang akan diajukan menjadi tanah ulayat 2. Pihak Eksternal ket:Belum ada kejelasan batas tanah adat yang akan diajukan menjadi tanah ulayat 3. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Belum ada kejelasan batas tanah adat yang akan diajukan menjadi tanah ulayat	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase Tanah Aset Pemerintah	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	Persen	70	94,29	411.662.306	254.330.087	1. Pihak Eksternal ket:Lahan dalam sengketa - Lokasi masuk di dalam HGU, WKP Pertamina, HPL Transmigrasi - Pajak PBB belum ada - Batas tanah belum jelas -	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Yang Bersertifikat								Kendaraan Operasional tidak ada	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	Dokumen	1	1	48.092.000	27.919.800	1. Pihak Eksternal ket:dokumen kelengkapan pembebasan asset daerah tidak lengkap/ tidak ada, patok batas bidang tidak ada 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:dokumen kelengkapan pembebasan asset daerah tidak lengkap/ tidak ada, patok batas bidang tidak ada	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kegiatan	2	2	363.570.306	226.410.287	1. Pihak Eksternal ket:Anggaran untuk kegiatan belum tersedia untuk penaganaan lahan dalam sengketa lokasi masuk HGU, WKP Pertamina, HPL Transmigrasi Pajak PBB belum ada batas tanah belum jelas Kendaraan Operasioanal tidak ada 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Anggaran untuk kegiatan belum tersedia untuk penaganaan lahan dalam sengketa lokasi masuk HGU, WKP Pertamina, HPL Transmigrasi Pajak PBB belum ada batas tanah belum jelas Kendaraan Operasioanal tidak ada	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	85	100	685.310.206	656.265.225	1. Regulasi/Peraturan ket:1) Tenaga teknis di desa/kecamatan dan dinas masih terbatas dalam memahami mekanisme IMT, verifikasi lapangan, dan penyusunan berita acara penetapan. (2) Masih ada kekhawatiran bahwa penerapan IMT bisa memicu konflik pertanahan atau protes masyarakat jika tidak didahului dengan sosialisasi dan mitigasi risiko. (3) Ketergantungan pada instansi lain (BPN, kecamatan, desa, perusahaan pemegang izin	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											HGU/IUP) dalam penyediaan data atau kesepakatan, bisa menjadi hambatan bila koordinasi lemah. (4) Keterbatasan akses terhadap data spasial (GIS), peta terbaru, atau perangkat lunak yang mendukung pemetaan dan overlay tanah negara menyulitkan updating data. 2. Pihak Eksternal ket:1) Tenaga teknis di desa/kecamatan dan dinas masih terbatas dalam memahami mekanisme IMT, verifikasi lapangan, dan penyusunan berita acara penetapan. (2) Masih ada kekhawatiran bahwa penerapan IMT bisa memicu konflik pertanahan atau protes masyarakat jika tidak didahului dengan sosialisasi dan mitigasi risiko. (3) Ketergantungan pada instansi lain (BPN, kecamatan, desa, perusahaan pemegang izin HGU/IUP) dalam penyediaan data atau kesepakatan, bisa menjadi hambatan bila koordinasi lemah. (4) Keterbatasan akses terhadap data spasial (GIS), peta terbaru, atau perangkat lunak yang mendukung pemetaan dan overlay tanah negara menyulitkan updating data.	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	2	2	685.310.206	656.265.225	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak pernah diperoleh, karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sedia petunjuk teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2)	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPRD Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPRD melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudia tidak supportnya anggarran urusan pertanahan baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melaui opda urusan pertanahan/ dppr 2. Peralatan ket:IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak pernah diperoleh, karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sedia petunjuk teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka	



No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2) untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPPR Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPPR melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudia tidak supportnya anggarran urusan pertanahan baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melaui opda urusan pertanahan/ dppr 3. Regulasi/Peraturan ket.IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak pernah diperoleh, karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sedia petunjuk	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2) untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPRD Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPRD melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudian tidak supportnya anggaran urusan pertanahan baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melalui opda urusan pertanahan/ DPRD 4. Waktu ket:IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pernah diperoleh, karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sedia petunjuk teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2) untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPRD Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPRD melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudia tidak supportnya anggaran urusan pertanahan baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melaui opda urusan pertanahan/ dppr	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah	Persen	79	87,08	290.689.400	275.383.350	1. Peralatan ket:sarana mobilitas / ketersediaan kendaraan lapangan yang siap untuk	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			pertanahan - Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat								medan sulit tidak tersedia, - alat pendukung kerja untuk pengolahan data masih kurang	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen	3	3	290.689.400	275.383.350	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:SDM teknis masih diperlukan - Peralatan penunjang masih diperlukan - penyediaan percepatan target kerja oleh tenaga pihak ketiga yang berlisensi dibutuhkan 2. Peralatan ket:SDM teknis masih diperlukan - Peralatan penunjang masih diperlukan - penyediaan percepatan target kerja oleh tenaga pihak ketiga yang berlisensi dibutuhkan 3. Pihak Eksternal ket:SDM teknis masih diperlukan - Peralatan penunjang masih diperlukan - penyediaan percepatan target kerja oleh tenaga pihak ketiga yang berlisensi dibutuhkan	
11.BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,56	109,75	35.668.167.012	29.934.608.271	1. Anggaran ket:Adanya Efisiensi anggaran di Triwulan IV	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	508.468.740	440.134.777	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan , kurang nya komitmen dan akuntabilitas, adanya resistensi untuk meng adopsi metode yang	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											baru, penggunaan data yang tidak lengkap dan akurat. 2. Peralatan ket: Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, kurang nya komitmen dan akuntabilitas, adanya resistensi untuk mengadopsi metode yang baru, penggunaan data yang tidak lengkap dan akurat. 3. Regulasi/Peraturan ket: Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, kurang nya komitmen dan akuntabilitas, adanya resistensi untuk mengadopsi metode yang baru, penggunaan data yang tidak lengkap dan akurat. 4. Pihak Eksternal ket: Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, kurang nya komitmen dan akuntabilitas, adanya resistensi untuk mengadopsi metode yang baru, penggunaan data yang tidak lengkap dan akurat. 5. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, kurang nya komitmen dan akuntabilitas, adanya resistensi untuk mengadopsi metode yang baru, penggunaan data yang tidak lengkap dan akurat. 6. Dukungan Pemimpin ket: Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, kurang nya komitmen dan akuntabilitas, adanya resistensi untuk mengadopsi metode yang baru, penggunaan data yang tidak lengkap dan akurat.	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	1	17.635.314.446	15.912.548.993		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	2	2	65.878.000	36.010.000	1. Peralatan ket: Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah. Sistem pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan. Kurangnya koordinasi dengan Lembaga. 2. Regulasi/Peraturan ket: Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah. Sistem pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan. Kurangnya koordinasi dengan Lembaga. 3. Pihak Eksternal ket: Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah. Sistem pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan. Kurangnya koordinasi dengan Lembaga. 4. Anggaran ket: Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah. Sistem pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan. Kurangnya	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											koordinasi dengan Lembaga. 5. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah. Sistem pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan. Kurangnya koordinasi dengan Lembaga. 6. Manajemen Resiko ket: Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah. Sistem pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan. Kurangnya koordinasi dengan Lembaga. 7. Waktu ket: Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah. Sistem pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan. Kurangnya koordinasi dengan Lembaga.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase Wajib Retribusi Daerah yang Diadministrasikan	Persen	100	0	-	-	1. Anggaran ket: adanya efesiensi anggaran sehingga anggaran kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dan akan di alihkan pagu anggaran nya pada sub kegiatan lain pada renja perubahan	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	96.986.680	76.772.599	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kualitas SDM aparatur yang masih	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											rendah, kurangnya pelatihan dan rendahnya disiplin, pengelolaan data kepegawaian yang tidak baik, tidak akurat dan terintegritasi, dukungan pimpinan yang kurang, keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem dan SDM. Pelayanan publik tidak optimal, kinerja pegawai tidak maksimal. 2. Regulasi/Peraturan ket: Kualitas SDM aparatur yang masih rendah, kurangnya pelatihan dan rendahnya disiplin, pengelolaan data kepegawaian yang tidak baik, tidak akurat dan terintegritasi, dukungan pimpinan yang kurang, keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem dan SDM. Pelayanan publik tidak optimal, kinerja pegawai tidak maksimal. 3. Pihak Eksternal ket: Kualitas SDM aparatur yang masih rendah, kurangnya pelatihan dan rendahnya disiplin, pengelolaan data kepegawaian yang tidak baik, tidak akurat dan terintegritasi, dukungan pimpinan yang kurang, keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem dan SDM. Pelayanan publik tidak optimal, kinerja pegawai tidak maksimal. 4. Anggaran ket: Kualitas SDM aparatur yang masih rendah, kurangnya pelatihan dan rendahnya disiplin, pengelolaan data kepegawaian yang tidak baik, tidak akurat dan terintegritasi, dukungan pimpinan yang kurang, keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem dan SDM. Pelayanan publik	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											tidak optimal.kinerja pegawai tidak maksimal. 5. Manajemen Resiko ket:Kualitas SDM aparatur yang masih rendah,kurangnya pelatihan dan rendahnya disiplin.pengelolaan data kepegawaian yang tidak baik ,tidak akurat dan terintegrasi.dukungan pimpinan yang kurang.keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem dan SDM.Pelayanan publik tidak optimal.kinerja pegawai tidak maksimal.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2.235.162.866	1.687.414.281	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kualitas SDM Aparatur yang tidak kompeten,tidak profesional dan tidak memiliki integritas.sistem dan prosedur tidak terlaksana dan tidak jelas untuk mendorong kelancaran tugas.budaya kerja yang kurang baik yang tidak fokus pada hasil. 2. Regulasi/Peraturan ket:Kualitas SDM Aparatur yang tidak kompeten,tidak profesional dan tidak memiliki integritas.sistem dan prosedur tidak terlaksana dan tidak jelas untuk mendorong kelancaran tugas.budaya kerja yang kurang baik yang tidak fokus pada hasil. 3. Anggaran ket:Kualitas SDM Aparatur yang tidak kompeten,tidak profesional dan tidak memiliki integritas.sistem dan prosedur tidak terlaksana dan tidak jelas untuk mendorong kelancaran tugas.budaya kerja yang kurang baik yang tidak fokus pada hasil. 4. Waktu ket:Kualitas SDM Aparatur yang tidak kompeten,tidak	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											profesional dan tidak memiliki integritas.sistem dan prosedur tidak terlaksana dan tidak jelas untuk mendorong kelancaran tugas.budaya kerja yang kurang baik yang tidak fokus pada hasil.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	65,5	65,5	10.602.943.928	9.693.271.850	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan proses menjadi tidak optimal 2. Peralatan ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan proses menjadi tidak optimal 3. Regulasi/Peraturan ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan proses menjadi tidak optimal 4. Pihak Eksternal ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan proses menjadi tidak optimal 5. Anggaran ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											proses menjadi tidak optimal 6. Waktu ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan proses menjadi tidak optimal	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	2.457.733.379	1.826.740.574		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	65,5	65,5	1.712.730.000	261.715.197	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kompetensi dan kesadaran masih rendah, ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan, kelemahan sistem inventarisasi dan pencatatan, kendala infrastruktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak terpelihara. 2. Peralatan ket: Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kompetensi dan kesadaran masih rendah, ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan, kelemahan sistem inventarisasi dan pencatatan, kendala infrastruktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak terpelihara. 3. Regulasi/Peraturan ket: Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kompetensi dan kesadaran masih rendah, ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan, kelemahan sistem inventarisasi dan pencatatan, kendala infrastruktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak terpelihara. 4. Pihak Eksternal ket: Sumber daya manusia	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											yang pemahaman regulasi kompetensi dan kesadaran masih rendah, ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan. kelemahan sistem inperterisasi dan pencatatan. kendala infra struktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak terpelihara. 5. Anggaran ket: Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kompetensi dan kesadaran masih rendah, ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan. kelemahan sistem inperterisasi dan pencatatan. kendala infra struktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak terpelihara. 6. Manajemen Resiko ket: Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kompetensi dan kesadaran masih rendah, ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan. kelemahan sistem inperterisasi dan pencatatan. kendala infra struktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak terpelihara. 7. Waktu ket: Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kompetensi dan kesadaran masih rendah, ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan. kelemahan sistem inperterisasi dan pencatatan. kendala infra struktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak terpelihara.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	100	50	253.797.520	239.709.200	1. Pihak Eksternal ket: Dokumen DIKPLHD telah disusun tetapi masih belum Final dikarenakan masih menunggu terselesainya proses input data pada aplikasi IKLH	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)									
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	Dokumen	2	1	253.797.520	239.709.200	1. Pihak Eksternal ket:Dokumen IKLH telah disusun tetapi masih belum Final dikarenakan masih menunggu terselesainya proses input data pada aplikasi IKLH	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS	Dokumen			-	-		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	200000	0,29	2.399.969.399	1.549.635.152	1. Regulasi/Peraturan ket:1.Bahwa lahan yang akan ditanami seluas 9,8 Ha tidak dapat di tanami,sehingga BPDAS meminta mengajukan permohonan relokasi seluas 9,8 Ha. 2.Karena adanya relokasi pembelian bibit mangrove sejumlah 16.500 pot dibatalkan dan di ganti dengan tanaman buah buahan 3.Diakibatkan Efesiensi maka pengurangan anggaran menjadi Rp.84.140,000,- dan ini juga dilakukan anggaran perubahan bulan desember yang memperpendek pengadaan barang dan jasa sejumlah 580 bibit tanaman dengan realisasi pagu anggaran Rp. 43.800,000,-	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	4	1.417.878.339	1.015.336.552		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan	1	1	295.789.800	64.985.000		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	686.301.260	469.313.600	1. Pihak Eksternal ket:Untuk kegiatan rehabilitasi adanya rekomendasi dari BPDAS	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Mahakam Berau terkait lahan yang digunakan masyarakat sebagai lahan tambak ikan untuk penanaman mangrove dilahan rehab DAS.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	Persen	20	100	3.236.304.662	2.512.090.900		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tercapainya Penanaman dan Pemeliharaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	24,19	24,19	3.236.304.662	2.512.090.900		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Tercapainya Pengayaan Pengelolaan Kebun Raya	Persen	34	17			1. Anggaran ket:Dikarenakan keterlambatan ketersediaan Kasda sehingga Pengadaan Bibit gagal dilaksanakan	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	2	2				
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	3	66,67	191.243.320	166.908.480	1. Anggaran ket:Adanya Efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan seminar teknis pada pelaku usaha tidak bisa di laksanakan.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	Pelaku Usaha	50	66,67	53.740.520	29.955.520	1. Pihak Eksternal ket:SDM Kopetensi Terbatas	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	Pelaku Usaha	50	50	137.502.800	136.952.960	1. Pihak Eksternal ket:SDM Kopetensi terkendala	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kehutanan										
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19,32	129,4	288.383.800	232.067.733	1. Anggaran ket:Anggaran yang tersedia sangat minim yang mengakibatkan jumlah target tidak sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	Persen	20	25	288.383.800	232.067.733	1. Anggaran ket:anggaran yang tersedia sangat minim yang mengakibatkan jumlah target tidak sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Persen	75	100	43.548.900	42.245.300	1. Regulasi/Peraturan ket:belum ada nya regulasi yang menyebabkan belum adanya penetapan MHA PPLH	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Persen	75	75	23.788.900	23.555.900	1. Regulasi/Peraturan ket:belum adanya regulasi yang menyebabkan belum adanya penetapan MHA PPLH	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	Persen	70	70	19.760.000	18.689.400	1. Regulasi/Peraturan ket:Belum adanya regulasi mengakibatkan tidak adanya penetapan MHA sehingga pembinaan yang dilakukan tidak dilakukan secara masif	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	Lembaga	35	91,43	232.345.260	113.584.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya regulasi Efisiensi anggaran mengakibatkan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			(IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	UNTUK MASYARAKAT							sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan RENJA. selain itu dengan adanya effesiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk sekolah yang di lakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen.selain effesiensi dana yang tersedia di Pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga di ragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas sub kegiatan yang di laksanakan dan besaran persentase yang di laksanakan. 2. Anggaran ket:Adanya regulasi Efesiensi anggaran mengakibatkan kan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan RENJA. selain itu dengan adanya effesiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk sekolah yang di lakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen.selain effesiensi dana yang tersedia di Pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga di ragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas sub kegiatan yang di laksanakan dan besaran persentase yang di laksanakan.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Kali	35	22	232.345.260	113.584.000	1. Regulasi/Peraturan ket:adanya regulasi efisiensi anggaran mengakibatkan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Daerah Kabupaten/Kota							sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan Renja. selain itu dengan adanya efisiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk sekolah yang dilakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen. selain efisiensi dana yang tersedia di Pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga diragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas subkegiatan yang dilaksanakan dan besaran persentase yang dilaksanakan 2. Anggaran ket:adanya regulasi efisiensi anggaran mengakibatkan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan Renja. selain itu dengan adanya efisiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk sekolah yang dilakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen. selain efisiensi dana yang tersedia di Pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga diragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas subkegiatan yang dilaksanakan dan besaran persentase yang dilaksanakan	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa/Kelurahan	5	100	560.324.000	176.723.116		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			(IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)									
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Jumlah Penghargaan yang diberikan	Penghargaan	129	100				
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	Jenis	2	2	560.324.000	176.723.116	1. Regulasi/Peraturan ket: adanya regulasi efisiensi mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan pemberian penghargaan ini terutama untuk program Desa Ramah Lingkungan tidak dilakukan Penilaian karena efisiensi dan adanya ketidak pastian anggaran 2. Anggaran ket: adanya regulasi efisiensi mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan pemberian penghargaan ini terutama untuk program Desa Ramah Lingkungan tidak dilakukan Penilaian karena efisiensi dan adanya ketidak pastian anggaran	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen	98	100	113.631.600	104.464.400		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Yang Ditindaklanjuti	Laporan	40	32	113.631.600	104.464.400	1. Anggaran ket: adanya efisiensi anggaran mengakibatkan tidak semua aduan masyarakat dapat terlayani secara maksimal	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	1	0	50.667.595.838	40.346.410.724		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kehutanan	pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)									
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Timbulan sampah	Persen	99,52	71,34			1. Anggaran ket:Adanya beberapa kegiatan dalam penyelesaian administrasi pencairan terhambat karena alokasi anggaran	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang ditangani	Persen	71	50,41	50.667.595.838	40.346.410.724	1. Anggaran ket:Adanya beberapa kegiatan dalam penyelesaian administrasi pencairan terhambat karena Alokasi anggaran	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	28,3	7,2			1. Anggaran ket:Adanya beberapa kegiatan dalam penyelesaian administrasi pencairan terhambat karena Alokasi anggaran	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Persentase cakupan area pelayanan	Persen	72,22	52			1. Anggaran ket:Adanya beberapa kegiatan dalam penyelesaian administrasi pencairan terhambat karena Alokasi anggaran	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen			-	-		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen						
12. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	86,72	16.053.974.255	13.371.815.204	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	DAN PENCATATAN SIPIL	Sipil	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	DAERAH KABUPATEN/KOTA							Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	3	187.022.800	165.323.230		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	2	2	10.457.967.815	8.982.244.404		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	66.948.400	22.120.000		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	64.000.000	47.890.000		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	2.824.733.238	2.690.294.518		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	95	42	1.403.480.000	495.152.000		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.000.412.002	931.615.052		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	9	1	49.410.000	37.176.000		
	BIDANG ADMINISTRASI	Dinas Kependudukan	Meningkatnya Pemenuhan	PROGRAM PENDAFTARAN	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99	100,73	364.964.400	222.925.172	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	dan Catatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	PENDUDUK							Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			Persentase Kepemilikan KIA	Persen	99	87,04				
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	Dokumen	200002	200002	364.964.400	222.925.172		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	99	100,34	344.020.700	257.318.610	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non-Muslim	Persen	99	67,42				
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	101,01				
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Dokumen	1501	1501	292.560.700	243.828.610		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelayanan Dokumen Akta Perkawinan Non-Muslim yang diterbitkan	Laporan	1	1	51.460.000	13.490.000		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	117.125.400	86.711.388		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	12	11	76.810.200	48.251.388	1. Anggaran ket:Anggaran Tidak tersedia di karenakan di rasionalisasi	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rata-rata lama pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jam	1	0	-	-	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:-	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	Laporan	1	1	40.315.200	38.460.000	1. Anggaran ket:Anggaran Tersedia Kurang	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100	100	31.515.000	25.470.000		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Dokumen	2	2	31.515.000	25.470.000		
13.BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	75	104,87	26.706.689.801	21.179.739.144	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih kurang kapasitas SDM dan komitmen seluruh ASN untuk optimalisasi terhadap tindak lanjut hasil LHE	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											AKIP	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	451.582.870	376.198.632		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan yang akuntabel	Laporan	12	12	15.070.423.977	14.162.415.993	1. Anggaran ket: Secara fisik prosentase pekerjaan sudah mencapai 93.15% namun realisasi keuangan hanya menunggu kas daerah dikarenakan transfer keuangan dari pusat belum terrealisasi 100% 2. Waktu ket: Secara fisik prosentase pekerjaan sudah mencapai 93.15% namun realisasi keuangan hanya menunggu kas daerah dikarenakan transfer keuangan dari pusat belum terrealisasi 100%	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	10	10	84.143.600	62.380.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Pengadaan, penghapusan serta Pemeliharaan barang milik daerah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada, serta pembayaran honor Pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 2. Regulasi/Peraturan ket: Pengadaan, penghapusan serta Pemeliharaan barang milik daerah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada, serta pembayaran honor Pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 3. Anggaran ket: Pengadaan, penghapusan serta	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Pemeliharaan barang milik daerah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada, serta pembayaran honor Pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	40	40	47.517.400	46.802.550		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	76,27	76,27	9.587.738.550	5.256.470.791	1. Anggaran ket:Kas Daerah tidak mencukupi	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	233.610.250	233.106.100		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	945.107.354	851.823.120		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	23	23	286.565.800	190.541.958		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa Yang Memiliki Tata Ruang Desa	Persen	25,91	77,19	67.794.025.068	67.243.243.600	1. Anggaran ket:Adanya Rasionalisasi Anggran sehinga target yang direncanakan tidak terpenuhi	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	Desa	27	27	67.794.025.068	67.243.243.600	1. Anggaran ket:Ada 3 Kegiatan yang mendapatkan Rasionalisasi Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian kegiatan	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100	100	247.808.800	130.291.400		
	BIDANG PEMBERDAYAAN	Dinas Pemberdayaan		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	Desa	52	52	247.808.800	130.291.400		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	MASYARAKAT DAN DESA	Masyarakat dan Desa										
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	90	100	19.521.740.892	18.575.651.032	1. Pihak Eksternal ket:Pihak Eksternal, Anggaran dan Keterbatasan waktu dapat sebagai faktor penghambat 2. Anggaran ket:Pihak Eksternal, Anggaran dan Keterbatasan waktu dapat sebagai faktor penghambat 3. Waktu ket:Pihak Eksternal, Anggaran dan Keterbatasan waktu dapat sebagai faktor penghambat	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	10	692,2			1. Pihak Eksternal ket:Masih terdapat Bumdes yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 2. Anggaran ket:Masih terdapat Bumdes yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 3. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Masih terdapat Bumdes yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Desa	193	193	19.521.740.892	18.575.651.032	1. Pihak Eksternal ket:Keterbatasan anggaran dan Pihak Eksterenal dapat sebagai faktor penghambat 2. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran dan Pihak Eksterenal dapat sebagai faktor penghambat	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Posyandu Aktif	Persen	70	142,86	4.604.672.998	3.605.402.703	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Tidak ada referensi Posyandu Aktif	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100			1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Tidak adanya referensi tentang penilaian lembaga	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kemasyarakatan aktif	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	Lembaga	4721	7720	4.604.672.998	3.605.402.703	1. Regulasi/Peraturan ket: Tidak adanya referensi tentang penilaian Lembaga Kemasyarakatan Aktif	
14. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62	104,48	11.088.261.612	9.085.929.265		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat	Persen	100	82			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Pengembalian secara mencil	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP	Persen	100	100				
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen	100	100				
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen	100	100				
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Rata-Rata	73,61	97,81			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Belum sepenuhnya ASN memahami dan patuh tentang pentingnya arsip	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga			Persentase Pengelolaan, Penataan, Penertiban dan Penelusuran Aset Daerah	Persen	100	100			1. Anggaran ket: Tidak tersedianya anggaran di OPD	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BERENCANA	Berencana										
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	177	177	970.673.940	823.337.987		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	7.799.272.964	6.711.366.639		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	215.000.000	194.126.000		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	68	0	296.373.000	-	1. Anggaran ket: Tidak tersedianya Anggaran	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	42	30	478.033.200	367.915.967	1. Anggaran ket: Kegiatan tidak bisa dilaksanakan terhambat Anggaran	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	23	23	172.582.000	111.754.350	1. Anggaran ket: Efisiensi Anggaran	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.123.296.508	866.429.112	1. Anggaran ket: Pembayaran rutin dilaksanakan sebelum tanggal 20 bulan berjalan	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	95	95	33.030.000	10.999.210	1. Anggaran ket: Efisiensi Anggaran	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program KKBPK - Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	Persen	45	129,33	2.668.025.380	2.092.865.693		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya dokumen grand design kependudukan	Dokumen	000	0,01	148.077.680	131.860.750		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	70	58,21	2.519.947.700	1.961.004.943	1. Waktu ket:tidak dapat memaksimalkan waktu yang tersedia	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menurunnya angka kelahiran total / Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49) tahun - Menurunnya Angka TFR per WUS (15-49 tahun)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	77,22	90,65	5.254.307.189	4.934.905.341	1. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran untuk distribusi alokon, sehingga hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan alokon di beberapa wilayah tertentu	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,5	28,76			1. Dukungan Pemimpin ket:Kurangnya pemahaman tentang capaian Unmet Need : dimana target OPD yang seharusnya capaian yang lebih rendah akan lebih baik, dan bukan dipahami sebaliknya.	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Meningkatnya Peserta KB Baru	Persen	15	106,53			1. Anggaran ket:Keterbatasan dalam penganggaran yang tersedia	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Menurunnya angka Drop Out (DO)	Persen	11,67	26,91			1. Peralatan ket:Tidak adanya data dukung yang valid dalam menyusur data DO	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Meningkatnya akseptor MKJP	Persen	17,03	115,91			1. Anggaran ket:Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk mobilisasi petugas.	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	Event	5	5	2.675.254.429	2.500.648.241	1. Anggaran ket:Ket : tersendatnya pencairan, sehingga kegiatan harus didahulukan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	Desa	237	236	656.580.000	656.305.000		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat, obat dan kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan	40	38	1.133.188.160	1.122.427.190	1. Regulasi/Peraturan ket:Ket : ada keterlambatan pada tahapan klaim pencairan kegiatan dikarenakan terdapat regulasi perubahan RKA menjadi RKA-P, sehingga juga menghambat proses pencairan belanja kegiatan berjalan	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan ORMAS / POKJA	Persen	75	74	789.284.600	655.524.910	1. Anggaran ket:Ket : Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan Pembinaan Kader, sehingga anggaran kegiatan tersebut di nihilkan, dan hanya kegiatan penggerakan kader saja yang dapat berjalan 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Ket : Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan Pembinaan Kader, sehingga anggaran kegiatan tersebut di nihilkan, dan hanya kegiatan penggerakan kader saja yang dapat berjalan	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemberdayaan keluarga - Indek Pembangunan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	65,31	148,52	4.888.299.900	4.349.637.895	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan pembinaan dan kapasitas SDM kader BKB	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	84,98	101,41			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan sumberdaya di lapangan	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	61,32	133,19			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangannya frekuensi pembinaan dan terbatasnya kapasitas kader BKL.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	7	438,14			1. Peralatan ket: Kurangnya sarana prasarana pengelola PPKS dalam pelaksanaan kegiatan.	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	88,89	118,88			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kurangnya advokasi, frekuensi pembinaan serta keterbatasan sumberdaya lapangan.	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	70,26	111,97			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kurangnya frekuensi pembinaan dan keterbatasan SDM kader UPPKS	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	37,2	80,83	1.663.278.200	1.235.206.395	1. Anggaran ket: Keterlambatan pengumpulan SPJ di lapangan dan adanya proses rasionalisasi anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam proses serapan anggaran	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	80	69,4	3.225.021.700	3.114.431.500	1. Anggaran ket: Keterlambatan pengumpulan SPJ di lapangan dan adanya proses rasionalisasi anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam proses serapan anggaran	
15. BIDANG PERHUBUNGAN												
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur - Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	82	88,7	44.671.495.007	40.600.515.453		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	100	100	939.438.861	573.963.000		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	20.769.041.190	19.228.321.237		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	212.140.223	160.481.896		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	585.489.072	518.593.580		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	2.401.279.700	1.669.668.027		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	348.805.573	327.922.196		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	17.099.752.679	16.586.875.569		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	2.315.547.709	1.534.689.948		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan - Persentase Ketersediaan Prasarana Jalan - Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	32,41	84,36	158.584.157.966	134.303.277.966	1. Anggaran ket: Ketersediaan dana mengakibatkan utang	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan	Persen	100	100	94.448.613.259	76.196.522.332		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Persen	100	100	1.240.927.981	577.251.000		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Peningkatan Pengeloaan Perparkiran	Persen	100	100	680.900.377	402.608.167		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Jumlah Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum	Persen	100	100	1.562.903.013	1.545.734.620		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100	100	58.118.225.259	54.003.262.222		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Penilaian Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persen	84	84	56.706.078	29.524.998		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen	84	0	53.967.200	-		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	2.319.979.569	1.472.819.867		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten / Kota	Persen	100	100	101.935.230	75.554.760		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan - Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal - Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran	Persen	52	61,96	3.224.137.231	2.078.330.233	1. Anggaran ket:Ketersediaan dana mengakibatkan utang	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan DLKR/DLKP di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	100	100	99.644.251	48.206.720		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	100	100	189.068.872	185.328.000		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Sungai dan danau	Persen	100	100	2.848.263.627	1.760.115.513		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Danau								
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan Pengelolaan TUKS DiDalam Kawasan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	100	100	87.160.481	84.680.000		
16.BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE - Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88	87,35	26.110.318.014	23.169.943.882	1. Peralatan ket:Belum optimalnya dokumentasi kegiatan untuk data dukung penilaian AKIP	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	10	383.972.000	259.969.200		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	2	2	10.213.388.665	9.308.272.601		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100.197.200	96.575.400		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	508.787.500	460.668.077		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	5	5	2.034.941.720	1.638.529.728		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	1.129.649.000	1.094.979.854		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	10.963.074.049	9.635.131.069		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	100	6	776.307.880	675.817.953	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya Efisiensi Anggaran dari Pemerintah Pusat	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Anggaran ket:Adanya Efisiensi Anggaran dari Pemerintah Pusat	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE - Indeks Domain Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	86.133.178.400	59.196.182.437	1. Anggaran ket:Alokasi Anggaran Tidak Sesuai Angkas	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Informasi dan Komunikasi Publik	840	840	86.133.178.400	59.196.182.437	1. Anggaran ket:Alokasi Anggaran Tidak Sesuai Angkas	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE - Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	100	84.935.867.135	75.854.328.179	1. Waktu ket:Adanya Efisiensi Anggaran Sehingga kurangnya optimalisasi kegiatan	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD	OPD	56	56	84.935.867.135	75.854.328.179		
17.BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM - Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	86,14	12.154.549.605	10.145.834.790	1. Anggaran ket:realisasi anggaran membuat beberapa sub kegiatan mengalami pengosongan anggaran, serta penurunan anggaran dan target.	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	342.856.622	164.706.600		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	2	2	9.340.786.510	8.446.450.597	1. Anggaran ket:Rasionalisasi anggaran	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	1	1	99.538.868	52.260.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Pada Perpres 72 tahun 2025. Terdapat perubahan regulasi teang satuan harga honor Pengguna Barang, Penatausahaan Barang, Pengurus Barang, Pengrus barang pembatu.	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	-	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Regulasi / peraturan	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	Persen	100	100	548.454.063	462.586.482		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	203.123.000	166.093.675		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	597.588.664	451.535.854		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	1.022.201.878	402.201.582		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	Persen	23,35	98,5	605.974.921	507.501.164	1. Regulasi/Peraturan ket: Dengan adanya inpres 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDMP / KKMP sehingga sasaran koperasi konvensional terkendala dan target yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana. 2. Pihak Eksternal ket: Dengan adanya inpres 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDMP / KKMP sehingga sasaran koperasi konvensional terkendala dan target yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana.	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	75,88	80	605.974.921	507.501.164		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat	Persen	14,81	173,73	684.875.600	574.408.790	1. Anggaran ket: Minimnya anggaran mengingat masih terdapat jumlah sasaran yang belum dapat dilakukan	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											penilaian kesehatan	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Unit	170	50	684.875.600	574.408.790		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus dan Pengawas yang Memiliki Sertifikasi Pelatihan Perkoperasian	Persen	100	100	76.577.169	29.573.900	1. Peralatan ket: kurangnya jaringan internet	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Unit	60	31	76.577.169	29.573.900		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Aset Koperasi	Persen	3,89	77,12	720.122.937	482.908.054		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			Persentase Meningkatnya Volume Usaha (Omzet) Koperasi	Persen	3,89	123,65				
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Unit	55	150	720.122.937	482.908.054		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru - Persentase Pertumbuhan wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Difasilitasi	Persen	1,99	45,73	3.184.681.946	1.983.526.435	1. Anggaran ket: Kebijakan Rasionalisasi Dan Efisiensi Anggaran yang berakibat pada Realisasi tidak memenuhi target	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di berdayakan	UMKM	1121	1188	3.184.681.946	1.983.526.435		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru - Persentase	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM	Persen	1,14	74,56	3.381.990.877	3.142.575.299	1. Anggaran ket: Kebijakan Rasionalisasi Dan Efisiensi Anggaran yang berakibat pada	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pertumbuhan wirausaha								Relisasi tidak memenuhi target	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan UMKM	UMKM	320	286	3.381.990.877	3.142.575.299		
18. BIDANG PENANAMAN MODAL												
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	94,9	82,76	16.386.169.136	14.696.635.367	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	19	19	565.569.593	468.864.104		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	10.997.224.634	9.996.315.205		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD	Dokumen	3	3	204.211.310	96.017.736		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Pendapatan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	13.201.340	13.201.000		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	252.968.760	149.414.865		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	Persen	100	100	1.116.077.859	1.088.684.800		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	20	100	299.101.000	290.084.100		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	Persen	100	100	1.815.984.640	1.630.497.817		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	Unit	108	108	1.121.830.000	963.555.740		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	Proyek	665	550,38	1.717.281.800	1.679.913.709	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PERDA	1	1	240.861.000	215.497.904		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	Dokumen	3	3	1.476.420.800	1.464.415.805		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	340	58,82	1.098.959.200	940.463.107	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	340	200	1.098.959.200	940.463.107		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan izin	Izin	12500	106,35	846.643.775	455.605.632	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92	96,51	846.643.775	455.605.632		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	Persen	30,75	0	619.102.773	592.187.535	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMDN/PMA	Perusahaan	1020	443	619.102.773	592.187.535		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3	100	511.315.200	153.482.357	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3	3	511.315.200	153.482.357		
19. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA												

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya - Persentase Pembinaan Kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga - Persentase masyarakat yang berolahraga Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota - Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	97,52	64.114.409.451	46.628.968.125	1. Regulasi/Peraturan ket: Target tidak boleh lebih besar dari nilai sakip pemda	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	118	118	522.940.400	301.021.020	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kurangnya pemahaman teknis perencanaan dan evaluasi kinerja menyebabkan dokumen tidak lengkap atau tidak berkualitas serta Penyesuaian mendadak	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											terhadap aturan baru sering menyebabkan revisi dokumen berulang	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	71	71	12.796.634.637	11.633.140.793	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kurangnya tenaga yang kompeten atau seringnya mutasi pengelola keuangan, serta SPJ, bukti transaksi, atau laporan kegiatan yang tidak tepat waktu. 2. Waktu ket: Kurangnya tenaga yang kompeten atau seringnya mutasi pengelola keuangan, serta SPJ, bukti transaksi, atau laporan kegiatan yang tidak tepat waktu.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	17	17	30.000.000	27.100.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: 1. Pengurus barang merangkap tugas lain sehingga pengelolaan dokumen BMD kurang optimal 2. Pengelola belum sepenuhnya memahami ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan BMD 2. Regulasi/Peraturan ket: 1. Pengurus barang merangkap tugas lain sehingga pengelolaan dokumen BMD kurang optimal 2. Pengelola belum sepenuhnya memahami ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan BMD	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	2	0	-	-	1. Anggaran ket: rasionalisasi	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	7	7	114.836.000	45.798.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: 1. Jumlah atau	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kompetensi pengelola administrasi kepegawaian belum memadai. 2. Aturan kepegawaian sering berubah sehingga memerlukan penyesuaian dokumen. 3. Pegawai belum memahami pentingnya kelengkapan administrasi kepegawaian. 2. Regulasi/Peraturan ket:1. Jumlah atau kompetensi pengelola administrasi kepegawaian belum memadai. 2. Aturan kepegawaian sering berubah sehingga memerlukan penyesuaian dokumen. 3. Pegawai belum memahami pentingnya kelengkapan administrasi kepegawaian. 3. Dukungan Pemimpin ket:1. Jumlah atau kompetensi pengelola administrasi kepegawaian belum memadai. 2. Aturan kepegawaian sering berubah sehingga memerlukan penyesuaian dokumen. 3. Pegawai belum memahami pentingnya kelengkapan administrasi kepegawaian.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	10.632.944.000	6.012.229.129	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. - Jumlah pegawai administrasi yang tidak sebanding dengan beban kerja - Kompetensi pegawai belum merata. 2. - Masih banyak layanan administrasi dilakukan secara manual -Aplikasi belum terintegrasi antar unit kerja 2. Peralatan ket:1. - Jumlah pegawai administrasi yang tidak sebanding dengan beban kerja - Kompetensi pegawai belum merata. 2. - Masih banyak layanan administrasi dilakukan secara manual -Aplikasi belum terintegrasi antar unit kerja	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	8	8	11.564.994.030	11.209.547.845	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Refocusing anggaran atau keterbatasan fiskal daerah mengurangi kemampuan pengadaan aset baru. 2. Kurangnya kompetensi dan jumlah pengurus barang mempengaruhi pencatatan dan pengelolaan BMD. 2. Anggaran ket:1. Refocusing anggaran atau keterbatasan fiskal daerah mengurangi kemampuan pengadaan aset baru. 2. Kurangnya kompetensi dan jumlah pengurus barang mempengaruhi pencatatan dan pengelolaan BMD.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	5.235.290.149	4.890.397.354	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: beban kerja tinggi tidak sebanding dengan jumlah pegawai atau kurangnya kompetensi. serta Keterlambatan anggaran atau pencairan dana Menghambat pelaksanaan kegiatan penunjang 2. Anggaran ket: beban kerja tinggi tidak sebanding dengan jumlah pegawai atau kurangnya kompetensi. serta Keterlambatan anggaran atau pencairan dana Menghambat pelaksanaan kegiatan penunjang	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	3,08	3,08	23.216.770.235	12.509.733.984	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Anggaran pemeliharaan yang terbatas menyebabkan tidak semua BMD dapat dipelihara sesuai kebutuhan, Terbatasnya jumlah dan kompetensi pengelola aset berdampak pada kualitas pemeliharaan serta Ketidaksesuaian data inventaris dengan kondisi riil menghambat perencanaan pemeliharaan. 2. Anggaran	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											ket: Anggaran pemeliharaan yang terbatas menyebabkan tidak semua BMD dapat dipelihara sesuai kebutuhan, Terbatasnya jumlah dan kompetensi pengelola aset berdampak pada kualitas pemeliharaan serta Ketidaksesuaian data inventaris dengan kondisi riil menghambat perencanaan pemeliharaan.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya - Persentase Pembinaan Kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan potensi dan daya saing pemuda	Persen	79,27	99,94	13.851.830.218	12.820.224.808	1. Regulasi/Peraturan ket: Keterbatasan anggaran, Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan serta Kurangnya lapangan kerja 2. Anggaran ket: Keterbatasan anggaran, Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan serta Kurangnya lapangan kerja	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	100	100	10.096.714.350	9.591.933.026	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Minim Koordinasi antara Steakholder dan Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana Kepemudaan	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	58,54	58,54	3.755.115.868	3.228.291.782	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Minim Koordinasi antara Steakholder dan Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana Kepemudaan	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga - Persentase masyarakat yang berolahraga Peningkatan prestasi olahraga - Jumlah Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Olahraga	Persen	35,41	100	49.113.429.856	37.849.928.883	1. Pihak Eksternal ket: Rendahnya minat dan motivasi masyarakat, Kurangnya disiplin dan konsistensi latihan, Pola hidup tidak sehat, Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, Minimnya anggaran dan perhatian pemerintah, Kurangnya kompetisi atau event olahraga serta Kurangnya pelatih berkualitas 2. Anggaran ket: Rendahnya minat dan motivasi masyarakat, Kurangnya disiplin dan konsistensi latihan, Pola hidup tidak sehat, Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, Minimnya anggaran dan perhatian pemerintah, Kurangnya kompetisi atau event olahraga serta Kurangnya pelatih berkualitas	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	Persen	21,05	23	17.037.001.233	13.419.313.148	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua perkumpulan olahraga dapat difasilitasi. Pengurus perkumpulan olahraga belum memahami tata kelola organisasi dan administrasi bantuan dan Banyak perkumpulan olahraga belum memiliki legalitas atau tidak aktif secara administrasi. 2. Pihak Eksternal ket: Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua perkumpulan olahraga dapat difasilitasi. Pengurus perkumpulan olahraga belum memahami tata	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kelola organisasi dan administrasi bantuan dan Banyak perkumpulan olahraga belum memiliki legalitas atau tidak aktif secara administrasi. 3. Anggaran ket:Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua perkumpulan olahraga dapat difasilitasi.Pengurus perkumpulan olahraga belum memahami tata kelola organisasi dan administrasi bantuan dan Banyak perkumpulan olahraga belum memiliki legalitas atau tidak aktif secara administrasi.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga	Persen	100	100	16.816.123.007	12.980.104.831	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Pemangkasan atau keterlambatan pencairan dana menghambat pelaksanaan.Panitia, wasit, dan tenaga teknis yang terbatas. 2. Anggaran ket:Pemangkasan atau keterlambatan pencairan dana menghambat pelaksanaan.Panitia, wasit, dan tenaga teknis yang terbatas.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	Persen	52,5	52,5	4.983.330.000	2.147.470.728	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Anggaran pembinaan yang belum optimal, terutama untuk cabang olahraga non-unggulan.Terbatasnya jumlah pelatih bersertifikat di beberapa cabang olahraga. 2. Anggaran ket:Anggaran pembinaan yang belum optimal, terutama untuk cabang olahraga non-unggulan.Terbatasnya jumlah pelatih bersertifikat di beberapa cabang olahraga.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	Persen	3,51	3,51	837.200.600	792.245.645	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Pelatih tidak	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											bersertifikat atau jumlahnya terbatas mengurangi efektivitas pembinaan atlet. Anggaran terbatas menyebabkan jumlah atlet yang dapat dibina menjadi terbatas. 2. Anggaran ket: Pelatih tidak bersertifikat atau jumlahnya terbatas mengurangi efektivitas pembinaan atlet. Anggaran terbatas menyebabkan jumlah atlet yang dapat dibina menjadi terbatas.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	Persen	0,01	0,01	9.439.775.016	8.510.794.531	1. Waktu ket: Kesibukan kerja dan aktivitas sehari-hari mengurangi kesempatan berolahraga	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota - Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan kepramukaan	Persen	100	100	1.607.427.320	1.268.199.388	1. Peralatan ket: Keterbatasan pembina berkualitas, Keterbatasan anggaran, Minimnya sarana dan prasarana, Rendahnya partisipasi peserta serta Kurangnya dukungan orang tua 2. Pihak Eksternal ket: Keterbatasan pembina berkualitas, Keterbatasan anggaran, Minimnya sarana dan prasarana, Rendahnya partisipasi peserta serta Kurangnya dukungan orang tua 3. Anggaran ket: Keterbatasan pembina berkualitas, Keterbatasan anggaran, Minimnya sarana dan prasarana, Rendahnya partisipasi peserta serta Kurangnya dukungan orang tua	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	14,36	14,36	1.607.427.320	1.268.199.388	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Tidak semua gugus depan memiliki pembina bersertifikat dan aktif, Faktor geografis, jarak, dan akses transportasi memengaruhi keaktifan organisasi. 2. Pihak Eksternal ket: Tidak semua gugus depan memiliki pembina bersertifikat dan aktif, Faktor geografis, jarak, dan akses transportasi memengaruhi keaktifan organisasi.		
20. BIDANG STATISTIK													
	BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE - Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	75,86	100	1.154.067.484	1.154.067.484	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Karena belum memiliki instrumen untuk mencari celah keamanan sistem elektronik dan untuk memantau anomasi serangan siber 2. Peralatan ket: Karena belum memiliki instrumen untuk mencari celah keamanan sistem elektronik dan untuk memantau anomasi serangan siber		
	BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	OPD		11	11	1.003.334.684	976.478.472	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Masih kurangnya SDM yang memiliki kapasitas sesuai kompetensi teknis 2. Anggaran ket: Masih kurangnya SDM yang memiliki kapasitas sesuai kompetensi teknis	
	BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	Layanan		1	1	150.732.800	138.592.188	1. Regulasi/Peraturan ket: Belanja Tenaga Ahli di alihkan ke bagian umum kepegawaian dan ketatalaksanaan	
21. BIDANG PERSANDIAN													

No	Ururan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE - Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	75,86	100	1.154.067.484	1.115.070.660	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Karena belum memiliki instrumen untuk mencari celah keamanan sistem elektronik dan untuk memantau anomasi serangan siber 2. Peralatan ket: Karena belum memiliki instrumen untuk mencari celah keamanan sistem elektronik dan untuk memantau anomasi serangan siber	
	BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	OPD	11	11	1.003.334.684	976.478.472	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Masih kurangnya SDM yang memiliki kapasitas sesuai kompetensi teknis 2. Anggaran ket: Masih kurangnya SDM yang memiliki kapasitas sesuai kompetensi teknis	
	BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	Layanan	1	1	150.732.800	138.592.188	1. Regulasi/Peraturan ket: Belanja Tenaga Ahli di alihkan ke bagian umum kepegawaian dan ketatalaksanaan	
22. BIDANG KEBUDAYAAN												
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	30	100	14.926.362.200	10.974.700.718	1. Anggaran ket: Kurang tepatnya dalam Penyusunan Anggaran Kas	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Persentase Desa Budaya yang Aktif	Persen	100	100			1. Anggaran ket: Kurang tepatnya dalam Penyusunan Anggaran Kas	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Pelestarian Seni dan Tradisi Budaya Lokal yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelakunya	Kegiatan	12	29	14.120.162.200	10.433.684.013	1. Anggaran ket: Kurang Tepatnya Penyusunan Anggaran Kas	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	Kegiatan	13	1	806.200.000	541.016.705	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Kurang tepatnya dalam membuat indikator target kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Lembaga Seni Budaya yang Aktif	Persen	75	86,67	3.167.018.100	893.994.191	1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam menyusbn anggaran kas kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	Kegiatan	13	25	3.167.018.100	893.994.191	1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam menyusbn anggaran kas kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosetase Sejarah lokal yang dilestarikan	Persen	75,98	99,84	318.832.640	280.401.251	1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam menyusun anggaran kas kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	Kegiatan	16	2	318.832.640	280.401.251	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurang Tepatnya dalam penyusunan target kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dipelihara	Persen	100	60	1.016.593.900	452.657.191	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Target Indikator Kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Persentase Penetapan Cagar Budaya Potensial	Persen	14,57	6,86			1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Anggaran Kas	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Persentase Museum yang Dikelola oleh Pemda	Persen	100	85			1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Target Kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan	Lokasi	16	9	338.406.400	128.528.277	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Indikator Target Kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	Lokasi	16	12	678.187.500	324.128.914	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Indikator	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Target Kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase museum yang dikelola	Persen	75,98	98,71	1.359.650.320	195.141.579	1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Anggaran Kas	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	Lokasi	2	2	1.359.650.320	195.141.579	1. Anggaran ket:Kurang Tepatnya Dalam Penyusunan Anggaran Kas	
23. BIDANG PERPUSTAKAAN												
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional - Tingkat ketersediaan arsip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	99,37	19.699.802.758	17.364.548.416		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	333.040.799	292.883.933		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	5	5	12.694.057.430	11.676.581.019		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	62.051.600	46.436.000		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	112.049.200	59.073.440		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	2.509.959.280	2.255.291.767		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	3.492.250.141	2.592.249.662		



No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	228	200	496.394.308	442.032.595		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	42,34	25,27	6.053.496.800	3.373.277.463	1. Pihak Eksternal ket: Masih menunggu hasil perhitungan dari Perpustakaan RI pada tanggal 30 Januari 2026	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	7,24	7,24	2.576.707.780	1.929.467.891		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	Kali	5	5	3.476.789.020	1.443.809.572		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Persen	80	100	287.191.059	203.316.960		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno	Dokumen	5	5	191.845.950	152.879.960	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Peralatan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas 2. Peralatan ket:Peralatan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas 3. Pihak Eksternal ket:Peralatan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas 4. Anggaran ket:Peralatan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis Nusantara yg tersimpan dan/atau yang terdaftar di wilayah Kukar	Eksemplar	300	348	95.345.109	50.437.000	1. Peralatan ket:Keterbatasan Anggaran, peralatan serta saarana dan prasarana dalam pengelolaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Anggaran ket: Keterbatasan Anggaran, peralatan serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
24. BIDANG KEARSIPAN												
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional - Tingkat ketersediaan arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prosentase Arsip yang dikelola	Persen	100	100	509.376.070	459.237.809		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	Berkas	66101	66101	368.072.220	332.052.592		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	Berkas	24000	25000	68.343.650	65.822.700		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional - Tingkat ketersediaan arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persen	95	87,42	442.513.700	350.441.600	1. Pihak Eksternal ket: perhitungan msh menunggu Review Inspektorat	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	Berkas	1000	1000	79.698.400	19.960.100		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan	Jumlah arsip yang diselamatkan dengan NSPK	Berkas	1000	1000	287.563.500	269.941.500		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Desa/Kelurahan								
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media sesuai dengan NSPK	Berkas	500	500	42.545.300	35.282.500		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang ditemukan setelah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	Berkas	500	500	32.706.500	25.257.500		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional - Tingkat ketersediaan arsip	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentase izin penggunaan arsip yang diterbitkan	Persen	100	100	34.110.800	28.741.102		
25. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan - Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,9	86,19	21.591.794.238	18.539.687.634		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	1.733.713.550	725.266.800		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	17.710.888.800	16.124.875.931		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	6	43.116.320	20.950.000		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	7.048.000	6.913.500		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	103.935.680	103.465.100		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	ASN	110	110	535.845.621	443.468.454		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	12		-	-		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	5	5	1.126.295.017	996.681.194		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	90	90	330.951.250	118.066.655		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan - Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	104689	112,06	99.066.555.727	79.627.172.998		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	Nelayan	2181	2181	78.157.255.276	62.045.643.973		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	Orang	500	500	19.980.417.171	17.338.424.045		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Jumlah KUB Naik Kelas	KUB	8	9				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi	Unit	3	3	322.055.400	95.133.580		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	Tanda Daftar Kapal Perikanan	2000	2000	527.913.200	102.104.900		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	Kapal	2000	2000	78.914.680	45.866.500		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan - Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	207881	104,6	312.248.408.597	296.736.954.047		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Bermitra	Pokdakan	20	20	4.105.566.900	3.823.988.934		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Jumlah POKDAKAN Naik Kelas	Pokdakan	5	5				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan	TDPI	1000	1000	108.817.000	103.307.900		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	Pembudidaya	1774	2150	308.034.024.697	292.809.657.213		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan - Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	Kecamatan	20	100	8.799.487.110	3.974.514.812		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal/Destruktif Fishing	Persen	98	100				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi	POKMASWAS	3	3	8.799.487.110	3.974.514.812		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Nelayan	400	400				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Jumlah Reservat Diawasi	Reservat	3	3				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Nilai Produksi Perikanan - Nilai Produksi Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	26350	166,98	10.148.873.360	8.150.832.512		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1771	90,34				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	Tanda Daftar Usaha	10	10	321.905.530	122.667.536		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	Unit Usaha	5	5	284.628.760	266.633.110		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	POKLAHSAR	25	25	9.542.339.070	7.761.531.866		
26. BIDANG PARIWISATA												
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Predikat akuntabilitas kinerja Dispar - Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	74	83,93	42.762.739.756	40.237.004.342	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Jumlah SDM yang terbatas, cukup signifikan menghambat pelaksanaan kegiatan dalam penyelesaian kegiatan	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	7	7	688.634.280	485.051.771		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dokumen	2	2	37.832.129.306	36.698.054.454		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	2	2	28.560.000	28.560.000	1. Anggaran ket:Dikarenakan adanya Rekonsiliasi maka pagu pada sub kegiatan Penyusunan Perencanaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dikurangi/dihapus sehingga tidak dapat dilaksanakan, sehingga target tidak tercapai	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Objek yang Dikelola	Laporan	12	12	7.690.000	7.520.000		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	-	-	1. Anggaran ket:Dikarenakan adanya Rasionalisasi maka pagu pada sub Kegiatan ini dikurangi/dihapus sehingga tidak dapat dilaksanakan, sehingga target tidak dapat tercapai.	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	5	5	885.861.410	622.816.649		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.899.702.796	1.718.949.468		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	Bulan	12	12	1.420.161.964	676.052.000		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan - Jumlah Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	65,76	100	12.246.293.472	9.414.996.423		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	Dokumen	2	2	7.518.722.050	6.123.326.828		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Yang Dikelola	Paket	4	4	4.065.028.360	2.881.262.461		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata a yang di rekomen dasikan untuk mendap at TDUP	Dokumen	10	6	662.543.062	410.407.134		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan - Okupansi	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Okupansi	Persen	32,28	121,44	21.102.949.975	18.887.767.996		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Dokumen	11	4	21.102.949.975	18.887.767.996	1. Anggaran ket: masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tetapi belum direalisasikan pembayaran kepada penyedia	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Kreatif - Presentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	Persen	6	100	11.150.570.820	8.410.796.568		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Yang Tersedia	Dokumen	1	0	56.069.720	14.843.600	1. Anggaran ket: Pagu Kegiatan terasionalisasi	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi	7	9	11.094.501.100	8.395.952.968		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Kreatif - Presentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	7	100	891.365.853	831.444.976		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	Dokumen	8	5	788.196.353	728.275.476		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku EKRAF yang Dikembangkan	Orang	20	30	103.169.500	103.169.500		
27. PERTANIAN												
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani - Nilai Tukar Petani (NTP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66	101,47	77.775.887.544	70.061.970.433		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	2	474.355.900	259.492.751		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	17	2	62.258.882.668	58.440.975.883	1. Anggaran ket:Adanya kesalahan dalam penyusunan Anggran 2. Waktu ket:Adanya kesalahan dalam penyusunan Anggran	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	71.721.175	47.380.000		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	145.315.500	52.329.500		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	1.798.738.550	1.602.900.214		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	50	50	6.513.179.480	4.515.741.687		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	4.812.858.871	3.687.103.561		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	340	340	1.700.835.400	1.456.046.837		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian - Produksi Padi - Produksi Jagung - Produksi Palawija (Porang) - Produksi Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	41802,48	29,58	72.340.739.430	51.956.800.678		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	20000	5				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Luas Tanam Palawija (Porang)	Hektar (Ha)	55	0				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	29278,24	0,09			1. Regulasi/Peraturan ket:anggaran terefisiensi sehingga target belum terpenuhi	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	37061	0,84				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	18440,3	4,12				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	17414000	0				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian - Produktivitas Padi - Produktivitas Jagung	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	12500	301,22	67.183.764.490	52.628.987.756	1. Waktu ket:Pada pelaksanaan terhambat oleh faktor cuaca dimana pada waktu pelaksanaan intensitas curah hujan tinggi	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	21	61,9			1. Waktu ket:Pada pelaksanaan terhambat oleh faktor cuaca dimana pada waktu pelaksanaan intensitas curah hujan tinggi	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun	Meter	10000	112,77			1. Waktu ket:Waktu dipengaruhi dengan keadaan alam yang tidak stabil	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Jumlah DAM Parit Yang Dibangun	Unit	4	50				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	Unit	19	142,11				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Dokumen	2	1	289.399.000	50.369.000	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggaran	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit	80	149	66.894.365.490	52.578.618.756	1. Waktu ket:Waktu dipengaruhi dengan keadaan alam yang tidak stabil	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Peternakan - Produksi Daging - Produksi Telur	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	96	100	755.793.620	726.659.040		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	5	60			1. Regulasi/Peraturan ket:Dalam Anggaran terkadang belum	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											tersedianya sehingga dalam pelayanan belum dapat maksimal 2. Anggaran ket: Dalam Anggaran terkadang belum tersedianya sehingga dalam pelayanan belum dapat maksimal	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	182.603.420	177.311.880	1. Pihak Eksternal ket: Masih membutuhkan data terkait daerah wabah penyakit sehingga melakukan kegiatan menjadi tepat sasaran di peternak dan ternak yang terdampak penyakit	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan	Jenis	2	2	106.414.000	101.014.000		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	Jenis	2	2	322.380.000	311.234.660		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Persen	3	2	144.396.200	137.098.500		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian - Produksi Padi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	95	100	1.765.527.400	442.743.000	1. Anggaran ket: diperlukan tambahan bahan obat-obatan untuk pengendalian hama dan penyakit	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas pengendalian OPT Pertanian	Hektar (Ha)	2400	2542,05	1.765.527.400	442.743.000	1. Anggaran ket: perlu tambahan anggaran untuk penyediaan jenis obat pengendalian OPT	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani - Nilai Tukar Petani (NTP)	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang dikeluarkan	Rekomendasi	35	37,14	517.627.800	158.109.640	1. Pihak Eksternal ket: relevansi penyampaian untung ruginya perizinan	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Surat	20	14	258.998.800	41.240.500	1. Pihak Eksternal ket: relevansi narasi yang disampaikan ke objek kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Ternak	Dokumen	15	7	258.629.000	116.869.140	1. Pihak Eksternal ket:relevansi penyampaian narasi kepada objek perijinan	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani - Nilai Tukar Petani (NTP)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	4	70,75	12.095.498.383	9.247.651.979	1. Pihak Eksternal ket:relevansi narasi serta perspektif inovasi untuk di tiru petani	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan lembaga petani yang dibina	Persen	95	85	12.095.498.383	9.247.651.979	1. Pihak Eksternal ket:relevansi narasi yang disampaikan ke pelaku utama dan usaha sebagai motivasi	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan - Produksi Kelapa Sawit Rakyat - Produksi Kelapa Sawit PBS - Produksi Karet - Produksi Lada - Produksi Kelapa Dalam - Produksi Kopi - Produksi Kakao - Produksi Aren - Produksi Kelor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	91,61	19.677.781.179	16.768.531.104	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih kurangnya pengetahuan terkait penyusunan data penilaian kelengkapan SAKIP sesuai permenpan RB 53 tahun 2014	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	489.650.800	277.670.772		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	14	14	15.792.706.297	13.585.648.857		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	95.237.600	89.467.500		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	6.286.000	5.700.000		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	194.191.400	183.894.006		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	824.823.361	715.598.700		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	1	1	221.468.600	185.910.000		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.471.473.921	1.155.367.587		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	56	88	581.943.200	569.273.682		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan - Produksi Kelapa Sawit Rakyat - Produksi Kelapa Sawit PBS - Produksi Karet - Produksi Lada - Produksi Kelapa Dalam - Produksi Kopi - Produksi Kakao - Produksi Aren - Produksi Kelor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Hektar (Ha)	28795	112,13	17.496.183.400	12.887.578.058		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Hektar (Ha)	307390	59,72			1. Pihak Eksternal ket: adanya beberapa IUP PBS yang dicabut, sehingga mempengaruhi jumlah luas Areal Kelapa Sawit PBS	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Karet	Hektar (Ha)	17988	95,9			1. Pihak Eksternal ket: adanya alih fungsi lahan dari karet ke komoditi perkebunan lainnya terutama kelapa sawit	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Lada	Hektar (Ha)	3442	36,47			1. Pihak Eksternal ket: adanya alih fungsi lahan dari komoditi lada ketambang dan ke komoditi lain	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Kelapa Dalam	Hektar (Ha)	7306	92,56			1. Pihak Eksternal ket: Pengembangan Kelapa Dalam yang cukup besar cuma ada di beberapa kecamatan yang ada dipesisir	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Kopi	Hektar (Ha)	115	132,78			1. Pihak Eksternal ket: adanya tanaman kopi	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											yang rusak dan mati	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Kakao	Hektar (Ha)	95	140,68				
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Aren	Hektar (Ha)	248	105,02				
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Kelor	Hektar (Ha)	9	105,56			1. Pihak Eksternal ket:minat pekebun masih kurang terkait komoditi kelor	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang Diawasi	Paket	152	152	17.434.805.400	12.827.628.058		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	1	1	61.378.000	59.950.000		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan - Produksi Kelapa Sawit Rakyat - Produksi Kelapa Sawit PBS - Produksi Karet - Produksi Lada - Produksi Kelapa Dalam - Produksi Kopi - Produksi Kakao - Produksi Aren - Produksi Kelor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	3512	9,4	1.165.341.517	950.851.737	1. Anggaran ket:adanya rasionalisasi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan fisik pembangunan jalan produksi tidak bisa dilaksanakan	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	3	0			1. Anggaran ket:Adanya rasiOnalisasi anggaran sehingga Pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan dan pengawasan terhadap fisik kegiatan tidak dapat dilaksanakan yang bias dilaksanakan Cuma pembuatan dokumen perencanaannya	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Dokumen	1	0	-	-		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit	8	1	1.165.341.517	950.851.737	1. Anggaran ket:Adanya rasionalisasi anggaran sehingga Pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan dan pengawasan terhadap fisik kegiatan tidak dapat dilaksanakan yang bias dilaksanakan Cuma pembuatan dokumen perencanaannya	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan - Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat - Produktivitas Kelapa Sawit PBS - Produktivitas Karet - Produktivitas Lada - Produktivitas Kelapa Dalam - Produktivitas Kopi - Produktivitas Kakao - Produktivitas Aren - Produktivitas Kelor	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	Persen	38,67	100	209.341.900	180.861.987	1. Anggaran ket:adanya rasionalisasi anggaran	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	Ha	260	125	209.341.900	180.861.987		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan - Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat - Produktivitas Kelapa Sawit PBS - Produktivitas Karet - Produktivitas Lada - Produktivitas Kelapa Dalam - Produktivitas Kopi - Produktivitas Kakao - Produktivitas Aren - Produktivitas Kelor	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Penerbitan STDB	Surat (STDB)	200	50	231.079.400	174.067.232	1. Anggaran ket:adanya rasionalisasi anggaran sehingga ada pengurangan target	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Surat (PUP)	10	80			1. Anggaran ket:adanya rasionalisasi anggaran sehingga ada pengurangan target	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	Pelaku	210	108	231.079.400	174.067.232		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun - NTP Perkebunan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	19,62	87,56	427.694.100	388.312.146	1. Anggaran ket:Adanya rasionalisasi Anggaran	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	Lembaga	24	24	427.694.100	388.312.146		
28. BIDANG KEHUTANAN												
	BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	Persen	33,33	45	748.252.400	532.567.940	1. Anggaran ket:Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk penyusunan satu dokumen. 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk penyusunan satu dokumen.	
	BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen	3	1	748.252.400	532.567.940	1. Anggaran ket:Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk penyusunan 1 Dokumen 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk penyusunan 1 Dokumen	
	BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama Kabupaten/Kota di daerah penyangga Tahura	Kegiatan	1	0			1. Pihak Eksternal ket:Setelah mengadakan Rapat dan Menganalisa data dan informasi di lapangan bahwa kerjasama yang akan di laksanakan terkendala terkait dengan regulasi	
29. BIDANG PERDAGANGAN												

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	98,63	35.849.655.146	28.514.206.131	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurangnya pemenuhan data dukung dalam penyampaian realisasi kinerja OPD Disperindag	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	1.082.530.400	872.316.999	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 2. Regulasi/Peraturan ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 3. Waktu ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	1	1	15.348.778.812	13.522.201.872	1. Peralatan ket:Gangguan teknis pada aplikasi keuangan, jaringan, atau integrasi data.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	187.881.000	175.132.103	1. Regulasi/Peraturan ket:Masih terdapat aset yang belum lengkap administrasinya atau belum tercatat secara optimal	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	12.895.000	12.690.000	1. Peralatan ket:Pendataan belum sepenuhnya akurat sehingga memengaruhi realisasi pendapatan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1.141.433.800	1.101.033.311	1. Pihak Eksternal ket:Kurangnya sinkronisasi antara unit kerja dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	2.737.284.200	1.272.663.866	1. Peralatan ket: Fasilitas pendukung administrasi yang belum optimal	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	3	1.910.000.000	1.762.458.400	1. Pihak Eksternal ket: Terbatasnya penyedia yang memenuhi kualifikasi, terutama di daerah tertentu.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12.009.302.224	9.109.791.680	1. Pihak Eksternal ket: Terbatasnya penyedia yang memenuhi kualifikasi, terutama di daerah tertentu.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	1450	120	1.419.549.710	685.917.900	1. Peralatan ket: Informasi kondisi BMD belum diperbarui secara berkala sehingga menyulitkan perencanaan pemeliharaan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	98,63	35.849.655.146	28.514.206.131	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Kurangnya pemenuhan data dukung dalam penyampaian realisasi kinerja OPD Disperindag	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	1.082.530.400	872.316.999	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 2. Regulasi/Peraturan ket: Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 3. Waktu ket: Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Persentase pelaku	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan rekomendasi peijinan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan	Persen	100	100	139.592.000	99.103.760	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Birokrasi yang rumit,	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Perdagangan	usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)								ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan teknis dan komitmen perijinan terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kemitraan 2. Peralatan ket: Birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan teknis dan komitmen perijinan terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kemitraan 3. Regulasi/Peraturan ket: Birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan teknis dan komitmen perijinan terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kemitraan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen rekomendasi izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan izin usaha toko Swalayan yang diterbitkan	Persen	76	2	69.013.000	49.913.760		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	Surat TDG	64	2	25.173.000	15.370.000		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri yang diterbitkan	Rekomendasi	15	0	45.406.000	33.820.000		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Luar Negeri yang diterbitkan	Rekomendasi			-	-		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	75	18,67	13.390.289.600	11.159.949.686	1. Pihak Eksternal ket: Belum optimalnya pemanfaatan pasar-pasar yang sudah terbangun di setiap desa	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Pertumbuhan pendapatan pasar	Persen	4,22	4,740.52			1. Pihak Eksternal ket: Pedagang yang dipindah dari pasar Tangga Arung ke Pasar Mangkurawang mengalami penurunan omzet karena sepi pembeli, serta adanya relokasi dan banyaknya pasar tumpah dan maraknya orang berjualan di rumah-rumah pinggir jalan yang mengakibatkan kurangnya pembeli untuk pergi belanja langsung ke pasar sehingga pedagang yang berjualan di dalam pasar milik pemerintah mengeluhkan omset pendapatan yang berkurang yang dimana menjadi alasan bagi mereka dalam membayar retribusi	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Indeks Kualitas Pasar	Nilai	62	119,13			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun dan dikelola	Unit	16	23	13.108.047.200	10.930.615.736		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (unit pengelola pasar) yang memperoleh pembinaan	Unit UPP	3	2	282.242.400	229.333.950		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	Persen	3,57	85,43	1.831.236.800	1.395.491.127	1. Peralatan ket: Barang pokok seperti cabai dan bawang impor dari luar daerah turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar rakyat, penyebabnya bisa keterlambatan jalur distribusi, sirkulasi panen dan faktor cuaca Aksesibilitas yang masih minim di beberapa daerah yang mengakibatkan sulitnya jalur distribusi menyebabkan harga barang lebih tinggi seperti kondisi jalan atau transportasi yang belum memadai	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Regulasi/Peraturan ket:Barang pokok seperti cabai dan bawang impor dari luar daerah turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar rakyat, penyebabnya bisa keterlambatan jalur distribusi, sirkulasi panen dan faktor cuaca Aksesibilitas yang masih minim di beberapa daerah yang mengakibatkan sulitnya jalur distribusi menyebabkan harga barang lebih tinggi seperti kondisi jalan atau transportasi yang belum memadai 3. Pihak Eksternal ket:Barang pokok seperti cabai dan bawang impor dari luar daerah turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar rakyat, penyebabnya bisa keterlambatan jalur distribusi, sirkulasi panen dan faktor cuaca Aksesibilitas yang masih minim di beberapa daerah yang mengakibatkan sulitnya jalur distribusi menyebabkan harga barang lebih tinggi seperti kondisi jalan atau transportasi yang belum memadai	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	Persen	98,39	100,68			1. Peralatan ket:Daerah yang terpencil atau sulit dijangkau dapat menghambat distribusi pupuk, menyebabkan keterlambatan atau kelangkaan.Praktik curang seperti distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya oknum yang menjual pupuk bersubsidi di pasar bebas bisa merugikan petani yang membutuhkan. 2. Regulasi/Peraturan ket:Daerah yang terpencil atau sulit dijangkau dapat menghambat distribusi pupuk, menyebabkan keterlambatan atau	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kelangkaan.Praktik curang seperti distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya oknum yang menjual pupuk bersubsidi di pasar bebas bisa merugikan petani yang membutuhkan.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	Jenis	13	13	166.692.800	141.168.500	1. Pihak Eksternal ket:Melihat dari data tahun sebelumnya diproyeksikan untuk bulan Desember menjelang Natal dan Tahun Baru (NATARU) Komoditas Beras, Cabai, Bawang, Daging Ayam, Tomat serta barang pokok lainnya akan mengalami kenaikan harga jika permintaan pasar meningkat dan mempengaruhi ketersediaan barang pokok tersebut.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	Persen	66,67	66,67	1.542.529.800	1.134.814.627	1. Pihak Eksternal ket:Secara umum, pergerakan harga bulan ini masih terkendali, namun komoditas seperti Beras perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan kutai kartanegara sebagian besar bergantung pada beras yang didatangkan dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa hingga faktor yang menghambat distribusi dan tingkat panen pada daerah produsen sangat mempengaruhi ketersediaan dan harga beras di wilayah kutai kartanegara, Beberapa jenis Cabai juga sangat bergantung dari pengiriman dari daerah Pulau Jawa sehingga harga dan ketersediaan tergantung pada faktor distribusi dan panen di daerah produsen, dan Bawang pula mengalami kondisi yang serupa, perlu adanya perhatian khusus pada komoditas berikut dikarenakan volatilitasnya yang tinggi menjelang akhir November 2025 dimana	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											permintaan pasar pada jenis komoditas berikut semakin mengalami peningkatan.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Ton	86,82	86,82	122.014.200	119.508.000	1. Pihak Eksternal ket:Daerah yang terpencil atau sulit dijangkau dapat menghambat distribusi pupuk, menyebabkan keterlambatan atau kelangkaan.Praktik curang seperti distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya oknum yang menjual pupuk bersubsidi di pasar bebas bisa merugikan petani yang membutuhkan.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Non Migas dan Batu Bara	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan ekspor produk unggulan	Persen	100	90	940.498.200	913.006.861	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Produk ekspor sering kali menghadapi masalah kualitas yang belum memenuhi standar internasional, sehingga sulit bersaing di pasar global,Biaya produksi yang tinggi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan logistik, dapat membuat harga produk menjadi kurang kompetitif,Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan, transportasi, dan penyimpanan dapat menghambat efisiensi distribusi produk ekspor. 2. Peralatan ket:Produk ekspor sering kali menghadapi masalah kualitas yang belum memenuhi standar internasional, sehingga sulit bersaing di pasar global,Biaya produksi yang tinggi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan logistik, dapat membuat harga produk menjadi kurang kompetitif,Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan, transportasi, dan penyimpanan dapat menghambat efisiensi distribusi produk ekspor. 3. Pihak Eksternal	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											ket:Produk ekspor sering kali menghadapi masalah kualitas yang belum memenuhi standar internasional, sehingga sulit bersaing di pasar global,Biaya produksi yang tinggi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan logistik, dapat membuat harga produk menjadi kurang kompetitif,Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan, transportasi, dan penyimpanan dapat menghambat efisiensi distribusi produk ekspor.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi	Kali	10	9	940.498.200	913.006.861	1. Anggaran ket:Kurangnya anggaran karena efisiensi sehingga pelaku usaha yang di fasilitasi tidak maksimal	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Metrologi	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	Persen	30	95,53	551.900.600	323.396.800	1. Peralatan ket:Adanya sebagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya - Ada terdapat kecamatan yang tidak memiliki pasar tradisional sehingga pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayanan tera / tera ulang 2. Pihak Eksternal ket:Adanya sebagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya - Ada terdapat kecamatan yang tidak memiliki pasar tradisional sehingga pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayanan tera / tera ulang	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	19,41	19,41	551.900.600	323.396.800	1. Pihak Eksternal ket:Adanya Debagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya - Ada Terdapat kecamatan Yang tidak memiliki Pasar tradisional sehingga pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayabna tera/tera ulang	
30. BIDANG PERINDUSTRIAN												
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	98,63	35.849.655.146	28.514.206.131	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurangya pemenuhan data dukung dalam penyampaian realisasi kinerja OPD Disperindag	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	1.082.530.400	872.316.999	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 2. Regulasi/Peraturan ket:Kurangya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 3. Waktu ket:Kurangya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	1	1	15.348.778.812	13.522.201.872	1. Peralatan ket:Gangguan teknis pada aplikasi keuangan, jaringan, atau integrasi data.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	187.881.000	175.132.103	1. Regulasi/Peraturan ket:Masih terdapat aset yang belum lengkap administrasinya atau belum tercatat secara optimal	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	12.895.000	12.690.000	1. Peralatan ket: Pendataan belum sepenuhnya akurat sehingga memengaruhi realisasi pendapatan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1.141.433.800	1.101.033.311	1. Pihak Eksternal ket: Kurangnya sinkronisasi antara unit kerja dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	2.737.284.200	1.272.663.866	1. Peralatan ket: Fasilitas pendukung administrasi yang belum optimal	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	3	3	1.910.000.000	1.762.458.400	1. Pihak Eksternal ket: Terbatasnya penyedia yang memenuhi kualifikasi, terutama di daerah tertentu.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12.009.302.224	9.109.791.680	1. Pihak Eksternal ket: Terbatasnya penyedia yang memenuhi kualifikasi, terutama di daerah tertentu.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	1450	120	1.419.549.710	685.917.900	1. Peralatan ket: Informasi kondisi BMD belum diperbarui secara berkala sehingga menyulitkan perencanaan pemeliharaan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah - Persentase Sentra IKM Berbasis Hilirisasi Produk Pertanian Dalam Arti Luas Yang Aktif	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	Dokumen	1	100	4.232.906.991	1.819.462.035	1. Anggaran ket: Penganggaran di APBD-Perubahan disahkan pada dua bulan terakhir pelaksanaan TA 2025, sehingga tidak memungkinkan untuk penyelesaian pekerjaan lantai Efoxi dan penambahan IPAL. Pabrik Rumpit Laut Kec. Muara Badak, serta adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan pembangunan Pabrik minyak makan merah di Kecamatan Kembang Janggut belum dapat dilaksanakan.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Jumlah Sentra	Sentra IKM	1	1	4.232.906.991	1.819.462.035	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: 1. Basis Data Sektor Industri 2. Ketersediaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Tenaga Kerja Terampil 3. Inovasi dan Teknologi 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:1. Basis Data Sektor Industri 2. Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil 3. Inovasi dan Teknologi	
31. BIDANG TRANSMIGRASI												
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru - Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan	Kawasan	1	100	131.386.100	68.939.625	1. Anggaran ket:Efisiensi	
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	1	100			1. Regulasi/Peraturan ket:Kewenangan penetapan kawasan di kementerian Transmigrasi	
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	Dokumen	1	0,7	131.386.100	68.939.625	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggaran	
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru - Jumlah Kawasan Transmigrasi Yg Dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	1	100	350.151.560	209.811.950	1. Anggaran ket:Efisiensi	
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	1	0,7	350.151.560	209.811.950	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggran	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau

Tabel 93. Pelaksanaan Urusan Pendukung Pemerintah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
32. SEKRETARIAT DAERAH												
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan - Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan - Efektifitas Koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan - Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	80	100	176.528.871.902	157.153.414.167	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kadangkala masih ada beberapa pelaksana yang perlu ditingkatkan untuk melaksanakan tugasnya	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	98,5	101,52			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Tingginya volume kegiatan sehingga agak kesulitan membagi SDM yang ada	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen	90	100			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: keterbatasan jumlah SDM yang support dalam pelaksanaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kegiatan	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			PERSENTASE ASET YANG DI MANFAATKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH	Persen	79	126,58			1. Anggaran ket:Keterbatasan kasda	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	281.111.600	134.961.680	1. Anggaran ket:Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami efisiensi	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	80.308.450.407	75.461.869.185		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	295.136.800	260.267.451	1. Anggaran ket:keterbatasan anggaran kasda, namun tetap dilaksanakan	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	24.587.000	24.194.090		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	13.771.004.600	12.280.742.601	1. Anggaran ket:Tidak adanya ketersediaan dana Pada Kas Daerah	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Unit	102	104	17.269.249.505	15.737.432.926	1. Anggaran ket:Tidak Adanya Ketersediaan Dana pada Kas Daerah	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	16.026.701.688	14.522.222.725	1. Anggaran ket:Tidak Adanya Ketersediaan Dana Kas Daerah	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	132	132	26.093.715.630	17.463.957.152	1. Anggaran ket:Tidak Adanya Ketersediaan Dana Kas Daerah	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	1.291.993.488	834.828.293		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Dokumen	12	12	1.253.095.900	1.167.736.355	1. Anggaran ket:efisiensi dan pemangkasan transfer keuangan daerah	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan	1001	100	19.913.825.284	19.265.201.709		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama - Indeks Kualitas Kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama - Efektifitas Koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama - Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama - Nilai LPPD	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	99	85.433.261.995	74.643.946.191	1. Pihak Eksternal ket:kadangkala dukungan dari pihak eksternal belum sesuai harapan	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	100	100			1. Anggaran ket:Ketersediaan kasda yang sepenuhnya tidak bisa memenuhi belanja masyarakat	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100			1. Waktu ket:kadangkala memerlukan waktu yang agak lama pada saat berproses	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	Persen	90	111,11			1. Anggaran ket:Keterbatasan kasda	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen	30	6	1.268.314.000	782.818.109		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Orang dan Lembaga	2589	4734	82.803.665.075	72.802.694.055	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Efisiensi anggaran dan keterbatasan kualitas SDM 2. Anggaran ket:Efisiensi anggaran dan keterbatasan kualitas SDM	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen	100	100	760.871.800	534.812.757		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	Dokumen	20	20	600.411.120	523.621.270	1. Anggaran ket:Kurangannya anggaran pada kegiatan	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam - Indeks Kualitas Kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam - Efektifitas Koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam - Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	4.021.800.444	3.330.801.624		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Persentase permasalahan kebijakan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan	Persen	95	100			1. Anggaran ket:Keterbatasan kasda	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	Persen	100	100				
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			PERSENTASE PENGADAAN BARANG JASA YANG DI SELESAIKAN	Persen	100	100				
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	12	12	1.051.839.400	741.938.175	1. Anggaran ket:Ketidakpastian ketersediaan dana (Surat Penyediaan Dana)	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen	14	14	859.248.454	748.145.661	1. Anggaran ket:keluaran / hasil tidak bisa maksimal	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	595	590	1.333.484.090	1.202.927.163		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen	31	31	777.228.500	637.790.625	1. Anggaran ket:Dengan adanya pengurangan anggaran, pelaksanaan kegiatan makan minum rapat dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan masyarakat menjadi kurang optimal, karena alokasi dana untuk kebutuhan tersebut mengalami pemotongan sehingga berdampak pada efektivitas dan kenyamanan jalannya rapat	
33. SEKRETARIAT DPRD												

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD - Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	83	120,48	126.815.874.698	96.859.385.514		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	960.063.000	897.709.600		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	6	6	25.228.238.321	23.133.744.699		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	271.564.000	234.718.180		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	1.922.365.690	1.079.790.554		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	8.601.335.068	5.392.338.072		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1389	1389	12.182.213.000	6.533.098.088		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	14.363.072.332	12.158.358.002		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	254	254	15.468.900.400	2.579.363.891		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan	2	2	36.738.518.887	35.168.893.015		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	Layanan	3	3	11.079.604.000	9.681.371.413		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Meningkatkan Dukungan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rapat-	Persen	100	100	59.684.274.909	54.426.573.829		



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Daerah	Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD - Prosentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	FUNGSI DPRD	Rapat Kerja DPRD							
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Persentase Fasilitas Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD	Persen	100	100				
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	PERDA	16	16	7.481.036.000	7.031.272.181		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat Pembahasan	Rapat	18	18	1.428.366.500	1.420.105.216		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan DPRD	Kali	190	190	1.990.774.000	1.898.964.347		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	100	24.730.371.500	21.233.950.577		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan yang terlaksana	Persen	100	100	6.089.245.000	5.511.213.684		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	Persen	100	100	349.482.500	324.867.968		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Fasilitas Tugas DPRD	Prosentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100	100	17.614.999.409	17.006.199.856		

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau



Tabel 94. Pelaksanaan Urusan Pengawasan Pemerintah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
34. INSPEKTORAT DAERAH												
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. - Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88	86,61	34.427.410.148	24.130.237.070		
					Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	100			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan SDM Pengawas.	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	750.000.000	79.893.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	5	5	21.141.423.715	19.594.259.870		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan barang milik daerah (BMD) pada perangkat Daerah	Dokumen	3	2	90.745.000	40.800.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	1.547.300.000	324.972.528		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	1.059.588.340	709.877.284		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Unit	40	39	6.365.896.000	1.381.712.800		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan	12	12	2.872.457.093	1.575.647.271		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Daerah yang disediakan							
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	17	100	600.000.000	423.074.317		
			Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI - Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	97	125,02	6.951.793.000	3.549.761.386	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI - Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen laporan kegiatan pengawasan	Dokumen	70	74	5.851.793.000	2.923.881.518		
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	19	26	1.100.000.000	625.879.868		
			Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. - Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	85	118,34	2.962.337.000	1.298.276.998	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. - Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	4	4	500.000.000	417.142.381		
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Dokumen	85	86	2.462.337.000	881.134.617		

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau

Tabel 95. Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
35. PERENCANAAN												
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah - Skor penilaian penghargaan perencanaan pembangunan daerah - Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88,85	87,61	36.598.794.501	30.110.081.854	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan komponen dalam cara hitung penilaian SAKIP oleh KEMENPAN RB	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	8	423.695.920	268.642.411		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	6	6	16.526.209.186	15.123.997.740		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	6	4	119.892.400	85.122.600		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi	Dokumen	8	8	856.946.836	704.255.515		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Kepegawaian Perangkat Daerah							
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah ASN	Orang	60	10				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Pakaian	Stell	368	368				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	3.291.662.230	2.814.908.638		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	4.761.321.090	3.702.902.761		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	4.086.335.899	2.948.679.915		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	6.532.730.940	4.461.572.274		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah - Skor penilaian penghargaan perencanaan pembangunan daerah - Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	100	90,98	4.398.376.564	2.734.552.316	1. Pihak Eksternal ket:1. Data belum sepenuhnya tersedia oleh produsen data pada awal tahun 2. Proses pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas belum sepenuhnya terbangun dalam skema kerja terintegrasi 3. Terdapat beberapa program yang mengalami rasionalisasi anggaran sehingga interview kebijakan tidak berjalan optimal 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:1. Data belum sepenuhnya tersedia oleh produsen data pada awal tahun 2. Proses pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas belum sepenuhnya terbangun dalam skema kerja terintegrasi 3. Terdapat beberapa program yang mengalami rasionalisasi anggaran sehingga interview kebijakan tidak berjalan optimal	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											3. Manajemen Resiko ket: 1. Data belum sepenuhnya tersedia oleh produsen data pada awal tahun 2. Proses pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas belum sepenuhnya terbangun dalam skema kerja terintegrasi 3. Terdapat beberapa program yang mengalami rasionalisasi anggaran sehingga interview kebijakan tidak berjalan optimal	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	6	103	1.976.687.064	1.655.430.060		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Pendampingan Perencanaan	OPD	58	59			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:-	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	2	2				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum	72	72			1. Pihak Eksternal ket: Kesiapan OPD	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Kali	2	2				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Dokumen	7	5	1.367.433.500	570.135.987		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah pendampingan ketersediaan data	Urusan	32	32				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	Rancangan Regulasi Daerah	6	0				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang	177	177			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Terbatasnya SDM yang dapat memahami Penngelolaan Data	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Layanan Data dan Informasi Kecamatan	Layanan Data & Informasi	6	20			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Dukungan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Komitmen Kecamatan belum Optimal Karena belum tersedianya regulasi daerah 2. Regulasi/Peraturan ket:Dukungan Komitmen Kecamatan belum Optimal Karena belum tersedianya regulasi daerah	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	7	7	1.054.256.000	508.986.269		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah - Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	Persen	100	91,17	5.604.120.870	4.664.010.475	1. Pihak Eksternal ket:1. OPD masih fokus target sektoral masing-masing sehingga sinergi lintas urusan lemah 2. Perubahan kebijakan pusat, diantaranya penyesuaian TKD yang mengharuskan efisiensi, dilakukan sehingga mengakibatkan target tidak dapat tercapai 3. Monev hanya berfokus pada pelaporan, Rekomendasi evaluasi belum jadi dasar perbaikan oleh perangkat daerah	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	100	75,45			1. Pihak Eksternal ket:1. OPD masih fokus target sektoral masing-masing sehingga sinergi lintas urusan lemah 2. Perubahan kebijakan pusat, diantaranya penyesuaian TKD yang mengharuskan efisiensi, dilakukan sehingga mengakibatkan target tidak dapat tercapai 3. Monev hanya berfokus pada pelaporan, Rekomendasi evaluasi belum jadi dasar perbaikan oleh perangkat daerah	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan	Persen	100	81,13			1. Pihak Eksternal ket:1. OPD masih fokus target sektoral masing-masing sehingga sinergi lintas urusan lemah 2.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD						Perubahan kebijakan pusat, diantaranya penyesuaian TKD yang mengharuskan efisiensi, dilakukan sehingga mengakibatkan target tidak dapat tercapai 3. Monev hanya berfokus pada pelaporan, Rekomendasi evaluasi belum jadi dasar perbaikan oleh perangkat daerah	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	71	77	1.161.005.340	929.572.539	1. Pihak Eksternal ket:- OPD fokus target sendiri, kurang mau berkolaborasi - Data antar OPD tidak sinkron - Perubahan kebijakan pusat mendadak → rencana daerah terganggu - Pemahaman perencanaan berbasis kinerja belum merata.	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	37	40	2.889.144.300	2.590.601.873		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	76	8	1.553.971.230	1.143.836.063	1. Waktu ket:waktu pelaksanaan kegiatan bidang bersamaan dengan agenda penyusunan RKPD, Ranwal RPJM dan Perubahan RKPD 2025	
36. KEUANGAN												
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah - Persentase Administrasi umum Perangkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	80	75	57.197.792.065	48.800.695.542		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	392.721.280	95.894.800		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	5	5	38.770.834.020	32.785.516.041		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	4	4	87.209.000	84.268.900		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	11	11	75.892.800	35.306.300		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	Persen	80	80	1.504.587.000	1.362.170.209		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	80	80	10.436.572.000	10.131.273.855		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	2.939.861.565	1.876.296.425		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	80	80	2.990.114.400	2.429.969.012		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	Optimalnya Penerimaan Dana bagi Hasil - Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat	Persen	80	100	284.900.800	235.401.284		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan Penerimaan DBH Pusat	Triliun Rupiah	80	11	284.900.800	235.401.284		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah			Realisasi Penerimaan DBH Pusat	Triliun Rupiah	80	11				
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persen	70	100	4.945.806.181	3.033.035.180		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Validitas data WP dan Penerimaan Pajak Daerah	Persen	13,6	1,85	4.945.806.181	3.033.035.180		

37. KEPEGAWAIAN

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					856.946.836	704.255.515		
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	856.946.836	704.255.515		
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah ASN	Orang	60	10				
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Pakaian	Stell	368	368				
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah - Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88	87,4	38.352.067.288	33.931.425.623	1. Anggaran ket:1. Masih ada beberapa penetapan Tujuan dan Target Bidang yang belum terperinci dan spesifik 2. Adanya Regulasi dari Pusat terkait Rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan target kinerjanya berupa draft Peraturan Bupati 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:1. Masih ada beberapa penetapan Tujuan dan Target Bidang yang belum terperinci dan spesifik 2. Adanya Regulasi dari Pusat terkait Rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan target kinerjanya berupa draft Peraturan Bupati	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23	25	672.331.150	590.456.611		
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	16	13.795.746.997	11.645.846.927		
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	4	153.935.040	117.259.000		
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	267.980.464	26.565.512	1. Regulasi/Peraturan ket:Proses review dan verifikasi produk/jasa oleh tim verifikator LKPP atau instansi	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											terkait memerlukan waktu lama. - Banyaknya antrian produk yang menunggu validasi, terutama untuk komoditas umum seperti IT, dan konstruksi.	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	1.115.487.350	725.615.015	1. Peralatan ket:1. Minimnya peralatan kantor (komputer, printer, alat arsip) atau kondisi yang sudah usang. 2. Ruang kerja yang sempit atau tidak layak. 3. Alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk kegiatan administrasi umum. 4. Proses pengadaan barang/jasa yang lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak. 2. Anggaran ket:1. Minimnya peralatan kantor (komputer, printer, alat arsip) atau kondisi yang sudah usang. 2. Ruang kerja yang sempit atau tidak layak. 3. Alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk kegiatan administrasi umum. 4. Proses pengadaan barang/jasa yang lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak.	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	20.812.246.000	19.621.698.835	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Terlambatnya pengesahan APBD atau revisi anggaran menghambat proses pengadaan. 2. Keterbatasan waktu pelaksanaan karena anggaran baru tersedia di tengah tahun anggaran 3. Petugas pengadaan belum bersertifikasi atau kurang memahami regulasi (seperti Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). 4. Ketergantungan pada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pihak ketiga (konsultan, penyedia) yang belum tentu andal	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.144.340.287	901.522.453	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Alokasi anggaran yang terbatas atau tidak sesuai dengan volume kebutuhan. 2. Prioritas anggaran lebih difokuskan pada program utama sehingga jasa penunjang dianggap sekunder. Keterlambatan proses lelang atau pengadaan langsung karena hambatan administratif atau teknis. 3. Penggunaan sistem e-Procurement yang belum optimal atau sering mengalami gangguan	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	12	12	390.000.000	302.461.270	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Anggaran pemeliharaan seringkali tidak diprioritaskan dalam APBD. 2. Biaya pemeliharaan dianggap beban tambahan, bukan investasi jangka panjang 3. Pengguna barang kurang peduli terhadap kondisi dan perawatan barang yang digunakan. 4. Tidak adanya sanksi atau sistem tanggung jawab jika barang rusak akibat kelalaian. 2. Anggaran ket:1. Anggaran pemeliharaan seringkali tidak diprioritaskan dalam APBD. 2. Biaya pemeliharaan dianggap beban tambahan, bukan investasi jangka panjang 3. Pengguna barang kurang peduli terhadap kondisi dan perawatan barang yang digunakan. 4. Tidak adanya sanksi atau sistem tanggung jawab jika barang rusak akibat kelalaian.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah - Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	95	100	5.905.643.556	3.501.243.488	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya regulasi pusat terkait Rasiobalisasi anggaran berdampak pada beberapa dokumen masih dalam bentuk Draft Perbub dan Proses Harmonisasinya di laksanakan di tahun 2026	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	ASN	5299	5299	1.379.495.970	554.077.103	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Adanya regulasi rasionalisasi anggaran sehingga sosialisasi Buzeting rencana kebutuhan ASN tidak di laksanakan 2. Pelaksanaan MTQ Korpri tingkat Kabupaten tidak laksanakan terkendala tidak cukupnya anggaran 2. Anggaran ket:1. Adanya regulasi rasionalisasi anggaran sehingga sosialisasi Buzeting rencana kebutuhan ASN tidak di laksanakan 2. Pelaksanaan MTQ Korpri tingkat Kabupaten tidak laksanakan terkendala tidak cukupnya anggaran	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	ASN	2495	2810	515.600.800	380.210.735	1. Regulasi/Peraturan ket:waktu dan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan mempengaruhi output kegiatan 2. Waktu ket:waktu dan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan mempengaruhi output kegiatan	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	PNS	1700	23776	3.318.700.230	1.966.267.779	1. Anggaran ket:Ketersediaan SPD tidak sesuai anggaran kas yang disusun	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	ASN	11491	11491	691.846.556	600.687.871	1. Anggaran ket:Kuranganya ketersediaan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditagihkan	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
38. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah - Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	Persen	24,64	100	4.767.316.920	3.391.231.334	1. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran sehingga PPPK Tahap 2 blum bisa melaksanakan Orientasi	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	ASN	200	10000	1.540.080.720	986.132.633	1. Anggaran ket:Ketersediaan SPD tidak sesuai dengan anggaran kas yang disusun	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan "	ASN	106	2417	3.227.236.200	2.405.098.701	1. Anggaran ket:Ketersediaan SPD tidak sesuai anggaran kas yang disusun	
39. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah - Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan - Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	129	100	12.741.776.127	11.651.020.253	1. Peralatan ket:belum terpenuhinya peralatan pendukung dan waktu pelaksanaan 2. Waktu ket:belum terpenuhinya peralatan pendukung dan waktu pelaksanaan	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	441.328.292	437.677.565	1. Waktu ket:Faktor penghambat tidak signifikan	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	7	1	11.014.866.845	10.031.841.810		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	8	6	63.881.800	63.051.498		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	6	80.011.420	79.765.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Pelayanan	7	7	327.571.508	289.464.512		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	85.455.040	50.527.000		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	419.533.222	396.446.004		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	243	243	309.128.000	302.246.864		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah - Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan - Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persen	100	100	5.215.569.972	4.609.626.160	1. Anggaran ket: kualitas output penelitian berkurang karena keterbatasan dana	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Persen	100	100				
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	100				
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Persen	100	100			1. Anggaran ket: adanya kendala penyelesaian pembayaran sampai laporan ini di input	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Dokumen	1	1	587.584.800	582.046.440	1. Anggaran ket: Kualitas output penelitian berkurang karena keterbatasan dana	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Pengkajian Peraturan							
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	Dokumen	2	2	2.072.131.000	2.062.128.622		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	3	3	797.228.450	768.016.798		
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	Dokumen	5	5	1.758.625.722	1.197.434.300	1. Anggaran ket:Adanya kendala penyelesaian pembayaran sampai laporan ini di input	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau

Tabel 96.Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
40. URUSAN KEWILAYAHAN												
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	100	51.607.594.956	45.377.370.729		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	340.087.570	171.191.580		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	36	36	45.318.753.127	41.427.158.194		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	1	1	64.546.000	35.417.498		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan	Orang	1	0	-	-	1. Anggaran ket:Anggaran Kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					administrasi kepegawaian						ini tidak ada	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	7	7	1.985.329.208	1.025.048.495		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	13	154.381.000	7.060.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	2.752.733.347	2.554.483.795		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	32	32	991.764.704	157.011.167		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	100	56.665.669.476	41.327.766.894		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	628.973.786	413.078.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	35.325.000	3.030.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	330	331	56.001.370.690	40.911.658.394		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	51.896.878.127	47.902.077.588		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	36	36	8.786.000.000	7.324.015.984		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	24	24	12.053.376.849	10.161.937.256		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	288	288	31.057.501.278	30.416.124.348		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	80	100	142.961.020	97.733.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	142.961.020	97.733.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	80	100	169.250.000	111.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	2	2	169.250.000	111.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	100	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	0		-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	64,47	9.591.063.329	7.478.536.432	1. Regulasi/Peraturan ket: Terlaksana menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	322.914.570	143.652.600		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	18	18	7.513.584.053	6.366.353.854		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	3	3	178.650.374	59.920.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	74	2	27.082.000	14.070.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	9	7	511.389.090	348.939.500	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	0	3.100.000	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	599.343.242	353.299.410	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	48	22	435.000.000	192.301.068	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	89,33	43.112.606.620	38.115.465.650	1. Regulasi/Peraturan ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi 2. Dukungan Pemimpin ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	72,67			1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan regulasi dan dukungan pimpinan 2. Dukungan Pemimpin ket:Adanya perubahan regulasi dan dukungan pimpinan	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	300.935.800	258.154.910		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	1	0	57.385.000	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	42.754.285.820	37.857.310.740	1. Regulasi/Peraturan ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi 2. Dukungan Pemimpin ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	469.471.940	440.045.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan regulasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	100	101.485.140	84.685.000		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	5	2	367.986.800	355.360.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi 2. Dukungan Pemimpin ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	118.690.000	63.070.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan regulasi	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	Kegiatan	20	20	118.690.000	63.070.000		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	193.707.000	71.251.500	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan regulasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	2	2	193.707.000	71.251.500	1. Regulasi/Peraturan ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi 2. Dukungan Pemimpin ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	90	100	-	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan regulasi	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76	101,32	132.936.150	122.100.000	1. Anggaran ket:Pelaksanaan terkendala dalam proses penyesuaian anggaran	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76	78,95	10.108.163.701	8.987.479.385	1. Anggaran ket:Pelaksanaan terkendala dalam proses penyesuaian anggaran	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	1	132.936.150	122.100.000		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	12	1	103.039.560	78.659.300		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	48	1	8.604.025.527	7.879.588.462		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat	Unit	50	1	241.432.308	46.230.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Daerah							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	100	1	275.517.800	248.291.600		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	1	764.148.506	623.318.217		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	50	1	120.000.000	111.391.806		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	64	62,5	537.309.620	255.612.400	1. Pihak Eksternal ket:kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya dukungan dari pemerintah, serta permasalahan koordinasi dan komunikasi antara LPM/LPP dengan masyarakat dan pemerintah.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	64	1	201.582.750	138.625.000	1. Anggaran ket:ketidakrutinan pembinaan oleh camat, terbatasnya waktu dan pagu dana dalam penyusunan RKP-Desa, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat desa juga menjadi penghambat.. 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:ketidakrutinan pembinaan oleh camat, terbatasnya waktu dan pagu dana dalam penyusunan RKP-Desa, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat desa juga menjadi penghambat.. 3. Waktu ket:ketidakrutinan pembinaan oleh camat, terbatasnya waktu dan pagu dana dalam penyusunan RKP-Desa, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau.	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat desa juga menjadi penghambat..	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Lembaga	4	1	335.726.870	116.987.400	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:kurangnya komitmen masyarakat, rendahnya etos kerja, perubahan mendadak dalam pola masyarakat, kurangnya koordinasi, dan perubahan nilai dan adat istiadat dan Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya pengetahuan juga menjadi kendala. 2. Peralatan ket:kurangnya komitmen masyarakat, rendahnya etos kerja, perubahan mendadak dalam pola masyarakat, kurangnya koordinasi, dan perubahan nilai dan adat istiadat dan Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya pengetahuan juga menjadi kendala. 3. Regulasi/Peraturan ket:kurangnya komitmen masyarakat, rendahnya etos kerja, perubahan mendadak dalam pola masyarakat, kurangnya koordinasi, dan perubahan nilai dan adat istiadat dan Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya pengetahuan juga menjadi kendala. 4. Anggaran ket:kurangnya komitmen masyarakat, rendahnya etos kerja, perubahan mendadak dalam pola masyarakat, kurangnya koordinasi, dan perubahan nilai dan adat istiadat dan Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya pengetahuan juga menjadi kendala.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											5. Dukungan Pemimpin ket:kurangnya komitmen masyarakat, rendahnya etos kerja, perubahan mendadak dalam pola masyarakat, kurangnya koordinasi, dan perubahan nilai dan adat istiadat dan Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya pengetahuan juga menjadi kendala.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	74	54,05	43.948.100	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Kurangnya penegakan hukum, Sumber Daya Manusia (SDM), Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, kurangnya Koordinasi, dan faktor lainnya	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	75	1	43.948.100	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Penegakan hukum yang belum optimal dan kurangnya perlindungan masyarakat dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pelanggaran hukum, kriminalitas, dan gangguan terhadap ketertiban umum.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	74	54,05	500.609.380	485.802.500	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:kurangnya kompetensi dan profesionalisme pegawai, kurangnya responsivitas terhadap keluhan, dan kurangnya informasi yang tersebar luas kepada masyarakat	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	67	1	500.609.380	485.802.500	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:meliputi kendala regulasi, teknis, dan political will pejabat dalam pengalokasian program dan anggaran. Selain itu, kurang optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi serta koordinasi antar sektor juga menjadi penghambat. Faktor sumber daya manusia, anggaran, sarana dan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											prasarana, serta kebijakan pemerintah daerah turut berperan 2. Anggaran ket: meliputi kendala regulasi, teknis, dan political will pejabat dalam pengalokasian program dan anggaran. Selain itu, kurang optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi serta koordinasi antar sektor juga menjadi penghambat. Faktor sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta kebijakan pemerintah daerah turut berperan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	72	55,56	40.090.500	38.905.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: kurangnya pemahaman SKPD terhadap pelayanan desa, kurangnya fasilitas kerja seperti komputer dan laptop, serta kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan komputer dan kurangnya motivasi. Selain itu, lambannya administrasi dan pengelolaan dana desa yang kurang efektif juga menjadi penghambat. 2. Peralatan ket: kurangnya pemahaman SKPD terhadap pelayanan desa, kurangnya fasilitas kerja seperti komputer dan laptop, serta kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan komputer dan kurangnya motivasi. Selain itu, lambannya administrasi dan pengelolaan dana desa yang kurang efektif juga menjadi penghambat.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	15	1	40.090.500	38.905.000	1. Regulasi/Peraturan ket: Masalah dalam pengelolaan anggaran APBDes Induk, pembangunan sarana	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											prasarana pemerintahan desa, pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan perangkat desa, serta laporan pejabat desa persiapan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia, sosialisasi yang tidak optimal, dan koordinasi yang kurang juga dapat menjadi penghambat. 2. Pihak Eksternal ket: Masalah dalam pengelolaan anggaran APBDes Induk, pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa, pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan perangkat desa, serta laporan pejabat desa persiapan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia, sosialisasi yang tidak optimal, dan koordinasi yang kurang juga dapat menjadi penghambat. 3. Anggaran ket: Masalah dalam pengelolaan anggaran APBDes Induk, pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa, pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan perangkat desa, serta laporan pejabat desa persiapan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia, sosialisasi yang tidak optimal, dan koordinasi yang kurang juga dapat menjadi penghambat.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	114,6	6.515.197.152	5.404.603.303	1. Peralatan ket: Data pendukung kinerja belum tersedia secara lengkap, valid, dan tepat waktu	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	5	262.932.100	115.950.879	1. Pihak Eksternal ket: Program "copy-paste" dari tahun sebelumnya tanpa analisis situasi.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat	Laporan	15	6	5.094.091.031	4.464.743.959	1. Anggaran ket: Penggunaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Daerah yang akuntabel						anggaran yang tidak sesuai prioritas atau aturan menghambat akuntabilitas.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	1033	1	215.019.400	154.138.430	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Data aset lama belum diperbarui sehingga banyak selisih antara fisik dan catatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	6	6	170.198.470	156.984.453	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kapasitas SDM yan terbatas, kurangnya kompetensi ASN dan sarana perasarana yang belum memadai serta ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan dengan rencana yang ditetapkan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	500	7	441.055.465	386.355.859	1. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran dan dana yang dialokasikan serta ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan dengan rencana yang ditetapkan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	85	6	331.900.686	126.429.723	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan SDM, Anggaran dan dana yang dialokasikan serta ketiksesuaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan dengan rencana yang ditetapkan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	33.782.945.146	30.714.379.514	1. Peralatan ket:Fasilitas pendukung pelayanan belum sepenuhnya optimal.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	65	96,92	-	-	1. Anggaran ket:Keterbatasan pendanaan menyebabkan pembangunan dan perbaikan belum merata	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan	Kegiatan	100	0	275.496.440	151.594.560	1. Regulasi/Peraturan ket:Penolakan terhadap perubahan dari pihak tertentu yang merasa	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif						nyaman dengan cara kerja lama	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	10	0	55.042.000	44.098.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Prosedur administrasi yang kompleks dapat memperlambat keputusan dan pelaksanaan kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	0	33.452.406.706	30.518.686.954	1. Anggaran ket:Minimnya dana operasional kecamatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	394.387.200	264.193.700	1. Regulasi/Peraturan ket:Kurangminat dan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	6	50	152.220.200	135.434.750	1. Anggaran ket:Dana Desa tidak cukup untuk semua kebutuhan prioritas	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kegiatan	5	30	242.167.000	128.758.950	1. Regulasi/Peraturan ket:Kurangkesadaran pentingnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	98,5	100.260.000	85.264.750	1. Pihak Eksternal ket:Tidak semua tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat terlibat aktif secara berkelanjutan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	10	10	100.260.000	85.264.750	1. Regulasi/Peraturan ket:Tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP, polisi, dan pemerintah daerah.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	99,4	239.499.000	52.320.000	1. Pihak Eksternal ket:Perbedaan kewenangan antar instansi membutuhkan waktu dan penyesuaian	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah								dalam pelaksanaan.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	100	0	239.499.000	52.320.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Ego sektoral dan kurangnya komunikasi lintas lembaga	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	102,95	7.943.687.781	6.660.676.426		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	9	9	289.159.940	64.967.438		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4	4	4.768.314.409	4.227.295.048		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	4	4	223.157.700	171.145.935		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	220.252.896	92.762.000	1. Anggaran ket:ketidakterersediaan anggaran karena kondisi keuangan daerah	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	3205	3205	571.901.600	478.573.963		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	90	90	618.166.600	547.806.582		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	787.789.876	639.306.840		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	20	20	464.944.760	438.818.620		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	39.186.676.120	28.864.409.017	1. Anggaran ket:kegiatan Fisik di pelimpahan kewenangan camat sebanyak 63 paket belum terbayarkan (	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah								utang)	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	3	3	267.654.900	212.431.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	80	80	66.775.000	44.075.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	202	201	38.852.246.220	28.607.903.017	1. Anggaran ket:Kegiatan pekerjaan Fisik tidak terbayarkan karena ketidaktersediaan anggaran	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	78	100	4.743.385.884	4.207.014.950		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	6	6	208.326.000	158.274.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	4.535.059.884	4.048.740.950		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	81	100	98.780.200	68.073.300		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	98.780.200	68.073.300		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	74	100	383.010.500	320.237.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah									
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	383.010.500	320.237.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	98	6.581.190.998	5.533.340.136	1. Anggaran ket: Kurangnya Ketersediaan Anggaran di APBDP sehingga mempengaruhi realisasi kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	65	65	302.500.000	301.600.000	1. Anggaran ket: Anggaran pada 2 sub kegiatan tidak dapat di realisasikan karena anggran yang tersedia tidak cukup	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	41	41	4.136.147.335	3.573.850.241		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	12	11	204.201.400	109.280.000	1. Anggaran ket: kurangnya Ketersediaan dana mempengaruhi realisasi kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	51	0	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	4	4	720.152.200	641.620.000	1. Anggaran ket: kurangnya Ketersediaan anggaran menghambat proses tahapan kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Unit	27	10	374.544.315	72.739.000	1. Anggaran ket: Ketersediaan dana yang tidak mencukupi sehingga tahapan kegiatan tidak dapat di laksanakan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	803.645.748	794.390.895	1. Anggaran ket: Ketersediaan anggaran mempengaruhi realisasi kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	30	30	40.000.000	39.860.000	1. Anggaran ket: Kegiatan pemeliharaan telah dilaksanakan akan tetapi realisasi anggaran tidak dapat di serap maksimal karena ketersediaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											dana	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	89	23.504.907.097	21.204.672.183	1. Anggaran ket:Kurang nya ketersediaan dana sehingga berpengaruh terhadap realisasi kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	89			1. Anggaran ket:Terkendala dengan kurangnya ketersediaan dana sehingga berpengaruh terhadap realisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	321.650.000	240.425.000	1. Anggaran ket:Faktor ketersediaan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan	2	2	50.000.000	50.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	114	106	23.133.257.097	20.914.247.183	1. Anggaran ket:kurangnya ketersediaan dana sehingga proses realisasi keuangan terhambat	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	80	100	361.600.000	360.250.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	4	3	100.000.000	99.350.000	1. Anggaran ket:Tahapan kegiatan berjalan akan tetapi ketersediaan dana tidak mencukupi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	5	5	261.600.000	260.900.000	1. Anggaran ket:Ketersediaan dana mempengaruhi penyerapan anggaran	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta	Persen	70	100	140.385.100	140.000.000		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	140.385.100	140.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	210.000.000	129.550.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	210.000.000	129.550.000	1. Anggaran ket:Realisai keuangan tidak dapat terserap maksimal karena kurangnya ketersediaan dana	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	88,48	20.840.844.330	18.011.556.746	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Belum optimalnya pencapaian bobot 4 unsur penilaian AKIP berupa Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja inetrnal; 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 2. Regulasi/Peraturan ket:1. Belum optimalnya pencapaian bobot 4 unsur penilaian AKIP berupa Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja inetrnal; 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 3. Waktu ket:1. Belum optimalnya pencapaian bobot 4 unsur penilaian AKIP berupa Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal; 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	181.340.540	101.449.900	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	14	14	14.831.887.435	13.593.978.552	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	1017	1017	233.637.500	58.705.000	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	74	74	-	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : 1. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; 2.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Penundaan realisasi anggaran karena keterbatasan kasda, pemilihan berdasarkan skala prioritas 2. Waktu ket:Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : 1. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; 2. Penundaan realisasi anggaran karena keterbatasan kasda, pemilihan berdasarkan skala prioritas	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	10	9	1.177.079.331	755.004.795	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	30	31	413.155.000	140.087.340	1. Regulasi/Peraturan ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, menjadi utang. 2. Waktu ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	3.011.560.024	2.749.141.115		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	545	425	992.184.500	613.190.044	1. Regulasi/Peraturan ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, menjadi utang. 2. Waktu ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	85	100	40.451.441.788	31.308.376.827	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 2. Waktu ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	-	-	1. Regulasi/Peraturan ket.: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 2. Waktu ket.: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	380.121.850	321.640.050	1. Regulasi/Peraturan ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, dan menjadi utang 2. Waktu ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, dan menjadi utang	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kegiatan	2	2	40.071.319.938	30.986.736.777	1. Waktu ket:Realisasi anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				kepada Camat	yang menjadi kewenangan Camat						tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	21.659.702.710	18.333.243.748	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 2. Waktu ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	24	18	7.104.174.460	4.131.775.748	1. Regulasi/Peraturan ket:Kegiatan tidak terlaksana 100% karena kondisi ketersediaan kasda yang tidak dapat diprediksi 100% serta menghindari potensi timbulnya utang, maka Kelurahan tidak melaksanakan SubKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berupa pelatihan-pelatihan. 2. Anggaran ket:Kegiatan tidak terlaksana 100% karena kondisi ketersediaan kasda yang tidak dapat diprediksi 100% serta menghindari potensi timbulnya utang, maka Kelurahan tidak melaksanakan SubKegiatan Pemberdayaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Masyarakat di Kelurahan yang berupa pelatihan-pelatihan.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	96	78	14.555.528.250	14.201.468.000	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	172.557.500	74.250.000	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 2. Waktu ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	172.557.500	74.250.000	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	693.637.450	628.991.550	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Waktu ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen keterbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	1	1	693.637.450	628.991.550	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	100,41	22.612.742.607	18.188.186.240	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi dan tahapan kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	241.084.100	90.308.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	14	15.869.094.388	13.915.354.804		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	1030	1030	223.428.800	36.520.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	90	0	264	-	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Karena adanya Efisiensi Anggaran Tahap 1 dan 2 sehingga anggaran di hapus	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	6	6	2.022.200.730	1.329.896.757		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	96	93	311.553.200	281.813.511	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Karena adanya efisiensi anggaran sehingga tidak tercapai sesuai dengan target	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	Bulan	12	12	3.420.260.899	2.320.395.419		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					disediakan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	80	80	524.856.490	213.897.749		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	100	71.416.722.833	57.598.127.851		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang Melibatkan Perangkat Daerah Dan instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	434.900.000	382.581.500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang Difasilitasi	SPM	1	1	33.495.000	33.377.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	70.948.327.833	57.182.169.351	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	100	22.657.161.900	20.780.096.954		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	80	80	8.884.548.900	7.615.232.354		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	41	39	13.772.613.000	13.164.864.600	1. Waktu ket:ada 3 Paket Kegiatan tidak dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kondisi/ waktu yang tidak mendukung	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Persen	80	100	141.430.000	49.433.850		

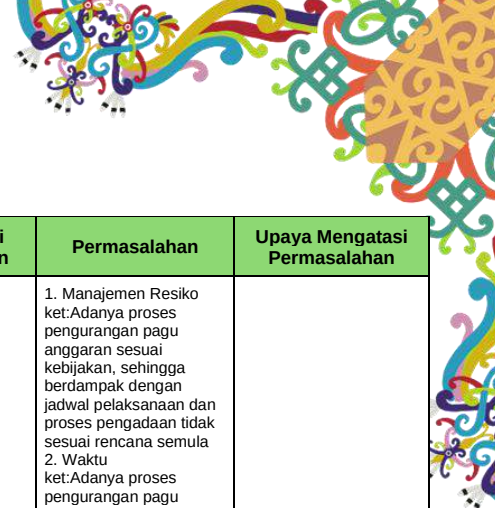
No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daerah		dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan	3	3	141.430.000	49.433.850	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	71,45	100	492.837.000	462.280.450	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	5	5	492.837.000	462.280.450		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	89,43	7.756.833.495	6.012.567.005		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	10	261.461.921	173.518.949		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	5.636.982.513	4.716.812.891		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	696	696	80.471.600	60.696.956		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	86	86	10.000.000	10.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	5	5	207.318.859	202.129.630		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Unit	6	4	771.073.388	149.818.016	1. Waktu ket: Pelaksanaan terkendala waktu	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	643.305.214	566.348.914		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	24	24	146.220.000	133.241.649		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	41	243,9	28.187.751.040	26.083.715.183		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	90	111,11	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	339.075.500	331.145.021		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	1	1	60.407.300	58.854.970		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	27.788.268.240	25.693.715.192		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	524.069.150	508.941.654		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	14	14	155.152.950	145.778.169		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Berdayakan	Lembaga	5	5	368.916.200	363.163.485		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	101.901.920	93.250.300	1. Anggaran ket:Dana Belum Tersedia	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	101.901.920	93.250.300		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	323.628.200	320.771.580	1. Anggaran ket:Belum Tersedianya Dana	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	1	1	323.628.200	320.771.580		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,5	98	11.919.715.874	10.718.821.496	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Masih terdapat personil yg kurang maksimal dalam memberikan dukungan khususnya dalam hal penyediaan data dan dokumen.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	21	318.707.000	239.552.650		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	9.373.453.306	8.681.032.899		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Laporan	27	27	183.255.000	152.322.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	60	10	181.240.000	79.226.000	1. Pihak Eksternal ket: Jadwal pelaksanaan Diklat dari BKPSDM tidak tersedia.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	107	107	262.417.224	191.922.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rasio	10	10	525.000.000	507.377.415		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	706.479.633	617.930.282		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	369.163.711	249.457.850		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	60	100	10.221.035.143	8.645.322.539	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kapasitas Petugas layanan belum optimal.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	60	100	-	-	1. Pihak Eksternal ket: Koordinasi kurang maksimal.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	3	3	326.137.500	276.379.545		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	2	2	142.928.800	108.675.700		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	55	55	9.751.968.843	8.260.267.294		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	80	100	623.979.053	446.911.050		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	20	20	163.182.500	126.906.650		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Berdayakan	Lembaga	5	5	347.186.553	268.394.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan.	Kegiatan	4	4	113.610.000	51.610.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	80	100	113.533.000	16.187.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	4	4	113.533.000	16.187.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	80	100	283.805.000	177.787.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	283.805.000	177.787.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	100	158.269.200	147.293.250		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	20	20	158.269.200	147.293.250		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67	101,49	6.889.121.197	5.673.629.961	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	237.115.150	76.332.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	4.513.030.548	3.936.393.115		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	590	531,02	129.642.862	33.423.242	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	



No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	31	0	-	-	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	8	7,6	218.666.360	190.122.320	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	17	17	507.000.000	506.725.485	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	932.508.112	750.794.649		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	566	566	351.158.165	179.839.150		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	23.270.526.300	18.688.343.273	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	88,1	100	-	-	1. Manajemen Resiko ket:Adanya Kegiatan Fisik yang terkendala dengan faktor alam sehingga jadwal	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya Kegiatan Fisik yang terkendala dengan faktor alam sehingga jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	176	176	309.641.500	290.593.250		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	4	4	42.505.000	18.680.000		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	22.918.379.800	18.379.070.023	1. Manajemen Resiko ket:Adanya Kegiatan Fisik yang terkendala dengan faktor alam sehingga jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya Kegiatan Fisik yang terkendala dengan faktor alam sehingga jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	60	111,12	537.533.700	468.975.100	1. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kali	36	36	132.203.200	97.640.800		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	24	24	405.330.500	371.334.300		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	75	102,67	45.252.550	24.310.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurang nya personel/sumber daya manusianya dalam menyiapkan kegiatan sehingga membuat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan belum maksimal	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	45.252.550	24.310.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	55	118,18	175.398.000	165.568.372	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	5	5	175.398.000	165.568.372		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	71,42	51,11	5.000.000	-	1. Manajemen Resiko ket:Jadwal Kegiatan di sesuai kan dengan kegiatan di desa 2. Waktu ket:Jadwal Kegiatan di sesuai kan dengan kegiatan di desa	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	21	0	5.000.000	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	100	8.718.961.632	7.463.407.998		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	290.184.865	74.055.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	75	75	6.464.812.432	5.883.563.171		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	230	230	199.195.000	128.738.120		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	8	8	352.929.037	248.756.757		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	20	754.402.000	687.768.788		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	567.438.298	398.554.562		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	10	10	90.000.000	41.971.600		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	88,5	6.742.058.050	5.070.529.766		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	88,5	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	5	5	457.905.750	300.679.856		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	10	10	93.227.000	3.360.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	6.190.925.300	4.766.489.910		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	525.093.150	348.652.000		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Penguatan Koordinasi									
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	13	13	154.276.650	105.095.000		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Laporan	10	10	370.816.500	243.557.000		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	104.509.000	-		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	5	5	104.509.000	-		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	611.558.000	450.543.607		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	90	90	611.558.000	450.543.607		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	97	100	129.390.000	-		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	13	13	129.390.000	-		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kenohan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67	74,63	5.704.294.903	4.264.039.519		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	13	340.667.825	137.384.450		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	3.558.452.117	2.970.957.698		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Unit	25	12	96.696.050	46.180.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					yang di administrasikan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang			-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	5	5	135.560.000	127.604.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	11	792.060.100	514.650.821		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	558.931.611	337.494.831		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	16	16	221.927.200	129.767.219		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	94,13	2.641.665.808	2.487.285.876		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	45	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	3	3	354.908.900	292.127.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	1	1	38.960.000	12.800.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	9	9	2.247.796.908	2.182.358.476		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	89,53	465.346.200	416.641.625		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	4	3	136.001.000	115.395.025		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	5	5	329.345.200	301.246.600		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	75	96	121.846.705	102.017.045		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	121.846.705	102.017.045		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	94,07	183.225.000	172.355.879		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	1	1	183.225.000	172.355.879		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	95,65	7.014.702.960	5.819.582.743	1. Manajemen Resiko ket: Kurangnya Evidence yang dibutuhkan dalam penilaian	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	289.840.530	181.226.700		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	37	37	4.654.489.664	4.102.422.215		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	50	50	132.135.000	102.475.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	30	30	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	9	9	409.001.400	236.652.250		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	18	18	673.265.500	546.673.986		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	486.837.482	428.920.035		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	50	50	369.133.384	221.212.557		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	15.183.054.900	14.774.314.823	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurang Saran dan Prasarana Pendukung dalam melakukan pelayanan 2. Anggaran ket:Kurang Saran dan Prasarana Pendukung dalam melakukan pelayanan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	86,36	100			1. Pihak Eksternal ket:Banyaknya Kendaraan Yang Melintas Jalan Dengan Bobot Berlebih Sehingga Jalan Mengalami Kerusakan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	11	11	335.552.000	196.319.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kegiatan	2	2	57.032.400	34.700.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	12	0	-	-	1. Waktu ket:Belum Adanya Penjadwalan Untuk Kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	14.790.470.500	14.543.295.323		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	524.015.600	333.508.100		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	12	141.846.000	60.934.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan lembaga yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5	382.169.600	272.574.100		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	138.771.000	121.780.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	4	4	138.771.000	121.780.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	181.069.000	70.508.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	5	5	181.069.000	70.508.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	65	100	25.000.000	17.160.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurang SDM dalam melakukan pendampingan ke Desa dan tidak disiplinnya Desa dalam menyampaikan laporan yang dibutuhkan 2. Waktu ket:Kurang SDM dalam melakukan pendampingan ke Desa dan tidak disiplinnya Desa dalam menyampaikan laporan yang dibutuhkan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	11	11	25.000.000	17.160.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	89	74,07	9.053.302.436	7.119.272.328		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	286.915.400	121.413.600		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	5	5	6.607.425.310	5.790.013.322		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	4	7	159.070.500	105.533.591		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	5	5	190.838.340	171.101.080		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	3	665.925.000	7.860.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	383.260.256	307.964.548		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	12	7	759.867.630	615.386.187		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	89	95,17	2.717.071.500	2.365.065.542		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	89	95,27				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	3	3	225.960.600	180.985.470		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	3	1,5	62.419.000	39.180.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	33	15	2.428.691.900	2.144.900.072		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	89	95,17	2.717.071.500	2.365.065.542		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	89	95,27				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	3	3	225.960.600	180.985.470		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	3	1,5	62.419.000	39.180.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	89	97,74	491.322.800	378.961.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	4	4	121.636.300	117.896.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kegiatan	5	5	369.686.500	261.065.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	89	95,51	115.780.400	59.142.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	89	89	115.780.400	59.142.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	89	100	216.052.300	130.338.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	1	1	216.052.300	130.338.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	64	89,95	8.608.456.112	7.104.394.772	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Banyak bukti dukung yang tidak dapat disajikan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	304.088.800	166.838.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	14	14	5.043.923.165	4.658.924.964		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	500	500	110.783.500	46.580.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	31	31	119.340.000	14.072.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	9	9	524.957.178	421.066.274		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	24	24	1.556.626.985	1.067.068.852		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	478.736.484	424.786.988		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	24	24	470.000.000	305.057.294		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	12.050.575.992	9.536.308.378		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	78,5	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	1	1	319.538.000	275.905.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	1	1	60.004.000	7.410.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	11.671.033.992	9.252.993.378		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	571.395.450	479.035.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	2	2	150.937.250	109.720.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	5	5	420.458.200	369.315.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	82.557.000	42.025.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	82.557.000	42.025.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	336.868.000	297.620.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	1	1	336.868.000	297.620.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	71,4	117,04	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	80	100	12.403.557.540	10.781.566.221		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	227.358.002	166.351.700		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan	14	14	10.090.806.961	8.977.809.855		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang di Adminitrasikan	Unit	56	56	180.997.300	104.424.190		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	99	0	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	10	10	569.184.420	495.776.702		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di Sediakan	Unit	25	25	274.457.200	114.030.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di Sediakan	Bulan	12	12	808.088.657	755.023.692		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di Pelihara	Unit	36	30	252.665.000	168.149.682		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	29.623.083.560	28.483.858.311		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	1	2	199.024.000	133.260.985		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	2	1	30.000.000	-	1. Pihak Eksternal ket:Pihak Eksternal,Kegiatan Kepramukaan yang tidak dilaksanakan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	173	175	29.394.059.560	28.350.597.326		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	11.343.789.860	10.397.586.091		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	1	1	99.851.000	24.009.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	5	5	4.408.351.980	3.715.606.608		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	102.233.500	67.683.925		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	102.233.500	67.683.925		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	802.640.000	777.194.350		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	1500	1500	802.640.000	777.194.350		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	80	73,75	7.039.476.533	5.742.145.785		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	294.307.900	170.562.099		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	14	14	5.162.314.681	4.630.377.459		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	331	331	121.685.000	42.010.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	33	33	42.315.700	39.627.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	8	8	252.785.871	236.067.910		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Unit	18	18	468.926.200	107.071.583		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					disediakan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	612.279.581	486.012.075		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	115	115	84.861.600	30.417.659		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	100	35.932.717.180	32.185.014.306		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	81,3	99,63				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	5	5	323.902.180	221.242.350		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	1	1	66.449.400	27.889.800		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	35.542.365.600	31.935.882.156		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	100	503.659.703	386.431.080		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	16	16	120.151.103	71.694.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Yang di Laksanakan Desa/Kelurahan	Kegiatan	8	8	383.508.600	314.736.680		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh	Persen	100	50	87.974.420	18.435.000	1. Manajemen Resiko ket:kegiatan terkendala waktu dan koodinasi 2. Waktu ket:kegiatan terkendala waktu dan koodinasi	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Masyarakat di wilayah Kecamatan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	3	2	87.974.420	18.435.000	1. Anggaran ket:keterbatasan waktu dan anggaran 2. Manajemen Resiko ket:keterbatasan waktu dan anggaran	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	169.584.200	89.776.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	2	2	169.584.200	89.776.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	90	0	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	8	0	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68	72,24	5.028.368.877	3.878.611.563		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	167.974.400	54.389.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4	4	3.833.746.141	3.129.781.183		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	4	4	86.615.000	50.050.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	43	19	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	7	7	172.438.550	160.724.542		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	17	17	80.000.000	80.000.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	557.174.786	291.176.740		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	14	14	130.420.000	112.490.098		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	82,14	22.447.504.750	18.553.623.154	1. Anggaran ket:-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	88,1	82,13			1. Anggaran ket:-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	362.393.750	307.612.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	4	4	43.636.000	17.160.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	22.041.475.000	18.228.850.654		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	67	74,63	534.240.000	403.189.950	1. Anggaran ket:-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kali	2	2	188.150.000	96.330.150		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1	346.090.000	306.859.800		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	65	67,68	581.734.800	393.693.006	1. Anggaran ket:-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	2	2	581.734.800	393.693.006		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat	Penataan Manajemen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat	Persen	73	0	-	-		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Organisasi dan Penguatan	PEMERINTAHAN DESA	Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	10	0	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	74,27	19.391.681.259	15.990.421.762		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	289.527.800	180.561.017		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	15.231.044.010	12.821.369.465		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	1030	1030	163.797.000	126.949.998		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	90	90	12.264.000	9.624.999		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	6	6	1.460.776.100	1.430.697.756		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	96	96	280.697.000	259.964.502		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.733.156.349	961.239.178		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	150	150	220.419.000	200.014.847		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	133,33	56.489.263.750	46.007.178.285		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	4	4	421.393.000	339.540.025		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Laporan	1	1	5.000.000	4.940.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	56.062.870.750	45.662.698.260		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	99,31	21.775.083.166	19.928.201.959		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	2	2	210.000.000	149.305.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	80	80	7.876.490.000	6.603.114.609		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	467	467	13.688.593.166	13.175.782.350		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	175.000.000	146.620.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kegiatan	2	2	175.000.000	146.620.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	71,45	100	350.000.000	267.387.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	5	5	350.000.000	267.387.000		

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau

Tabel 97. Pelaksanaan Pemerintahan Umum

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
41. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	89	84,65	11.461.833.939	10.292.240.785	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Pemenuhan bukti dukung penilaian	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	136.685.000	96.687.032		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	20	20	8.821.705.829	8.072.353.938		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	59.937.000	46.917.000		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	15.910.000	11.730.000		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	841.594.000	668.779.009		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	403.286.000	372.136.950		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	527.167.817	438.202.852		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	70	655.548.293	585.434.004	1. Anggaran ket: Tidak sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang direncanakan karena adanya pembatasan waktu dan anggaran dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan sehingga pelaksanaan pemeliharaan ditunda pemeliharaannya 2. Waktu ket: Tidak sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang direncanakan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											karena adanya pembatasan waktu dan anggaran dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan sehingga pelaksanaan pemeliharaan ditunda pemeliharannya	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	2,17	100	4.724.874.000	4.297.139.083		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	12	12	4.724.874.000	4.297.139.083		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	Persen	14,51	100	67.095.173.206	66.363.571.410		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	Dokumen	12	12	67.095.173.206	66.363.571.410		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi	Persen	12,9	100	228.070.000	113.280.959	1. Regulasi/Peraturan ket: Perlu terus dilakukan sosialisasi ormas	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	30	30	228.070.000	113.280.959	1. Regulasi/Peraturan ket: Ormas bisa untuk tidak melaporkan keberadaannya	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	Persen	1,45	100	638.629.000	444.350.140		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Dokumen	5	5	638.629.000	444.350.140		



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	729.922.000	429.295.744		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	12	12	729.922.000	429.295.744		

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-Pantau

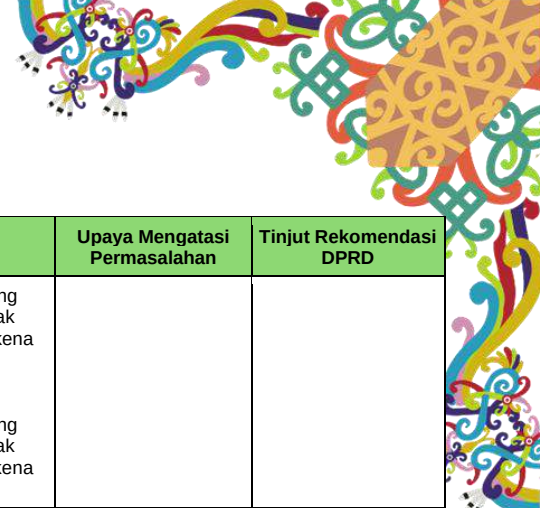
3.3 Analisis Kesesuaian antar Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

3.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas - APK PAUD - APK SD Sederajat - APM SD sederajat - Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun - Angka putus sekolah SD - APK SMP Sederajat - APM SMP sederajat - Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun - Angka Putus sekolah SMP - Angka Melek Huruf	Program Pengelolaan Pendidikan	89,71	86,95	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	92.94	99	1. Anggaran ket: 1. Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan. 2. Masih rendahnya program musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.37	54	Alokasi dan Kapasitas SDM ket: 1. Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan. 2. Masih rendahnya peningkatan program musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)		
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	89.83	81	1. Waktu ket: Masih terdapat satuan PAUD yang belum terdampingi mengingat lokasi relatif jauh dari Puskesmas 2. Dukungan Pemimpin		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							ket:Perubahan Mindset yang relatif lambat sehingga untuk melakukan adaptasi dengan kurikulum baru agak terhambat 3.Peralatan ket:Penguasaan TIK yang masih lemah 4. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 5.Regulasi/Peraturan ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 6. Anggaran ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 7. Dukungan Pemimpin ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah		
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	68.72	58	1.Regulasi/Peraturan ket:Standar dan indikator yang digunakan dalam rapor pendidikan berbeda dengan yang digunakan untuk perhitungan sebelumnya. Sehingga harus melakukan penyesuaian 2. : sebagian personal yang jadi sasaran survey ANBK sebagai dasar perhitungan rapor pendidikan banyak yang belum faham dan mengisi dengan tidak maksimal		

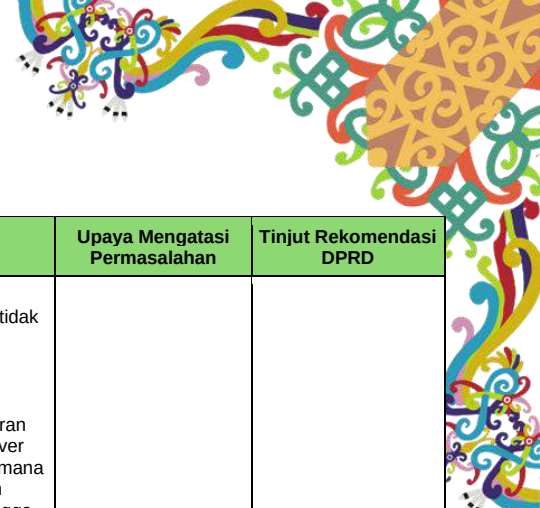
No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas - APM SD sederajat - APM SMP sederajat	Program Pengembangan Kurikulum	100	100	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)		
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2	2	1. Anggaran ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal 2. Waktu ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal		
				Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	1	1	1. Anggaran ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal 2. Waktu ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal		
			Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas - APM SD sederajat - APM SMP sederajat	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	95	100			
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80	80			
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Menurunnya Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	14,1	102,84	Menurunnya Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Menurunnya Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	78	78	1. Anggaran ket:Efisiensi anggaran pada		



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			beberapa paket pekerjaan yang sudah di anggarkan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terkena efisiensi anggaran 2. Waktu ket:Efisiensi anggaran pada beberapa paket pekerjaan yang sudah di anggarkan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terkena efisiensi anggaran		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	89,08			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	30	30			
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100			
	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	80	118,1			
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1500	1195			
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	80	80			
	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Menurunnya Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat						
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	100			
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15	15			
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	942	942			
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	253	253			
	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	50	Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Keterbatasan SDM dalam mengadvokasi lintas sektor terkait		
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55	90			
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36	32,91	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kurangnya kemampuan SDM untuk mengadvokasi lintas sektor terkait		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
3	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir - Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	0,72	100			
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,13	0,13			
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	76,51	76,51			
	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir - Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3,96	100			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	13	13			
	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik - Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	67,25	100	Anggaran Ket: Kurangnya anggaran		
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2	2	Anggaran Ket: Kurangnya anggaran		
	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik - Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	81,88	100	Anggaran Ket: Kurangnya anggaran		
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	15	15	Anggaran Ket: Kurangnya anggaran		
	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten - Persentase Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan	64,95	98,88	1. Regulasi/Peraturan ket:ada beberapa ruas jalan kabupaten yang mengalami		



No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Jalan Kabupaten				penurunan kondisi jalan dari sebelumnya mantap menjadi tidak mantap, pada tahun 2025 sebanyak 196 ruas jalan kabupaten yang mengalami penurunan kondisi hal ini disebabkan antara lain kendaraan ODOL (over dimension dan over loading) serta kondisi alam dimana akhir-akhir ini intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga beberapa ruas jalan mengalami kerusakan bahkan ada yang mengalami longsor		
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1424,39	1408,61	1. Regulasi/Peraturan ket:ada beberapa ruas jalan kabupaten yang mengalami penurunan kondisi jalan dari sebelumnya mantap menjadi tidak mantap, pada tahun 2025 sebanyak 196 ruas jalan kabupaten yang mengalami penurunan kondisi hal ini disebabkan antara lain kendaraan ODOL (over dimension dan over loading) serta kondisi alam dimana akhir-akhir ini intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga beberapa ruas jalan mengalami kerusakan bahkan ada yang mengalami longsor		
	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Akseibilitas Jalan Kabupaten - Persentase Aksesibilitas Jalan Kabupaten Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik - Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir - Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100	100			
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	310	310			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	1			

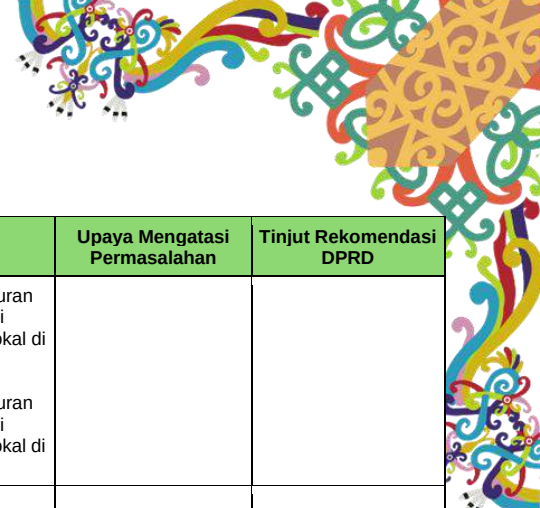
No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1	1			
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	25	25			
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	93,58	81,1	Pihak Eksternal ket:1. verifikasi BNBA yang belum valid		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4	4	Anggaran ket:Efisiensi Anggaran		
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	88,3	107	Pihak Eksternal ket:Kerbatasan Kapasitas SDM serta Faktor eksternal seperti cuaca buruk dan kondisi sosial ekonomi		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	51	295			
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Program Pengembang Perumahan	100	100			
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15	9			
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1			
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	19	12			
				Penerbitan Izin Pembangunan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				dan Pengembangan Perumahan					
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Kawasan Permukiman	48,19	191,45	1. Pihak Eksternal ket:Kurang nya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kualitas permukiman kumuh		
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	1	1. Anggaran ket:Alokasi Anggaran yang terlambat		
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2	2			
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak - Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6,4	20,47			
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	517	94	1. Anggaran ket:adanya pemotongan anggaran (Rasio)		
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4,29	27,97	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Menekankan pada proses sistematis keterukuran,keterlibatan pemangku kepentingan serta dasar pertimbangan seperti kondisi baseline dan kapasitas sumber daya agar tujuan dan target dpt dipantau dan dicapai secara efektif		
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	15,75	15,75			
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah - Jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86	100	Anggaran ket:Efisiensi Anggaran		
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	900	937			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3	3	Anggaran ket:Efisiensi Anggaran		
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	3	3	Anggaran ket:Efisiensi Anggaran		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana - Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Jumlah Regulasi Daerah	Program Penanggulangan Bencana	18,11	78,13	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: 1. Kapasitas SDM Belum Memadai 2. Adanya Pengurangan/Rasionalisasi Anggaran 2. Anggaran ket: 1. Kapasitas SDM Belum Memadai 2. Adanya Pengurangan/Rasionalisasi Anggaran		
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	18,11	2,8	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, Koordinasi Dengan Stakeholder Lainnya Belum Optimal 2. Pihak Eksternal ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, Koordinasi Dengan Stakeholder Lainnya Belum Optimal 3. Anggaran ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, Koordinasi Dengan Stakeholder Lainnya Belum Optimal		
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	90	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, waktu pelaksanaan Belum Optimal 2. Pihak Eksternal ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, waktu		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							pelaksanaan Belum Optimal 3. Anggaran ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, waktu pelaksanaan Belum Optimal		
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	1. Peralatan ket:Peralatan		
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2	1,96			
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran - Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) - Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia - Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	100	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Trdapat Kesalahan dalam Penentuan Target Seharusnya Satuannya adalah menit bukan persen		
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100			
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	100	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. kurangnya respon objek pendataan sarana prasarana kebakaran menyampaikan data sapras proteksi bangunan gedung 2. Dalam pelaksanaan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran belum tersedianya aparatur yang memiliki kopetensi sesuai regulasi 2. Pihak Eksternal ket:1. kurangnya respon objek pendataan sarana prasarana kebakaran menyampaikan data		

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							sapras proteksi bangunan gedung 2. Dalam pelaksanaan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran belum tersedianya aparaturnya yang memiliki kompetensi sesuai regulasi		
				Investigasi Kejadian Kebakaran	1	-			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	310	310	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Belum memadainya peralatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan relawan 2. Kurang tersedianya sdm yang tersertifikasi yang memiliki kapasitas sebagai narasumber 2. Peralatan ket:Belum memadainya peralatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan relawan 2. Kurang tersedianya sdm yang tersertifikasi yang memiliki kapasitas sebagai narasumber		
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100	107,14			
6	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Program Pemberdayaan	100	100	1. Anggaran ket:Anggaran kegiatan peningkatan SDM terfokus pada pembayaran PSM,TKSK,PUSKESOS, sehingga mencapai 99 % pembayaran jasa pergeseran anggaran mengurangi nilai makna Pengembangan SDM PSKS 2. Waktu ket:Anggaran kegiatan peningkatan SDM terfokus pada pembayaran PSM,TKSK,PUSKESOS, sehingga mencapai 99 % pembayaran jasa pergeseran anggaran mengurangi nilai makna Pengembangan SDM PSKS		
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50	50	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:di harapkan di Buat Peraturan Daerah tentang mekanisme di sesuaikan dengan kearifan lokal di Kab.Kutai Kartanegara. 2. Regulasi/Peraturan		



No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							ket:di harapkan di Buat Peraturan Daerah tentang mekanisme di sesuaikan dengan kearifan lokal di Kab.Kutai Kartanegara. 3. Anggaran ket:di harapkan di Buat Peraturan Daerah tentang mekanisme di sesuaikan dengan kearifan lokal di Kab.Kutai Kartanegara.		
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	70	70	1. Anggaran ket:Anggaran terfokus pada pembayaran SDM PUSKESOS,PSM TKSK , SDM PSKS perlu peningkatan kapasitas pengelolaan manajemen publik speking dll kedepan perlu perhatian kusus		
	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100	100			
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5	5			
	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	100	83,5	1. Anggaran ket:1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti tidak dapat dilaksanakan secara Maksimal dengan berkurangnya anggaram kegiatan. 2. Untuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti belum dapat dilaksanakan karena jumlah kuota yang terbatas di Dinas Sosial Provinsi.		
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1250	1217	1. Anggaran ket:1. Pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dengan kurangnya anggaran kegiatan. 2. Untuk pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							belum dapat dilaksanakan karena jumlah kuota yang terbatas di Dinas Sosial Provinsi.		
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	320	202	1. Anggaran ket:1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dengan berkurangnya anggaran kegiatan. 2. Untuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti belum dapat dilaksanakan karena jumlah kuota terbatas di Dinas Sosial Provinsi.		
	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	97,83	100			
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	40	12	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya efisiensi Anggaran dan penagihan pembayaran belanja yang tidak lancar, serta kurangnya kapasitas penampungan.		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2	1,99	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya efisiensi anggaran, target awal tidak sesuai karena mengacu pada DTSEN, hasil pemuktahiran data ditetapkan oleh BPS Pusat. 2. Pihak Eksternal ket:Adanya efisiensi anggaran, target awal tidak sesuai karena mengacu pada DTSEN, hasil pemuktahiran data ditetapkan oleh BPS Pusat. 3. Anggaran ket:Adanya efisiensi anggaran, target awal tidak sesuai karena mengacu pada DTSEN, hasil pemuktahiran data ditetapkan oleh BPS Pusat.		
	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan	Program Penanganan Bencana	100	100	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Rasionalisasi anggaran, menunggu proses APBDP, kesiapan SDM yang masih rendah,		

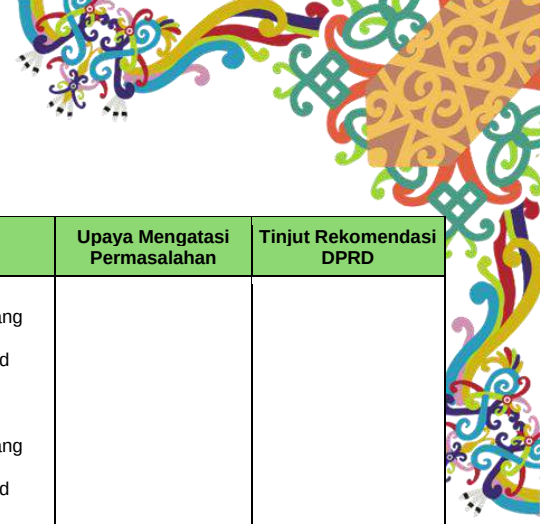


No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya				Pihak eksternal dapat menghambat penanganan bencana melalui kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana 2. Pihak Eksternal ket:Rasionalisasi anggaran, menunggu proses APBDP, kesiapan SDM yang masih rendah, Pihak eksternal dapat menghambat penanganan bencana melalui kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana 3. Anggaran ket:Rasionalisasi anggaran, menunggu proses APBDP, kesiapan SDM yang masih rendah, Pihak eksternal dapat menghambat penanganan bencana melalui kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana		
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1500	2709	1. Anggaran ket:Ketiadaan Anggaran		
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	12	0	1. Anggaran ket:Ketiadaan Anggaran		

Sumber data Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-Pantau than 2025

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru - Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Ditempatkan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	100	100	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Terlaksananya kegiatan		



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1	1	1. Anggaran ket:Anggaran sangat kurang untuk Pelaksanaan Penyusunan RTKD terkaid dana pendampingan dari Narasumber 2. Dukungan Pemimpin ket:Anggaran sangat kurang untuk Pelaksanaan Penyusunan RTKD terkaid dana pendampingan dari Narasumber		
	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing. - Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	24,34	19,68			
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	300	183	1. Anggaran ket:adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pembatalan beberapa program pelatihan yang telah direncanakan, sehingga pelatihan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk jenis pelatihan yang paling cepat memberikan peluang kerja bagi peserta		
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11	15	1. Manajemen Resiko ket:Hambatan dalam penerapan manajemen risiko antara lain disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran organisasi terhadap pentingnya identifikasi dan mitigasi risiko sejak awal perencanaan kegiatan. Selain itu, belum tersedianya pedoman atau sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan risiko, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen risiko, serta keterbatasan data dan informasi yang akurat turut menjadi kendala dalam penerapan manajemen risiko secara efektif.		
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	25	25	1. Manajemen Resiko ket:Hambatan utama dalam pelaksanaan konsultasi ini adalah belum optimalnya penerapan manajemen risiko di tingkat		

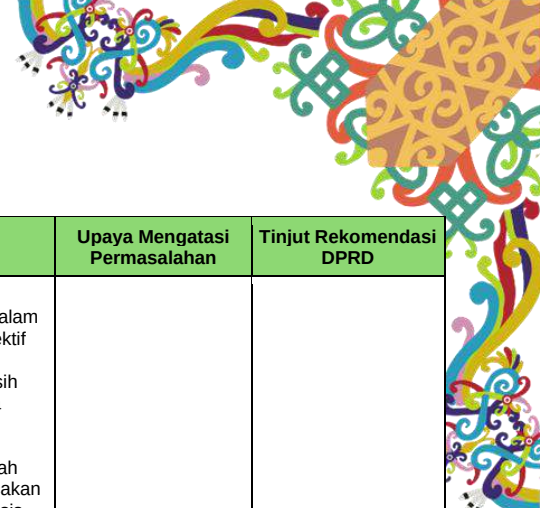
No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							perusahaan kecil. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya identifikasi risiko usaha, mitigasi, dan pengendalian risiko sebagai bagian dari strategi peningkatan efisiensi dan keberlanjutan usaha.		
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25	0	1. Anggaran ket: Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengukuran produktivitas adalah terbatasnya anggaran akibat kebijakan efisiensi		
	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru - Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	12,35	809,72			
				Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2	2	1. Peralatan ket: 1. Ada beberapa item barang belum ada di SIPD karena harus diusulkan melalui Aplikasi Simaston. 2. Adanya beberapa kali Efisiensi Anggaran sehingga target berkurang 2. Regulasi/Peraturan ket: 1. Ada beberapa item barang belum ada di SIPD karena harus diusulkan melalui Aplikasi Simaston. 2. Adanya beberapa kali Efisiensi Anggaran sehingga target berkurang		
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	0	1. Anggaran ket: tidak bisa dilaksanakn		
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1	1	1. Pihak Eksternal ket: Perusahaan yang belum melaporkan hasil rekrutmen kegiatan		
	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis - Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	100	99,78	1. Anggaran ket: Karena Efisiensi		
				Pengesahan Peraturan	28	43			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	65	27			
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	22,92	100			
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	56	52			
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	28	26			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	28	26			
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100	100			
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	11	11			
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50			
				Penguatan dan Pengembangan	10	10			

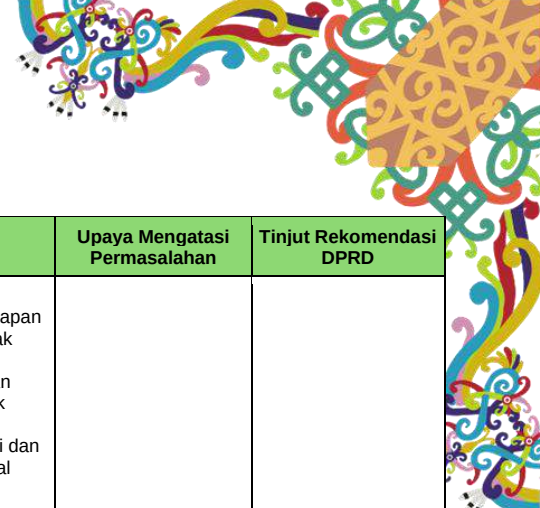
No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	77,8	100			
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	3	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Efisiensi Anggaran sehingga harus penyesuaian di beberapa hal 2. Waktu ket:Efisiensi Anggaran sehingga harus penyesuaian di beberapa hal		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	2	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Efisiensi Anggaran sehingga harus penyesuaian di beberapa hal 2. Waktu ket:Efisiensi Anggaran sehingga harus penyesuaian di beberapa hal		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	80,77	100,28			
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	2			
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	7	7	1. Anggaran ket:efisiensi anggaran sehingga harus dilakukan penyesuaian		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100	100			
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20	20			
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	112			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17	10			
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah - Ketersediaan energi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	10	1,640.00	1. Waktu ket: Pelaksanaan Kegiatan Tidak tepat waktu, sehingga baru selesai di Bulan desember		
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10	164			
	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Score Pola Pangan harapan - Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2200	92,5			
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5	5			
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	150	3	1. Regulasi/Peraturan ket:karena belum adanya regulasi, jadi kegiatan tidak bisa secara keseluruhan dilaksanakan		
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	30	30			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah - Ketersediaan energi	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	5	360			
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1	1			
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5			
			Meningkatnya Score Pola Pangan harapan - Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	92	103,26			
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	92	95			
4	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arah Pola Ruang - Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	80	100	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Penyesuaian Target/Output Terkait Pengurangan anggaran		
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	4	4			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	27,29	14,6	1. Anggaran ket:ketersediaan kas daerah terbatas		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5,03	5,03			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3,77	3,77			
	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	95	100	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Sengketa tanah garapan melibatkan banyak pihak dan emosi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka jika tidak ditangani dengan pendekatan komunikasi dan pengelolaan risiko sosial yang baik. (2) Petugas mediasi di tingkat desa/kecamatan terbatas,		

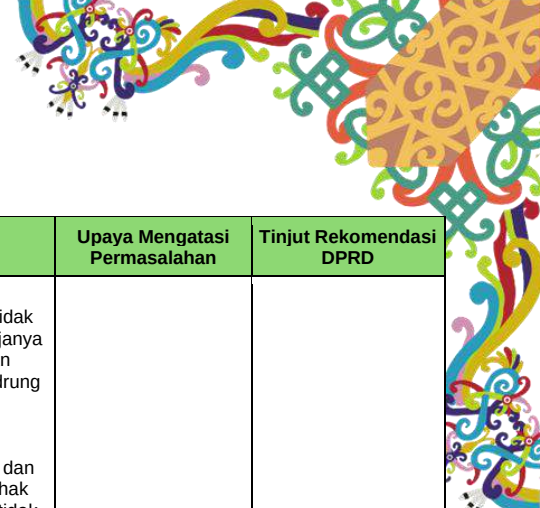


No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam teknik mediasi yang efektif dan netral. (3) Sistem pengelolaan kasus masih manual, belum tersedia Sistem Informasi Rekapitulasi Data Pengaduan Kasus Tanah yang mendukung pelacakan dan penanganan berbasis data. (4) Ketergantungan pada kehadiran dan komitmen pihak luar (masyarakat, badan hukum, atau instansi) yang terlibat dalam konflik seringkali menjadi hambatan saat proses mediasi tidak direspons dengan baik. 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Sengketa tanah garapan melibatkan banyak pihak dan emosi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka jika tidak ditangani dengan pendekatan komunikasi dan pengelolaan risiko sosial yang baik. (2) Petugas mediasi di tingkat desa/kecamatan terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam teknik mediasi yang efektif dan netral. (3) Sistem pengelolaan kasus masih manual, belum tersedia Sistem Informasi Rekapitulasi Data Pengaduan Kasus Tanah yang mendukung pelacakan dan penanganan berbasis data. (4) Ketergantungan pada kehadiran dan komitmen pihak luar (masyarakat, badan hukum, atau instansi) yang terlibat dalam konflik seringkali menjadi hambatan saat proses mediasi tidak direspons dengan baik.		



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							3. Manajemen Resiko ket:Sengketa tanah garapan melibatkan banyak pihak dan emosi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka jika tidak ditangani dengan pendekatan komunikasi dan pengelolaan risiko sosial yang baik. (2) Petugas mediasi di tingkat desa/kecamatan terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam teknik mediasi yang efektif dan netral. (3) Sistem pengelolaan kasus masih manual, belum tersedia Sistem Informasi Rekapitulasi Data Pengaduan Kasus Tanah yang mendukung pelacakan dan penanganan berbasis data. (4) Ketergantungan pada kehadiran dan komitmen pihak luar (masyarakat, badan hukum, atau instansi) yang terlibat dalam konflik seringkali menjadi hambatan saat proses mediasi tidak direspons dengan baik.		
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	4	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cenderung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public 2. Peralatan		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cenderung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public 3. Pihak Eksternal ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cenderung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public 4. Anggaran ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cenderung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public		



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							5. Waktu ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cenderung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public		
	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	85	76,47	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Data dan lokasi yang disampaikan OPD yang memerlukan tanah kurang lengkap dan lokasi yang ditetapkan belum ada kepastian.		
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8	7	1. Pihak Eksternal ket:Sengketa Waris dan kurangnya respon OPD yang memerlukan tanah		
	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	95	100	1. Regulasi/Peraturan ket:- Diakhir tahun kepastian pembayaran 2. Anggaran ket:- Diakhir tahun kepastian pembayaran		
				Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	4			
				Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1			

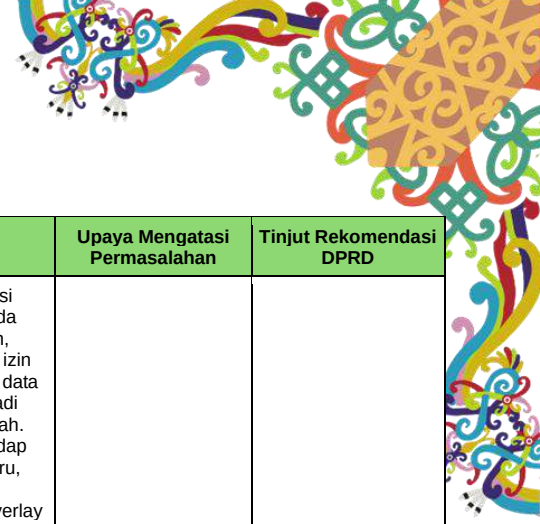




No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	60	10,03	1. Regulasi/Peraturan ket:- belum ada kejelasan batas batas tanah adat yang dikuasai MHA, belum ada Kajian dari BRIDA dan pihak lain terkait adanya tanah ulayat di Kukar 2. Pihak Eksternal ket:- belum ada kejelasan batas batas tanah adat yang dikuasai MHA, belum ada Kajian dari BRIDA dan pihak lain terkait adanya tanah ulayat di Kukar 3. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:- belum ada kejelasan batas batas tanah adat yang dikuasai MHA, belum ada Kajian dari BRIDA dan pihak lain terkait adanya tanah ulayat di Kukar		
				Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	1	1. Regulasi/Peraturan ket:Belum ada kejelasan batas tanah adat yang akan diajukan menjadi tanah ulayat 2. Pihak Eksternal ket:Belum ada kejelasan batas tanah adat yang akan diajukan menjadi tanah ulayat 3. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Belum ada kejelasan batas tanah adat yang akan diajukan menjadi tanah ulayat		
	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	70	94,29	1. Pihak Eksternal ket:Lahan dalam sengketa - Lokasi masuk di dalam HGU, WKP Pertamina, HPL Transmigrasi - Pajak PBB belum ada - Batas tanah belum jelas - Kendaraan Operasional tidak ada		
				Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	1	1	1. Pihak Eksternal ket:dokumen kelengkapan pembebasan asset daerah tidak lengkap/ tidak ada, patok batas bidang tidak ada 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:dokumen kelengkapan pembebasan asset daerah tidak lengkap/ tidak ada, patok batas bidang tidak ada		



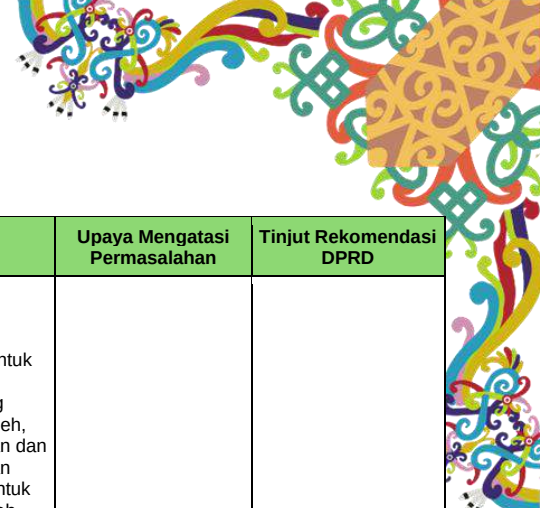
No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2	2	1. Pihak Eksternal ket: Anggaran untuk kegiatan belum tersedia untuk penaganan lahan dalam sengketa lokasi masuk HGU, WKP Pertamina, HPL Transmigrasi Pajak PBB belum ada batas tanah belum jelas Kendaraan Operasioanal tidak ada 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Anggaran untuk kegiatan belum tersedia untuk penaganan lahan dalam sengketa lokasi masuk HGU, WKP Pertamina, HPL Transmigrasi Pajak PBB belum ada batas tanah belum jelas Kendaraan Operasioanal tidak ada		
	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	85	100	1. Regulasi/Peraturan ket: 1) Tenaga teknis di desa/kecamatan dan dinas masih terbatas dalam memahami mekanisme IMT, verifikasi lapangan, dan penyusunan berita acara penetapan. (2) Masih ada kekhawatiran bahwa penerapan IMT bisa memicu konflik pertanahan atau protes masyarakat jika tidak didahului dengan sosialisasi dan mitigasi risiko. (3) Ketergantungan pada instansi lain (BPN, kecamatan, desa, perusahaan pemegang izin HGU/IUP) dalam penyediaan data atau kesepakatan, bisa menjadi hambatan bila koordinasi lemah. (4) Keterbatasan akses terhadap data spasial (GIS), peta terbaru, atau perangkat lunak yang mendukung pemetaan dan overlay tanah negara menyulitkan updating data. 2. Pihak Eksternal ket: 1) Tenaga teknis di desa/kecamatan dan dinas masih terbatas dalam memahami mekanisme IMT, verifikasi lapangan, dan penyusunan berita acara penetapan. (2) Masih ada kekhawatiran bahwa penerapan IMT bisa memicu konflik pertanahan atau protes masyarakat jika tidak didahului		



No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							dengan sosialisasi dan mitigasi risiko. (3) Ketergantungan pada instansi lain (BPN, kecamatan, desa, perusahaan pemegang izin HGU/IUP) dalam penyediaan data atau kesepakatan, bisa menjadi hambatan bila koordinasi lemah. (4) Keterbatasan akses terhadap data spasial (GIS), peta terbaru, atau perangkat lunak yang mendukung pemetaan dan overlay tanah negara menyulitkan updating data.		
				Penerbitan Izin Membuka Tanah	2	2	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak pernah diperoleh, karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sediaan petunjuk teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2) untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPPR Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPPR melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudia tidak		



No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							supportnya anggarran urusan pertanahan baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melau opda urusan pertanahan/ dppr 2. Peralatan ket:IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak pernah diperoleh, karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sedia petunjuk teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2) untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPPR Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPPR melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudia tidak supportnya anggarran urusan pertanahan baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melau opda urusan pertanahan/ dppr		



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							3. Regulasi/Peraturan ket:IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak pernah diperoleh, karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sedia petunjuk teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2) untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPRD Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPRD melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudia tidak supportnya anggarran urusan pertanahan baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melaui opda urusan pertanahan/ dppr 4. Waktu ket:IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak pernah diperoleh,		



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sedia petunjuk teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2) untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPPR Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPPR melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudia tidak supportnya anggaran urusan pertanian baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melau opda urusan pertanian/ dppr		
	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	79	87,08	1. Peralatan ket:sarana mobilitas / ketersediaan kendaraan lapangan yang siap untuk medan sulit tidak tersedia, - alat pendukung kerja untuk pengolahan data masih kurang		
				Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	3	3	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:SDM teknis masih diperlukan - Peralatan penunjang masih diperlukan - penyediaan percepatan target kerja oleh tenaga pihak ketiga yang		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							berlisensi dibutuhkan 2. Peralatan ket:SDM teknis masih diperlukan - Peralatan penunjang masih diperlukan - penyediaan percepatan target kerja oleh tenaga pihak ketiga yang berlisensi dibutuhkan 3. Pihak Eksternal ket:SDM teknis masih diperlukan - Peralatan penunjang masih diperlukan - penyediaan percepatan target kerja oleh tenaga pihak ketiga yang berlisensi dibutuhkan		
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100	50	1. Pihak Eksternal ket:Dokumen DIKPLHD telah disusun tetapi masih belum Final dikarenakan masih menunggu terselesainya proses input data pada aplikasi IKLH		
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2	1	1. Pihak Eksternal ket:Dokumen IKLH telah disusun tetapi masih belum Final dikarenakan masih menunggu terselesainya proses input data pada aplikasi IKLH		
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	200000	0,29	1. Regulasi/Peraturan ket:1.Bahwa lahan yang akan ditanami seluas 9,8 Ha tidak dapat di tanami,sehingga BPDAS meminta mengajukan permohonan relokasi seluas 9,8 Ha. 2.Karena adanya relokasi pembelian bibit mangrove sejumlah 16.500 pot dibatalkan dan di ganti dengan tanaman buah buahan 3.Diakibatkan Efisiensi maka pengurangan anggaran menjadi Rp.84.140,000,- dan ini juga dilakukan anggaran perubahan bulan desember yang memperpendek pengadaan barang		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							dan jasa sejumlah 580 bibit tanaman dengan realisasi pagu anggaran Rp. 43.800,000,-		
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4	4			
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	1			
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	1	1. Pihak Eksternal ket: Untuk kegiatan rehabilitasi adanya rekomendasi dari BPDAS Mahakam Berau terkait lahan yang digunakan masyarakat sebagai lahan tambak ikan untuk penanaman mangrove dilahan rehab DAS.		
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	20	100			
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	24,19	24,19			
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	3	66,67	1. Anggaran ket: Adanya Efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan seminar teknis pada pelaku usaha tidak bisa di laksanakan.		
				Penyimpanan sementara Limbah B3	50	66,67	1. Pihak Eksternal ket: SDM Kopetensi Terbatas		
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50	50	1. Pihak Eksternal ket: SDM Kopetensi terkendala		
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	19,32	129,4	1. Anggaran ket: Anggaran yang tersedia sangat minim yang mengakibatkan jumlah		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			target tidak sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA		
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20	25	1. Anggaran ket:anggaran yang tersedia sangat minim yang mengakibatkan jumlah target tidak sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA		
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	75	100	1. Regulasi/Peraturan ket:belum ada nya regulasi yang menyebabkan belum adanya penetapan MHA PPLH		
				Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	75	75	1. Regulasi/Peraturan ket:belum adanya regulasi yang menyebabkan belum adanya penetapan MHA PPLH		
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	70	70	1. Regulasi/Peraturan ket:Belum adanya regulasi mengakibatkan tidak adanya penetapan MHA sehingga pembinaan yang dilakukan tidak dilakukan secara masif		
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35	91,43	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya regulasi Efisiensi anggaran mengakibatkan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan RENJA, selain itu dengan adanya efisiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk sekolah yang dilakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen.selain efisiensi dana yang tersedia di Pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga di ragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas sub kegiatan yang dilaksanakan dan besaran persentase yang dilaksanakan.		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							2. Anggaran ket:Adanya regulasi Efisiensi anggaran mengakibatkan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan RENJA. selain itu dengan adanya efisiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk sekolah yang di lakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen.selain efisiensi dana yang tersedia di Pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga di ragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas sub kegiatan yang di laksanakan dan besaran persentase yang di laksanakan.		
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35	22	1. Regulasi/Peraturan ket:adanya regulasi efisiensi anggaran mengakibatkan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan Renja. selain itu dengan adanya efisiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk sekolah yang dilakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen. selain efisiensi dana yang terseida di pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga diragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas subkegiatan yang dilaksanakan dan besaran persentase yang dilaksanakan 2. Anggaran ket:adanya regulasi efisiensi anggaran mengakibatkan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan Renja. selain itu dengan adanya efisiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							sekolah yang dilakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen. selain efisiensi dana yang tersedia di Pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga diragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas subkegiatan yang dilaksanakan dan besaran persentase yang dilaksanakan		
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5	100			
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	2	1. Regulasi/Peraturan ket: adanya regulasi efisiensi mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan pemberian penghargaan ini terutama untuk program Desa Ramah Lingkungan tidak dilakukan Penilaian karena efisiensi dan adanya ketidakpastian anggaran 2. Anggaran ket: adanya regulasi efisiensi mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan pemberian penghargaan ini terutama untuk program Desa Ramah Lingkungan tidak dilakukan Penilaian karena efisiensi dan adanya ketidakpastian anggaran		
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	98	100			
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan	40	32	1. Anggaran ket: adanya efisiensi anggaran mengakibatkan tidak semua aduan		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			asyarakat dapat terlayani secara maksimal		
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	0			
				Pengelolaan Sampah	71	50,41	1. Anggaran ket:Adanya beberapa kegiatan dalam penyelesaian administrasi pencairan terhambat karena Alokasi anggaran		
				Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta					
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	99	100,73			
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	200002	200002			
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99	100,34			
				Pelayanan Pencatatan Sipil	1501	1501			
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	1			
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100	100			
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	12	11	1. Anggaran ket:Anggaran Tidak tersedian di karenakan di rasionalisasi		
				Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	0	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:-		
				Penyelenggaraan Pengelolaan	1	1	1. Anggaran		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Informasi Administrasi Kependudukan			ket:Anggaran Tersedia Kurang		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100	100			
				Penyusunan Profil Kependudukan	2	2			
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	PROGRAM PENATAAN DESA	25,91	77,19	1. Anggaran ket:Adanya Rasionalisasi Anggran sehingga target yang direncanakan tidak terpenuhi		
				Penyelenggaraan Penataan Desa	27	27	1. Anggaran ket:Ada 3 Kegiatan yang mendapatkan Rasionalisasi Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian kegiatan		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	100	100			
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	52	52			
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	90	100	1. Pihak Eksternal ket:Pihak Eksternal, Anggaran dan Keterbatasan waktu dapat sebagai faktor penghambat 2. Anggaran ket:Pihak Eksternal, Anggaran dan Keterbatasan waktu dapat sebagai faktor penghambat 3. Waktu ket:Pihak Eksternal, Anggaran dan Keterbatasan waktu dapat sebagai faktor penghambat		
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	193	193	1. Pihak Eksternal ket:Keterbatasan anggaran dan Pihak Eksternal dapat sebagai faktor penghambat 2. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran dan Pihak Eksternal dapat sebagai faktor penghambat		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	70	142,86	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Tidak ada referensi Posyandu Aktif		
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	4721	7720	1. Regulasi/Peraturan ket:Tidak adanya referensi tentang penilaian Lembaga Kemasyarakatan Aktif		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program KKBPK - Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	45	129,33			
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	000	0,01			
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70	58,21	1. Waktu ket:tidak dapat memaksimalkan waktu yang tersedia		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menurunnya angka kelahiran total / Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49) tahun - Menurunnya Angka TFR per WUS (15-49 tahun)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	77,22	90,65	1. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran untuk distribusi alokasi, sehingga hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan alokasi di beberapa wilayah tertentu		
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5	5	1. Anggaran ket:Ket : tersendatnya pencairan, sehingga kegiatan harus didahulukan		
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	237	236			
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	40	38	1. Regulasi/Peraturan ket:Ket : ada keterlambatan pada tahapan klaim pencairan kegiatan dikarenakan terdapat regulasi perubahan RKA menjadi RKA-P, sehingga juga menghambat proses pencairan belanja kegiatan berjalan		
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	75	74	1. Anggaran ket:Ket : Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan Pembinaan Kader, sehingga anggaran kegiatan tersebut di nihilkan, dan hanya kegiatan pergerakan kader saja yang dapat berjalan 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Ket : Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan Pembinaan Kader, sehingga anggaran kegiatan tersebut di nihilkan, dan hanya kegiatan pergerakan kader saja yang dapat berjalan		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemberdayaan keluarga - Indeks Pembangunan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	65,31	148,52	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan pembinaan dan kapasitas SDM kader BKB		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	37,2	80,83	1. Anggaran ket:Keterlambatan pengumpulan SPJ di lapangan dan adanya proses rasionalisasi anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam proses serapan anggaran		
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80	69,4	1. Anggaran ket:Keterlambatan pengumpulan SPJ di lapangan dan adanya proses rasionalisasi anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam proses serapan anggaran		
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan - Persentase Ketersediaan Prasarana Jalan - Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	32,41	84,36	1. Anggaran ket:Ketersediaan dana mengakibatkan utang		
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	100			
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100	100			
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100	100			
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	100			
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	100			
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	84	84			
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	84	0			
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100			
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100			
	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan - Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal - Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	52	61,96	1. Anggaran ket:Ketersediaan dana mengakibatkan utang		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	100	100			
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100	100			
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100	100			
				Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	100	100			
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE - Indeks Domain Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100	100	1. Anggaran ket:Alokasi Anggaran Tidak Sesuai Angkas		
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	840	840	1. Anggaran ket:Alokasi Anggaran Tidak Sesuai Angkas		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE - Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100	100	1. Waktu ket:Adanya Efisiensi Anggaran Sehingga kurangnya optimalisasi kegiatan		
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56	56			
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	23,35	98,5	1. Regulasi/Peraturan ket: Dengan adanya inpres 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDMP / KKMP sehingga sasaran koperasi konvensional terkendala dan target yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana. 2. Pihak Eksternal ket: Dengan adanya inpres 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDMP / KKMP sehingga sasaran koperasi konvensional terkendala dan target yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana.		
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	75,88	80			
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	14,81	173,73	1. Anggaran ket:Minimnya anggaran mengingat masih terdapat jumlah sasaran yang belum dapat dilakukan penilaian kesehatan		
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan	170	50			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100	100	1. Peralatan ket: kurangnya jaringan internet		
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	31			
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3,89	77,12			
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	55	150			
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru - Persentase Pertumbuhan wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1,99	45,73	1. Anggaran ket: Kebijakan Rasionalisasi Dan Efisiensi Anggaran yang berakibat pada Realisasi tidak memenuhi target		
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1121	1188			
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru - Persentase Pertumbuhan wirausaha	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1,14	74,56	1. Anggaran ket: Kebijakan Rasionalisasi Dan Efisiensi Anggaran yang berakibat pada Relisasi tidak memenuhi target		
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	320	286			
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	665	550,38	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)		
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	1			
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3	3			
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	340	58,82	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)		
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	340	200			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	12500	106,35	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)		
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	92	96,51			
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	30,75	0	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)		
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1020	443			
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	3	100	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	3			
13	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya - Persentase Pembinaan Kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	79,27	99,94	1. Regulasi/Peraturan ket: Keterbatasan anggaran, Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan serta Kurangnya lapangan kerja 2. Anggaran ket: Keterbatasan anggaran, Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan serta Kurangnya lapangan kerja		
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100	100	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Minim Koordinasi antara Steakholder dan Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana Kepemudaan		
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58,54	58,54	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Minim Koordinasi antara Steakholder dan Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana Kepemudaan		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga - Persentase masyarakat yang berolahraga Peningkatan prestasi olahraga - Jumlah Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	35,41	100	1. Pihak Eksternal ket: Rendahnya minat dan motivasi masyarakat, Kurangnya disiplin dan konsistensi latihan, Pola hidup tidak sehat, Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, Minimnya anggaran dan perhatian pemerintah, Kurangnya kompetisi atau event olahraga serta Kurangnya pelatih berkualitas 2. Anggaran ket: Rendahnya minat dan motivasi masyarakat, Kurangnya disiplin dan konsistensi latihan, Pola hidup tidak sehat, Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, Minimnya anggaran dan perhatian pemerintah, Kurangnya kompetisi atau event olahraga serta Kurangnya pelatih berkualitas		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21,05	23	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua perkumpulan olahraga dapat difasilitasi. Pengurus perkumpulan olahraga belum memahami tata kelola organisasi dan administrasi bantuan dan Banyak perkumpulan olahraga belum memiliki legalitas atau tidak aktif secara administrasi. 2. Pihak Eksternal ket: Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua perkumpulan olahraga dapat difasilitasi. Pengurus perkumpulan olahraga belum memahami tata kelola organisasi dan administrasi bantuan dan Banyak perkumpulan olahraga belum memiliki legalitas atau tidak aktif secara administrasi. 3. Anggaran ket: Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua perkumpulan olahraga dapat difasilitasi. Pengurus perkumpulan olahraga belum memahami tata kelola organisasi dan administrasi bantuan dan Banyak perkumpulan olahraga belum memiliki legalitas atau tidak aktif secara administrasi.		
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Pemangkasan atau keterlambatan pencairan dana menghambat pelaksanaan. Panitia, wasit, dan tenaga teknis yang terbatas. 2. Anggaran ket: Pemangkasan atau keterlambatan pencairan dana menghambat pelaksanaan. Panitia, wasit, dan tenaga teknis yang terbatas.		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	52,5	52,5	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Anggaran pembinaan yang belum optimal, terutama untuk cabang olahraga non-unggulan. Terbatasnya jumlah		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							pelatih bersertifikat di beberapa cabang olahraga. 2. Anggaran ket:Anggaran pembinaan yang belum optimal, terutama untuk cabang olahraga non-unggulan. Terbatasnya jumlah pelatih bersertifikat di beberapa cabang olahraga.		
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3,51	3,51	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Pelatih tidak bersertifikat atau jumlahnya terbatas mengurangi efektivitas pembinaan atlet.Anggaran terbatas menyebabkan jumlah atlet yang dapat dibina menjadi terbatas. 2. Anggaran ket:Pelatih tidak bersertifikat atau jumlahnya terbatas mengurangi efektivitas pembinaan atlet.Anggaran terbatas menyebabkan jumlah atlet yang dapat dibina menjadi terbatas.		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	0,01	0,01	1. Waktu ket:Kesibukan kerja dan aktivitas sehari-hari mengurangi kesempatan berolahraga		
	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota - Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100	100	1. Peralatan ket:Keterbatasan pembina berkualitas,Keterbatasan anggaran, Minimnya sarana dan prasarana,Rendahnya partisipasi peserta serta Kurangnya dukungan orang tua 2. Pihak Eksternal ket:Keterbatasan pembina berkualitas,Keterbatasan anggaran, Minimnya sarana dan prasarana,Rendahnya partisipasi peserta serta Kurangnya dukungan orang tua 3. Anggaran ket:Keterbatasan pembina berkualitas,Keterbatasan anggaran, Minimnya sarana dan prasarana,Rendahnya partisipasi peserta serta Kurangnya dukungan orang tua		
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	14,36	14,36	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tidak semua gugus depan memiliki pembina bersertifikat dan aktif, Faktor geografis, jarak, dan akses transportasi memengaruhi keaktifan organisasi. 2. Pihak Eksternal ket:Tidak semua gugus depan memiliki pembina bersertifikat dan aktif, Faktor geografis, jarak, dan akses transportasi memengaruhi keaktifan organisasi.		
14	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	75,86	100	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Karena belum memiliki instrumen		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			- Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	PENGAMANAN INFORMASI			untuk mencari celah keamanan sistem elektronik dan untuk memantau anomasi serangan siber 2. Peralatan ket: Karena belum memiliki instrumen untuk mencari celah keamanan sistem elektronik dan untuk memantau anomasi serangan siber		
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11	11	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Masih kurangnya SDM yang memiliki kapasitas sesuai kompetensi teknis 2. Anggaran ket: Masih kurangnya SDM yang memiliki kapasitas sesuai kompetensi teknis		
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1. Regulasi/Peraturan ket: Belanja Tenaga Ahli di alihkan ke bagian umum kepegawaian dan ketatalaksanaan		
15	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	30	100	1. Anggaran ket: Kurang tepatnya dalam Penyusunan Anggaran Kas		
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	29	1. Anggaran ket: Kurang Tepatnya Penyusunan Anggaran Kas		
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	13	1	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Kurang tepatnya dalam membuat indikator target kegiatan		
	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	75	86,67	1. Anggaran ket: Kurang tepatnya dalam menyusun anggaran kas kegiatan		
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	13	25	1. Anggaran ket: Kurang tepatnya dalam menyusun anggaran kas kegiatan		
			Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	75,98	99,84	1. Anggaran ket: Kurang tepatnya dalam menyusun anggaran kas kegiatan		
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16	2	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Kurang Tepatnya dalam penyusunan target kegiatan		
			Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100	60	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Kurang tepatnya dalam Penyusunan Target Indikator Kegiatan		
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	16	9	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Kurang tepatnya dalam Penyusunan		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							Indikator Target Kegiatan		
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	16	12	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket: Kurang tepatnya dalam Penyusunan Indikator Target Kegiatan		
	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	75,98	98,71	1. Anggaran ket: Kurang tepatnya dalam Penyusunan Anggaran Kas		
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2	2	1. Anggaran ket: Kurang Tepatnya Dalam Penyusunan Anggaran Kas		
16	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	42,34	25,27	1. Pihak Eksternal ket: Masih menunggu hasil perhitungan dari Perpustakaan RI pada tanggal 30 Januari 2026		
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,24	7,24			
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	5			
			Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	80	100			
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	5	5	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Peralatan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas 2. Peralatan ket: Peralatan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas 3. Pihak Eksternal ket: Peralatan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas 4. Anggaran ket: Peralatan dalam pelaksanaan		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas		
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	300	348	1. Peralatan ket:Keterbatasan Anggaran, peralatan serta saarana dan prasarana dalam pengelolaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 2. Anggaran ket:Keterbatasan Anggaran, peralatan serta saarana dan prasarana dalam pengelolaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		
17	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional - Tingkat ketersediaan arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100	100			
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	66101	66101			
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	24000	25000			
	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional - Tingkat ketersediaan arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	95	87,42	1. Pihak Eksternal ket:perhitungan msh menunggu Review Inspektorat		
				Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000	1000			
				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1000	1000			
				Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	500	500			
				Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	500	500			
	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional - Tingkat ketersediaan arsip	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	100	100			

Sumber data: E-Pantau 2025

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan - Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	104689	112,06			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2181	2181			
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	500	500			
					8	9			
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3	3			
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2000	2000			
				Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2000	2000			
	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan - Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	207881	104,6			
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	20	20			
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	5			
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1000	1000			
	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan - Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	20	100			
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					
	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Nilai Produksi Perikanan - Nilai Produksi Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	26350	166,98			
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	10	10			
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5	5			
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25	25			
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan - Jumlah Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	65,76	100			
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2	2			
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4			
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	10	6			
	Pariwisata	Dinas Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan - Okupansi	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	32,28	121,44			
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	11	4	1. Anggaran ket:masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tetapi belum direalisasikan pembayaran kepada penyedia		
	Pariwisata	Dinas Pariwisata	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif - Presentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	6	100			
				Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	1	0	1. Anggaran ket:Pagu Kegiatn terasionalisasi		
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	7	9			
	Pariwisata	Dinas Pariwisata	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif - Presentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	7	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	8	5			
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	20	30			
3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian - Produksi Padi - Produksi Jagung - Produksi Palawija (Porang) - Produksi Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	41802,48	29,58			
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian - Produktivitas Padi - Produktivitas Jagung	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Pengembangan Prasarana Pertanian	2	1	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggaran		
				Pembangunan Prasarana Pertanian	80	149	1. Waktu ket:Waktu dipengaruhi dengan keadaan alam yang tidak stabil		
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Peternakan - Produksi Daging - Produksi Telur	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	96	100			
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100	100	1. Pihak Eksternal ket:Masih membutuhkan data terkait daerah wabah penyakit sehingga melakukan kegiatan menjadi tepat sasaran di peternak dan ternak yang terdampak penyakit		
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	2	2			
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	2			
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3	2			
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian - Produksi Padi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	95	100	1. Anggaran ket:diperlukan tambahan bahan obat-obatan untuk pengendalian hama dan penyakit		
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2400	2542,05	1. Anggaran ket:perlu tambahan anggaran untuk penyediaan jenis obat pengendalian OPT		
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani - Nilai Tukar Petani (NTP)	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	35	37,14	1. Pihak Eksternal ket:relevansi penyampaian untung ruginya perizinan		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	14	1. Pihak Eksternal ket:relevansi narasi yang disampaikan ke objek kegiatan		
				Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	15	7	1. Pihak Eksternal ket:relevansi penyampaian narasi kepada objek perijinan		
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani - Nilai Tukar Petani (NTP)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4	70,75	1. Pihak Eksternal ket:relevansi narasi serta perspektif inovasi untuk di tiru petani		
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	95	85	1. Pihak Eksternal ket:relevansi narasi yang disampaikan ke pelaku utama dan usaha sebagai motivasi		
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan - Produksi Kelapa Sawit Rakyat - Produksi Kelapa Sawit PBS - Produksi Karet - Produksi Lada - Produksi Kelapa Dalam - Produksi Kopi - Produksi Kakao - Produksi Aren - Produksi Kelor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79	91,61	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih kurangnya pengetahuan terkait penyusunan data penilaian kelengkapan SAKIP sesuai permenpan RB 53 tahun 2014		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	9			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	14			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	1			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	1			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	2			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	6			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79	91,61			
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan - Produksi Kelapa Sawit Rakyat - Produksi Kelapa Sawit PBS - Produksi Karet	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	28795	112,13			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			- Produksi Lada - Produksi Kelapa Dalam - Produksi Kopi - Produksi Kakao - Produksi Aren - Produksi Kelor						
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	152	152			
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1			
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan - Produksi Kelapa Sawit Rakyat - Produksi Kelapa Sawit PBS - Produksi Karet - Produksi Lada - Produksi Kelapa Dalam - Produksi Kopi - Produksi Kakao - Produksi Aren - Produksi Kelor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3512	9,4	1. Anggaran ket:adanya rasionalisasi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan fisik pembangunan jalan produksi tidak bisa dilaksanakan		
				Pengembangan Prasarana Pertanian	1	0			
				Pembangunan Prasarana Pertanian	8	1	1. Anggaran ket:Adanya rasionalisasi anggaran sehingga Pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan dan pengawasan terhadap fisik kegiatan tidak dapat dilaksanakan yang bias dilaksanakan Cuma pembuatan dokumen perencanaannya		
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan - Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat - Produktivitas Kelapa Sawit PBS - Produktivitas Karet - Produktivitas Lada - Produktivitas Kelapa Dalam - Produktivitas Kopi - Produktivitas Kakao - Produktivitas Aren - Produktivitas Kelor	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	38,67	100	1. Anggaran ket:adanya rasionalisasi anggaran		
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	260	125			
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan - Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat - Produktivitas Kelapa Sawit PBS - Produktivitas Karet - Produktivitas Lada - Produktivitas Kelapa Dalam - Produktivitas Kopi	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	200	50	1. Anggaran ket:adanya rasionalisasi anggaran sehingga ada pengurangan target		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
			- Produktivitas Kakao - Produktivitas Aren - Produktivitas Kelor						
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	210	108			
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun - NTP Perkebunan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	19,62	87,56	1. Anggaran ket:Adanya rasionalisasi Anggaran		
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	24	24			
4	Kehutanan								
5	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100	100	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan teknis dan komitmen perijinan terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kemitraan 2. Peralatan ket:Birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan teknis dan komitmen perijinan terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kemitraan 3. Regulasi/Peraturan ket:Birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan teknis dan komitmen perijinan terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kemitraan		
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	76	2			
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	64	2			
				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	15	0			
				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri					
	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	75	18,67	1. Pihak Eksternal ket:Belum optimalnya pemanfaatan pasar-pasar yang sudah terbangun di setiap desa		
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16	23			
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana	3	2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					
	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3,57	85,43	1. Peralatan ket:Barang pokok seperti cabai dan bawang impor dari luar daerah turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar rakyat, penyebabnya bisa keterlambatan jalur distribusi, sirkulasi panen dan faktor cuaca Aksesibilitas yang masih minim di beberapa daerah yang mengakibatkan sulitnya jalur distribusi menyebabkan harga barang lebih tinggi seperti kondisi jalan atau transportasi yang belum memadai 2. Regulasi/Peraturan ket:Barang pokok seperti cabai dan bawang impor dari luar daerah turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar rakyat, penyebabnya bisa keterlambatan jalur distribusi, sirkulasi panen dan faktor cuaca Aksesibilitas yang masih minim di beberapa daerah yang mengakibatkan sulitnya jalur distribusi menyebabkan harga barang lebih tinggi seperti kondisi jalan atau transportasi yang belum memadai 3. Pihak Eksternal ket:Barang pokok seperti cabai dan bawang impor dari luar daerah turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar rakyat, penyebabnya bisa keterlambatan jalur distribusi, sirkulasi panen dan faktor cuaca Aksesibilitas yang masih minim di beberapa daerah yang mengakibatkan sulitnya jalur distribusi menyebabkan harga barang lebih tinggi seperti kondisi jalan atau transportasi yang belum memadai		
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	13	13	1. Pihak Eksternal ket:Melihat dari data tahun sebelumnya diproyeksikan untuk bulan Desember menjelang Natal dan Tahun Baru (NATARU) Komoditas Beras, Cabai, Bawang, Daging Ayam, Tomat serta barang pokok lainnya akan mengalami kenaikan harga jika permintaan pasar meningkat dan mempengaruhi ketersediaan barang pokok tersebut.		
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	66,67	66,67	1. Pihak Eksternal ket:Secara umum, pergerakan harga bulan ini masih terkendali, namun komoditas seperti Beras perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan kutai kartanegara sebagian besar bergantung pada beras yang didatangkan dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa hingga faktor yang menghambat distribusi dan tingkat panen pada daerah produsen sangat mempengaruhi ketersediaan dan harga		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							beras di wilayah kutai kartanegara, Beberapa jenis Cabai juga sangat bergantung dari pengiriman dari daerah Pulau Jawa sehingga harga dan ketersediaan tergantung pada faktor distribusi dan panen di daerah produsen, dan Bawang pula mengalami kondisi yang serupa, perlu adanya perhatian khusus pada komoditas berikut dikarenakan volatilitasnya yang tinggi menjelang akhir November 2025 dimana permintaan pasar pada jenis komoditas berikut semakin mengalami peningkatan.		
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86,82	86,82	1. Pihak Eksternal ket:Daerah yang terpencil atau sulit dijangkau dapat menghambat distribusi pupuk, menyebabkan keterlambatan atau kelangkaan.Praktik curang seperti distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya oknum yang menjual pupuk bersubsidi di pasar bebas bisa merugikan petani yang membutuhkan.		
	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Non Migas dan Batu Bara	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100	90	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Produk ekspor sering kali menghadapi masalah kualitas yang belum memenuhi standar internasional, sehingga sulit bersaing di pasar global,Biaya produksi yang tinggi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan logistik, dapat membuat harga produk menjadi kurang kompetitif,Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan, transportasi, dan penyimpanan dapat menghambat efisiensi distribusi produk ekspor. 2. Peralatan ket:Produk ekspor sering kali menghadapi masalah kualitas yang belum memenuhi standar internasional, sehingga sulit bersaing di pasar global,Biaya produksi yang tinggi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan logistik, dapat membuat harga produk menjadi kurang kompetitif,Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan, transportasi, dan penyimpanan dapat menghambat efisiensi distribusi produk ekspor. 3. Pihak Eksternal ket:Produk ekspor sering kali menghadapi masalah kualitas yang belum memenuhi standar internasional, sehingga sulit bersaing di pasar global,Biaya produksi yang tinggi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan logistik, dapat membuat harga produk menjadi kurang kompetitif,Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan, transportasi, dan penyimpanan dapat		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
							menghambat efisiensi distribusi produk ekspor.		
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	9	1. Anggaran ket:Kurang anggaran karena efisiensi sehingga pelaku usaha yang di fasilitasi tidak maksimal		
	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Metrologi	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	30	95,53	1. Peralatan ket:Adanya sebagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya - Ada terdapat kecamatan yang tidak memiliki pasar tradisional sehingga pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayanan tera / tera ulang 2. Pihak Eksternal ket:Adanya sebagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya - Ada terdapat kecamatan yang tidak memiliki pasar tradisional sehingga pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayanan tera / tera ulang		
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	19,41	19,41	1. Pihak Eksternal ket:Adanya sebagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya - Ada Terdapat kecamatan Yang tidak memiliki Pasar tradisional sehinggagan pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayabna tera/tera ulang		
6	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah - Persentase Sentra IKM Berbasis Hilirisasi Produk Pertanian Dalam Arti Luas Yang Aktif	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	100	1. Anggaran ket:Penganggaran di APBD-Perubahan disahkan pada dua bulan terakhir pelaksanaan TA 2025,sehingga tidak memungkinkan untuk penyelesaian pekerjaan lantai Efoxi dan penambahan IPAL Pabrik Rumpit Laut Kec. Muara Badak, serta adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan pembangunan Pabrik minyak makan merah di Kecamatan Kembang Janggut belum dapat dilaksanakan.		
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	1	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Basis Data Sektor Industri 2. Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil 3. Inovasi dan Teknologi 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:1. Basis Data Sektor Industri 2. Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil 3. Inovasi dan Teknologi		

Sumber data: Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-Pantau tahun 2025

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Selama Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang memiliki dampak dalam pencapaian sasaran strategis serta menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang meliputi sebagai berikut:

Tabel 98. Kebijakan Tahun 2025

No	No Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 tahun 2025 Tentang Perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan	Terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan kepada petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
2	Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah	1. Tersedia dasar hukum untuk memberikan fasilitas dan insentif untuk kemudahan investasi daerah. 2. Tersedia fasilitas dan insentif untuk kemudahan investasi daerah. 3. Terbuka potensi sumber pendapatan asli daerah. 4. Terciptanya iklim investasi yang menarik.
3	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan	1. memberikan perlindungan secara optimal kepada seluruh Pekerja Rentan di Daerah. 2. Jaminan bagi Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. 3. sebagai kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.
4	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup agar dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan sekitar
5	Kerja Sama Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kerja Sama	Sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi

No	No Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Daerah	Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah
6	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Kesejahteraan Masyarakat: Memastikan pembangunan desa benar-benar menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara maksimum. 2. Mengatasi keperluan terhadap pelaksanaan pembangunan yang mendapat legitimasi serta akuntabiliti sosial daripada masyarakat. 3. Memastikan pembangunan desa dilakukan secara inklusif dan akuntabel berdasarkan kebutuhan sebenar masyarakat desa. 4. Menyediakan aturan yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa.
7	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sumber pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
8	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Bentuk pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara dalam melaksanakan APBD Tahun 2024.
9	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD.
10	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	1. Pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 2. Pedoman dalam penyusunan RKPD. 3. Pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

No	No Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			RPJMD.
11	APBD Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Tersedianya anggaran untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
12	Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Di Desa	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa di Desa	Tersedianya pedoman dan panduan dalam penyusunan standarisasi satuan harga barang dan jasa di desa.
13	Kemitraan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Dengan Perusahaan	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 tahun 2025 tentang Kemitraan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan Perusahaan	Tersedianya pedoman dan panduan bagi BUMDesa yang akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan.
14	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	Tersedianya pedoman dan panduan untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
15	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi	Tersedianya pedoman dan panduan untuk pembebasan retribusi bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
16	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa Dan Staf Desa	Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kades, Perangkat Desa dan BPD dan Staf Desa	sebagai pedoman dan panduan dalam pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya untuk kepala dan perangkat desa, BPD serta staf desa.
17	Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Penyederhanaan birokrasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE
18	Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Sistem Komando	Tersedianya sistem komandi dalam penanggulangan bencana daerah.

No	No Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Tanggap Darurat Bencana Daerah	
19	Standar Kualifikasi Aparatur Kebencanaan	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Kebencanaan	Terdapat pedoman dan standar mengenai petugas/aparatur penanggulangan bencana daerah.
20	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kemitraan Bidan Dan Dukun Bayi	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kemitraan Bidan Dan Dukun Bayi	Standar pembinaan dan kemitraan dukun bayi oleh bidan dan pemerintah daerah.
21	Status Keadaan Darurat Bencana Daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Daerah	Pedoman dalam penetapan status, tingkat dan masa berlaku status keadaan darurat bencana.
22	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan Keuangan Untuk Penanggulangan Bencana	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan Keuangan Untuk Penanggulangan Bencana	Pedoman Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan keuangan untuk penanggulangan bencana daerah.
23	Pembentukan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Daerah	Pedoman dan standar dalam pembentukan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana daerah.
24	Penetapan Kawasan Rawan Bencana	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana	Pedoman dan acuan dalam penetapan kawasan rawan bencana dan sebagai antisipasi korban bencana.
25	Tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif dalam penanggulangan bencana daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Tahapan Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penanggulangan Bencana Daerah.	Pedoman dalam pemberian sanksi administratif dalam kondisi terjadi bencana dan penanggulangan bencana daerah.
26	Peraturan Pelaksana Perda No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat	Pedoman dalam pembentukan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

No	No Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Pelelangan Ikan.	
27	Perubahan Perbup 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Pedoman dalam penggunaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2025.
28	Tata Cara Pemberian Persetujuan Lokasi Untuk Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Pada Kawasan Gambut Dan Kawasan Mangrove Yang Berada Diluar Kawasan Hutan	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Lokasi Untuk Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Pada Kawasan Gambut Dan Kawasan Mangrove Yang Berada Di Luar Kawasan Hutan.	Mendukung pencapaian target nasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendorong pelaksanaan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
29	Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di daerah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan aktif sehingga terjadi pengurangan sampah
30	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Pedoman dalam penggunaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2025.
31	Teknis Pemberian THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2025	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025	Pedoman, tata cara dan besaran dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
32	Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Daerah	Sebagai acuan dalam mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
33	Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2025 tentang Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana Daerah	Standar Teknis Penanggulangan Bencana Daerah
34	Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun	Petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pendataan,

No	No Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Daerah	2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	pemungutan, pembayaran, penyetoran dan penagihan pajak yang telah diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada pemerintah daerah
35	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah	Memberi kepastian hukum dalam penerapan inovasi daerah, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di daerah dan membentuk kerja sama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi
36	Perubahan Ketiga Atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pedoman dalam penggunaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2025
37	Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan koperasi dan menumbuhkan kemakmuran masyarakat
38	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab Dan Wewenang Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	Pedoman dalam pembentukan dan tata kelola rumah sakit umum daerah
39	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Desa	Pedoman dan acuan dalam pembuatan dan tata kelola tata naskah/surat menyurat pemerintahan desa
40	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Memberikan landasan hukum bagi dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sinergis dengan RPJMD dan APBD. Tujuannya adalah menjamin konsistensi perencanaan-penganggaran, mengoptimalkan potensi wilayah, serta meningkatkan

No	No Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			efektivitas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
41	Pembubaran Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pembubaran Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah	Memberikan dasar hukum dalam pembubaran UPTD
42	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Pedoman dalam pembentukan dan tata kelola Puskesmas
43	Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi	Meningkatkan indeks kesehatan di daerah
44	Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pedoman dalam pembentukan dan tata kelola koordinator wilayah pendidikan
45	Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah serta menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
46	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten.	Petunjuk teknis dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah kabupaten
47	Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2025 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis	Kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan pemerintah daerah.

No	No Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah	
48	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Pedoman kebijakan yang konsisten, menjamin sinergitas perencanaan-penganggaran, dan menjadi pedoman dalam mencapai target kinerja pelayanan perangkat daerah dalam satu tahun
49	Perjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penggunaan keuangan negara
50	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Pedoman kebijakan yang konsisten, menjamin sinergitas perencanaan-penganggaran, dan menjadi pedoman dalam mencapai target kinerja pelayanan perangkat daerah dalam satu tahun
51	Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.	Pedoman dalam penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat di daerah, membentuk sistem pusat panggilan darurat yang terpadu, menyatukan nomor panggilan darurat untuk mempermudah masyarakat dalam penanggulangan kedaruratan, mempercepat penanggulangan kedaruratan dan mempermudah koordinasi antar perangkat daerah dan/atau instansi terkait
52	Pengembangan Minat Baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pengembangan Minat Baca Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Pedoman dalam pelaksanaan pengembangan minat baca masyarakat dan pembudayaan kegemaran membaca, membangun minat dan kebiasaan membaca masyarakat, mendorong terciptanya pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

No	No Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
53	Perubahan Atas Perbup No. 49 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025	Pedoman dalam ambang batas harga satuan barang dan jasa dalam penggunaan keuangan daerah
54	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pedoman dalam penggunaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2025
55	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tenggarong	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tenggarong Tahun 2025-2044	Pedoman dan acuan operasional rinci dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang terstruktur, aman, dan berkelanjutan. RDTR berfungsi mengatur zonasi, struktur ruang, dan jaringan prasarana untuk menjamin keseimbangan pembangunan ekonomi dan sosial
56	Pengelolaan Arsip Statis	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Arsip Statis	Pedoman dalam Pengelolaan Arsip Statis di lingkungan Pemerintah Daerah
57	Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2026	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2026	Pedoman dalam ambang batas harga satuan barang dan jasa dalam penggunaan keuangan daerah.
58	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
59	Pengelolaan Arsip Dinamis	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis	Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah
60	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pedoman dalam pengelolaan resiko dan sebagai panduan dalam mengelola resiko.



No	No Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
61	Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah Dan Perpustakaan Khusus	Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 50 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Khusus	Memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat, mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karekteristik budaya daerah serta melaksanakan pembudayaan gemar membaca di daerah dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat
62	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pedoman dalam penggunaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2026.
63	Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2026	Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 52 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2026	Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa melalui penguatan ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan kapasitas aparatur dan masyarakat secara terpadu
64	Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026	Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026	meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa secara adil dan transparan. Mengoptimalkan kapasitas fiskal desa serta membagi pendapatan daerah berdasar asas keadilan

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara, diperoleh rekomendasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-4/DPRD/04/2024 tertanggal 30 April 2024 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan dan penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta menyusun peraturan daerah dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya. Adapun tindaklanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Dengan telah di angkatnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga pendidik, agar Pemerintah Daerah bisa melakukan tata kelola manajemen pendidikan dengan mempertimbangkan ragam wilayah kerja, jumlah lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dan kependidikannya yang dihubungkan dengan ragam "numerasinya" secara proporsional.	1.Melakukan pemetaan Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. 2.Melakukan Penataan Distribusi PPPK secara Proporsional	Telah ditetapkan Pejabat Definitif (Direktur RSUD. AM. Parkesit) TMT 6 maret 2024 SK pelantikan.
2	Terhadap pembangunan "RSUD" di Kecamatan Muara Badak, direkomendasikan agar dalam Tahun 2025 ini keberadaan "RSUD" di Kecamatan Muara Badak sudah dapat difungsikan, sehingga bisa memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat serta mengurangi beban sosial ekonomi masyarakat jika harus dibandingkan melakukan cek layanan kesehatan/ perawatan kesehatan ke Bontang atau bahkan ke Samarinda.	Mengupayakan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM untuk RSUD di kecamatan Muara Badak.	Tujuan : Terpenuhihinya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Masalah : 1. Terkait Kebutuhan SDM, dinas kesehatan telah menyampaikantelaahan staf perihal permohonan fasilitasi dan kebijakan mengenai pemenuhan tenaga penyelenggaraan operasional pelayanan RS Aji Muhammad Idris Kec. Muara Badak

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			kepada Sekretaris daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas kesehatan telah melakukan pendataan terkait SDM PNS yang bersedia mengajukan mutasi ke RSUD Muara Badak, dan ASN jakur PPPK umum. Dinas kesehatan sudah membuat draf Perjanjian Kerja Sama dengan pihak Fakultas Kedokteran terkait pemenuhan SDN Kesehatan. 2. Kebutuhan sarana, alat kesehatan dan perlengkapan lainnya yang perlu disiapkan telah diusulkan dalam usulan kegiatan/anggaran perubahan. 3. Telah dilakukan pendampingan kegiatan oleh Kejaksaan terkait kegiatan pembangunan pagar, jalan dan landscape RS Aji Muhammad Idris Muara Badak.
3	Untuk RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti kiranya dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan koordinasinya terhadap kegiatan yang dilaksanakan profesional. Pertimbangan tingkat serapan menjadi bagian pemikiran dan perhatian.	Dokumen Pendukung tindak lanjut yang dilaksanakan : Tahap Perencanaan : 1. Masterplan 2. FS (Studi Kelayakan) 3. Renstra 2021-2026 Tahap Penganggaran : 1. Renja 2025 2. RKA 2025 Tahap Pelaksanaan : 1. DPA pengembangan RS 2025 2. Surat Permohonan Pendampingan Inspektorat 3. Surat Balasan Inspektorat 4. Surat Permohonan Pendampingan Kejari Kutai Kartanegara 5. Undangan Entri meeting Kejari 6. Surat Persetujuan Kejari 7. Surat Permohonan Pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim 8. Undangan Ekspose BPKP 9. Notulen Ekspose Pendampingan BPKP 10. Surat Permohonan Pendampingan Dinas PU Kutai Kartanegara 11. Surat Balasan Dinas PU.	Meningkatkan fungsi pengawasan dan koordinasi dengan melibatkan tenaga professional

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
4	Pembangunan Pasar Tangga Arung telah 100% (seratus persen) selesai, maka kini perlu tata kelola dalam dimensi manajemen yang lebih luas dan memperhatikan Prinsip Good Government, antara lain: 1. Aspek Manajemen : Manajemen penempatan pedagang dengan data akurat dan transparan. 2. Aspek Pengelolaan sampah dan limbah untuk kebersihan pasar dan lingkungan sekitar. 3. Aspek pengelolaan Drainase yang baik untuk mendukung operasional pasar. 4. Aspek Pengelolaan Jasa Perkir dan kendaraan bongkar muat barang. 5. Aspek Manajemen terpadu oleh pihak-pihak terkait (Koordinasi lintas OPD, seperti Disperindag, Dinas Damkar dan Penyelamatan, Dinas PU, Satpol PP, Perumda Tirta Mahakam, atau Perumda lainnya. 6. Jika diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dapat dirumuskan agar pengelolaan bisa diserahkan ke Perumda, sebagai bagian dari pemanfaatan ruang publik.		

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
5	Pembangunan Pasar Tangga Arung telah 100% (seratus persen) selesai, maka kini perlu tata kelola dalam dimensi manajemen yang lebih luas dan memperhatikan Prinsip Good Government, antara lain: 1.Aspek Manajemen : Manajemen penempatan pedagang dengan data akurat dan transparan.	1. Telah berkoordinasi dengan pihak disperindag berkaitan dengan penempatan lay out pedagang pada Lt. 1 dan Lt. 2 bangunan sesuai dengan DED awal perencanaan. 2. Selanjutnya pihak disperindag mengkoordinasikan dengan pedagang, disperindag sebagai pembina para pedagang	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola sarana Distribusi Perdagangan
	2.Aspek Pengelolaan sampah dan limbah untuk kebersihan pasar dan lingkungan sekitar.	Telah berkoordinasi dengan pihak disperindag berkaitan dengan produksi sampah pada setiap hari agar dilakukan pengangkutan sampah terjadwal	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
	3.Aspek pengelolaan Drainase yang baik untuk mendukung operasional pasar	Berkoordinasi dengan pihak DPU bidang SDA berkaitan dengan kapasitas pembuangan dan saluran pembuangan diluar area pasar.	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan
	4. Aspek Pengelolaan Jasa Parkir dan kendaraan bongkar muat barang.	1. Telah berkoordinasi dengan pihak Dishub mengenai andal lalin tercantum dalam dokumen UKL UPL/Amdal Pembangunan dan Penataan Kawasan Pasar Tangga Arung dengan Nomor Kontrak : P.749/DPU-UTL/CK/640/9/2022	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
	5. Aspek Manajemen terpadu oleh pihak-pihak terkait (Koordinasi lintas OPD, seperti Disperindag, Dinas Damkar dan Penyelamatan, Dinas PU, Satpol PP, Perumda Tirta Mahakam, atau Perumda lainnya.	1.Pada saat pembangunan telah berkoordinasi dengan pihak disperindag, satpol pp, Dionas Perhubungan pada saat Pembangunan 2.Perlu adanya koordinasi lebih lanjut pada saat operasional pasar diprakarsai oleh disperindag	1.Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi program Pembangunan 2.Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	6. Jika diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dapat dirumuskan agar pengelolaan bisa diserahkan ke Perumda, sebagai bagian dari pemanfaatan ruang publik.		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
6	Pembangunan Pasar Tangga Arung telah 100% (seratus persen) selesai, maka kini perlu tata kelola dalam dimensi manajemen yang lebih luas dan memperhatikan Prinsip Good Government, antara lain:		
	1. Aspek Manajemen : Manajemen penempatan pedagang dengan data akurat dan transparan.	1. Telah berkoordinasi dengan pihak disperindag berkaitan dengan penempatan lay out pedagang pada Lt. 1 dan Lt. 2 bangunan sesuai dengan DED awal perencanaan 2. Selanjutnya pihak disperindag mengkoordinasikan dengan pedagang, disperindag sebagai pembina para pedagang	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola sarana Distribusi Perdagangan
	2. Aspek Pengelolaan sampah dan limbah untuk kebersihan pasar dan lingkungan sekitar.	1. Telah berkoordinasi dengan pihak disperindag berkaitan dengan produksi sampah pada setiap hari agar dilakukan pengangkutan sampah terjadwal	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
	3. Aspek pengelolaan Drainase yang baik untuk mendukung operasional pasar	Berkoordinasi dengan pihak DPU bidang SDA berkaitan dengan kapasitas pembuangan dan saluran pembuangan diluar area pasar.	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan
	4. Aspek Pengelolaan Jasa Parkir dan kendaraan bongkar muat barang.	1. Telah berkoordinasi dengan pihak Dishub mengenai andal lalin tercantum dalam dokumen UKL UPL/Amdal Pembangunan dan Penataan Kawasan Pasar Tangga Arung dengan Nomor Kontrak : P.749/DPU-	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		UTL/CK/640/9/2022	Terintegrasi secara Elektronik
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
	5. Aspek Manajemen terpadu oleh pihak-pihak terkait (Koordinasi lintas OPD, seperti Disperindag, Dinas Damkar dan Penyelamatan, Dinas PU, Satpol PP, Perumda Tirta Mahakam, atau Perumda lainnya.	1. Pada saat pembangunan telah berkoordinasi dengan pihak disperindag, satpol pp, Dionas Perhubungan pada saat pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi program Pembangunan
		2. Perlu adanya koordinasi lebih lanjut pada saat operasional pasar diprakarsai oleh disperindag	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
	6. Jika diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dapat dirumuskan agar pengelolaan bisa diserahkan ke Perumda, sebagai bagian dari pemanfaatan ruang publik.		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
7	Pembangunan Pasar Tangga Arung telah 100% (seratus persen) selesai, maka kini perlu tata kelola dalam dimensi manajemen yang lebih luas dan memperhatikan Prinsip Good Government, antara lain:	A.1. Menyusun manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) 2. Menyiapkan Rencana tindak darurat kebakaran (RTBK)	A. Tersedianya Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dan Rencana tindak darurat kebakaran
	1.Aspek Manajemen : Manajemen penempatan pedagang dengan data akurat dan transparan. 2.Aspek Pengelolaan sampah dan limbah untuk kebersihan pasar dan lingkungan sekitar. 3.Aspek pengelolaan Drainase yang baik untuk mendukung operasional pasar. 4.Aspek Pengelolaan Jasa Parkir dan kendaraan bongkar muat barang.	B.1. Menyediakan Sarana Penyelamatan, yang terdiri dari jalan keluar, konstruksi jalan keluar. 2.Menyediakan komponen proteksi Aktif terdiri dari deteksi dan alarm, siamese connection, Pemadam Api Ringan, Sprinkler, Sistem Pemadam Luapan, Pengendali Asap, Deteksi Asap, Pembuangan Asap, Lift Kebakaran, Cahaya darurat, Listrik Darurat dan Ruang Pengendalian Operasi. 3.Menyiapkan Komponen Proteksi Pasif berupa Kompartementnisasi, Ruang dan Perlindungan Buka 4.Menyediakan Kelengkapan Tapak, yang terdiri atas sumber air, jalan lingkungan, jarak antar	B.1. Tersedianya Sarana prasarana proteksi kebakaran, pada bangunan Pasar Tangga Arung Sehingga mengurangi resiko kerugian jika terjadi kebakaran

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		bangunan dan Hydrant Halaman.	
	5. Aspek Manajemen terpadu oleh pihak-pihak terkait (Koordinasi lintas OPD, seperti Disperindag, Dinas Damkar dan Penyelamatan, Dinas PU, Satpol PP, Perumda Tirta Mahakam, atau Perumda lainnya.		
	6. Jika diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dapat dirumuskan agar pengelolaan bisa diserahkan ke Perumda, sebagai bagian dari pemanfaatan ruang publik.		

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

VI. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperlancar pelaksanaan tugas serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat sehingga Pemerintah Daerah dapat turut serta dalam membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di wilayah.

Pada Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mendapatkan pelaksanaan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



BAB V

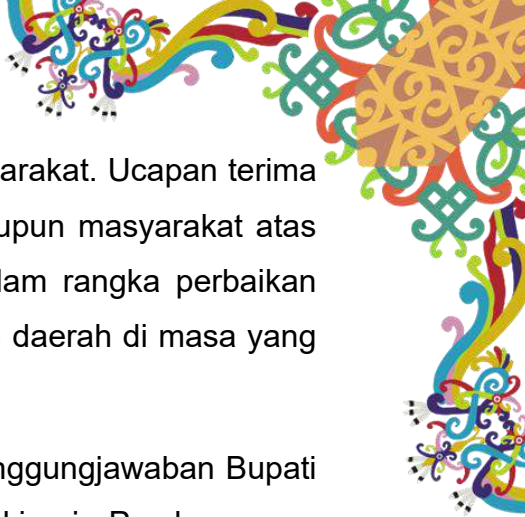
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan langkah tahun terakhir dalam pelaksanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026. Tahun 2025 tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “Pemerataan Pembangunan Daerah dan Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan”.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan dan Pembangunan daerah berjalan cukup optimal. Momen Pergantian Kepala Daerah tidak mempengaruhi pelaksanaan Pembangunan secara signifikan sebagaimana komitmen kepala daerah yang baru terhadap rencana pembangunan yang sudah ada. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dukungan, partisipasi, dan kolaborasi, serta sinergi dan wujud efisiensi efektivitas Pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Namun, tentunya masih terdapat kelemahan dan permasalahan yang muncul disebabkan oleh berbagai dinamika dari sisi internal maupun eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan dan permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan pada tahun mendatang.

Capaian kinerja pembangunan ini tentunya tidak lepas dari dukungan DPRD, Jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah, seluruh stakeholder serta masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karenanya sebagai bagian akhir penyampaian LKPJ ini, diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran Eksekutif Pemerintah Daerah, seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selama ini telah menjalin sinergitas hubungan yang harmonis serta memberikan motivasi, kritik yang konstruktif dalam pelaksanaan roda



pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan pada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada segenap stakeholder maupun masyarakat atas partisipasi, dukungan, masukan, dan saran masukan dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di masa yang akan datang

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025, dengan harapan semoga kinerja Pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik demi mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia.



KUKAR
SAMAN
TERBAIK



**Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara**